



KAJIAN EKONOMI REGIONAL

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Triwulan IV-2013





KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Triwulan IV-2013

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Penerbit :

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Unit Asesmen Ekonomi dan Keuangan

Jl. Pejanggik No.2 Mataram

Nusa Tenggara Barat

Telp. : 0370-623600

Fax : 0370-631793

E-mail : imamdwi_k@bi.go.id

petrus_ee@bi.go.id

greis@bi.go.id

indria_s@bi.go.id

Visi Bank Indonesia

Menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya (kredibel) secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

Misi Bank Indonesia

Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.

Nilai-nilai Strategis Organisasi Bank Indonesia

Nilai-nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia, manajemen dan pegawai untuk bertindak atau berperilaku yaitu kompetensi, integritas, transparansi, akuntabilitas dan kebersamaan.

Visi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat

Menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang dapat dipercaya di daerah melalui peningkatan peran dalam menjalankan tugas-tugas Bank Indonesia yang diberikan.

Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat

Mendukung pencapaian kebijakan Bank Indonesia di bidang moneter, perbankan dan sistem pembayaran secara efisien dan optimal serta memberikan saran kepada Pemerintah Daerah dan lembaga terkait lainnya di daerah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi daerah.

KATA PENGANTAR

Pertama kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Kajian Ekonomi Regional Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan IV-2013 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Kajian triwulanan ini disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* eksternal maupun internal yang terkait dengan perkembangan perekonomian, keuangan daerah dan sistem keuangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat baik pada triwulan dimaksud maupun prospek ke depan.

Pertumbuhan ekonomi NTB secara kumulatif tahun 2013 mampu tumbuh sebesar 5,69% (yoy) dibanding tahun 2012, sedikit lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi secara nasional yang tumbuh sebesar 5,78% (yoy). Secara triwulanan, PDRB Provinsi NTB relatif mengalami penurunan dibanding triwulan sebelumnya seiring dengan berakhirnya hari raya Idul Fitri dan berakhirnya panen raya beberapa komoditas utama. Adapun laju inflasi di tahun 2013 mengalami kenaikan tertinggi dalam 3 tahun terakhir terutama di akibatkan oleh kenaikan harga BBM di triwulan II 2013.

Pada tahun 2014, prospek pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan melambat bahkan mengalami penurunan dibanding tahun 2013. Pada triwulan I 2014, pertumbuhan ekonomi juga diperkirakan mengalami penurunan terutama karena masa panen komoditas pertanian yang jatuh pada triwulan berikutnya. Adanya anomali inflasi juga mendorong Bank Indonesia melakukan penelitian yang kami sampaikan dalam suplemen kajian tentang struktur pasar komoditas penyumbang inflasi terbesar di NTB.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan atas kerjasama kepada semua pihak terutama jajaran Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota, dinas/instansi terkait, perbankan, akademisi dan pihak lainnya yang telah membantu penyediaan data dan diskusi yang telah dilakukan, sehingga kajian ini dapat dipublikasikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Mataram, 17 Februari 2014
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Perwakilan,

Bambang Himawan
Deputi Direktur

INDIKATOR EKONOMI DAN MONETER
Provinsi Nusa Tenggara Barat

INDIKATOR	2012				2013			
	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4
EKONOMI MAKRO REGIONAL								
Indeks Harga Konsumen	144.33	145.62	146.87	146.83	151.81	152.52	156.22	157.13
-Kota Mataram	144.77	145.79	147.01	147.00	151.89	152.62	156.44	157.17
-Kota Bima	142.67	145.02	146.32	146.19	151.54	177.48	155.38	156.99
Laju Inflasi Tahunan (yoy %)	8.84	8.52	6.36	3.99	3.39	5.48	6.37	7.02
-Kota Mataram	9.14	8.81	6.13	4.10	4.92	5.44	6.41	6.92
-Kota Bima	7.71	7.45	7.22	3.61	3.66	5.62	6.19	7.39
PDRB-harga konstan (miliar Rp)	4,533.81	4,718.72	5,036.15	4,932.76	4,746.97	4,885.26	5,359.14	5,270.07
-Pertanian	1,112.31	1,172.49	1,402.47	1,259.75	1,133.92	1,197.17	1,492.73	1,282.06
-Pertambangan dan Pengalihan	739.25	744.37	738.68	735.42	739.85	678.10	778.44	874.10
-Industri Pengolahan	245.08	253.00	265.66	248.36	253.81	262.79	276.05	264.96
-Listrik, gas dan air bersih	20.05	20.68	21.14	21.50	21.53	22.67	23.28	23.99
-Bangunan	387.70	410.69	434.82	466.43	431.43	449.38	454.99	473.76
-Perdagangan, Hotel dan Restoran	808.31	853.27	887.71	895.58	884.64	938.61	951.70	948.74
-Pengangkutan dan Komunikasi	407.60	426.46	437.97	458.94	428.31	456.54	470.74	489.51
-Keuangan, Persewaan dan Jasa	288.16	302.92	314.31	311.44	316.34	331.24	338.47	335.50
-Jasa	525.36	534.84	533.40	535.34	537.12	548.76	572.74	577.46
Pertumbuhan PDRB (yoy %)	(2.36)	2.78	(3.75)	(0.81)	5.56	4.02	5.92	6.55
Pertumbuhan PDRB tanpa Sektor Pertambangan (yoy %)	4.96	6.96	5.74	5.22	6.03	5.66	6.03	4.44
Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta)	158.82	136.69	156.22	168.67	38.53	105	110	148
Volume Ekspor Nonmigas (ribu ton)	78.09	70.83	92.60	96.41	22.07	60.06	18.08	97.70
Nilai Impor Nonmigas (USD Juta)	72.24	59.91	54.64	77.90	53.67	43.24	49.89	43.11
Volume Impor Nonmigas (ribu ton)	25.60	18.74	23.11	32.65	23.22	18.71	22.83	15.02
PERBANKAN								
Total Aset (Rp triliun)	17.57	18.64	19.42	20.77	20.92	22.02	23.03	24.15
Dana Pihak Ketiga (Rp triliun)	11.54	12.42	12.90	13.31	13.34	13.76	14.33	14.68
Kredit (Rp triliun)	12.96	14.17	14.82	15.67	16.38	17.44	18.17	19.08
Loan to Deposit Ratio	112.29	114.06	114.87	117.72	122.75	126.72	126.78	129.9432
NPL gross (%)	2.30	2.13	2.12	1.86	2.02	1.88	1.91	1.74
Bank Umum :								
Total Aset (Rp triliun)	16.78	17.77	18.54	19.79	19.91	20.95	21.91	22.74
Dana Pihak Ketiga (Rp triliun)	10.72	11.59	12.05	12.35	12.44	13.04	13.93	14.14
-Giro (%)	21.66	19.52	19.92	12.68	17.75	15.32	16.73	10.70
-Tabungan (%)	53.72	55.60	54.86	63.32	55.23	56.76	56.84	64.23
-Deposito (%)	24.63	24.88	25.22	24.00	27.02	27.93	26.43	25.07
Kredit (Rp triliun) - berdasarkan bank pelapor	12.68	13.77	14.46	15.32	16.00	17.03	17.73	18.38
-Modal Kerja	3.73	4.26	4.33	4.79	5.05	5.28	5.49	5.76
-Investasi	1.38	1.55	1.75	1.86	1.95	2.27	2.38	2.41
-Konsumsi	7.57	7.96	8.38	8.67	9.00	9.49	9.86	10.21
Kredit Mikro (< atau = Rp50 juta) (Rp triliun)	2.84	2.73	2.95	2.91	2.90	2.86	2.78	2.78
-Kredit Modal Kerja	0.70	0.73	0.82	0.89	0.94	0.96	0.96	1.03
-Kredit Investasi	0.12	0.10	0.11	0.11	0.11	0.14	0.14	0.14
-Kredit Konsumsi	2.02	1.89	2.02	1.91	1.85	1.76	1.68	1.61
Kredit Kecil (Rp 50 < x ≤ Rp500 juta) (Rp triliun)	7.54	8.33	8.59	9.11	9.58	10.28	10.84	11.24
-Kredit Modal Kerja	1.51	1.75	1.67	1.80	1.86	1.91	1.96	2.01
-Kredit Investasi	0.76	0.88	1.00	1.06	1.13	1.29	1.33	1.31
-Kredit Konsumsi	5.28	5.69	5.93	6.25	6.59	7.09	7.54	7.92
Kredit Menengah (Rp 500 juta < x < Rp5 miliar) (Rp triliun)	1.78	2.06	2.18	2.47	2.63	2.93	3.08	3.26
-Kredit Modal Kerja	1.26	1.42	1.44	1.64	1.73	1.87	1.97	2.09
-Kredit Investasi	0.24	0.27	0.31	0.34	0.35	0.44	0.48	0.51
-Kredit Konsumsi	0.28	0.37	0.43	0.49	0.55	0.62	0.63	0.66
Total Kredit MKM (Rp triliun)	12.16	13.12	13.72	14.50	15.11	16.07	16.69	17.29
Loan to Deposit Ratio	118.28	118.88	119.97	124.06	128.62	130.66	127.30	129.94
NPL (%)	1.79	1.70	1.68	1.42	1.55	1.55	1.58	1.40

INDIKATOR	2012				2013			
	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4
Bank Perkreditan Rakyat :								
Total Aset (Rp triliun)	1.11	1.12	1.17	1.26	1.29	1.32	1.37	1.41
Dana Pihak Ketiga (Rp triliun)	0.46	0.46	0.48	0.52	0.54	0.51	0.54	0.54
-Tabungan (%)	53.57	54.97	55.35	55.75	54.18	53.84	55.74	56.50
-Giro (%)								
-Deposito (%)	46.43	45.03	44.65	44.25	45.82	46.16	44.26	43.50
Kredit (Rp triliun) - berdasarkan bank pelapor	0.58	0.62	0.64	0.63	0.66	0.68	0.69	0.70
-Modal Kerja	0.34	0.37	0.39	0.38	0.40	0.41	0.42	0.42
-Investasi	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05
-Konsumsi	0.21	0.21	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.24
Loan to Deposit Ratio	124.23	134.78	133.65	121.22	123.19	132.02	128.39	129.92
NPL (%)	12.98	11.68	11.89	12.45	13.13	10.17	10.41	10.94
SISTEM PEMBAYARAN								
Nominal Transaksi RTGS (Rp miliar)	2,402.87	2,376.70	2,814.03	2,528.13	2,349.65	2,523.18	3,282.81	3035.58
Volume Transaksi RTGS (lembar)	2,694	2,723	2,763	2,945	2,560	2,774	2,762	2745
Rata-rata Harian Nominal Transaksi RTGS (Rp miliar)	37.54	38.33	46.13	42.14	39.16	39.42	54.71	48.96
Rata-rata Harian Volume Transaksi RTGS (lembar)	42.09	43.92	45.30	49.08	42.67	43.34	46.03	44.27
Nominal Kliring Kredit (Rp miliar)	1,331.04	1,360.23	1,387.29	1,641.99	1,564.46	1,536.15	1,630.40	1636.38
Volume Kliring Kredit (lembar)	32,247	32,410	31,828	36,479	36,443	37,106	37,271	39,005
Rata-rata Harian Nominal Kliring Kredit (Rp miliar)	20.80	21.94	22.74	27.37	26.07	24.00	27.17	26.39
Rata-rata Harian Volume Kliring Kredit (lembar)	503.86	522.74	521.77	607.98	607.38	579.78	621.18	629.11

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Indikator Ekonomi dan Moneter.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Grafik.....	vii
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Gambar.....	xv
Ringkasan Eksekutif.....	xvi
Bab 1 Makro Ekonomi Regional Nusa Tenggara Barat.....	1
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.2. Sisi Permintaan.....	3
1.2.1. Konsumsi.....	5
1.2.2. Investasi.....	7
1.2.3. Ekspor Impor.....	9
1.3. Sisi Penawaran.....	12
1.3.1. Pertanian.....	14
1.3.2. Pertambangan.....	16
1.3.3. Perdagangan, Hotel dan Restoran.....	17
1.3.4. Bangunan.....	19
1.3.5. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.....	20
1.3.6. Transportasi dan Komunikasi.....	22
1.3.7. Industri Pengolahan.....	23
1.3.8. Listrik, Gas dan Air Bersih.....	25
Boks 1 Pengaruh Penerapan UU Minerba Terhadap Industri Tembaga di Provinsi NTB.....	27
Bab 2 Perkembangan Inflasi Nusa Tenggara Barat.....	30
2.1. Kondisi Umum.....	30
2.2. Inflasi Berdasarkan Komoditas.....	33
2.2.1. Bahan Makanan.....	34
2.2.2. Makanan Jadi, Minuman dan Tembakau.....	36
2.2.3. Perumahan, Listrik, Air dan Gas.....	37
2.2.4. Sandang.....	39
2.2.5. Kesehatan.....	40
2.2.6. Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga.....	41

2.2.7. Transport, Komunikasi dan Jasa	42
2.3. Inflasi Periodikal.....	44
2.3.1. Inflasi Bulanan	44
2.3.2. Inflasi Triwulanan	47
2.3.3. Inflasi Tahunan	47
2.4. Inflasi Berdasarkan Kota	49
2.4.1. Kota Mataram	50
2.4.2. Kota Bima	51
2.5. Disagregasi Inflasi	53
2.5.1. Provinsi Nusa Tenggara Barat	53
2.5.2. Kota Mataram	54
2.5.3. Kota Bima	54
Boks 2 pemetaan Struktur Pasar Komoditas Penyumbang Inflasi Terbesar di Provinsi NTB	56
1. Daging Ayam	59
2. Telur Ayam	59
3. Bawang Merah	60
4. Tomat Sayur.....	61
5. Cabe Rawit	62
Bab 3 Perkembangan Perbankan dan Sistem Pembayaran	64
3.1. Perkembangan Kinerja Bank Umum	64
3.1.1. Aset	66
3.1.2. Dana Pihak Ketiga	67
3.1.3. Kredit	70
3.1.4. Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	73
3.1.5. Kredit Usaha Rakyat (KUR)	75
3.2. Stabilitas Sistem Perbankan	76
3.2.1. Risiko Kredit	76
3.3. Perbankan Syariah	78
3.4. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	81
3.5. Perkembangan Sistem Pembayaran	82
3.5.1. Transaksi Keuangan Secara Tunai.....	82
3.5.2. Perkembangan Penukaran Uang Pecahan Kecil	83
3.5.3. Transaksi Pembayaran Secara Non Tunai	84
3.5.3.1. Transaksi Kliring	84
3.5.3.2. Transaksi Real Time Gross Settlement (RTGS)	85

Bab 4 Perkembangan Keuangan Daerah.....	86
4.1. Perkembangan Keuangan Daerah	86
4.2. Realisasi Pendapatan di Provinsi NTB.....	88
4.3. Realisasi Belanja di Provinsi NTB	90
4.4. APBD Provinsi NTB	93
4.5. APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi NTB	96
4.6. Keuangan Pemerintah Pusat di Provinsi NTB	101
Bab 5 Kesejahteraan Masyarakat	105
5.1. Umum	105
5.2. Ketenagakerjaan	105
5.2.1. Data Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Barat	105
5.3. Kesejahteraan Masyarakat	108
Bab 6 Prospek Ekonomi Dan Harga	112
6.1. Prospek Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat	112
6.2. Perkiraan Inflasi Nusa Tenggara Barat	117

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 PDRB (ADHB) Tahunan dan Pertumbuhan PDRB Provinsi NTB dan Nasional Tahunan	1
Grafik 1.2 Perbandingan Pertumbuhan PDRB Tahunan Provinsi NTB dan Nasional	1
Grafik 1.3 Peta Realisasi PDRB Seluruh Indonesia di Triwulan IV 2013.....	2
Grafik 1.4 PDRB (ADHB) dan growth (ADHK) yoy.....	3
Grafik 1.5 PDRB (ADHB) dan growth (ADHK) qtq.....	3
Grafik 1.6 Rincian Pertumbuhan PDRB dari Sisi Permintaan.....	4
Grafik 1.7 Porsi PDRB dari Sisi Permintaan	4
Grafik 1.8 Pertumbuhan Ekonomi Dari Sisi Permintaan Secara Tahunan	5
Grafik 1.9 Pertumbuhan Ekonomi Dari Sisi Permintaan Secara Triwulanan.....	5
Grafik 1.10 Pertumbuhan Ekonomi Dari Sisi Permintaan Secara Kumulatif.....	5
Grafik 1.11 Perkembangan Konsumsi Listrik Rumah Tangga	6
Grafik 1.12 Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor	6
Grafik 1.13 Penyaluran Kredit Konsumsi.....	6
Grafik 1.14 Indeks Keyakinan Konsumen	6
Grafik 1.15 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto	7
Grafik 1.16 Penyaluran Kredit Investasi	7
Grafik 1.17 Peringkat Realisasi Ijin Investasi di Indonesia hingga Triwulan IV 2013	8
Grafik 1.18 Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri ..	8
Grafik 1.19 Perkembangan Volume Penjualan Semen.....	9
Grafik 1.20 Realisasi Belanja Modal Pemerintah Hingga Triwulan IV 2013	9
Grafik 1.21 Daftar Komoditas Pangan Utama yang Keluar Provinsi NTB.....	10
Grafik 1.22 Daftar Komoditas Pangan Utama yang Masuk Provinsi NTB	10
Grafik 1.23 Neraca Ekspor Impor Provinsi NTB Triwulan IV 2013	10
Grafik 1.24 Arus Bongkar Muat di Pelabuhan Lembar.....	10
Grafik 1.25 Perkembangan Volume Ekspor (dlm juta)	11
Grafik 1.26 Perkembangan Volume Impor (dlm juta)	11
Grafik 1.27 Porsi PDRB Sektoral Dengan dan Tanpa Tambang.....	12
Grafik1.28 PDRB Berdasarkan Sektor Ekonomi	12
Grafik 1.29 Pertumbuhan PDRB Sektoral Triwulanan Triwulan IV 2013.....	13
Grafik 1.30 Pertumbuhan PDRB Sektoral Tahunan Triwulan IV 2013	13
Grafik 1.31 PDRB Sektor Pertanian.....	14
Grafik 1.32 Luas Lahan dan Luas Tanam Padi Triwulan IV 2013	14
Grafik 1.33 Luas Lahan dan Luas Tanam Jagung Triwulan IV 2013.....	15
Grafik 1.34 Luas Lahan dan Luas Tanam Kedelai Triwulan IV 2013.....	15
Grafik 1.35 Realisasi Survei Kegiatan Dunia Usaha Sektor Pertanian Triwulan IV 2013.....	15
Grafik 1.36 Nilai dan Pertumbuhan Kredit Sektor Pertanian Triwulan IV 2013.....	15
Grafik 1.37 PDRB Provinsi NTB Sektor Pertambangan Triwulan IV 2013	16
Grafik 1.38 Perbandingan Nilai Penjualan Konsentrat Tembaga dibanding PDRB Pertambangan dan Ekspor.....	16

Grafik 1.39	Harga konsentrat dan komoditas Internasional Emas, Perak dan Tembaga	16
Grafik 1.40	Penyaluran Kredit Perbankan di Nusa Tenggara Barat ke Sektor Pertambangan	16
Grafik 1.41	PDRB Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan Pertumbuhannya	17
Grafik 1.42	Aktivitas Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Lembar	17
Grafik 1.43	Jumlah Tamu yang Menginap di Hotel Berbintang	18
Grafik 1.44	Tingkat Penghunian Kamar dan Rata-Rata Lama Menginap Hotel	18
Grafik 1.45	Penyaluran Kredit Perbankan ke Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran.....	18
Grafik 1.46	Realisasi Survei Kegiatan Dunia Usaha Sektor PHR Triwulan IV 2013.....	18
Grafik 1.47	PDRB Sektor Bangunan dan Pertumbuhannya	19
Grafik 1.48	Penyaluran Kredit Perbankan ke Sektor Bangunan.....	19
Grafik 1.49	Perkembangan Volume Penjualan Semen.....	20
Grafik 1.50	PDRB Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaanserta Pertumbuhannya ...	20
Grafik 1.51	Perkembangan Kondisi Perbankan	20
Grafik 1.52	Nilai Tambah Sektor Perbankan	21
Grafik 1.53	Penyumbang Nilai Tambah Sektor Perbankan.....	21
Grafik 1.54	Perkembangan Laba Perbankan	22
Grafik 1.55	Kinerja dan Kesehatan Perbankan.....	22
Grafik 1.56	PDRB Sektor Transportasi dan Komunikasi serta Pertumbuhannya	22
Grafik 1.57	Perkembangan Arus Penumpang Angkutan Udara	22
Grafik 1.58	Penyaluran Kredit Perbankan ke Sektor Transportasi dan Komunikasi.....	23
Grafik 1.59	Perkembangan Arus Penumpang Angkutan Udara Bulanan	23
Grafik 1.60	PDRB Sektor Industri Pengolahan serta Pertumbuhannya	24
Grafik 1.61	Perkembangan Konsumsi Listrik Industri.....	24
Grafik 1.62	Penyaluran Kredit Perbankan ke Sektor Industri Pengolahan	25
Grafik 1.63	Kapasitas Utilisasi Survei Kegiatan Dunia Usaha Triwulan IV 2013	25
Grafik 1.64	PDRB Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih serta Pertumbuhannya.....	25
Grafik 1.65	Perkembangan Total Konsumsi Listrik	25
Grafik 1.66	Penyaluran Kredit Perbankan ke Sektor Listrik, Air dan Gas.....	26
Grafik 2.1	Perkembangan Inflasi Tahunan Provinsi NTB dan Nasional	31
Grafik 2.2	Perkembangan Inflasi Bulanan Provinsi NTB dan Nasional	31
Grafik 2.3	Perkembangan Inflasi Tahun Dasar Provinsi NTB dan Nasional.....	32
Grafik 2.4	Perkembangan Inflasi Triwulanan Provinsi NTB dan Nasional.....	32
Grafik 2.5	Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Kelompok Komoditas Bahan Makanan	34
Grafik 2.6	Perkembangan Inflasi Tahunan Berdasarkan Kelompok Komoditas Bahan Makanan	34
Grafik 2.7	Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Sub Kelompok Komoditas Bahan Makanan	35
Grafik 2.8	Perkembangan Inflasi Tahunan Berdasarkan Sub Kelompok Komoditas Bahan Makanan	35
Grafik 2.9	Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Kelompok Komoditas Makanan Jadi, Minuman dan Tembakau.....	36
Grafik 2.10	Perkembangan Inflasi Tahunan Berdasarkan Kelompok Komoditas Makanan Jadi, Minuman dan Tembakau.....	36

Grafik 2.11 Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Sub Kelompok Komoditas Makanan Jadi, Minuman dan Tembakau	37
Grafik 2.12 Perkembangan Inflasi Tahunan Berdasarkan Sub Kelompok Komoditas Makanan Jadi, Minuman dan Tembakau	37
Grafik 2.13 Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Kelompok Komoditas Perumahan, Listrik, Air dan Gas	38
Grafik 2.14 Perkembangan Inflasi Tahunan Berdasarkan Kelompok Komoditas Perumahan, Listrik, Air dan Gas	38
Grafik 2.15 Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Sub Kelompok Komoditas Perumahan, Listrik, Air dan Gas	38
Grafik 2.16 Perkembangan Inflasi Tahunan Berdasarkan Sub Kelompok Komoditas Perumahan, Listrik, Air dan Gas	38
Grafik 2.17 Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Kelompok Komoditas Sandang	39
Grafik 2.18 Perkembangan Inflasi Tahunan Berdasarkan Kelompok Komoditas Sandang	39
Grafik 2.19 Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Sub Kelompok Komoditas Sandang	40
Grafik 2.20 Perkembangan Inflasi Tahunan Berdasarkan Sub Kelompok Komoditas Sandang	40
Grafik 2.21 Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Kelompok Komoditas Kesehatan	40
Grafik 2.22 Perkembangan Inflasi Tahunan Berdasarkan Kelompok Komoditas Kesehatan	40
Grafik 2.23 Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Sub Kelompok Komoditas Kesehatan	41
Grafik 2.24 Perkembangan Inflasi Tahunan Berdasarkan Sub Kelompok Komoditas Kesehatan	41
Grafik 2.25 Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Kelompok Komoditas Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	42
Grafik 2.26 Perkembangan Inflasi Tahunan Berdasarkan Kelompok Komoditas Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	42
Grafik 2.27 Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Kelompok Komoditas Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	42
Grafik 2.28 Perkembangan Inflasi Tahunan Berdasarkan Kelompok Komoditas Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	42
Grafik 2.29 Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Kelompok Komoditas Transport, Komunikasi dan Jasa	43
Grafik 2.30 Perkembangan Inflasi Tahunan Berdasarkan Kelompok Komoditas Transport, Komunikasi dan Jasa	43
Grafik 2.31 Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Sub Kelompok Komoditas Transport, Komunikasi dan Jasa	43
Grafik 2.32 Perkembangan Inflasi Tahunan Berdasarkan Sub Kelompok Komoditas Transport, Komunikasi dan Jasa	43
Grafik 2.33 Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Komoditas	45
Grafik 2.34 Perkembangan Inflasi Provinsi NTB dan Nasional secara Triwulanan	47
Grafik 2.35 Perkembangan Inflasi Triwulanan Berdasarkan Komoditas	47
Grafik 2.36 Perkembangan Inflasi Tahunan Berdasarkan Komoditas	48
Grafik 2.37 Komoditas Penyumbang Inflasi Tahunan di Kota Bima	48
Grafik 2.38 Komoditas penyumbang Inflasi tahunan di Kota Mataram	48
Grafik 2.39 Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Mataram	50

Grafik 2.40 Perkembangan Inflasi Berdasarkan Capaian Bulanan Kota Mataram.....	50
Grafik 2.41 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Mataram	51
Grafik 2.42 Perkembangan Inflasi Triwulanan Kota Mataram	51
Grafik 2.43 Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Bima.....	52
Grafik 2.44 Perkembangan Inflasi Berdasarkan Capaian Bulanan Kota Bima	52
Grafik 2.45 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Bima.....	52
Grafik 2.46 Perkembangan Inflasi Triwulanan Kota Bima	52
Grafik 2.47 Disagregasi Inflasi Bulanan Provinsi NTB	53
Grafik 2.48 Disagregasi Inflasi Tahunan Provinsi NTB	53
Grafik 2.49 Perkembangan Disagregasi Inflasi Bulanan Kota Mataram	54
Grafik 2.50 Disagregasi Inflasi Tahunan Kota Mataram.....	54
Grafik 2.51 Disagregasi Inflasi Bulanan Kota Bima	55
Grafik 2.52 Disagregasi Inflasi Tahunan Kota Bima	55
Grafik 3.1 Perkembangan LDR dan NPL.....	65
Grafik 3.2 Perkembangan LDR per Kelompok Bank	65
Grafik 3.3 Pertumbuhan Indikator Utama Perbankan (yoy).....	66
Grafik 3.4 Pertumbuhan Indikator Utama Perbankan (qtq).....	66
Grafik 3.5 Perkembangan Total Aset Bank Umum	66
Grafik 3.6 Proporsi Aset Bank Umum	66
Grafik 3.7 Proporsi Aset Bank Umum Per Kab/Kota	67
Grafik 3.8 Jumlah Aset Bank Umum Per Kab / Kota	67
Grafik 3.9 Pertumbuhan Aset Bank Umum Per Kab / Kota (% yoy).....	67
Grafik 3.10 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (yoy).....	68
Grafik 3.11 Perkembangan DPK Per Jenis Simpanan	68
Grafik 3.12 Komposisi DPK Bank Umum	68
Grafik 3.13 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (yoy).....	69
Grafik 3.14 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (qtq).....	69
Grafik 3.15 Proporsi DPK per Kabupaten Kota.....	69
Grafik 3.16 Jumlah DPK per Kabupaten Kota	69
Grafik 3.17 Pertumbuhan DPK Bank Umum Per Kabupaten / Kota (% yoy).....	70
Grafik 3.18 Pertumbuhan Kredit (yoy)	70
Grafik 3.19 Pertumbuhan Kredit (qtq)	70
Grafik 3.20 Proporsi Penyaluran Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan.....	71
Grafik 3.21 Proporsi Penyaluran Kredit Berdasarkan Kelompok Bank.....	71
Grafik 3.22 Pertumbuhan Kredit Per Jenis Penggunaan.....	72
Grafik 3.23 Pertumbuhan Kredit Per Jenis Penggunaan.....	72
Grafik 3.24 Proporsi Kredit Sektoral	72
Grafik 3.25 Proporsi Penyaluran Kredit per Kab/Kota	73
Grafik 3.26 Proporsi Penyaluran Kredit per Kab/Kota	73
Grafik 3.27 Pertumbuhan Kredit per Kabupaten Kota.....	73
Grafik 3.28 Perkembangan Kredit UMKM	74
Grafik 3.29 Perkembangan NPL UMKM	74
Grafik 3.30 Proporsi Kredit UMKM Berdasarkan Bank.....	74

Grafik 3.31 Perkembangan Penyaluran KUR di NTB	75
Grafik 3.32 Pertumbuhan KUR di NTB.....	75
Grafik 3.33 Perkembangan NPL Bank Umum.....	77
Grafik 3.34 NPL Per Jenis Penggunaan	77
Grafik 3.35 NPL per Sektor Ekonomi	78
Grafik 3.36 Perkembangan Indikator Perbankan Syariah (yoy).....	78
Grafik 3.37 Perkembangan Indikator Perbankan Syariah (qtq).....	78
Grafik 3.38 Proporsi DPK Perbankan Syariah di NTB.....	79
Grafik 3.39 Perkembangan DPK Perbankan Syariah di NTB	79
Grafik 3.40 Proporsi Pembiayaan Perbankan Syariah di NTB.....	80
Grafik 3.41 Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah di NTB.....	80
Grafik 3.42 Financing to Deposits Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) Perbankan Syariah NTB.....	80
Grafik 3.43Perkembangan <i>Inflow</i> , <i>Outflow</i> dan <i>Netflow</i> (Rp, miliar).....	82
Grafik 3.44Perkembangan Penukaran Uang Kecil(Rp, miliar).....	83
Grafik 3.45Komposisi Penukaran Uang Kertas Keluar Berdasarkan Jenis Pecahan	83
Grafik 3.46Perkembangan Transaksi Non Tunai.....	84
Grafik 3.47Perkembangan Transaksi Kliring.....	85
Grafik 3.48Perkembangan Transaksi <i>Real Time Gross Settlement</i>	85
Grafik 4.1 APBD Pendapatan Kabupaten/ Kota dan Provinsi NTB Tahunan.....	86
Grafik 4.2 APBD Belanja Kabupaten/ Kota dan Provinsi NTB Tahunan.....	86
Grafik 4.3 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Provinsi di Provinsi NTB.....	87
Grafik 4.4 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Provinsi di Provinsi NTB.....	87
Grafik 4.5 Perkembangan Pangsa Pendapatan Tahunan yang dihasilkan Pemerintah di Provinsi NTB	88
Grafik 4.6 Perkembangan Pangsa Belanja Tahunan yang dihasilkan Pemerintah di Provinsi NTB	88
Grafik 4.7 Total Pangsa Pendapatan yang dihasilkan Pemerintah di Provinsi NTB	89
Grafik 4.8 Realisasi Pendapatan Pemerintah di Provinsi NTB	89
Grafik 4.9 Pangsa Realisasi Belanja yang dihasilkan Pemerintah di Provinsi NTB	91
Grafik 4.10 Realisasi Belanja Pemerintah di Provinsi NTB	91
Grafik 4.11 Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat	91
Grafik 4.12 Pangsa Belanja Modal terhadap Total Belanja Pemerintah di Provinsi NTB.....	91
Grafik 4.13 Pangsa Belanja Modal antara Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat	92
Grafik 4.14 Realisasi Belanja Modal Pemerintah di Provinsi NTB.....	92
Grafik 4.15 Total Realisasi Pendapatan yang dihasilkan Pemerintah Provinsi NTB dibanding DIPA tahun 2013.....	93
Grafik 4.16 Perbandingan Pangsa Realisasi Pendapatan yang dihasilkan Pemerintah Provinsi NTB tahun 2013.....	93
Grafik 4.17 Total Belanja yang dihasilkan Pemerintah Provinsi NTB dibanding DIPA tahun 2013	95
Grafik 4.18 Perbandingan Pangsa Belanja yang dihasilkan Pemerintah Provinsi NTB dibanding DIPA tahun 2013.....	95

Grafik 4.19 Perbandingan Pangsa Belanja Produktif Kabupaten dan Kota di Provinsi NTB	97
Grafik 4.20 Realisasi Pendapatan yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten di Provinsi NTB.....	98
Grafik 4.21 Realisasi Belanja yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten di Provinsi NTB tahun 2013	98
Grafik 4.22 Simpanan Pemerintah Kabupaten, Kota dan Provinsi dalam Perbankan di Provinsi NTB	99
Grafik 4.23 Alokasi Simpanan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi NTB	99
Grafik 4.24 Pangsa Pendapatan Total Pemerintah Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi NTB.	100
Grafik 4.25 Perbandingan Pangsa Pendapatan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi NTB	100
Grafik 4.26 Pangsa Belanja Total Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi NTB	101
Grafik 4.27 Perbandingan Pangsa Belanja Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi NTB.....	101
Grafik 4.28 Perbandingan Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi NTB	101
Grafik 4.29 Realisasi Penerimaan Pendapatan Negara di Provinsi NTB.....	102
Grafik 4.30 Realisasi Belanja Negara di Provinsi NTB	102
Grafik 4.31 Realisasi Pangsa Pendapatan yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten di Provinsi NTB	103
Grafik 4.32 Realisasi Pangsa Belanja yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten di Provinsi NTB tahun.....	103
Grafik 5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi NTB 2013	106
Grafik 5.2 Jumlah dan Prosentase Pengangguran di Provinsi NTB 2013	106
Grafik 5.3 Perbandingan Pekerja Penuh dan Setengah Penganggur di Provinsi NTB	107
Grafik 5.4 Perbandingan Pekerja dengan Jam Kerja di Atas 35 jam dan di Bawah 35 jam	107
Grafik 5.5 Sumbangan Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Ekonomi di Triwulan II 2013.....	107
Grafik 5.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka di Kabupaten/ Kota	107
Grafik 5.7 Prosentase Pekerja di Provinsi NTB Berdasarkan Pendidikan Terakhir	108
Grafik 5.8 Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi NTB	108
Grafik 5.9 Perkembangan Kegiatan Dunia Usaha.....	108
Grafik 5.10 Perkembangan Penggunaan Tenaga Kerja SKDU	108
Grafik 5.11 Perkembangan Penduduk Miskin di Propinsi NTB.....	109
Grafik 5.12 Prosentasi Penduduk Miskin Perkotaan dan Pedesaan.....	109
Grafik 5.13 Perkembangan Nilai Tukar Petani	109
Grafik 5.14 Remitansi TKI Per Negara Penempatan di Provinsi NTB 2013	109
Grafik 5.15 Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi NTB	110
Grafik 5.16 Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi NTB 2013	110
Grafik 5.17 Perkembangan Garis Kemiskinan Kota dan Desa di Provinsi NTB	110
Grafik 5.18 Nilai Garis Kemiskinan Berdasarkan Golongan Konsumsi	110
Grafik 5.19 Indeks Keyakinan Konsumen	111
Grafik 5.20 Indeks Ketahanan Daya Beli dan Angsuran Hutang.....	111
Grafik 5.21 Gini Rasio Provinsi NTB	111
Grafik 5.22 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTB.....	111
Grafik 6.1 Peramalan PDRB NTB Tahunan dan Triwulanan	116

Grafik 6.2 Korelasi Peramalan Statistik dengan Peramalan SKDU.....	116
Grafik 6.3 Indeks Ekspektasi Konsumen	117
Grafik 6.4 Prospek Inflasi Bulanan hingga Akhir Tahun 2013	118
Grafik 6.5 Indeks Ramalan Perubahan Harga Survei Konsumen.....	118

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 PDRB Sisi Permintaan Triwulan IV 2013	4
Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Penawaran	14
Tabel 2.1 Ringkasan Perkembangan Inflasi Provinsi NTB.....	33
Tabel 2.2 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi di Kota Mataram dan Bima Triwulan IV 2013.....	46
Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Bank Umum di Nusa Tenggara Barat	64
Tabel 3.2 Perkembangan NPL per-Kelompok Bank.....	76
Tabel 4.1. Rincian Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten dan Provinsi di Wilayah Provinsi NTB	90
Tabel 4.2 Rincian Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten dan Provinsi di Wilayah Provinsi NTB....	93
Tabel 4.3 Rincian Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi NTB.....	95
Tabel 4.4 Rincian Belanja Daerah Pemerintah Provinsi NTB.....	96
Tabel 4.5 Rincian Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi NTB	103
Tabel 4.6 Rincian Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi NTB	104
Tabel 5.1 Perkembangan Ketenagakerjaan Prov. NTB	106
Tabel 6.1 Proyeksi PDRB tahun 2014 dan Triwulan I 2014.....	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 6.1 Proyeksi Curah Hujan Triwulan I 2014.....	117
--	-----

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perkembangan Ekonomi, Keuangan Daerah dan Sistem Keuangan

Makro Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi NTB secara kumulatif tahun 2013 mampu tumbuh sebesar 5,69% (yoy) dibanding tahun 2012, sedikit lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi secara nasional yang tumbuh sebesar 5,78% (yoy). Pertumbuhan ekonomi saat ini lebih baik dibanding 2 tahun sebelumnya yang justru mengalami penurunan. Penyebab utama penurunan dalam 2 tahun terakhir adalah menurunnya produksi tambang konsentrat tembaga PT. NNT yang sedang mengalami pelebaran dinding, sehingga kandungan konsentrat dan produksi mengalami penurunan cukup signifikan.

Dibanding pertumbuhan ekonomi daerah-daerah lain di Indonesia, pertumbuhan ekonomi provinsi NTB di triwulan IV 2013 termasuk tumbuh moderat dan relatif tinggi dengan pertumbuhan sebesar 6,55% (yoy). Adanya perbaikan ekspor tambang konsentrat juga tampak dari pertumbuhan ekonomi tahunan NTB yang mengalami pertumbuhan lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi di triwulan IV secara nasional yang tumbuh 5,65% (yoy). Pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB di luar tambang cenderung relatif rendah disebabkan oleh penyumbang kegiatan ekonomi terbesar yang masih didominasi pertanian, sehingga pertumbuhan pembangunan sangat tergantung kepada penambahan luas lahan tanam komoditas pertanian dan faktor cuaca. Potensi akselerasi pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan penguatan industri hulu dan hilir atas produk unggulan pertanian dan atau melakukan pengembangan di sektor yang lain seperti pariwisata yang akan mengakselerasi sektor tersier.

Pertumbuhan ekonomi NTB secara kumulatif tahun 2013 mampu tumbuh sebesar 5,69% (yoy) dibanding tahun 2012, sedikit lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi secara nasional yang tumbuh sebesar 5,78% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB di luar tambang cenderung relatif rendah dan tidak mengalami percepatan pertumbuhan.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB di Triwulan IV 2013 mengalami sedikit penurunan dibanding triwulan sebelumnya.

Dari sisi penawaran secara triwulanan, realisasi pertumbuhan ekonomi di provinsi NTB di Triwulan IV 2013 baik dengan tambang maupun tanpa tambang menunjukkan adanya penurunan dibanding triwulan sebelumnya sebesar 1,66% (qtq) dan 3,73%% (qtq).

Laju inflasi tahun 2013 mengalami kenaikan tertinggi dalam 3 tahun terakhir

Secara triwulanan, PDRB Provinsi NTB relatif mengalami penurunan dibanding triwulan sebelumnya. Walaupun terdapat hari raya Idul Adha di bulan Oktober, meningkatnya kegiatan MICE di triwulan IV, peningkatan permintaan menjelang tahun baru, maupun panen raya kedelai di triwulan IV, aktivitas ekonomi tetap tidak sebesar triwulan sebelumnya yang bersamaan dengan adanya perayaan hari raya Idul Fitri dan panen komoditas tembakau. Namun, penurunan perekonomian di triwulan IV masih tertahan oleh meningkatnya ekspor konsentrat tembaga di akhir tahun 2013.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB di Triwulan IV 2013 mengalami sedikit penurunan dibanding triwulan sebelumnya. Peningkatan konsumsi pemerintah menjadi pendorong utama peningkatan pertumbuhan ekonomi di saat konsumsi swasta mengalami pelambatan. Realisasi investasi pemerintah yang cukup tinggi di triwulan IV 2013 juga mendorong tumbuhnya investasi. Peningkatan ekspor konsentrat di akhir tahun mampu meningkatkan Ekspor Provinsi NTB walaupun nilai impor juga mengalami peningkatan.

Dari sisi penawaran secara triwulanan, realisasi pertumbuhan ekonomi di provinsi NTB di Triwulan IV 2013 baik dengan tambang maupun tanpa tambang menunjukkan adanya penurunan dibanding triwulan sebelumnya sebesar 1,66% (qtq) dan 3,73%% (qtq). Penurunan pertumbuhan ekonomi terutama disebabkan penurunan sektor pertanian di triwulan IV 2013 yang turun hingga 14,11% (qtq) karena sudah selesainya panen raya komoditas unggulan seperti padi, jagung dan tembakau. Adanya panen raya kedelai di bulan Oktober 2013, dan tingginya penjualan sapi di bulan Oktober juga tidak terlalu berdampak dalam meningkatkan nilai tambah sektor pertanian. Adanya musim penghujan dimanfaatkan petani untuk memulai tanam beberapa komoditas unggulan di bulan Desember dan buruknya cuaca akibat hujan dan angin menyebabkan hasil tangkapan ikan laut juga mengalami penurunan.

Perkembangan Inflasi

Laju inflasi tahun 2013 mengalami kenaikan tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Adanya kenaikan harga BBM di akhir bulan Juni 2013 langsung mengerek inflasi di tahun 2013 sebesar 9,51%(yoy). Namun begitu, kenaikan inflasi tidak setinggi kenaikan inflasi karena kenaikan BBM di tahun 2010 yang mencapai 10,05% (yoy). Kenaikan inflasi tidak hanya disebabkan oleh kenaikan BBM yang cukup tinggi, melainkan juga disebabkan oleh kenaikan harga barang yang lain mengikuti kenaikan inflasi yang terjadi.

Karakter Inflasi di Provinsi NTB juga sangat sensitif dengan adanya *shock* permintaan dan penawaran. Terbukti, inflasi mengalami kenaikan pada saat hari raya Maulid Nabi, hari raya Idul Fitri dan kemerdekaan RI, hari raya Idul Adha, hari raya Galungan maupun tekanan inflasi menjelang pergantian tahun yang secara signifikan meningkatkan konsumsi. Adanya tekanan inflasi dari sisi permintaan ini menunjukkan belum cukup siapnya pemerintah dan dunia usaha dalam menjaga ketersediaan pasokan dalam menghadapi lonjakan permintaan yang terjadi.

Selain itu, di tahun 2013 juga terjadi kenaikan inflasi dari sisi *administered price* yaitu kenaikan tarif dasar listrik rumah tangga dan kenaikan harga gas yang juga meningkatkan sentimen inflasi yang tinggi. Adanya penggunaan gas 3kg untuk *omprongan*/bahan bakar pengeringan tembakau juga menimbulkan anomali inflasi di provinsi NTB yang tampak dari kenaikan inflasi di bulan Oktober dan November 2013 yang mengalami kenaikan cukup besar.

Tekanan inflasi dari sektor perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar rumah tangga juga masih menunjukkan tren pergerakan yang cukup tinggi. Setelah mengalami inflasi yang cukup tinggi di tahun 2012 yang kemudian terus menurun hingga bulan Juni 2013, kemudian berbalik arah dengan adanya kenaikan harga BBM, inflasi perumahan menunjukkan adanya tren kenaikan di bulan Juli hingga Desember 2013, dan menjadi penyumbang inflasi terbesar kedua setelah inflasi kelompok

Karakter Inflasi di Provinsi NTB juga sangat sensitif dengan adanya *shock* permintaan dan penawaran

Adanya penggunaan gas 3kg untuk *omprongan*/bahan bakar pengeringan tembakau juga menimbulkan anomali inflasi di provinsi NTB

Pada triwulan IV 2013, pergerakan inflasi relatif melambat dibanding triwulan sebelumnya yaitu sebesar 1,25% (qtq) dibanding inflasi triwulan III 2013 sebesar 4,12% (qtq).

Perkembangan perbankan di Nusa Tenggara Barat sepanjang triwulan IV-2013 terus menunjukkan kinerja yang positif

komoditas bahan makanan. Adanya penyesuaian tarif sewa rumah, menjadi salah satu penyebab kenaikan, selain juga disebabkan oleh kenaikan tarif listrik dan kenaikan harga LPG.

Kenaikan harga BBM menimbulkan anomali pergerakan inflasi pada beberapa komoditas terutama bahan makanan di bulan Juli 2013 yang disinyalir lebih disebabkan oleh adanya spekulasi harga memanfaatkan momen kenaikan harga BBM. Untuk menanggulangi kenaikan yang lebih tinggi, pemerintah melalui dinas terkait gencar melakukan operasi pasar di beberapa tempat. Namun hal ini tidak dibarengi dengan sosialisasi dan kapasitas barang yang dijual dalam operasi pasar yang cukup membuat operasi pasar kurang berdampak dalam menekan inflasi yang terjadi.

Pada triwulan IV 2013, pergerakan inflasi relatif melambat dibanding triwulan sebelumnya yaitu sebesar 1,25% (qtq) dibanding inflasi triwulan III 2013 sebesar 4,12% (qtq). Secara bulanan, inflasi juga cenderung rendah walaupun terjadi anomali pergerakan inflasi di bulan Oktober dan November yang biasanya cenderung rendah mengarah deflasi menjadi inflasi cukup tinggi di bulan Oktober sebesar 0,44% dan inflasi di bulan November sebesar 0,21% (mtm). Inflasi di bulan Oktober lebih disebabkan perayaan hari raya Idul Adha pada tengah bulan berbeda dengan tahun sebelumnya yang berada di akhir bulan, sehingga dampak inflasi langsung berpengaruh dalam perhitungan. Selain itu, adanya kegiatan pengeringan tembakau menggunakan LPG 3kg membuat harga LPG juga melambung tinggi. Inflasi di bulan November 2013 seharusnya juga dapat ditekan apabila pemerintah tidak menaikkan harga listrik dan HET LPG 3kg. Adanya panen sebagian besar komoditas hortikultura tidak mampu menurunkan inflasi dikarenakan kenaikan TDL, HET LPG dan kenaikan beras yang memiliki bobot inflasi cukup tinggi. Di Bulan Desember, inflasi terjadi cukup tinggi lebih disebabkan oleh tekanan permintaan menjelang pergantian akhir tahun dan buruknya cuaca yang mempengaruhi produksi beberapa komoditas pangan dan tangkapan ikan.

Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank Umum di Nusa Tenggara Barat terus menunjukkan peningkatan hingga mencapai 129,94% pada triwulan IV-2013 dan lebih besar apabila dibandingkan dengan LDR triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 127,89%.

Kegiatan transaksi keuangan secara tunai mengalami *net outflow*.

Perkembangan Perbankan dan Sistem Pembayaran

Perkembangan perbankan di Nusa Tenggara Barat sepanjang triwulan IV-2013 terus menunjukkan kinerja yang positif. Kondisi tersebut tercermin dari meningkatnya total aset bank umum tercatat Rp22,74 triliun dengan angka pertumbuhan mencapai 14,89% (yoy). Fungsi intermediasi perbankan berjalan baik dan didukung dengan kinerja kredit yang baik dengan *Non Performing Loan* (NPL) sebesar 1,40%.

Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank Umum di Nusa Tenggara Barat terus menunjukkan peningkatan hingga mencapai 129,94% pada triwulan IV-2013 dan lebih besar apabila dibandingkan dengan LDR triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 127,89%, atau periode yang sama tahun sebelumnya (triwulan IV-2012) yang tercatat sebesar 124,06%. Peningkatan ini terutama didorong oleh rata-rata pertumbuhan kredit triwulanan (5,46% qtq) yang lebih tinggi daripada pertumbuhan DPK (4,07% qtq) dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

Berdasarkan nominal, proporsi penyaluran kredit masing-masing kelompok bank terhadap total kredit perbankan di NTB masih didominasi oleh Bank Pemerintah sebesar Rp 15,31 triliun atau 67,55% dari total kredit. Proporsi terbesar selanjutnya adalah Bank Swasta sebesar Rp 6,63 triliun atau 29,23%, dan Bank Asing memiliki porsi penyaluran kredit terkecil dengan nominal sebesar Rp 730,51 miliar atau 3,22% dari total kredit.

Kegiatan transaksi keuangan secara tunai mengalami *net outflow*, tercermin dari peningkatan jumlah aliran uang keluar (*cash outflow*) yang lebih besar dibandingkan aliran uang masuk (*cash inflow*), atau dengan kata lain jumlah penarikan uang tunai lebih besar dibandingkan jumlah setoran uang tunai yang dilakukan oleh perbankan NTB melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan perkembangan transaksi secara non tunai didominasi oleh layanan transaksi RTGS. Sementara itu, kegiatan penukaran uang pecahan kecil mengalami penurunan setelah pada periode

Realisasi pendapatan dan belanja daerah di tahun 2013 relatif mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Realisasi pendapatan total daerah di provinsi NTB tahun 2013 mencapai 13,82 trilyun atau mencapai 104,88% dari total rencana pendapatan.

Realisasi belanja provinsi NTB tahun 2013 cukup rendah bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Indikator kesejahteraan di Provinsi NTB menunjukkan adanya tren peningkatan

sebelumnya mengalami lonjakan yang cukup tinggi akibat pengaruh faktor musiman (Idul Fitri).

Kinerja Keuangan Daerah

Realisasi pendapatan dan belanja daerah di tahun 2013 relatif mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Target pendapatan daerah tidak tercapai terutama disebabkan oleh tidak terpenuhinya pendapatan transfer hingga 100% dan pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) yang relatif rendah terutama capaian kabupaten Sumbawa Besar akibat dari turunnya produksi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Belanja daerah juga mengalami penurunan terutama disebabkan oleh realisasi belanja modal yang hanya terealisasi 82,89% dibanding target yang ditetapkan.

Realisasi pendapatan total daerah di provinsi NTB tahun 2013 mencapai 13,82 trilyun atau mencapai 104,88% dari total rencana pendapatan. Tingginya Pencapaian disebabkan oleh tingginya penerimaan pajak dalam negeri yang mencapai 218,24%, sehingga realisasi pendapatan oleh KPPN dapat mengangkat pencapaian realisasi pendapatan kabupaten/kota dan provinsi yang cenderung mengalami penurunan.

Realisasi belanja provinsi NTB tahun 2013 cukup rendah bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Realisasi belanja pemerintah kabupaten/kota dan provinsi tahun 2013 hanya mencapai 89,33%, capaian terendah dalam 7 tahun terakhir. Rendahnya pencapaian realisasi terutama disebabkan oleh rendahnya realisasi belanja beberapa kabupaten seperti kabupaten Sumbawa Barat dengan realisasi 73,43% dari target yang ditetapkan yang disebabkan oleh capaian pendapatan asli daerah yang tidak sesuai target penerimaan, sehingga harus dilakukan pengurangan belanja yang cukup besar pula.

Kesejahteraan Masyarakat

Indikator kesejahteraan di Provinsi NTB menunjukkan adanya tren peningkatan. Adanya penurunan angka kemiskinan berdasarkan hasil survei kemiskinan di bulan

Daya beli masyarakat juga menunjukkan adanya peningkatan.

Pada tahun 2014, prospek pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan melambat

Faktor penyebab utama pelambatan ekonomi provinsi NTB adalah produksi PT Newmont Nusa Tenggara yang hingga saat ini belum ada kepastian

September 2013 menjadi penyebab utama peningkatan indikator kesejahteraan. Dengan adanya peningkatan nilai garis kemiskinan hingga 12,0% (yoy), jumlah penduduk kurang mampu menurun hingga 3,1% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan daya beli masyarakat.

Hasil survei kegiatan dunia usaha (SKDU) juga menunjukkan peningkatan penggunaan tenaga kerja di triwulan IV 2013 seiring dengan adanya peningkatan kebutuhan tenaga kerja di sektor pertanian. Adanya penurunan jumlah angkatan kerja di bulan Agustus dinilai cukup wajar mengikuti tren penurunan yang rutin terjadi di tiap bulan Agustus terutama di sektor formal yang disebabkan oleh peralihan pekerja remaja yang melanjutkan sekolah.

Daya beli masyarakat juga menunjukkan adanya peningkatan yang terlihat dari adanya peningkatan penurunan pembayaran cicilan hutang dan meningkatnya kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Adanya penurunan remitansi TKI lebih disebabkan oleh adanya moratorium pengiriman TKI yang menyebabkan pengiriman TKI juga mengalami pelambatan.

Prospek Ekonomi 2014

Pada tahun 2014, prospek pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan melambat bahkan mengalami penurunan dibanding tahun 2013. Faktor penyebab utama pelambatan ekonomi provinsi NTB adalah produksi PT Newmont Nusa Tenggara yang hingga saat ini belum ada kepastian.

Berdasarkan hasil peramalan statistik setelah penyesuaian didapatkan ramalan PDRB provinsi NTB tahun 2014 sebesar 6,25% dengan asumsi PT NNT normal berproduksi. Dengan sudah mulai berakhirnya pelebaran dinding tambang, maka produksi PT NNT di tahun 2014 diramalkan sudah akan mengalami peningkatan, sehingga kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat cukup besar. Apabila PT NNT memutuskan untuk tidak melakukan ekspor dan hanya mengirimkan hasil tambang untuk keperluan domestik

Berdasarkan proyeksi PDRB non tambang, diprediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2014 akan bertumbuh sebesar 5,51%.

Sepanjang tahun 2014, inflasi di Provinsi NTB diperkirakan berada pada level 5,8%.

Tekanan potensi inflasi terutama disebabkan oleh adanya pemilu di tahun 2014 yang berpotensi memberikan tekanan permintaan.

sesuai dengan plafon pengiriman sebesar 20% dari total kapasitas PT Smelting, maka total PDRB NTB diperkirakan masih akan mengalami pertumbuhan hingga 0,75%. Apabila skenario ketiga yang berjalan, yaitu PT NNT menghentikan sama sekali produksi yang dilakukan, maka pertumbuhan ekonomi provinsi NTB akan mengalami penurunan sebesar 7,89% (yoy).

Berdasarkan proyeksi PDRB non tambang, diprediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2014 akan bertumbuh sebesar 5,51%. Pertumbuhan ekonomi relatif lebih rendah dibanding capaian PDRB di tahun 2013 yang sebesar 5,61 tanpa tambang lebih dikarenakan adanya pelambatan investasi yang disebabkan oleh aksi investor untuk menunggu kepastian keamanan dan politik yang ada di provinsi NTB.

Prospek Inflasi 2014

Sepanjang tahun 2014, inflasi di Provinsi NTB diperkirakan berada pada level 5,8%. Penurunan inflasi lebih disebabkan oleh sudah cukup tingginya inflasi di tahun sebelumnya, sehingga inflasi di tahun 2014 terkena dampak tarikan ke bawah yang disebabkan oleh basis harga yang tinggi di tahun sebelumnya, sehingga pelaku usaha cenderung enggan menaikkan harga lebih tinggi. Adanya cuaca yang relatif bersahabat juga berpotensi meningkatkan produksi yang berdampak pada stabilnya harga bahan pangan.

Tekanan potensi inflasi terutama disebabkan oleh adanya pemilu di tahun 2014 yang berpotensi memberikan tekanan permintaan. Adanya pemilu juga berpotensi memberikan tekanan inflasi yang lebih disebabkan oleh faktor pengendalian harga dan program pemerintah yang lebih sulit dilaksanakan karena banyaknya gangguan operasional selama pelaksanaan pemilu. Adanya ancaman gangguan operasional pemerintah berpotensi menumbuhkan spekulasi pasar untuk memainkan harga. Oleh karena itu, penguatan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menjadi penting dilakukan untuk mengantisipasi potensi adanya shock permintaan dan pasokan barang.

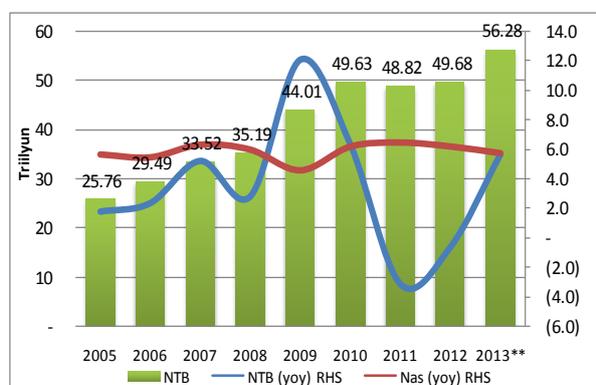
BAB 1

MAKRO EKONOMI REGIONAL NUSA TENGGARA BARAT

1.1 KONDISI UMUM

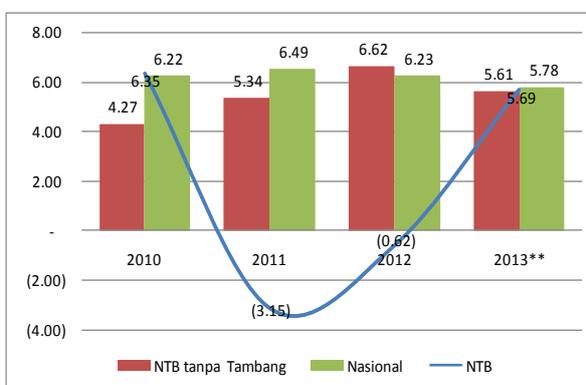
Pertumbuhan ekonomi NTB secara kumulatif tahun 2013 mampu tumbuh sebesar 5,69% (yoy) dibanding tahun 2012, sedikit lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi secara nasional yang tumbuh sebesar 5,78% (yoy). Pertumbuhan ekonomi saat ini lebih baik dibanding 2 tahun sebelumnya yang justru mengalami penurunan. Penyebab utama penurunan dalam 2 tahun terakhir adalah menurunnya produksi tambang konsentrat tembaga PT. NNT yang sedang mengalami pelebaran dinding, sehingga kandungan konsentrat dan produksi mengalami penurunan cukup signifikan. Apabila sektor tambang dipisahkan, maka pertumbuhan ekonomi masih menunjukkan adanya tren yang selalu bertumbuh positif, bahkan lebih tinggi dibanding pertumbuhan nasional di tahun 2012 yang secara kumulatif mengalami pertumbuhan hingga 6,61% (yoy) dibanding tahun sebelumnya, lebih tinggi dibanding pertumbuhan nasional tahun 2012 yang sebesar 6,23% (yoy)

Grafik 1.1
PDRB (ADHB) Tahunan dan Pertumbuhan PDRB
Provinsi NTB dan Nasional Tahunan



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

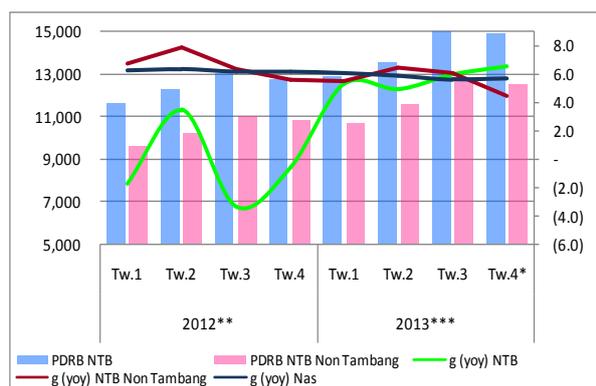
Grafik 1.2
Perbandingan Pertumbuhan PDRB Tahunan Provinsi
NTB dan Nasional



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

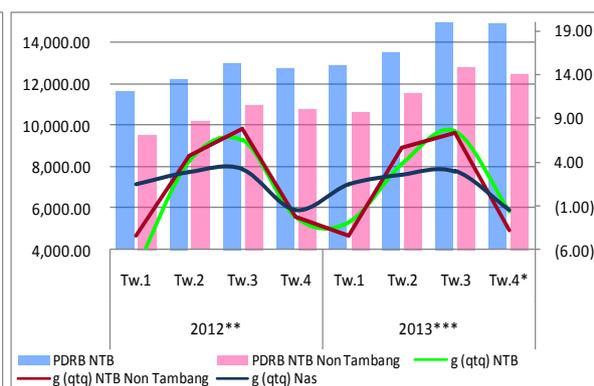
Pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB di luar tambang cenderung relatif rendah dan tidak mengalami percepatan pertumbuhan dikarenakan oleh penyumbang kegiatan ekonomi terbesar yang masih didominasi pertanian, sehingga pertumbuhan pembangunan sangat tergantung kepada penambahan luas lahan tanam komoditas pertanian dan faktor cuaca. Hal ini dapat kita lihat pada pertumbuhan ekonomi di tahun 2012 yang secara rata-rata lebih tinggi dari nasional yang disebabkan oleh adanya pertumbuhan tinggi di sektor pertanian hingga 6,24% (yoy) dibanding tahun sebelumnya.

Grafik 1.4
PDRB (ADHB) dan growth (ADHK) yoy



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 1.5
PDRB (ADHB) dan growth (ADHK) qtq



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Secara triwulanan, PDRB Provinsi NTB relatif mengalami penurunan dibanding triwulan sebelumnya. Walaupun terdapat hari raya Idul Adha di bulan Oktober, meningkatnya kegiatan MICE di triwulan IV, peningkatan permintaan menjelang tahun baru, maupun panen raya kedelai di triwulan IV, aktivitas ekonomi tetap tidak sebesar triwulan sebelumnya yang bersamaan dengan adanya perayaan hari raya Idul Fitri dan panen komoditas tembakau. Namun, penurunan perekonomian di triwulan IV masih tertahan oleh meningkatnya ekspor konsentrat tembaga di akhir tahun 2013, sehingga secara triwulanan, ekonomi hanya mengalami penurunan sebesar 1,66% (qtq), dibandingkan dengan penurunan PDRB non tambang yang turun hingga 3,73% (qtq). Tren penurunan ini juga sejalan dengan tren penurunan pertumbuhan ekonomi triwulan yang juga mengalami penurunan di triwulan IV 2013 sebesar 1,42% (qtq).

1.2 SISI PERMINTAAN

Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB di Triwulan IV 2013 mengalami sedikit penurunan dibanding triwulan sebelumnya. Peningkatan konsumsi pemerintah menjadi pendorong utama peningkatan pertumbuhan ekonomi di saat konsumsi swasta mengalami pelambatan. Realisasi investasi pemerintah yang cukup tinggi di triwulan IV 2013 juga mendorong tumbuhnya investasi. Peningkatan ekspor konsentrat di akhir tahun mampu meningkatkan Ekspor Provinsi NTB walaupun nilai impor juga mengalami peningkatan. Secara total, net ekspor provinsi NTB di triwulan IV 2013 masih mengalami net impor sebesar 342,00 milyar, sedikit lebih besar dibanding triwulan sebelumnya yang mengalami net impor 340,82 milyar.

Berdasarkan sumbangan terhadap perekonomian, Konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar PDRB sisi permintaan dengan sumbangan konsumsi rumah tangga di triwulan IV 2013 mencapai 55,02%, lebih besar dibanding sumbangan di triwulan

sebelumnya yang sebesar 54,04%. Secara tahunan, konsumsi rumah tangga mampu menyumbang hingga 55,91% dari total PDRB. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB sangat didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, sehingga kebijakan yang berfokus pada peningkatan daya beli masyarakat sangat penting untuk diprioritaskan.

Tabel 1.1
PDRB Sisi Permintaan Triwulan IV 2013

Periode	yoy		2012**	2013***		Bobot	yoy	qtq	ctc
	2012	2013	Tw.4	Tw.3	Tw.4				
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	26.937.45	31.463.54	7.070.48	8.080.43	8.204.77	55.91	5.19	0.35	5.25
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nirlaba (LNP)	559.56	638.76	145.69	164.49	167.96	1.14	8.09	0.56	7.67
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10.277.85	11.213.82	2.734.12	2.879.04	3.009.65	19.93	2.61	3.43	1.70
Pembentukan Modal Tetap Bruto	15.418.09	16.503.04	3.958.43	4.173.07	4.331.77	29.32	1.64	1.39	0.47
Perubahan Stok	(4.926.67)	(2.479.91)	(1.513.45)	(3.31)	(459.69)	(4.41)	(79.88)	(178.92)	(57.02)
Ekspor	13.618.07	12.017.59	3.608.82	3.018.48	3.112.56	21.35	(12.50)	1.33	(11.53)
Impor	12.204.66	13.078.86	3.228.43	3.359.29	3.454.34	23.24	(0.45)	0.86	(6.18)
NTB	49.679.69	56.277.97	12.775.66	14.952.91	14.912.69	100.00	6.55	(1.66)	5.69
Nasional	8.241.864.30	9.084.000.74	2.095.693.30	2.375.200.00	2.344.000.74	0.62	5.65	(1.42)	5.78
Net Ekspor	1.413.41	(1.061.28)	380.39	(340.82)	(342)	(1.89)	(851.29)	(2.87)	81.50

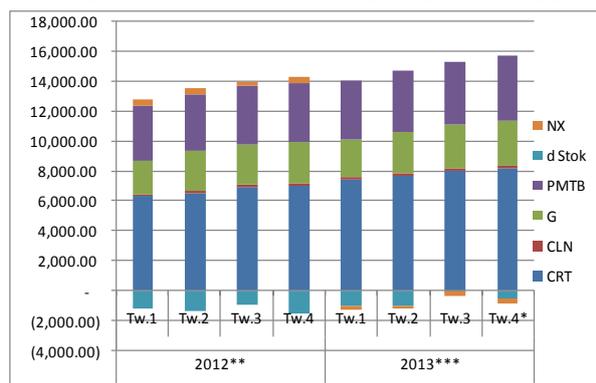
Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Kegiatan investasi menjadi penyumbang aktivitas ekonomi terbesar kedua setelah konsumsi. Sumbangan investasi terhadap total perekonomian di tahun 2013 mencapai 29,32% dari total PDRB NTB. Investasi swasta masih menjadi penyumbang terbesar investasi di Provinsi NTB. Namun demikian, sumbangan investasi pemerintah juga relatif besar hingga sekitar 25% dari total investasi yang ada. Adanya proyek MP3EI menjadi penyumbang utama tingginya investasi swasta di Provinsi NTB.

Konsumsi pemerintah secara tahunan menyumbang 19,93% dari total PDRB, relatif menurun dibanding sumbangan tahun sebelumnya yang mencapai 20,69%. Penurunan sumbangan konsumsi pemerintah dinilai cukup positif karena diimbangi oleh peningkatan alokasi investasi pemerintah.

Grafik 1.6

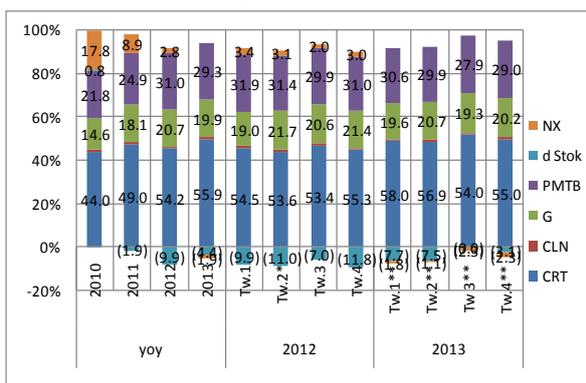
Rincian Pertumbuhan PDRB dari Sisi Permintaan



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 1.7

Porsi PDRB dari Sisi Permintaan

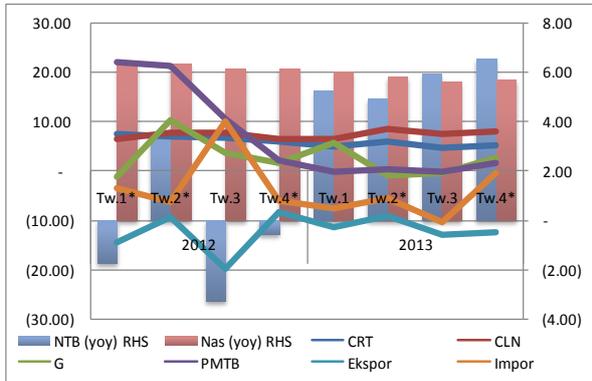


Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Secara tahunan, ekonomi Provinsi NTB dalam dua triwulan terakhir mampu tumbuh lebih tinggi dibanding pertumbuhan nasional. Tingginya pertumbuhan terutama oleh kembali meningkatnya produksi konsentrat tembaga setelah mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pertumbuhan konsumsi masih menjadi penyebab utama pertumbuhan ekonomi NTB.

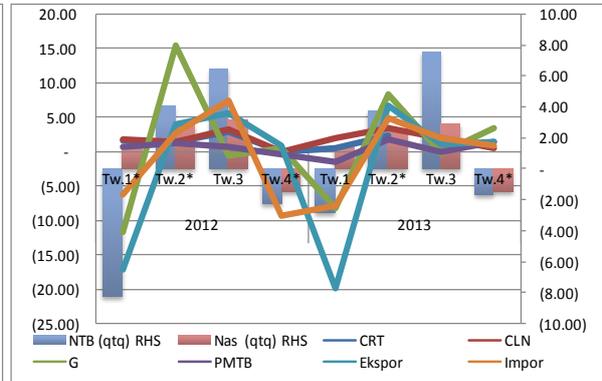
Secara triwulanan, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Namun demikian, berdasarkan indikator pembentuknya, baik konsumsi rumah tangga dan pemerintah, investasi maupun ekspor impor masih mengalami kenaikan. Penurunan ekonomi lebih disebabkan oleh penurunan perubahan stok yang cukup signifikan, sehingga ekonomi mengalami penurunan.

Grafik 1.8
Pertumbuhan Ekonomi Dari Sisi Permintaan
Secara Tahunan



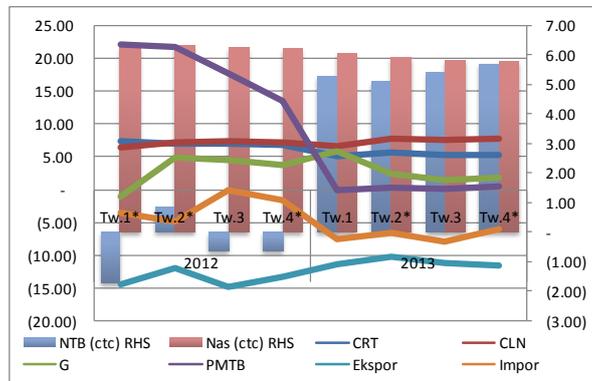
Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 1.9
Pertumbuhan Ekonomi Dari Sisi Permintaan
Secara Triwulanan



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 1.10
Pertumbuhan Ekonomi Dari Sisi Permintaan
Secara Kumulatif



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

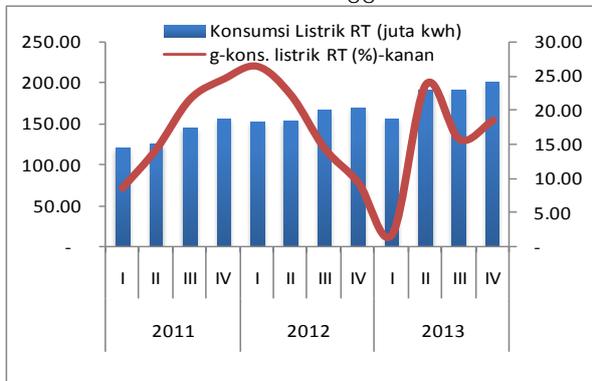
Berdasarkan pencapaian kumulatif hingga Triwulan IV, pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya kenaikan sebesar 5,69% terutama didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, lembaga nirlaba dan pemerintah. Kinerja investasi juga mulai menunjukkan perbaikan dengan bertumbuh 0,47% (yoy) dibanding kumulatif inflasi tahun sebelumnya.

1.2.1 Konsumsi

Secara triwulanan, aktivitas konsumsi rumah tangga pada Triwulan IV 2013 mengalami pelambatan pertumbuhan dibanding triwulan sebelumnya. Pelambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga lebih disebabkan oleh telah berakhirnya momen perayaan hari raya Idul Fitri yang

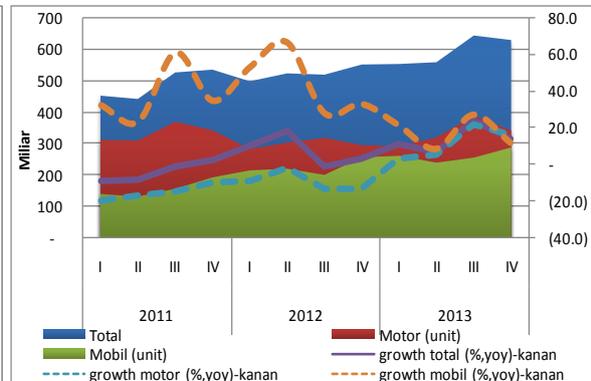
secara nasional juga mempengaruhi peningkatan konsumsi secara signifikan. Di Provinsi NTB, pengaruh hari raya agama islam memiliki pengaruh yang relatif lebih besar disebabkan oleh demografi penduduk yang 96% beragama islam, sehingga perayaan hari raya berasa lebih meriah. Masih bertumbuhnya konsumsi terutama disebabkan oleh adanya momen hari raya idul adha dan meningkatnya aktivitas MICE di akhir tahun. Peningkatan aktivitas tersebut tampak dari indikator total konsumsi listrik, pertumbuhan kredit konsumsi dan indeks keyakinan konsumen yang masih menunjukkan adanya peningkatan. Sedangkan pelambatan pertumbuhan tampak dari pembelian kendaraan bermotor yang relatif tumbuh melambat dibanding triwulan sebelumnya, yang menunjukkan pelambatan konsumsi sektor barang tersier.

Grafik 1.11
Perkembangan Konsumsi Listrik Rumah Tangga



Sumber: PLN, diolah

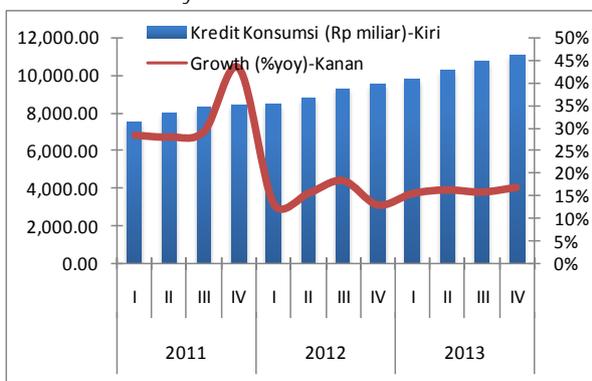
Grafik 1.12
Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor



Sumber: Dispenda NTB, diolah

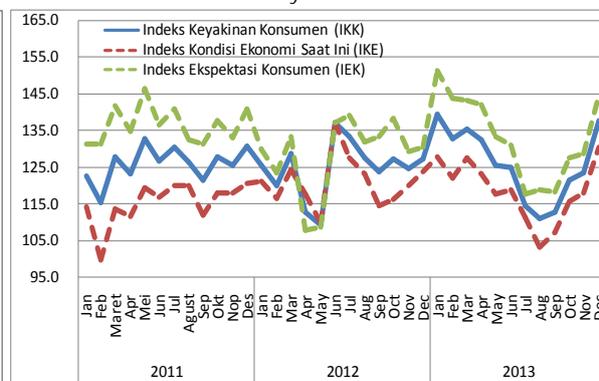
Berdasarkan data bulanan, juga tampak terjadi pelambatan pertumbuhan konsumsi listrik di bulan Oktober-Desember 2013 dibanding bulan sebelumnya. Penurunan konsumsi kendaraan terutama terjadi pada penjualan kendaraan roda dua, sedangkan penjualan mobil masih menunjukkan adanya peningkatan yang menunjukkan adanya peningkatan penduduk golongan menengah ke atas di Provinsi NTB.

Grafik 1.13
Penyaluran Kredit Konsumsi



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.14
Indeks Keyakinan Konsumen



Sumber: Bank Indonesia, diolah

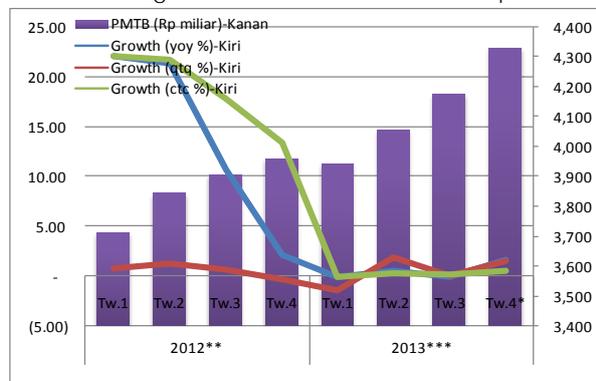
Pertumbuhan kredit konsumsi tampak stabil menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan kondisi daya beli yang relatif tumbuh stabil. Peningkatan keyakinan konsumen terutama disebabkan oleh peningkatan ekspektasi penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja. Adanya kenaikan UMK yang cukup moderat dinilai mampu mendorong bertumbuhnya ketersediaan lapangan kerja.

1.2.2 Investasi

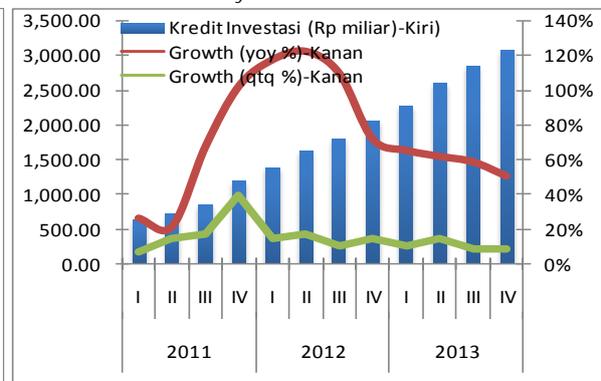
Aktivitas investasi di triwulan IV 2013 mengalami kenaikan dibanding triwulan sebelumnya. Tingginya investasi terutama disebabkan oleh meningkatnya pencairan investasi pemerintah dan investasi baru swasta mendekati akhir tahun 2013. Tingginya realisasi pemerintah di akhir tahun lebih disebabkan oleh proses pencairan proyek yang sebagian besar berada di akhir tahun dan atau beberapa proyek memang baru jalan di tengah tahun, sehingga realisasi proyek baru selesai di akhir tahun 2013.

Secara kumulatif, nilai investasi di Provinsi NTB hanya bertumbuh 0,47% (yoy). Pendorong pertumbuhan investasi terutama terjadi di triwulan IV 2013 yang mampu tumbuh 1,39% (qtq) dibanding triwulan sebelumnya dan atau tumbuh 1,64% (yoy) dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya. Total nilai investasi di triwulan IV 2013 sebesar 4,33 triliun rupiah. Berdasarkan data total belanja modal pemerintah, di sepanjang triwulan IV, telah dicairkan belanja modal sebesar 2,47 triliun rupiah, dengan pencairan terbesar berasal dari dana APBN sebesar 1,49 triliun dan pencairan investasi pemerintah kabupaten/ kota dengan realisasi sebesar 751,78 milyar rupiah. Berdasarkan data BKPM, total investasi di triwulan IV 2013 sebesar 1,49 triliun rupiah dengan penyumbang terbesar investasi berasal dari penanaman modal asing dengan nilai investasi mencapai 1,4 triliun rupiah. Adapun Investasi lainnya berasal dari investasi pelaku usaha eksisting yang ada di Provinsi NTB.

Grafik 1.15
Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto



Grafik 1.16
Penyaluran Kredit Investasi

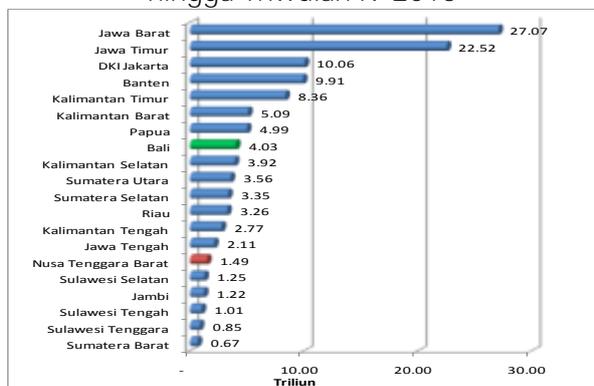


Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Pelambatan investasi, tampak dari pertumbuhan kredit investasi yang cenderung melambat dalam 1 tahun terakhir. Walaupun secara tahunan, pertumbuhan kredit investasi masih bertumbuh di atas 40%, namun pertumbuhan kredit terus mengalami pelambatan hingga triwulan IV 2013. Konsumsi semen juga mengalami penurunan cukup besar dibanding tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya penurunan pembangunan perumahan dan bangunan.

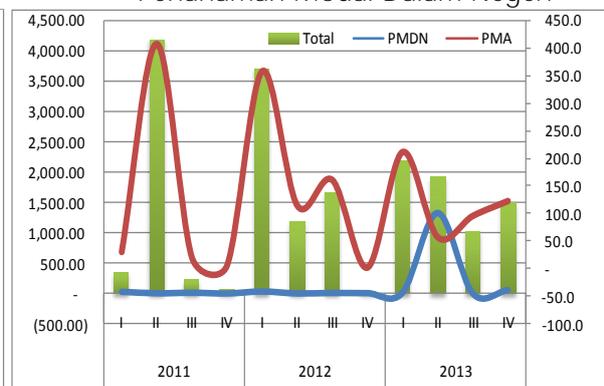
Berdasarkan data peringkat investasi BKPM, peringkat investasi Provinsi NTB mengalami penurunan dibanding triwulan sebelumnya yaitu dari peringkat 13 nasional menjadi peringkat 15 nasional. Namun demikian, secara nominal, nilai investasi swasta mengalami peningkatan dibanding triwulan sebelumnya.

Grafik 1.17
Peringkat Realisasi Ijin Investasi di Indonesia
hingga Triwulan IV 2013



Sumber : BKPM, diolah

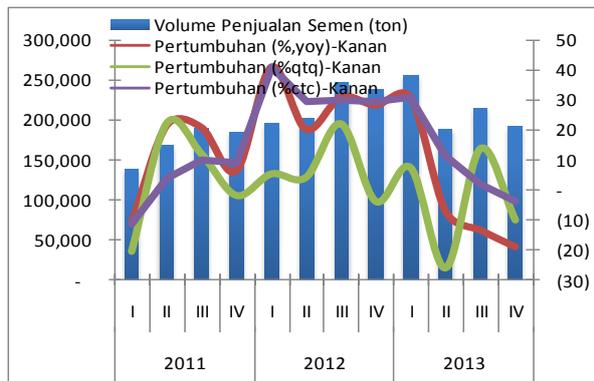
Grafik 1.18
Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing dan
Penanaman Modal Dalam Negeri



Sumber : BKPM, diolah

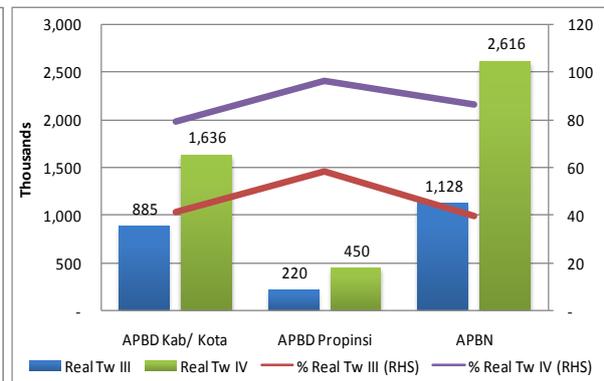
Membbaiknya investasi juga tampak dari realisasi belanja modal pemerintah di triwulan IV 2013 yang mengalami kenaikan signifikan dibanding triwulan sebelumnya. Peningkatan investasi terutama berasal dari terealisasinya proyek investasi di triwulan IV maupun berupa pembayaran atas proyek yang sudah berjalan. Tingginya investasi pemerintah terutama berasal dari pembangunan proyek MP3EI yang sedang berjalan seperti pembangunan waduk Pandan Duri, penanganan jalan dari Bangau- Labuan Bajo dan pengembangan *cruise port* Lembar. Pembangunan waduk Rababaka complex masih sebatas pembebasan lahan dan *ground breaking* di akhir tahun 2013, dan pembangunan waduk Bintang Bano serta waduk Mujur II masih dalam tahap studi kelayakan. Adapun perkembangan mega proyek pariwisata kawasan Mandalika berupa pembangunan jalan sepanjang 4,5 km namun masih terhalang permasalahan tanah dan demo kelompok masyarakat tertentu. Apabila proyek pariwisata kawasan Mandalika dapat berjalan sukses, maka potensi akselerasi ekonomi yang dapat dicapai provinsi NTB akan sangat besar.

Grafik 1.19
Perkembangan Volume Penjualan Semen



Sumber: Asosiasi Semen Indonesia, diolah

Grafik 1.20
Realisasi Belanja Modal Pemerintah Hingga
Triwulan IV 2013



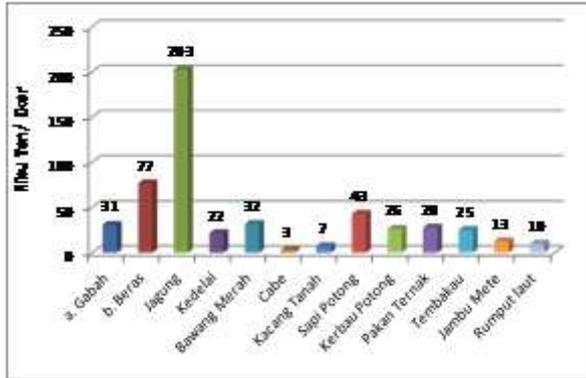
Sumber : BPS

1.2.3 Ekspor Impor

Secara tahunan, nilai ekspor dan impor masih menunjukkan adanya penurunan dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya. Namun demikian, secara triwulanan, ekspor impor provinsi NTB sudah mulai menunjukkan adanya pertumbuhan sejak mencapai produksi terendah di triwulan I 2013. Komoditas ekspor utama Provinsi NTB berasal dari ekspor komoditas konsentrat tembaga yang dikirimkan baik langsung ke luar negeri maupun pengiriman domestik ke PT Smelting. Di sepanjang tahun 2013, 75,71% produksi PT NNT ditujukan untuk pasar ekspor dan hanya 24,29% produksi dikirim ke pasar domestik. Dari total pengiriman ke luar negeri, ekspor komoditas konsentrat tembaga menyumbang hingga 98,22% dari total ekspor luar negeri provinsi NTB. Komoditas ekspor unggulan lainnya adalah mutiara dengan pangsa ekspor NTB sepanjang tahun 2013 sebesar 1,5% dari total ekspor ke luar negeri NTB.

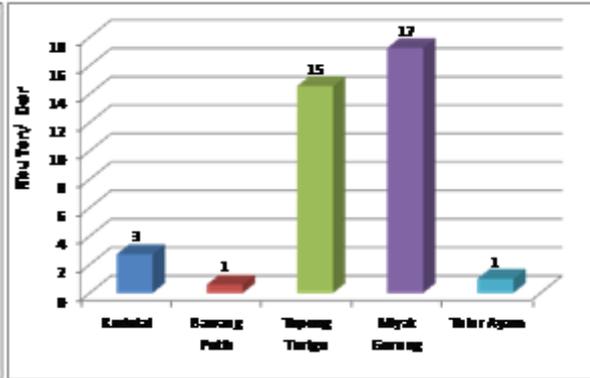
Pengiriman ekspor antar pulau didominasi oleh pengiriman produk pertanian. Tujuan utama ekspor antar pulau adalah provinsi Jawa Timur dengan komoditas unggulan berupa beras, tembakau, jagung, sapi, rumput laut, kedelai dan kacang-kacangan. Bahkan komoditas bawang merah Provinsi NTB saat ini relatif menguasai pasar di kawasan timur Indonesia. Pengiriman antar pulau komoditas pertanian juga dikirim hingga Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jakarta bahkan pulau Sumatera untuk komoditas sapi. Berdasarkan pemantauan Badan Ketahanan Pangan, total nilai ekspor komoditas pangan mencapai lebih dari empat triliun per tahun, belum termasuk ekspor antar pulau yang tidak terdeteksi karena menggunakan jasa penyeberangan (ASDP).

Grafik 1.21
Daftar Komoditas Pangan Utama yang Keluar
Provinsi NTB



Sumber: BKP Provinsi NTB, diolah

Grafik 1.22
Daftar Komoditas Pangan Utama yang Keluar
Provinsi NTB

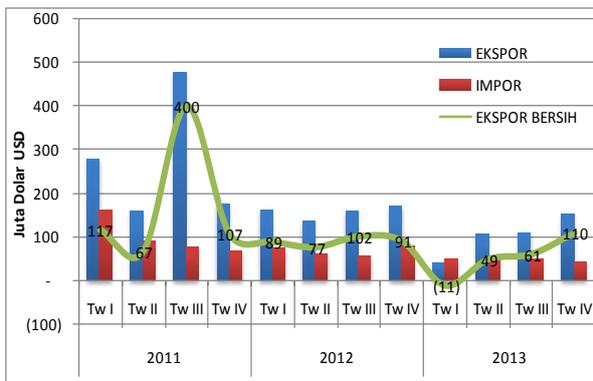


Sumber : BKP Provinsi NTB, diolah

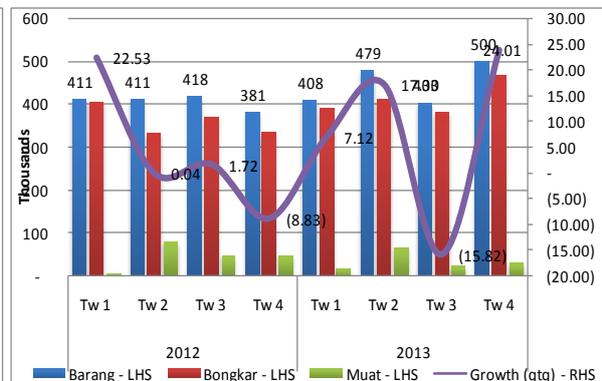
Komoditas impor provinsi NTB lebih didominasi oleh kebutuhan non pangan, seperti kendaraan, sandang, peralatan konstruksi, makanan jadi dan produk lainnya. Komoditas pangan yang diimpor terutama komoditas tepung terigu dan minyak goreng. Komoditas lainnya adalah kedelai bawang putih dan telur ayam.

Ekspor luar negeri provinsi NTB di tahun 2013 mengalami net ekspor hingga lebih dari dua trilyun rupiah. Berdasarkan karakteristiknya, ekspor luar negeri di Provinsi NTB selalu positif dikarenakan impor yang dilakukan hanya berupa bahan baku penunjang produksi PT NNT, dan hasil aktivitas tambang diekspor ke luar negeri. Namun demikian, provinsi NTB pernah satu kali mengalami net impor di triwulan I 2013 dikarenakan oleh produksi PT NNT yang mengalami titik terendah produksi, sedangkan ekspor mutiara dan kerajinan yang lain tidak mampu menutupi rendahnya ekspor dikarenakan pangsa produk lain yang relatif masih sangat kecil.

Grafik 1.23
Neraca Ekspor Impor Provinsi NTB Triwulan IV
2013



Grafik 1.24
Arus Bongkar Muat di Pelabuhan Lembar



Sumber: BPS Provinsi NTB dan Pelindo III, diolah

Dibanding triwulan sebelumnya, aktivitas ekspor di triwulan IV 2013 mengalami kenaikan sebesar 1,33% (qtq) lebih tinggi dibanding pertumbuhan di triwulan sebelumnya yang

sebesar 1,09% (qtq). Peningkatan ekspor terutama disebabkan oleh meningkatnya ekspor konsentrat tembaga di bulan Desember 2013 yang naik signifikan, mengantisipasi adanya penerapan bea keluar yang tinggi untuk ekspor produk konsentrat tembaga. Secara tahunan, nilai ekspor triwulan IV 2012 masih mengalami penurunan sebesar 12,50% (yoy) dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif sepanjang tahun 2013, nilai ekspor masih mengalami penurunan hingga 11,53% dibanding tahun sebelumnya.

Di tahun 2013, Provinsi NTB mengalami net impor pertama dalam 10 tahun terakhir dikarenakan oleh rendahnya ekspor yang dilakukan. Penurunan ekspor yang cukup besar tidak diimbangi oleh pelambatan impor yang terjadi, sehingga sejak triwulan I 2013, Provinsi NTB mengalami net impor pertama hingga 225 milyar. Di tahun 2013, nilai impor NTB mengalami penurunan hingga 6,18% (yoy) dibanding tahun sebelumnya. Dengan laju penurunan impor yang tidak lebih besar dibanding penurunan ekspor, maka defisit impor provinsi NTB cenderung semakin besar.

Berdasarkan karakteristik barang yang diimpor, sebagian besar merupakan barang non pangan, meliputi bahan baku pembangunan hingga kebutuhan sandang, sehingga adanya penurunan impor menunjukkan adanya pelambatan pertumbuhan konsumsi dan investasi di provinsi NTB di sepanjang tahun 2013. Untuk meningkatkan konsumsi dan investasi, maka dalam jangka pendek, impor mutlak diperlukan terlebih dalam penyediaan barang modal. Dalam jangka panjang, juga perlu dijajagi pembangunan industri yang sekiranya menguntungkan secara ekonomi dan sesuai dengan karakter wilayah provinsi NTB sehingga ketergantungan impor barang konsumsi antar daerah dapat diminimalisir. Sedangkan tingginya impor barang modal, dapat diimbangi dengan adanya peningkatan ekspor yang terjadi.

Grafik 1.25
Perkembangan Volume Ekspor (dlm juta)



Grafik 1.26
Perkembangan Volume Impor (dlm juta)



Berdasarkan data ekspor impor luar negeri, sebagian besar ekspor provinsi NTB masih berupa bahan baku yaitu konsentrat tembaga. Melalui undang-undang Minerba, diharapkan terjadi penghiliran industri, sehingga nilai tambah atas hasil tambang yang dihasilkan dapat menjadi lebih besar. Dampak langsung bagi provinsi NTB adalah ekspor luar negeri provinsi NTB

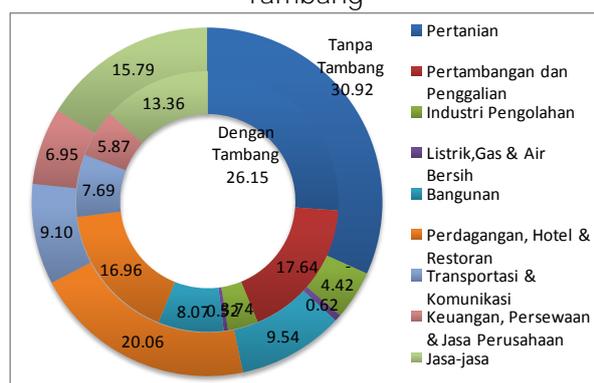
akan berkurang sangat signifikan, namun dalam perhitungan PDRB tidak akan terlalu berpengaruh karena komoditas ekspor tersebut nantinya hanya akan dialihkan dalam ekspor antar pulau. Permasalahannya saat ini adalah kapasitas produsen hilir dalam negeri yang kurang mencukupi, sehingga lebih dari 50% produksi konsentrat tembaga dalam negeri tidak akan dapat terekspor, yang berarti akan terjadi penurunan produksi dalam jumlah cukup besar. Pembahasan lebih lengkap akan kami sampaikan dalam boks 1.

Komoditas impor luar negeri provinsi NTB lebih didominasi oleh impor bahan baku penunjang produksi tambang konsentrat tembaga. Nilai impor luar negeri cenderung terus mengalami penurunan searah dengan adanya penurunan produksi tambang.

1.3 SISI PENAWARAN

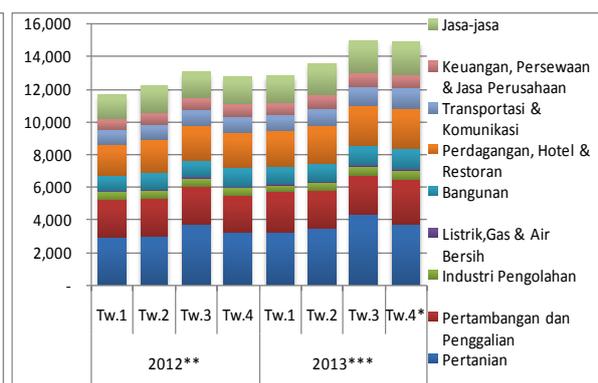
Secara triwulanan, realisasi pertumbuhan ekonomi di provinsi NTB di Triwulan IV 2013 baik dengan tambang maupun tanpa tambang menunjukkan adanya penurunan dibanding triwulan sebelumnya sebesar 1,66% (qtq) dan 3,73% (qtq). Penurunan pertumbuhan ekonomi terutama disebabkan penurunan sektor pertanian di triwulan IV 2013 yang turun hingga 14,11% (qtq) karena sudah selesainya panen raya komoditas unggulan seperti padi, jagung dan tembakau. Adanya panen raya kedelai di bulan Oktober 2013, dan tingginya penjualan sapi di bulan Oktober juga tidak terlalu berdampak dalam meningkatkan nilai tambah sektor pertanian. Adanya musim penghujan dimanfaatkan petani untuk memulai tanam beberapa komoditas unggulan di bulan Desember dan buruknya cuaca akibat hujan dan angin menyebabkan hasil tangkapan ikan laut juga mengalami penurunan.

Grafik 1.27
Porsi PDRB Sektorial Dengan dan Tanpa Tambang



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 1.28
PDRB Berdasarkan Sektor Ekonomi

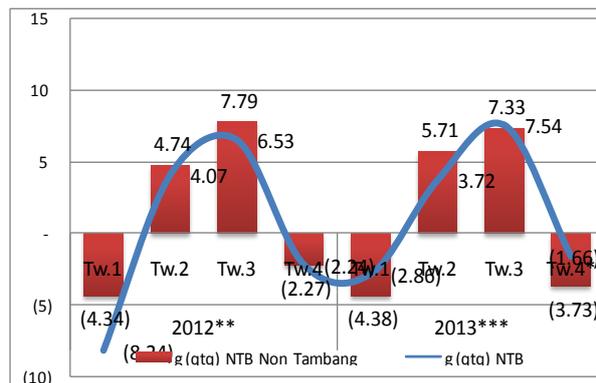


Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Secara total, kontribusi sektor pertanian di tahun 2013 memiliki kontribusi hingga 26,15% dari total perekonomian, diikuti dengan kontribusi pertambangan sebesar 17,64%, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 16,96%, sektor jasa-jasa (13,36%) dan sektor bangunan sebesar 8,07%. Apabila penurunan produksi tambang terus terjadi, maka di tahun 2014, kontribusi sektor pertambangan dapat menurun, digantikan sektor perdagangan yang

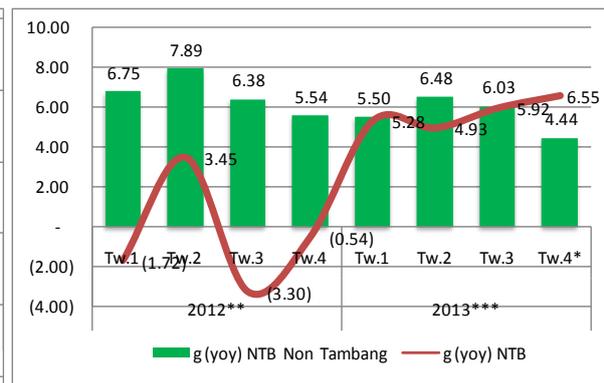
bertumbuh cukup besar di tiap tahunnya. Tanpa tambang, sektor pertanian memberikan kontribusi hingga 30,92%, disusul oleh pertanian dengan kontribusi 20,06% dan sektor jasa-jasa dengan kontribusi sebesar 15,79%. Secara nominal, pertumbuhan ekonomi juga relatif menurun dibanding triwulan sebelumnya dengan pendorong penurunan pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian.

Grafik 1.29
Pertumbuhan PDRB Sektoral Triwulanan
Triwulan IV 2013



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 1.30
Pertumbuhan PDRB Sektoral Tahunan Triwulan IV
2013



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi di triwulan IV relatif tumbuh lebih tinggi dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya. Tingginya pertumbuhan ekonomi terutama disebabkan oleh membaiknya produksi tambang, sehingga pertumbuhan ekonomi dengan tambang meningkat cukup tinggi. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi tanpa tambang menunjukkan adanya pelambatan dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya dengan bertumbuh 4,44% (yoy) bandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya yang sebesar 5,54% (yoy). Hal ini menunjukkan pertumbuhan riil ekonomi yang menunjukkan adanya pelambatan.

Dibanding tahun sebelumnya, pertumbuhan sektor pertambangan mampu tumbuh hingga 18,86% (yoy), menjadikan pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan sebagai pertumbuhan ekonomi tertinggi di triwulan IV 2013. Listrik, air dan gas mengalami pertumbuhan tertinggi kedua secara tahunan seiring dengan bertambahnya pasokan listrik di provinsi NTB.

Secara kumulatif tahun 2013, sektor listrik, gas dan air bersih mengalami pertumbuhan tertinggi hingga 9,93% (yoy), diikuti oleh sektor keuangan (8,18%), perdagangan, hotel dan restoran sebesar 7,94% (yoy), pertambangan dan pernggalian dengan pertumbuhan sebesar 6,73% (yoy) dan sektor transportasi dan komunikasi dengan pertumbuhan mencapai 6,50% (yoy).

Tabel 1.2
Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Penawaran

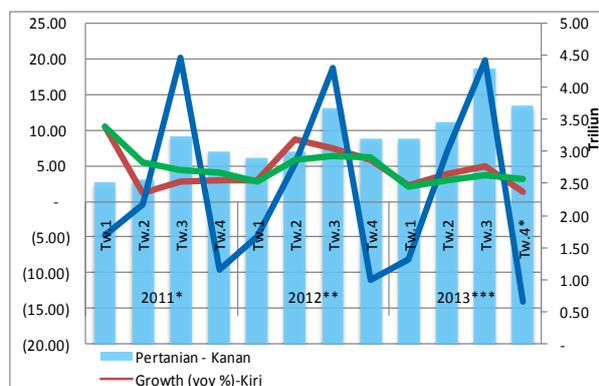
Periode	yoy		2012**	2013***		Bobot	yoy	qtq	ctc
	2012	2013	Tw.4	Tw.3	Tw.4				
Pertanian	12,831.82	14,716.44	3,212.48	4,308.51	3,717.33	26.15	1.27	(14.11)	3.11
Pertambangan dan Penggalian	9,228.51	9,930.05	2,285.96	2,416.51	2,766.48	17.64	18.86	12.29	6.73
Industri Pengolahan	1,947.80	2,102.85	480.73	554.73	540.61	3.74	5.98	(4.02)	4.01
Listrik, Gas & Air Bersih	252.86	293.10	65.91	74.66	80.07	0.52	11.58	3.06	9.93
Bangunan	4,116.78	4,538.83	1,131.30	1,169.26	1,246.08	8.07	0.87	4.12	5.08
Perdagangan, Hotel & Restoran	8,302.15	9,545.45	2,168.34	2,480.72	2,507.88	16.96	5.94	(0.31)	7.94
Transportasi & Komunikasi	3,808.39	4,329.33	1,018.94	1,137.68	1,200.85	7.69	6.66	3.99	6.50
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	2,873.32	3,305.97	741.47	861.78	869.44	5.87	7.73	(0.88)	8.18
Jasa-jasa	6,318.07	7,515.96	1,670.52	1,949.05	1,983.94	13.36	7.43	0.82	5.71
NTB	49,679.69	56,277.97	12,775.66	14,952.91	14,912.69	100.00	6.55	(1.66)	5.69
NTB tanpa Tambang	41,546.26	47,593.32	10,787.79	12,851.01	12,487.27	84.57	4.44	(3.73)	5.61
Nasional	8,241,863.00	9,081,670.74	2,095,693	2,375,300	2,341,571	0.62	5.72	(1.42)	5.78

Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

1.3.1 Pertanian

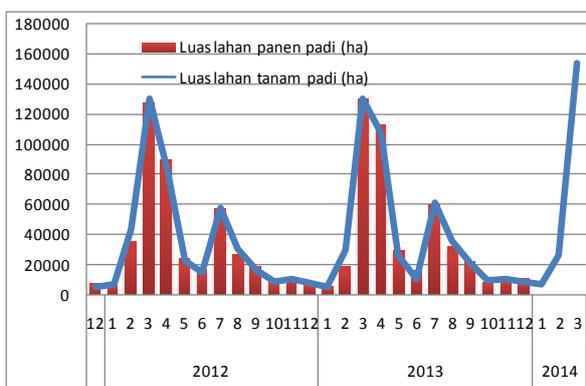
Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian triwulan IV 2013 mengalami penurunan hingga 14,11% (qtq) dibanding triwulan sebelumnya. Sudah berakhirnya panen raya komoditas unggulan seperti padi, jagung dan tembakau menjadi penyebab utama penurunan nilai tambah ekonomi di sektor pertanian. Peningkatan produksi saat ini yang terjadi berupa panen raya kedelai di bulan Oktober maupun panen komoditas hortikultura. Namun demikian, sumbangan komoditas tersebut ke dalam perekonomian tidak terlalu besar, sehingga nilai tambah ekonomi di sektor pertanian tetap mengalami penurunan. Kondisi cuaca yang buruk juga menurunkan hasil tangkapan ikan.

Grafik 1.31
PDRB Sektor Pertanian



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 1.32
Luas Lahan dan Luas Tanam Padi Triwulan IV 2013

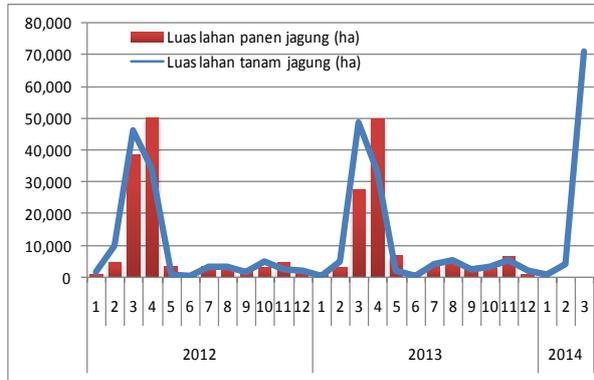


Sumber : Dinas Pertanian Provinsi NTB, diolah

Berdasarkan data luas tanam tanaman pangan, produksi pangan diperkirakan baru akan mengalami kenaikan di triwulan I 2014. Produksi padi dan jagung diperkirakan akan meningkat tinggi bila dibandingkan dengan data tanam padi dan jagung yang naik signifikan. Kenaikan tertinggi terutama pada tanaman jagung yang naik signifikan seiring dengan program tanam jagung di Kabupaten Dompu yang berencana meningkatkan luas lahan tanam jagung hingga 40 ribu hektar. Pertumbuhan produktivitas kedelai juga meningkat cukup signifikan seiring dengan penunjukkan provinsi NTB sebagai salah satu lumbung kedelai nasional. Namun

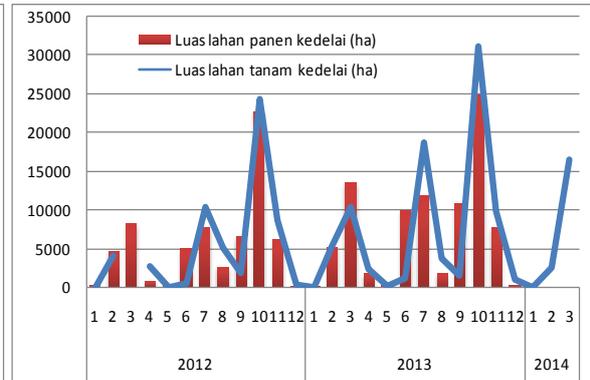
demikian, adanya pembatasan pupuk diperkirakan dapat menghambat tercapainya target produksi tanaman pangan dikarenakan oleh kurangnya unsur hara tanah. Adanya kelangkaan pasokan pupuk di bulan Desember 2013 dikhawatirkan dapat mempengaruhi produktivitas tanaman pangan.

Grafik 1.33
Luas Lahan dan Luas Tanam Jagung Triwulan IV 2013



Sumber: Dinas Pertanian Provinsi NTB, diolah

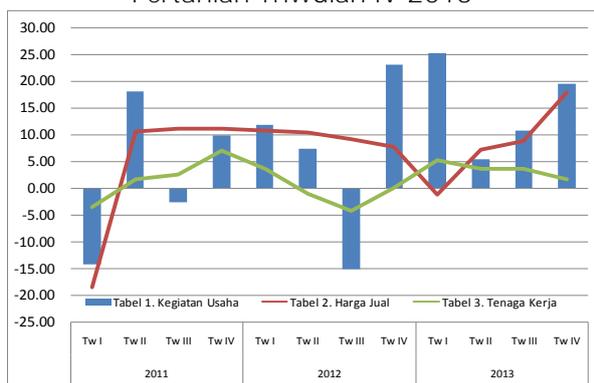
Grafik 1.34
Luas Lahan dan Luas Tanam Kedelai Triwulan IV 2013



Sumber: Dinas Pertanian Provinsi NTB, diolah

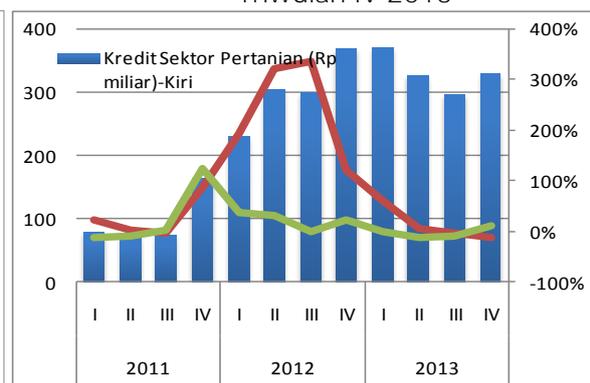
Berdasarkan data kredit pertanian, pembangunan pertanian justru menunjukkan adanya tren penurunan. Dengan jumlah kredit yang relatif kecil, penurunan kredit dinilai tidak terlalu berdampak. Walaupun demikian, turunnya penyaluran kredit dapat menghambat investasi swasta dalam pengembangan pertanian di provinsi NTB.

Grafik 1.35
Realisasi Survei Kegiatan Dunia Usaha Sektor Pertanian Triwulan IV 2013



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.36
Nilai dan Pertumbuhan Kredit Sektor Pertanian Triwulan IV 2013

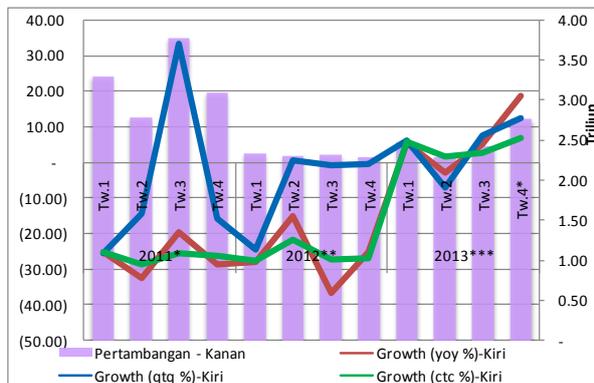


1.3.2 Pertambangan

Kinerja sektor pertambangan terus menunjukkan perbaikan kinerja di Triwulan IV 2013. Secara triwulanan, kinerja sektor pertambangan mengalami peningkatan hingga 12,29% (qtq) dibanding triwulan sebelumnya. Dibandingkan tahun sebelumnya, kinerja sektor pertambangan bahkan bertumbuh hingga 18,86% (yoy) dibanding triwulanan yang sama tahun sebelumnya, dan secara tahunan, sektor pertambangan mampu bertumbuh hingga 6,73% (yoy).

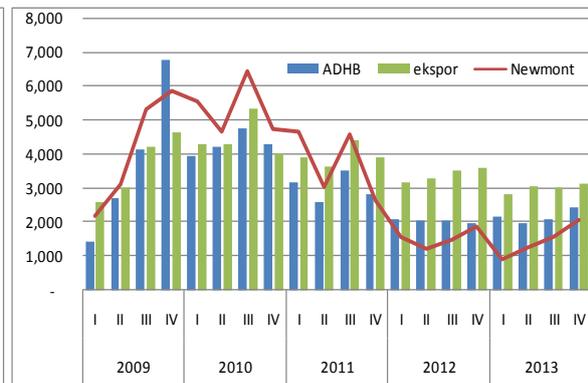
Perbaikan kinerja sektor pertambangan terutama selain disebabkan oleh adanya peningkatan kinerja tambang, juga disebabkan oleh adanya antisipasi terhadap pelarangan ekspor konsentrat. Hal ini tampak dari tingginya ekspor konsentrat di bulan Desember yang meningkat signifikan dibanding bulan sebelumnya.

Grafik 1.37
PDRB Provinsi NTB Sektor Pertambangan Triwulan IV 2013



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 1.38
Perbandingan Nilai Penjualan Konsentrat Tembaga dibanding PDRB Pertambangan dan Ekspor

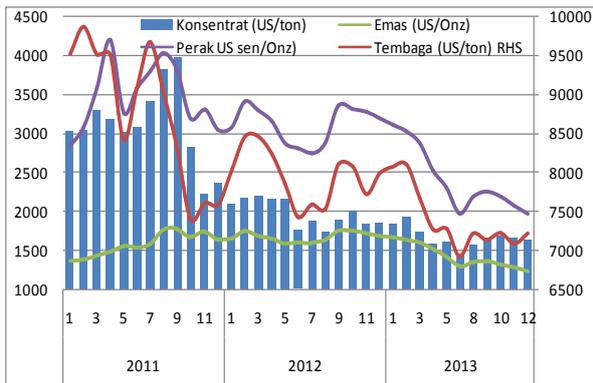


Sumber: PT Newmont, diolah

Harga jual konsentrat tembaga masih memiliki kecenderungan menurun namun mulai mengalami pembalikan arah sejak akhir triwulan II 2013. Relatif stabilnya harga terutama disebabkan oleh relatif stabilnya harga tembaga di pasar dunia, sedangkan harga emas dan perak masih mengalami penurunan. Total pinjaman di sektor pertambangan mengalami peningkatan di triwulan I-III 2013. Namun demikian, total pinjaman di triwulan IV kembali melambat dibandingkan bulan sebelumnya. Adapun total kredit pertambangan mencapai sebesar 2,91 triliun dengan tujuan utama di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat.

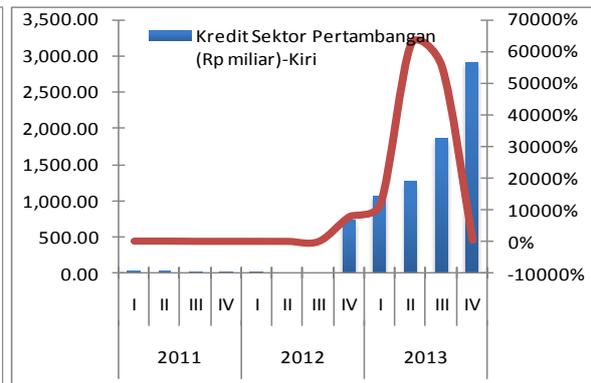
Grafik 1.39

Harga konsentrat dan komoditas Internasional Emas, Perak dan Tembaga



Grafik 1.40

Penyaluran Kredit Perbankan di Nusa Tenggara Barat ke Sektor Pertambangan



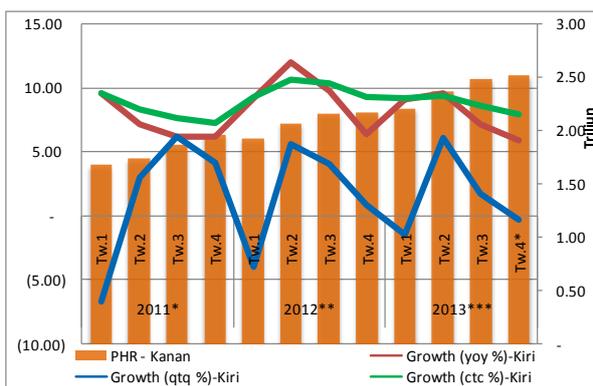
Sumber: PT Newmont dan Bloomberg, diolah

1.3.3 Perdagangan, Hotel dan Restoran

Pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan, hotel dan restoran justru masih menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi walaupun mengalami pelambatan dibanding triwulan sebelumnya. Secara triwulanan, pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami penurunan sebesar 0,31% (qtq). Namun demikian secara tahunan masih bertumbuh sebesar 5,94% (yoy) dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya. Di sepanjang tahun 2013, PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran mampu tumbuh hingga 7,31% (yoy) dibanding tahun sebelumnya, terutama didorong oleh pertumbuhan tinggi di triwulan II 2013.

Grafik 1.41

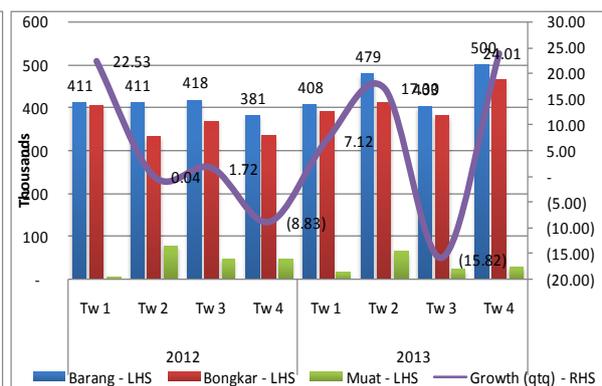
PDRB Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan Pertumbuhannya



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 1.42

Aktivitas Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Lembar

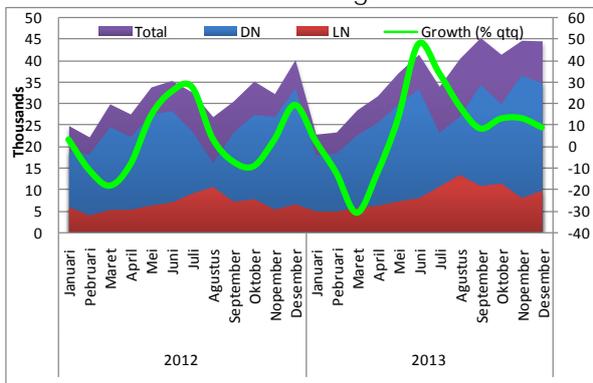


Sumber : BPS Provinsi NTB dan Pelindo III, diolah

Berdasarkan data pengiriman barang di pelabuhan Lembar, didapatkan bahwa total pengiriman barang di pelabuhan Lembar mengalami kenaikan hingga 24,01% dan dibanding tahun sebelumnya meningkat hingga 31,16%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan

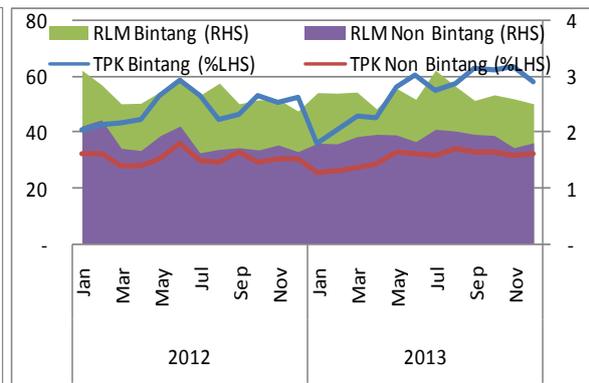
aktivitas perdagangan di triwulan IV 2013. Walaupun bisa dimungkinkan terdapat *lag* waktu penjualan antara pengiriman dan penjualan, namun *lag* penjualan dirasa tidak terlalu lama. Indikator hotel juga menunjukkan adanya kenaikan yang tampak dari jumlah kunjungan hotel berbintang di triwulan IV 2013 yang meningkat sebesar 9,12% dibanding triwulan sebelumnya. Tingkat penghunian kamar juga menunjukkan adanya kenaikan, sedangkan rata-rata lama menginap mengalami sedikit penurunan. Adanya aktivitas MICE dan peningkatan kunjungan wisatawan jelang akhir tahun menjadi pendorong utama meningkatnya aktivitas perhotelan di triwulan IV 2013.

Grafik 1.43
Jumlah Tamu yang Menginap di Hotel Berbintang



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

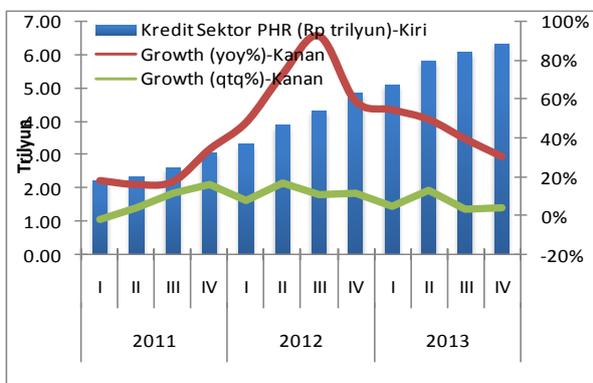
Grafik 1.44
Tingkat Penghunian Kamar dan Rata-Rata Lama Menginap Hotel



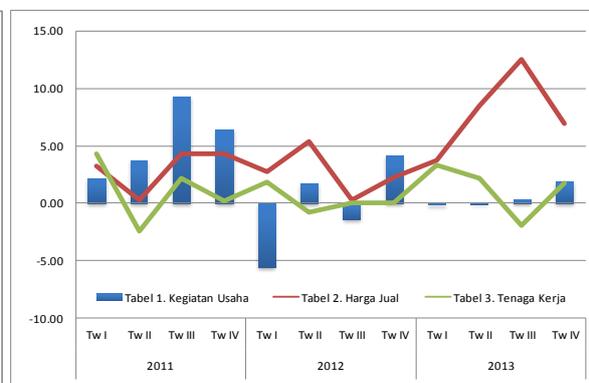
Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Data realisasi kredit sektor PHR di triwulan IV 2013 menunjukkan adanya tren pelambatan kredit. Dengan nilai kredit yang relatif besar, adanya pelambatan penghimpunan DPK dinilai menjadi salah satu alasan adanya pelambatan penyaluran kredit secara keseluruhan. Dengan adanya pelambatan DPK, maka bank menjadi lebih selektif dalam penyaluran proposal kredit yang diajukan, sehingga pertumbuhan kredit menurun. Selain itu, pelambatan impor juga mempengaruhi penyaluran kredit yang menunjukkan adanya pelambatan daya beli masyarakat.

Grafik 1.45
Penyaluran Kredit Perbankan ke Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran



Grafik 1.46
Realisasi Survei Kegiatan Dunia Usaha Sektor PHR Triwulan IV 2013



Sumber: Bank Indonesia, diolah

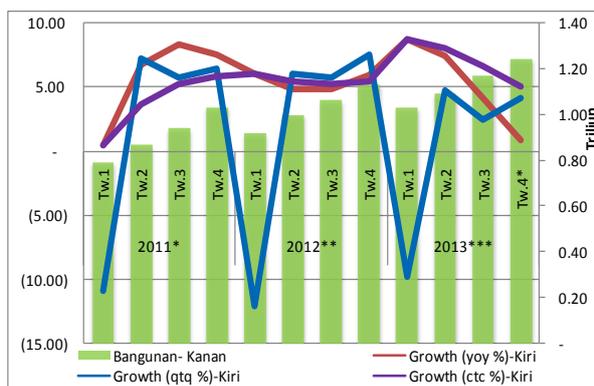
Berdasarkan hasil SKDU, realisasi kegiatan usaha di sektor perdagangan, hotel dan restoran juga masih menunjukkan adanya kenaikan walaupun tidak terlalu besar. Peningkatan aktivitas didukung oleh adanya penambahan penyerapan tenaga kerja, sedangkan harga jual relatif melambat setelah kenaikan tinggi di triwulan sebelumnya.

1.3.4 Bangunan

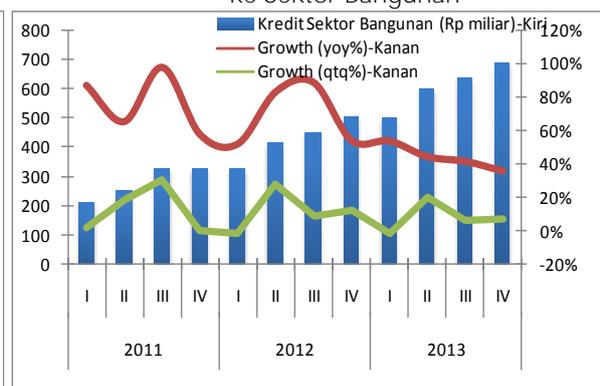
Pertumbuhan ekonomi sektor bangunan meningkat cukup besar hingga 4,12% (qtq) dibanding triwulan sebelumnya. Tingginya pencapaian disebabkan oleh banyaknya promo akhir tahun pembelian properti guna mengejar target penjualan properti. Selain itu, adanya realisasi pembangunan pemerintah yang cukup tinggi juga berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor bangunan.

Dibanding tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi sektor bangunan masih bertumbuh namun melambat dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya dengan pertumbuhan sebesar 0,87% (yoy). Di sepanjang tahun 2013, PDRB sektor bangunan bertumbuh sebesar 5,08% (yoy) dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi sektor bangunan cenderung terus melambat dalam empat tahun terakhir, setelah mengalami pertumbuhan tinggi di tahun 2009. Pelambatan pertumbuhan tampak dari realisasi penyaluran kredit yang tumbuh melambat dalam 3 tahun terakhir.

Grafik 1.47
PDRB Sektor Bangunan dan Pertumbuhannya

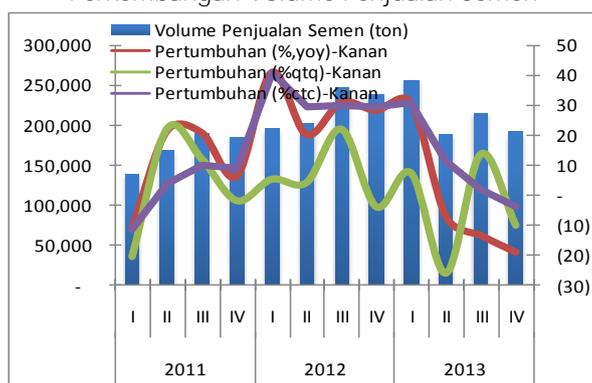


Grafik 1.48
Penyaluran Kredit Perbankan ke Sektor Bangunan



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 1.49
Perkembangan Volume Penjualan Semen



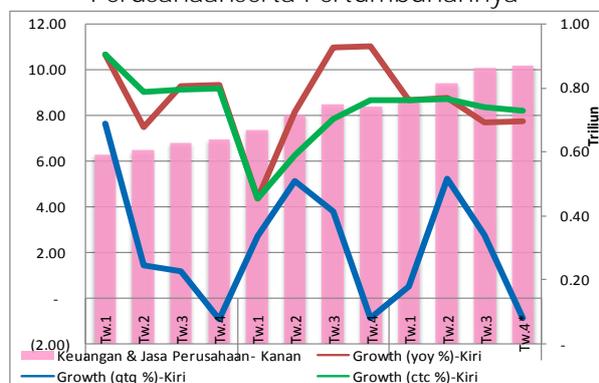
Sumber: Asosiasi Semen Indonesia, diolah

Tren pelambatan ekonomi sektor bangunan juga tampak dari penjualan semen di provinsi NTB yang masih menunjukkan adanya penurunan. Tren penurunan penjualan semen terjadi juga di sebagian besar provinsi di luar Jawa yang menunjukkan adanya pelambatan pembangunan.

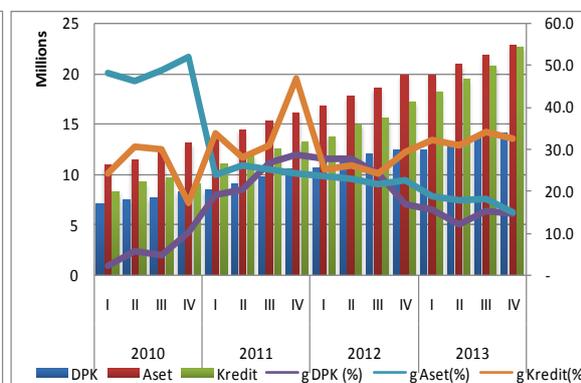
1.3.5 Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan

Pertumbuhan ekonomi di sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan masih menunjukkan adanya pertumbuhan yang cukup tinggi. Di tahun 2013, pertumbuhan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan masih mampu tumbuh hingga 8,18% (yoy), dan menjadi pertumbuhan tertinggi kedua setelah pertumbuhan sektor listrik, gas dan air bersih. Namun demikian, pelambatan pertumbuhan kredit terlihat dari semakin menurunnya pertumbuhan PDRB triwulanan dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya, yang terus menunjukkan adanya pelambatan. Adapun pelambatan penyaluran kredit secara triwulanan lebih disebabkan oleh struktur DPK yang juga cenderung menurun tajam di akhir tahun, sehingga penyaluran kredit memang cenderung melambat di akhir tahun.

Grafik 1.50
PDRB Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan serta Pertumbuhannya



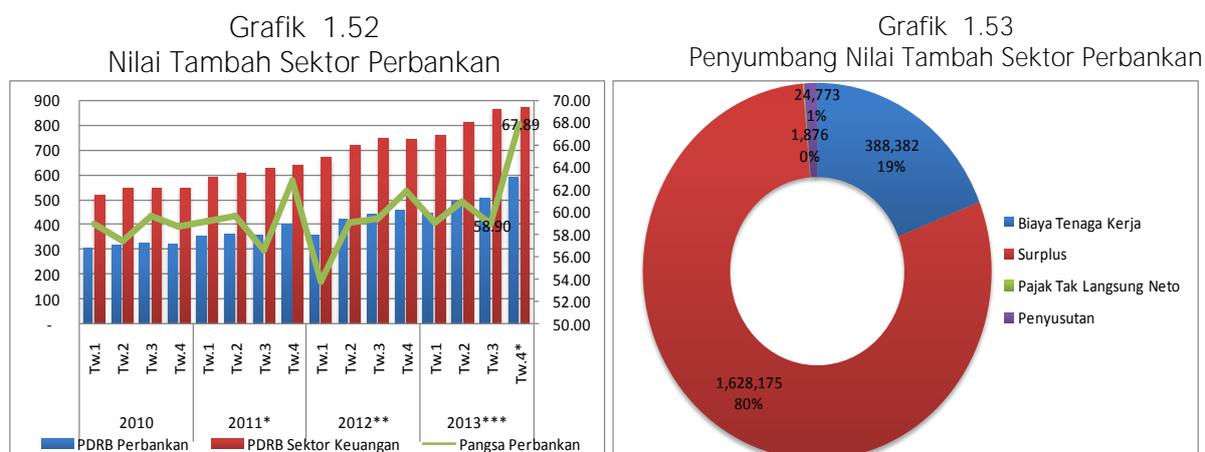
Grafik 1.51
Perkembangan Kondisi Perbankan



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Berdasarkan olah data perbankan, baik nilai kredit, total asset maupun penghimpunan DPK masih mengalami kenaikan. Namun demikian, pertambahan total asset dan DPK menunjukkan adanya pelambatan. Hal ini terutama disebabkan oleh melambatnya perolehan DPK dalam tiga tahun terakhir, sehingga asset yang berhasil dihimpun juga mengalami pelambatan. Total kredit yang disalurkan masih mampu tumbuh cukup tinggi lebih disebabkan oleh penyaluran kredit dari kantor pusat bank nasional atau dari wilayah lain, sehingga kredit masih mampu bertumbuh cukup tinggi. Bahkan total kredit berdasarkan alokasi proyek yang disalurkan di provinsi NTB pada triwulan IV 2013 memiliki nilai hampir sama dengan total asset perbankan di provinsi NTB yang bernilai 22,74 triliun.

Berdasarkan sub sektor pembentuk PDRB sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor perbankan menunjukkan peran yang semakin meningkat. Peran sektor perbankan di triwulan IV 2013 mengalami peningkatan yang cukup besar dengan porsi mencapai 67,89% dari total PDRB sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dibanding pangs sektor perbankan di triwulan III 2013 yang hanya berkontribusi sebesar 58,90% dari total PDRB sektoral. Dari total dua triliun nilai tambah sektor perbankan yang dihasilkan, 79,69% dihasilkan melalui keuntungan perbankan dan 19,00% diperoleh dari biaya tenaga kerja.



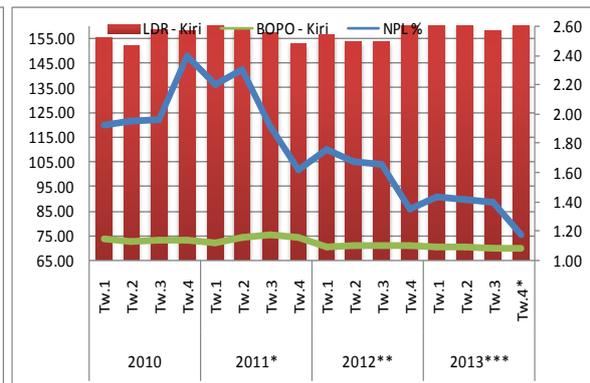
Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Tingginya kontribusi perbankan dalam PDRB sektor keuangan juga tampak dari peningkatan laba perbankan di banding tahun sebelumnya, walaupun mengalami pelambatan di triwulan IV 2013. Kondisi BOPO dan NPL yang senantiasa menurun menunjukkan kondisi perbankan di provinsi NTB yang relatif sehat.

Grafik 1.54
Perkembangan Laba Perbankan



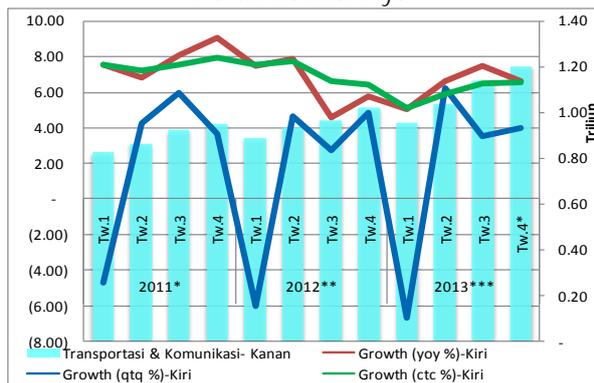
Grafik 1.55
Kinerja dan Kesehatan Perbankan



1.3.6 Transportasi dan Komunikasi

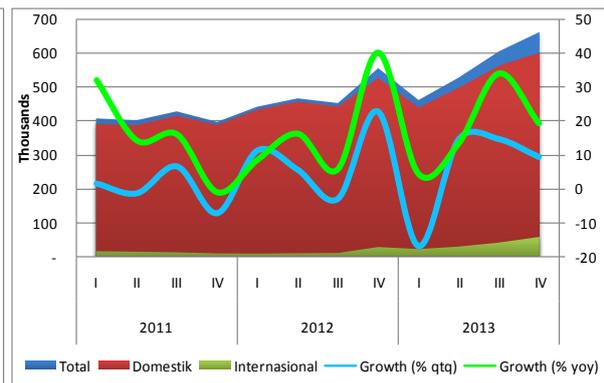
Pertumbuhan ekonomi sektor transportasi dan komunikasi menunjukkan adanya pertumbuhan dibanding triwulan sebelumnya sebesar 3,99% (qtq). Adanya peningkatan kunjungan wisatawan dan kegiatan MICE yang banyak dilakukan menjelang akhir tahun menjadi penyebab utama meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor transportasi dan komunikasi. Selain itu, ada penambahan rute penerbangan baru seperti penambahan rute domestik oleh Garuda dan penerbangan langsung ke Australia oleh Jetstar juga berpengaruh meningkatkan pertumbuhan sektor transportasi dan pariwisata provinsi NTB secara keseluruhan.

Grafik 1.56
PDRB Sektor Transportasi dan Komunikasi serta Pertumbuhannya



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 1.57
Perkembangan Arus Penumpang Angkutan Udara

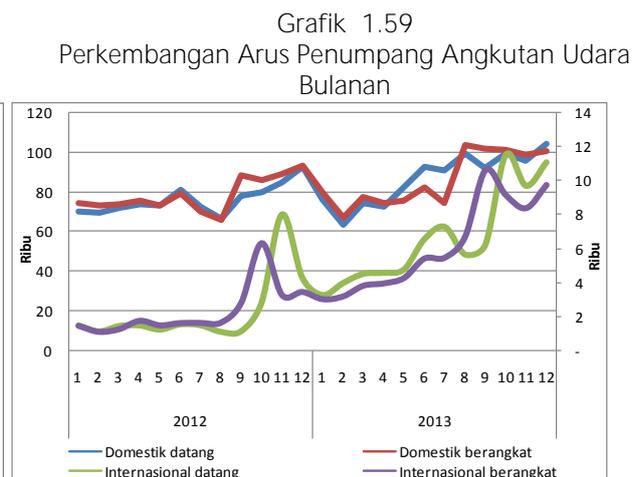
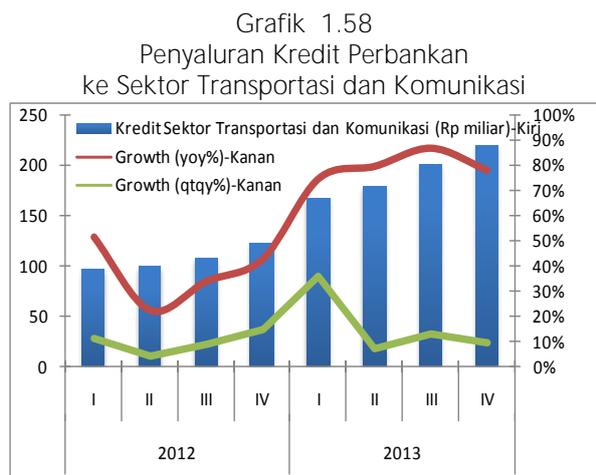


Sumber : Dinas Perhubungan, diolah

Berdasarkan data perkembangan arus penumpang angkutan udara, jumlah kunjungan masih menunjukkan adanya peningkatan yang cukup tinggi walaupun mengalami pelambatan pertumbuhan di triwulan IV 2013. Dibanding triwulan sebelumnya, pertumbuhan jumlah penumpang mampu mengalami peningkatan hingga 9,38% (qtq) walaupun melambat dibanding triwulan sebelumnya yang mampu tumbuh hingga 14,69% (qtq). Dibanding tahun

sebelumnya, jumlah penumpang angkutan udara mampu tumbuh hingga 19,22% (yoy). Tingginya pertumbuhan angkutan penumpang udara lebih disebabkan oleh bertambahnya rute penerbangan pesawat ke bandara internasional Lombok (BIL) selain juga disebabkan oleh meningkatnya okupansi penumpang pesawat.

Tingginya pertumbuhan di sektor transportasi dan komunikasi terlihat dari pertumbuhan penyaluran kredit sektor tersebut yang mampu tumbuh hingga 80% dalam 1 tahun terakhir. Dalam triwulan IV 2013, kredit juga masih mampu tumbuh hingga 9,17% dibanding triwulan sebelumnya.



Sumber: Dinas perhubungan, PT Angkasa Pura

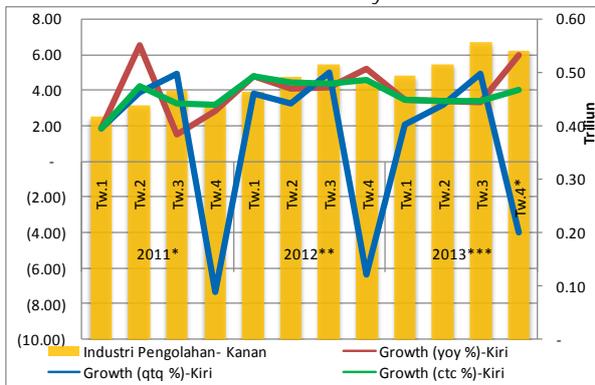
Secara tahunan, jumlah penumpang angkutan udara mampu bertumbuh hingga 17,81%. Tingginya pertumbuhan terutama didorong oleh pertumbuhan penerbangan internasional hingga 178,12% (yoy) dibanding tahun sebelumnya dikarenakan adanya penambahan penerbangan langsung internasional ke pulau Lombok. Tahun 2014, penerbangan internasional diperkirakan juga akan meningkat cukup tinggi seiring dengan adanya penambahan beberapa penerbangan internasional ke pulau Lombok. Hingga bulan Februari 2014, setidaknya sudah terdapat tambahan dua maskapai yang melakukan penerbangan langsung antara lain China airline dan Chatay pacific dengan tujuan China dan Hongkong.

1.3.7 Industri Pengolahan

Sepanjang tahun 2013, Sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan sebesar 4,01% (yoy). Pertumbuhan sektor industri relatif stabil namun lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2013 yang mampu tumbuh hingga 5,69% (yoy). Rendahnya pertumbuhan sektor industri pengolahan lebih disebabkan oleh skala industri yang sulit untuk menjadi besar disebabkan oleh pasar yang relatif terbatas, sehingga pengusaha enggan mengembangkan industri di Mataram. Investor lebih tertarik mengembangkan industri pariwisata disebabkan oleh keunggulan komparatif daerah yang memiliki alam yang indah.

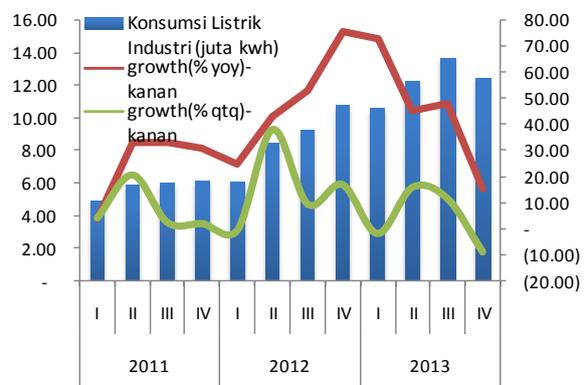
Dibanding triwulan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan mengalami penurunan sebesar 4,02% (qtq). Penurunan ekonomi lebih disebabkan oleh fokus industri lokal yang lebih memprioritaskan peningkatan permintaan di triwulan sebelumnya. Selain itu, telah selesainya panen raya tembakau juga membuat omset penjualan perusahaan mengalami penurunan. Industri tembakau memiliki peranan penting di provinsi NTB karena besarnya produksi tembakau yang dihasilkan provinsi NTB, sehingga mendorong produsen besar untuk mendirikan industri hulu di provinsi NTB, yang harapannya bisa mengefisienkan ongkos produksi terutama dari sisi ongkos angkut komoditas.

Grafik 1.60
PDRB Sektor Industri Pengolahan serta Pertumbuhannya



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

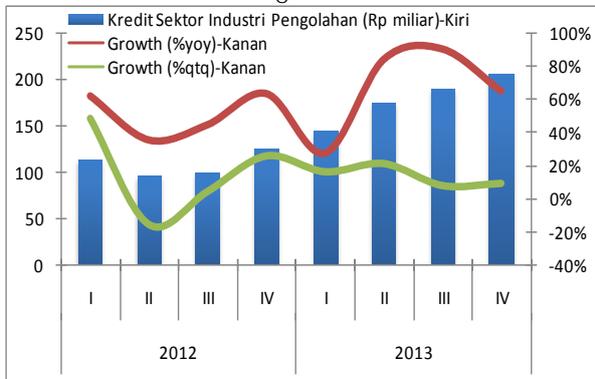
Grafik 1.61
Perkembangan Konsumsi Listrik Industri



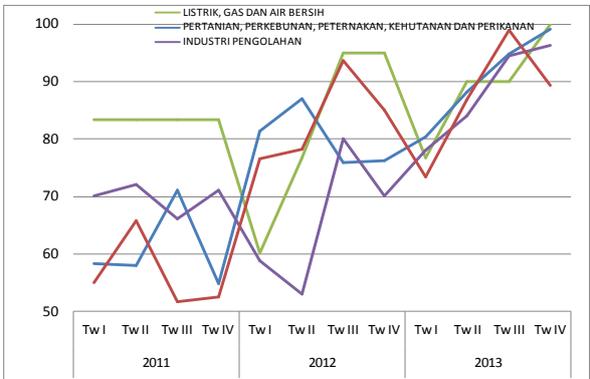
Sumber: PLN, diolah

Penurunan kegiatan industri juga tampak dari penggunaan konsumsi listrik yang mengalami penurunan cukup besar di triwulan IV 2013. Pelambatan aktivitas juga tampak dari penyaluran kredit untuk sektor industri pengolahan yang mengalami pelambatan. Tingginya kapasitas utilisasi juga akan mengganggu produksi dikarenakan oleh terbatasnya kemampuan perusahaan dalam memproduksi barang.

Grafik 1.62
Penyaluran Kredit Perbankan ke Sektor Industri Pengolahan



Grafik 1.63
Kapasitas Utilisasi Survei Kegiatan Dunia Usaha Triwulan IV 2013

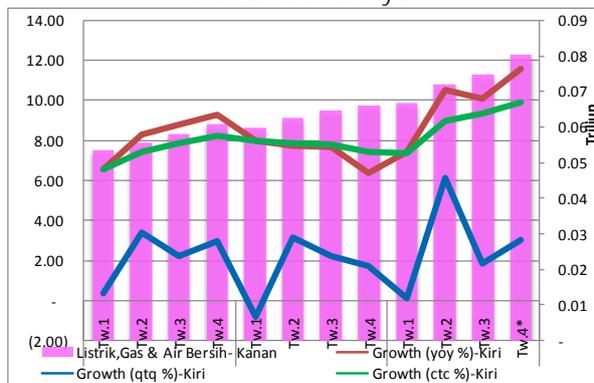


Sumber : Bank Indonesia, diolah

1.3.8 Listrik, Gas, dan Air Bersih

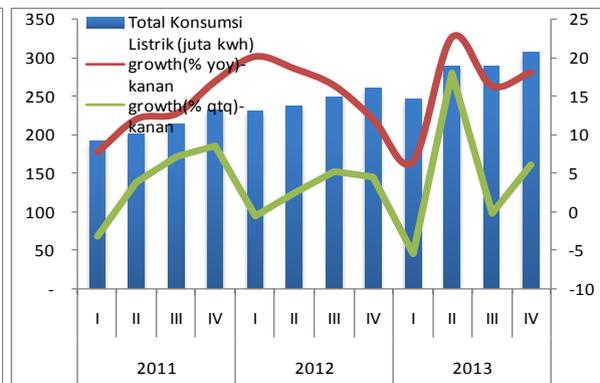
Sektor listrik, air dan gas sepanjang tahun 2013 mampu mengalami pertumbuhan tertinggi sektoral dibanding sektor yang lain. Dibanding tahun sebelumnya, sektor listrik, gas dan air bersih mampu tumbuh hingga 9,93% (yoy). Dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya, sektor listrik, gas dan air bersih juga masih mampu tumbuh hingga 11,58% (yoy) dan secara triwulanan, sektor listrik, gas dan air bersih masih mampu tumbuh hingga 3,06% (qtq). Tingginya pertumbuhan ekonomi lebih disebabkan oleh meningkatnya konsumsi listrik dan gas, serta bertambahnya pasokan listrik di provinsi NTB setelah adanya investasi pembangkit listrik baru. Peningkatan pasokan tersebut, langsung diikuti oleh peningkatan rumah tangga tersambung listrik yang otomatis meningkatkan penggunaan listrik.

Grafik 1.64
PDRB Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih serta Pertumbuhannya



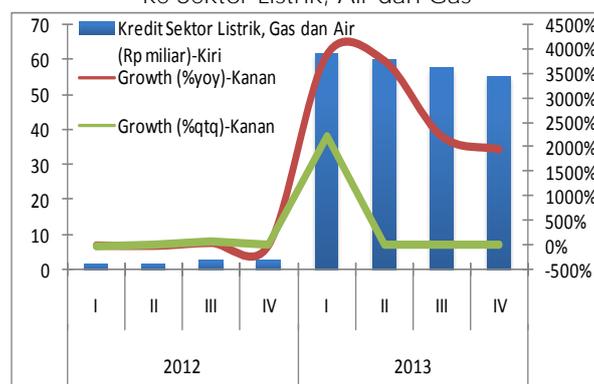
Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 1.65
Perkembangan Total Konsumsi Listrik



Sumber: PLN, diolah

Grafik 1.66
Penyaluran Kredit Perbankan ke Sektor Listrik, Air dan Gas



Pengaruh Penerapan UU Minerba terhadap Industri Tembaga di Provinsi NTB

Perkembangan terbaru atas peraturan turunan atas penerbitan UU Minerba No. 4 tahun 2009 memasuki babak baru, dikarenakan ketidaksiapan pengusaha, maka pemerintah pada tanggal 11 Januari 2014 mengeluarkan tiga peraturan sekaligus yaitu PP No. 1 tahun 2014, Permen ESDM No. 1 tahun 2014 dan Permen Keuangan No. 6 tahun 2014 untuk merubah peraturan sebelumnya yaitu PP No. 23 tahun 2010, Permen ESDM No. 24 tahun 2012 dan Permen Keuangan No. 75 tahun 2012. Inti dari perubahan tersebut adalah adanya kelonggaran ekspor hingga tahun 2017, penurunan kadar tembaga yang dapat diekspor dari 99,9% katoda tembaga menjadi hanya 15% katoda tembaga dan penerapan tarif pajak keluar progresif mulai dari 25% di tahun 2014, mulai meningkat menjadi 30% di tahun 2015 dan tiap semester meningkat 10% hingga menjadi 60% di tahun 2016.

Perusahaan tambang pada awalnya mengapresiasi kebijakan kementerian ESDM yang menurunkan kadar konsentrat tembaga yang layak diekspor mengikuti permintaan pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) rakyat yang hanya mampu mengolah kadar konsentrat hingga 15% kandungan tembaga. Namun demikian, setelah dikeluarkannya peraturan menteri keuangan No. 6 tahun 2014, perusahaan tambang besar merasa penetapan tarif tersebut terlalu besar, sehingga berpotensi mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Apabila perusahaan memutuskan untuk tidak melakukan ekspor, maka potensi pendapatan ekspor yang hilang dari berhentinya ekspor mencapai sebesar hampir 30 triliun rupiah.

Tabel1
Tarif Ekspor Konsentrat Tembaga

	2014		2015		2016	
	I	II	I	II	I	II
Konsentrat tembaga < 15%	25%	25%	30%	40%	50%	60%

Sumber : Kementerian Perdagangan

Industri konsentrat tembaga di Indonesia saat ini dikuasai oleh dua pemain besar yaitu PT Freeport Indonesia dan PT NNT Nusa Tenggara. Kedua perusahaan ini menguasai hingga 99,98% dari total ekspor konsentrat Indonesia. Secara total, produksi konsentrat tembaga 2,3 juta ton konsentrat. 52,46% produksi diekspor dan 44,66% dikirim ke pasar domestik. Berdasarkan porsi produksi, PT Freeport menguasai total produksi hingga 84,17% dari total produksi, sedangkan PT NNT hanya memproduksi sebesar 15,82% dari total produksi. Sepanjang tahun 2013, 75,71% produksi PT NNT diekspor, dan hanya 24,29% dari total produksi yang dikirim ke dalam negeri. Hal ini berbeda dengan penjualan PT Freeport dengan ekspor sebesar 55,81% dari total produksi dan pengiriman domestik mencapai 44,19%.

Tabel 2

Gambaran Industri Konsentrat Tembaga di Indonesia

		2011	2012	2013*	Pangsa
Eksport	Newmont	368,204,800	331,639,800	274,334,464	22.84
	Freeport	1,089,373,159	767,565,668	992,751,240	82.64
	NNT + Freeport	1,457,577,959	1,099,205,468	1,201,150,561	99.98
	Total	1,480,007,954	1,109,055,582	1,201,356,022	100
Domestik (Smelting)	Newmont	231,222,560	26,834,363	88,031,407	8.61
	Freeport**	806,422,095	979,994,088	934,568,656	91.39
	Total**	1,037,644,655	1,006,828,451	1,022,600,063	100
Total	Newmont	599,427,360	358,474,163	362,365,871	15.82
	Freeport***	1,895,795,254	1,747,559,756	1,927,319,896	84.17
	Total***	2,517,652,610	2,115,884,033	2,289,891,228	100

Sumber : Bank Indonesia, perkiraan statistik, diolah
(Perhitungan produksi domestik dihitung berdasarkan asumsi kapasitas produksi tertinggi PT Smelting)

Relatif rendahnya produksi PT NNT terutama disebabkan oleh kegiatan pelebaran dinding tambang dalam dua tahun terakhir, yang mengakibatkan produksi mineral emas dan perak mengalami penurunan tajam. Di tahun 2014, produksi PT NNT diprediksi akan kembali mendekati normal seiring dengan telah diselesaikannya pelebaran dinding tambang. Namun demikian, dengan adanya peraturan menteri keuangan tersebut, PT NNT sedang menghitung kemungkinan penghentian produksi dikarenakan tingginya tarif progresif yang ditetapkan. Belum jelasnya wacana pembagian alokasi suplai domestik juga membuat perusahaan belum dapat melakukan perencanaan produksi, walaupun di pertemuan sebelumnya sudah diwacanakan terkait pembagian alokasi PT NNT dan PT Freeport sebesar 20:80 dari total pasokan yang dibutuhkan.

Dengan adanya tarif ekspor yang cukup besar tersebut, baik petinggi indukan PT NNT maupun PT Freeport yang berpusat di Amerika Serikat sudah berusaha melakukan negosiasi, namun pemerintah hingga saat ini menunjukkan sikap menolak. Sikap ini patut diapresiasi karena peraturan tersebut merupakan pengejawantahan pasal 34 UUD tahun 1945 terkait sikap negara menyikapi kekayaan yang dimiliki harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu sikap tegas pemerintah ini diharapkan akan mengurangi keraguan investor dalam menanamkan modalnya ke Indonesia terkait dengan isu kepastian hukum di Indonesia.

Tabel 3

Perusahaan Eksisting Pengolahan Konsentrat Tembaga dan Rencana Investasi yang Dilakukan

Perusahaan	Katoda Tembaga	Newmont	Freeport	Total	Total Investasi (Miliar USD)
Smelting	300,000	269,080	800,000	1,069,080	750
Indovasi	200,000	179,387	533,333	712,720	1,500
Indosmelt	150,000	201,810	350,000	551,810	1,000
Nusantara	200,000	179,387	533,333	712,720	1,500
Freport-Antam	300,000	269,080	800,000	1,069,080	2,200
Total Investasi	850,000	829,664	2,216,667	3,046,331	6,200
Total Smelter	1,150,000	1,098,744	3,016,667	4,115,411	6,950
Produksi Tertinggi		912,165	2,114,881	3,027,046	

Sumber : Berbagai sumber, diolah

Hingga saat ini, terdapat tiga investor yang sudah mulai melakukan studi kelayakan antara lain PT Indovasi, Indosmelt dan Nusantara Smelting. Selain itu, Freeport dan Antam juga sedang menjajagi kerjasama pembuatan smelter baru untuk pengolahan katoda tembaga dan anoda slime yang ada. Total investasi keempat investor diperkirakan mencapai 6,2 milyar dolar USD atau setara lebih dari 74 trilyun rupiah. Investasi keempat investor tersebut diperkirakan dapat menghasilkan hingga 850 ribu katoda tembaga. Apabila produksi PT Smelting diikutkan, maka total katoda tembaga yang dapat diproduksi mencapai 1,15 juta ton katoda tembaga, atau setara dengan pasokan 4 juta ton konsentrat. Total konsentrat tersebut dapat dipenuhi pada tahun 2017, seiring dengan adanya peningkatan produksi hasil tambang di tahun yang sama oleh kedua perusahaan dan berpotensi menghasilkan devisa hingga lebih dari 100 trilyun rupiah dengan asumsi harga saat ini. Nilai tersebut akan meningkat lebih tinggi apabila terjadi kenaikan harga tembaga seiring dengan adanya perbaikan ekonomi ditambah dengan hasil pengolahan anoda slime yang akan menghasilkan ratusan ton emas dan ribuan ton perak. Produk sampingan lainnya juga berpotensi meningkatkan industri petrokimia seiring dengan besarnya amoniak dan produk sampingan yang lain, yang sangat berguna dalam pembuatan pupuk, semen dan industri petrokimia lainnya.

Bagi Indonesia, apabila PT NNT memutuskan untuk menghentikan usaha, tidak akan terlalu berdampak bagi PDRB Indonesia disebabkan oleh total nilai pasar yang relatif kecil dibandingkan total PDRB Indonesia yang sudah mencapai 9.000 triliun. Namun demikian, bagi Provinsi NTB, penghentian operasi PT NNT diperkirakan menurunkan PDRB Provinsi NTB hingga 7,89% dibanding tahun 2013. Apabila PT NNT masih melakukan pengiriman domestik sesuai kuota 20% produksi, maka pertumbuhan PDRB Provinsi NTB diperkirakan masih dapat bertahan sama dibanding tahun 2013. Bahkan apabila produksi PT NNT tetap normal, pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat mengalami pertumbuhan hingga sedikit lebih tinggi di atas 6% sebagaimana perhitungan dalam kajian mengenai proyeksi ekonomi 2014.

BAB 2

PERKEMBANGAN INFLASI NUSA TENGGARA BARAT

2.1 KONDISI UMUM

Laju inflasi tahun 2013 mengalami kenaikan tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Adanya kenaikan harga BBM di akhir bulan Juni 2013 langsung mengerek inflasi di tahun 2013 sebesar 9,51%(yoy). Namun begitu, kenaikan inflasi tidak setinggi kenaikan inflasi karena kenaikan BBM di tahun 2010 yang mencapai 10,05% (yoy). Kenaikan inflasi tidak hanya disebabkan oleh kenaikan BBM yang cukup tinggi, melainkan juga disebabkan oleh kenaikan harga barang yang lain mengikuti kenaikan inflasi yang terjadi.

Karakter Inflasi di Provinsi NTB juga sangat sensitif dengan adanya *shock* permintaan dan penawaran. Terbukti, inflasi mengalami kenaikan pada saat hari raya Maulid Nabi, hari raya Idul Fitri dan kemerdekaan RI, hari raya Idul Adha, hari raya Galungan maupun tekanan inflasi menjelang pergantian tahun yang secara signifikan meningkatkan konsumsi. Adanya tekanan inflasi dari sisi permintaan ini menunjukkan belum cukup siapnya pemerintah dan dunia usaha dalam menjaga ketersediaan pasokan dalam menghadapi lonjakan permintaan yang terjadi.

Selain itu, di tahun 2013 juga terjadi kenaikan inflasi dari sisi *administered price* yaitu kenaikan tarif dasar listrik rumah tangga dan kenaikan harga gas yang juga meningkatkan sentimen inflasi yang tinggi. Adanya penggunaan gas 3kg untuk *omprongan*/bahan bakar pengeringan tembakau juga menimbulkan anomali inflasi di provinsi NTB yang tampak dari kenaikan inflasi di bulan Oktober dan November 2013 yang mengalami kenaikan cukup besar.

Tekanan inflasi dari sektor perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar rumah tangga juga masih menunjukkan tren pergerakan yang cukup tinggi. Setelah mengalami inflasi yang cukup tinggi di tahun 2012 yang kemudian terus menurun hingga bulan Juni 2013, kemudian berbalik arah dengan adanya kenaikan harga BBM, inflasi perumahan menunjukkan adanya tren kenaikan di bulan Juli hingga Desember 2013, dan menjadi penyumbang inflasi terbesar kedua setelah inflasi kelompok komoditas bahan makanan. Adanya penyesuaian tarif sewa rumah, menjadi salah satu penyebab kenaikan, selain juga disebabkan oleh kenaikan tarif listrik dan kenaikan harga LPG.

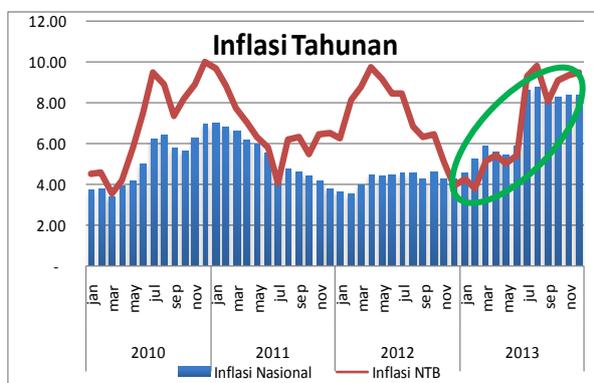
Kenaikan harga BBM menimbulkan anomali pergerakan inflasi pada beberapa komoditas terutama bahan makanan di bulan Juli 2013 yang disinyalir lebih disebabkan oleh

adanya spekulasi harga memanfaatkan momen kenaikan harga BBM. Untuk menanggulangi kenaikan yang lebih tinggi, pemerintah melalui dinas terkait gencar melakukan operasi pasar di beberapa tempat. Namun hal ini tidak dibarengi dengan sosialisasi dan kapasitas barang yang dijual dalam operasi pasar yang cukup membuat operasi pasar kurang berdampak dalam menekan inflasi yang terjadi.

Pada triwulan IV 2013, pergerakan inflasi relatif melambat dibanding triwulan sebelumnya yaitu sebesar 1,25% (qtq) dibanding inflasi triwulan III 2013 sebesar 4,12% (qtq). Secara bulanan, inflasi juga cenderung rendah walaupun terjadi anomali pergerakan inflasi di bulan Oktober dan November yang biasanya cenderung rendah mengarah deflasi menjadi inflasi cukup tinggi di bulan Oktober sebesar 0,44% dan inflasi di bulan November sebesar 0,21% (mtm). Inflasi di bulan Oktober lebih disebabkan perayaan hari raya Idul Adha pada tengah bulan berbeda dengan tahun sebelumnya yang berada di akhir bulan, sehingga dampak inflasi langsung berpengaruh dalam perhitungan. Selain itu, adanya kegiatan pengeringan tembakau menggunakan LPG 3kg membuat harga LPG juga melambung tinggi. Inflasi di bulan November 2013 seharusnya juga dapat ditekan apabila pemerintah tidak menaikkan harga listrik dan HET LPG 3kg. Adanya panen sebagian besar komoditas hortikultura tidak mampu menurunkan inflasi dikarenakan kenaikan TDL, HET LPG dan kenaikan beras yang memiliki bobot inflasi cukup tinggi. Di Bulan Desember, inflasi terjadi cukup tinggi lebih disebabkan oleh tekanan permintaan menjelang pergantian akhir tahun dan buruknya cuaca yang mempengaruhi produksi beberapa komoditas pangan dan tangkapan ikan. Pelambatan inflasi di triwulan IV juga tampak dari pelambatan inflasi tahunan di triwulan IV 2013 yang cenderung melandai, walaupun terjadi anomali pergerakan di bulan Oktober dan November 2013.

Grafik 2.1

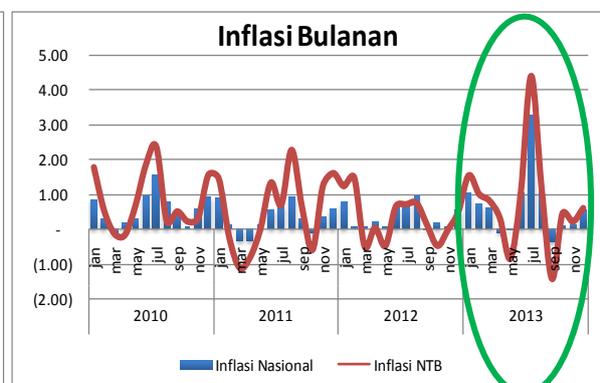
Perkembangan Inflasi Tahunan Provinsi NTB dan Nasional



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 2.2

Perkembangan Inflasi Bulanan Provinsi NTB dan Nasional



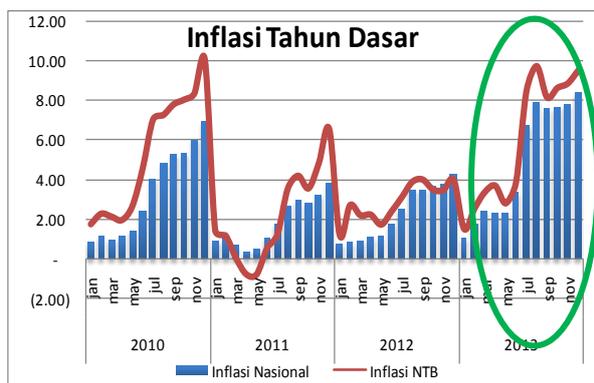
Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Fenomena yang cukup menarik adalah adanya arah pergerakan inflasi Provinsi NTB yang mulai searah dengan inflasi nasional. Secara tahunan, tingginya inflasi NTB terjadi di bulan Juli hingga akhir tahun yang lebih disebabkan oleh adanya kenaikan harga barang mengikuti kenaikan harga BBM. Kondisi daerah yang berupa kepulauan membuat harga barang sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga BBM yang terjadi. Adanya preferensi perpindahan barang menggunakan angkutan darat menggunakan truk dan angkutan barang roda 4 lainnya, membuat harga barang sensitif dengan kenaikan BBM yang terjadi. Hal ini juga tampak dari pengiriman barang keluar pulau yang cenderung menggunakan jasa ASDP dibanding pelabuhan, sehingga biaya BBM berperan penting pembentukan harga. Disamping itu adanya faktor spekulasi juga berperan dalam kenaikan harga barang.

Shock permintaan karena hari raya juga sangat berpengaruh pada pergerakan inflasi NTB. Hal ini terlihat pada bulan Januari, Agustus, dan Oktober yaitu adanya perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, Idul Fitri dan Idul Adha yang menunjukkan kenaikan inflasi lebih besar dibanding nasional, faktor demografi penduduk NTB yang 96% beragama Islam menyebabkan perayaan hari besar agama Islam di NTB memiliki kekhasan tersendiri dan terasa lebih meriah dibanding daerah lain di Indonesia.

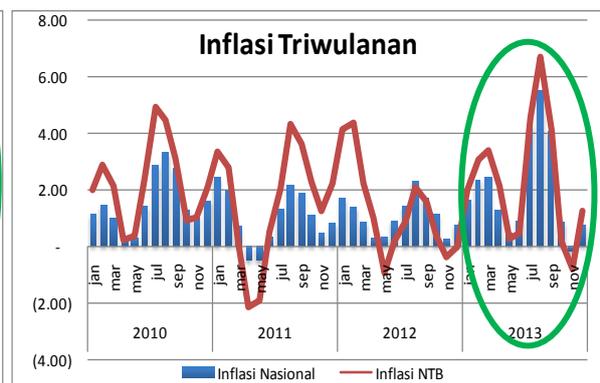
Secara bulanan, pergerakan inflasi NTB juga menunjukkan pergerakan yang sama bahkan hingga akhir tahun 2013. Hal ini menunjukkan semakin terintegrasinya perekonomian NTB dengan ekonomi Indonesia secara umum dan menunjukkan perekonomian NTB yang semakin terbuka dengan daerah lain.

Grafik 2.3
Perkembangan Inflasi Tahun Dasar Provinsi NTB dan Nasional



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 2.4
Perkembangan Inflasi Triwulanan Provinsi NTB dan Nasional



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Berdasarkan pendekatan tahun dasar maupun triwulanan pola pergerakan yang sama dengan nasional juga terlihat di sepanjang tahun 2013. Dalam tataran kebijakan, secara nasional menjadi semakin mudah untuk mendeteksi penyebab inflasi sehingga dimungkinkan kebijakan generik langsung dari pusat untuk menyelesaikan permasalahan regional. Namun

demikian, dari sisi regional, kebijakan pengendalian inflasi yang diambil menjadi relatif lebih sulit dikarenakan oleh ketergantungan secara ekonomi terhadap daerah lain yang semakin besar, sehingga penyelesaian permasalahan inflasi tidak cukup oleh kebijakan lokal dan memerlukan koordinasi yang lebih intens dengan daerah lain.

2.2 INFLASI BERDASARKAN KOMODITAS

Inflasi kelompok komoditas bahan makanan masih menjadi penyumbang inflasi tertinggi sepanjang tahun 2013 dengan inflasi sebesar 17,74% (yoy), memberikan sumbangan terhadap inflasi provinsi NTB tahun 2013 mencapai 4,89% (sumbangan yoy). Transportasi menjadi kelompok komoditas dengan inflasi tahunan terbesar kedua dengan inflasi sebesar 12,56% (yoy), namun sumbangan inflasi kelompok komoditas Transportasi sebesar 1,70% (sumbangan yoy), masih lebih rendah dibanding kelompok komoditas perumahan, listrik, air, gas dan bahan bakar yang mampu menyumbang 1,77% (sumbangan yoy). Inflasi terendah berasal dari kelompok sandang dengan nilai inflasi sebesar 0,54% (yoy) dan sumbangan inflasi sebesar 0,04% (sumbangan yoy).

Tabel 2.1
Ringkasan Perkembangan Inflasi Provinsi NTB

KETERANGAN	2012	2013			mtm			yoy	qtq
	Des	Okt	Nov	Des	Okt	Nov	Des		
UMUM	146.83	159.51	159.84	160.80	0.44	0.21	0.60	9.51	1.25
BAHAN MAKANAN	166.51	194.28	193.48	196.05	0.48	-0.41	1.33	17.74	1.40
MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU	153.08	159.47	160.02	160.46	0.48	0.35	0.27	4.82	1.10
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BB	158.29	166.55	168.12	169.20	0.63	0.94	0.64	6.89	2.24
SANDANG	141.71	142.34	142.19	142.47	-0.36	-0.10	0.19	0.54	-0.27
KESEHATAN	121.93	124.14	124.30	124.45	0.09	0.13	0.12	2.06	0.33
PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAH RAGA	122.50	124.95	124.95	124.95	0.61	0.00	0.00	2.00	0.61
TRANSPOR, KOMUNIKASI DAN JASA K	111.43	125.31	125.42	125.43	0.20	0.09	0.00	12.56	0.29

Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Tabel di atas menunjukkan, inflasi kelompok komoditas sandang dan kesehatan relatif stabil, sedangkan inflasi kelompok komoditas makanan jadi, minuman dan tembakau cenderung mengikuti inflasi bahan makanan dan bahan bakar yang cenderung naik. Namun demikian, kenaikan harga makanan jadi di kota Mataram tidak terlalu besar hal ini disebabkan oleh harga jual yang relatif sudah tinggi dan peningkatan jumlah pedagang makanan yang memaksa harga menjadi persisten dengan sedikit kenaikan.

2.2.1 Bahan Makanan

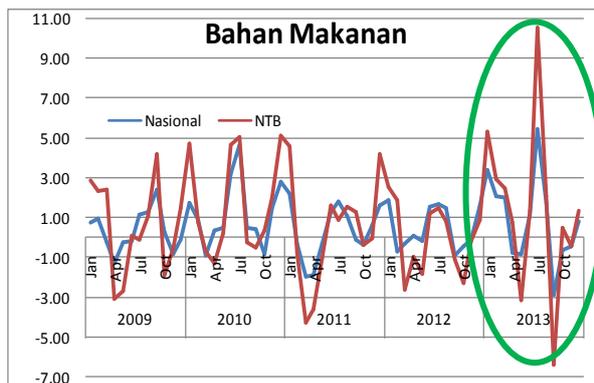
Kelompok komoditas bahan makanan sepanjang tahun 2013 mengalami inflasi tertinggi dan memberikan sumbangan inflasi tertinggi terhadap total inflasi. Kenaikan harga bahan makanan sangat peka terhadap shock permintaan yang tampak meningkat di bulan Januari dan Februari 2013 seiring adanya Maulid Nabi SAW, naik tinggi di bulan Juli 2013 seiring dengan adanya kenaikan BBM yang mendorong pada ekspektasi permintaan tinggi dan tetap

meningkat di bulan Agustus seiring dengan adanya hari raya Idul Fitri dan kemerdekaan RI. Inflasi kembali terjadi di bulan Oktober 2013 seiring dengan adanya perayaan hari raya Idul Adha dan hari raya Galungan, dan kembali meningkat di akhir tahun seiring dengan adanya peningkatan permintaan menjelang akhir tahun, walaupun di saat bersamaan juga terjadi penurunan pasokan beberapa komoditas karena pengaruh cuaca. Hal ini menunjukkan pemenuhan pasokan atas peningkatan permintaan relatif kurang elastis, sehingga inflasi dapat terjadi pada saat terjadi shock permintaan tersebut.

Pada bulan-bulan tersebut, kenaikan harga juga terbentuk oleh adanya ekspektasi harga yang cenderung tinggi pada bulan-bulan tersebut, sehingga walaupun terdapat cukup pasokan, harga akan tetap meningkat seiring dengan adanya ekspektasi harga yang sudah terbentuk.

Grafik 2.5

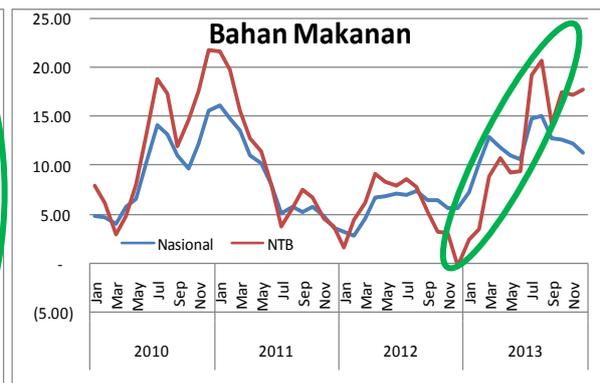
Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Kelompok Komoditas Bahan Makanan



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 2.6

Perkembangan Inflasi Tahunan Berdasarkan Kelompok Komoditas Bahan Makanan

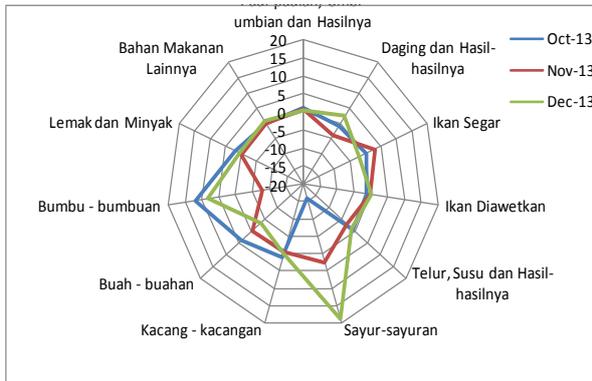


Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Berdasarkan arah pergerakan harga, terutama sejak pertengahan 2012, arah pergerakan harga komoditas cenderung sama dengan harga nasional. Hal ini mengindikasikan perpindahan barang yang semakin mudah dan sering dilakukan antar wilayah di Indonesia, sehingga harga komoditas antar wilayah menjadi semakin homogen. Adanya kemajuan teknologi juga membuat perputaran arus informasi harga barang semakin mudah didapat, sehingga apabila didapati harga tinggi di daerah lain, maka barang dapat cepat bergerak ke daerah yang mampu memberikan keuntungan maksimal, atau setidaknya dapat menaikkan harga berdasarkan informasi kenaikan harga di daerah lain yang didapatkan. Di level pedagang besar, pertukaran informasi sangat mudah dilakukan terutama menggunakan fasilitas *handphone* atau melalui orang kepercayaan untuk memasarkan produk di daerah lain. Berdasarkan data bulanan dan tahunan terlihat bahwa arah inflasi cenderung semakin sama di tahun 2013 yang menunjukkan kondisi ekonomi yang semakin terbuka di provinsi NTB.

Grafik 2.7

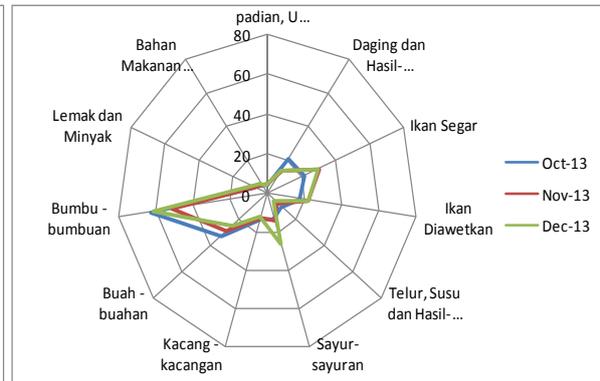
Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Sub Kelompok Komoditas Bahan Makanan



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 2.8

Perkembangan Inflasi Tahunan Berdasarkan Sub Kelompok Komoditas Bahan Makanan



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Pada grafik di atas terlihat bumbu-bumbuan, ikan segar, sayur-sayuran dan buah-buahan menjadi penyumbang inflasi tahunan terbesar pada kelompok komoditas bahan makanan. Tingginya inflasi bumbu-bumbuan terutama disumbang oleh inflasi Cabe merah dan Bawang merah yang sepanjang tahun 2013 mengalami kenaikan hingga 226,06% dan 213,06% dibanding tahun sebelumnya, disusul oleh inflasi cabe merah sebesar 66,28% dan Jeruk limau sebesar 40,17%. Bumbu-bumbuan mampu menyumbang hingga 1,02% dari total inflasi Provinsi NTB yang sebesar 9,51% (yoy).

Tingginya inflasi ikan segar terutama disebabkan oleh meningkatnya harga komoditas ikan Tenggiri, ikan Tongkol, Cumi-cumi, Kembung, Bandeng, Selar dan Cakalang yang mencapai lebih dari 30%, dengan sumbangan terhadap inflasi total sebesar 1,06% (sumbangan yoy). Adanya cuaca yang buruk membuat hasil tangkapan ikan menurun cukup besar yang berdampak pada meningkatnya harga ikan segar.

Tingginya inflasi sayur-sayuran terutama disebabkan oleh meningkatnya harga Tomat sayur dan Cabai hijau yang mencapai lebih dari 100% dan meningkatnya harga Ketimun dan Daun singkong yang mencapai lebih dari 30%. Hampir seluruh komoditas mengalami inflasi kecuali komoditas Wortel dan Jagung Manisyang sepanjang tahun 2013 justru mengalami penurunan. Kenaikan harga sayur lebih disebabkan oleh meningkatnya permintaan yang disambut dengan peningkatan harga barang.

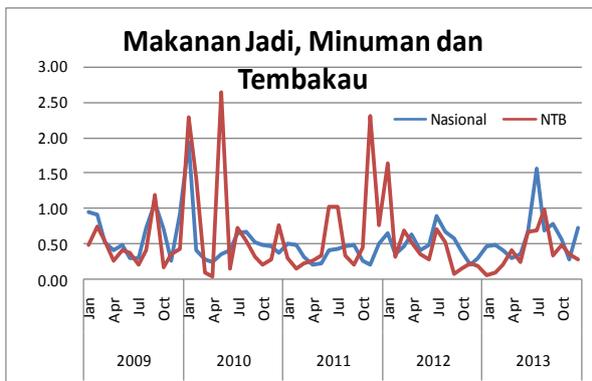
Sub kelompok komoditas buah-buahan juga mengalami inflasi yang cukup besar terutama pada buah Pir, Apel, Jeruk terutama disebabkan oleh adanya larangan impor hortikultura, sehingga harga buah cenderung meningkat. Tingginya harga buah yang lain lebih disebabkan oleh meningkatnya konsumsi buah lokal tanpa diimbangi oleh pasokan yang mencukupi sehingga harga buah cenderung meningkat.

2.2.2 Makanan Jadi, Minuman dan Tembakau

Inflasi kelompok komoditas makanan jadi, minuman dan tembakau di tahun 2013 relatif rendah dengan nilai investasi tahunan sebesar 4,82% (yoy) dibanding tahun sebelumnya. Harga dasar penjualan makanan jadi yang sudah cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lain, dan semakin banyaknya penjual makanan di provinsi NTB mampu menekan terjadinya lonjakan harga, walaupun di saat bersamaan terjadi kenaikan BBM yang secara alamiah meningkatkan harga jual beberapa komoditas.

Berdasarkan runtut waktu, inflasi kelompok komoditas makanan jadi, minuman dan tembakau dengan kenaikan cukup tinggi baru terjadi pada bulan Agustus 2013, dengan kenaikan sebesar 0,95% (mtm), lebih lambat dibanding kenaikan tinggi secara nasional yang terjadi pada bulan Juli 2013 dengan kenaikan hingga 1,55% (mtm). Relatif rendahnya kenaikan juga disebabkan oleh sudah adanya kenaikan tinggi di tahun sebelumnya, sehingga dengan harga dasar yang sudah tinggi, harga jual tidak akan diterima konsumen yang justru berakibat pada penurunan penjualan.

Grafik 2.9
Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan
Kelompok Komoditas Makanan Jadi, Minuman
dan Tembakau



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 2.10
Perkembangan Inflasi Tahunan Berdasarkan
Kelompok Komoditas Makanan Jadi, Minuman
dan Tembakau

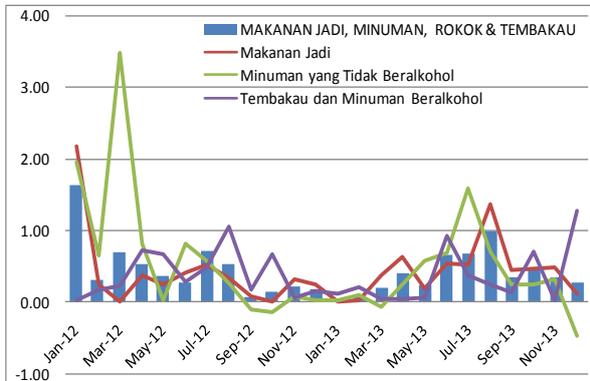


Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Tingginya harga makanan jadi di provinsi NTB mampu menarik banyak pedagang makanan dari Provinsi NTB sendiri atau dari luar daerah yang tampak dari mulai menjamurnya pedagang makanan di Kota Mataram dan Bima. Secara rata-rata, inflasi kelompok makanan jadi, minuman dan tembakau di provinsi NTB relatif lebih rendah dibanding inflasi nasional yang mencapai 7,45% (yoy).

Grafik 2.11

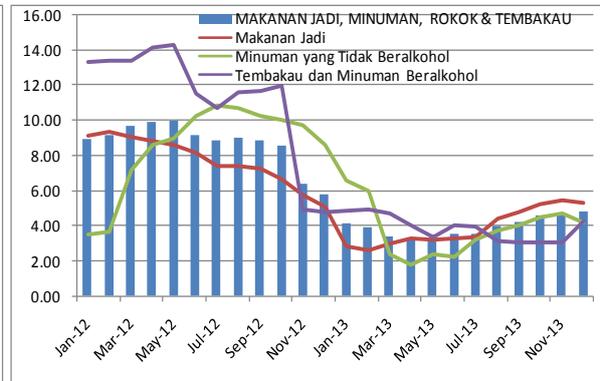
Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Sub Kelompok Komoditas Makanan Jadi, Minuman dan Tembakau



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 2.12

Perkembangan Inflasi Tahunan Berdasarkan Sub Kelompok Komoditas Makanan Jadi, Minuman dan Tembakau



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Adapun komoditas makanan jadi yang menyumbang kenaikan tinggi adalah komoditas Sate, Soto, Es kacang hijau dan Ayam goreng. Sedangkan komoditas minuman yang menyumbang cukup tinggi yaitu komoditas Es dan Teh manis. Kenaikan inflasi bulanan komoditas Tembakau di bulan Desember 2013 lebih disumbang oleh kenaikan harga Tembakau haq di akhir tahun.

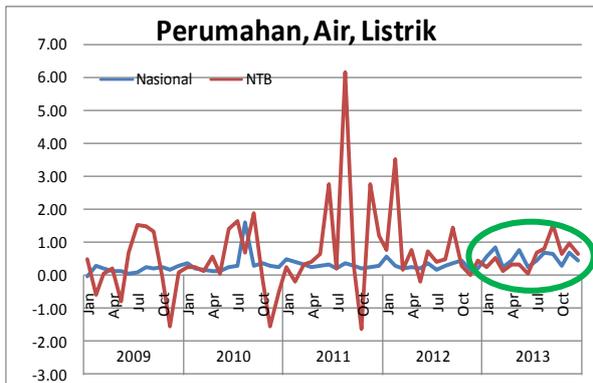
2.2.3 Perumahan, Listrik, Air dan Gas

Inflasi kelompok komoditas Perumahan, Listrik, Air dan Gas mulai menunjukkan kenaikan terutama di triwulan IV 2013. Kenaikan inflasi terutama disebabkan oleh naiknya TDL yang diikuti oleh kenaikan harga eceran tertinggi bahan bakar LPG ukuran 3 kg, adanya kekosongan pasokan di bulan Oktober dan November juga mendorong inflasi Bahan bakar yang disebabkan oleh penggunaan LPG untuk pengeringan tembakau. Hingga akhir tahun 2013, inflasi kelompok komoditas Perumahan, Listrik, Air, Gas dan Bahan bakar mencapai 7,02% dan menjadi penyumbang inflasi terbesar ke-2 di provinsi NTB.

Sepanjang tahun 2013, peningkatan inflasi cenderung melandai hingga akhir tahun terutama disebabkan oleh kenaikan tarif dasar listrik secara bertahap di masing-masing triwulan. Kenaikan TDL mendorong kenaikan tarif sewa rumah dan kontrak rumah di provinsi NTB dengan besar kenaikan masing-masing sebesar 11,01% (yoy) dan 8,14% (yoy). Kenaikan BBM lebih berdampak pada meningkatnya biaya tukang bukan mandor dan bahan baku konstruksi yang terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya angkut material. Khusus komoditas batu bata, terjadi inflasi sebesar 11,96% disebabkan oleh menurunnya pasokan karena permasalahan ketersediaan bahan baku, selain juga karena peningkatan ongkos angkut.

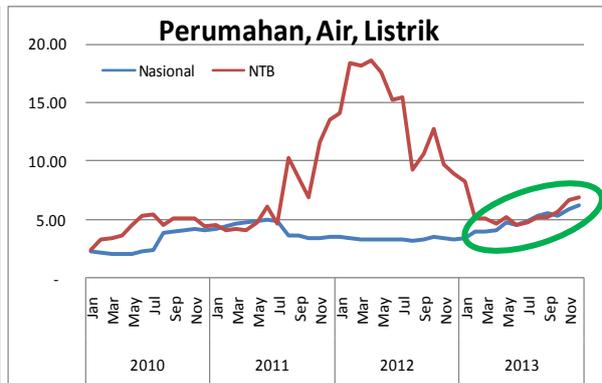
Selain kenaikan harga sebagian besar komoditas, juga terdapat penurunan pada beberapa komoditas seperti komoditas Bambu, Jam dinding, Genteng, Kursi, Kompot, *Magic com*. Namun demikian, pengaruh penurunan dalam menahan laju inflasi tidak signifikan.

Grafik 2.13
Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Kelompok Komoditas Perumahan, Listrik, Air dan Gas



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

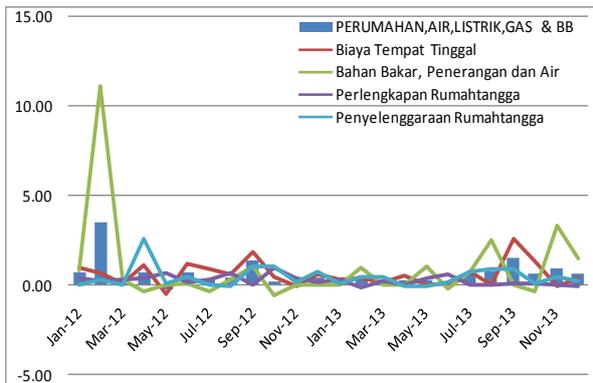
Grafik 2.14
Perkembangan Inflasi Tahunan Berdasarkan Kelompok Komoditas Perumahan, Listrik, Air dan Gas



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

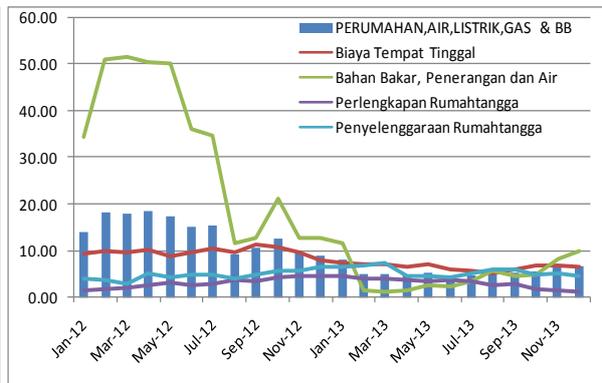
Untuk kelompok Komoditas Perumahan, Listrik, Air dan Gas pergerakan inflasi relatif searah dengan nasional, hal ini menunjukkan tidak adanya *shock* inflasi regional yang signifikan sebagaimana terjadi pada tahun 2012 karena kenaikan harga bahan bakar rumah tangga. Sumber inflasi regional juga relatif sama dengan nasional, dimana penyumbang utama inflasi adalah kenaikan TDL, harga bahan bakar, sewa rumah dan kenaikan harga bahan bangunan.

Grafik 2.15
Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Sub Kelompok Komoditas Perumahan, Listrik, Air dan Gas



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 2.16
Perkembangan Inflasi Tahunan Berdasarkan Sub Kelompok Komoditas Perumahan, Listrik, Air dan Gas



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

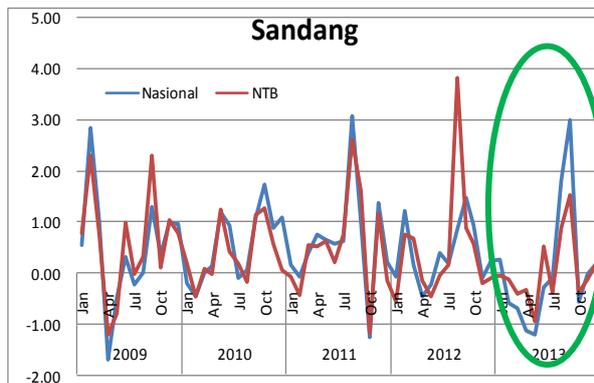
Dampak *Shock* kenaikan TDL tampak dari pergerakan inflasi bulanan di bulan Agustus dan November 2013. Kenaikan TDL di bulan Agustus 2013 mengakibatkan kenaikan tarif sewa

rumah karena adanya kenaikan biaya listrik. Selanjutnya kenaikan inflasi yang lebih tinggi di bulan November lebih disebabkan karena kenaikan LPG di saat yang bersamaan dengan kenaikan TDL.

2.2.4 Sandang

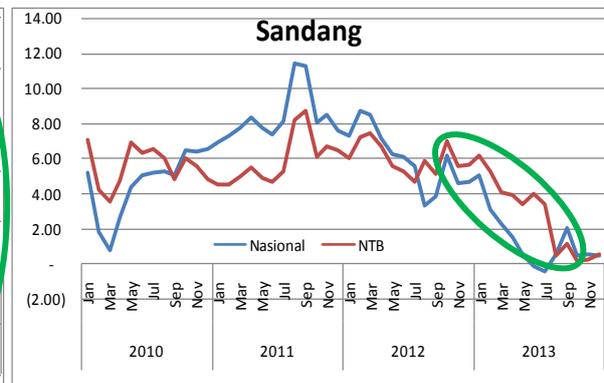
Inflasi kelompok komoditas sandang secara tahunan terus menunjukkan penurunan sepanjang tahun 2013. Pelambatan inflasi tersebut terjadi sejak tahun 2012 setelah puncak kenaikan harga sandang di bulan Agustus dan September tahun 2011 dengan hingga 8,71% (yoy). Penurunan harga lebih disebabkan oleh adanya penurunan harga komoditas sandang secara nasional, sehingga secara langsung juga berpengaruh pada penurunan harga komoditas sandang di tingkat regional.

Grafik 2.17
Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan
Kelompok Komoditas Sandang



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

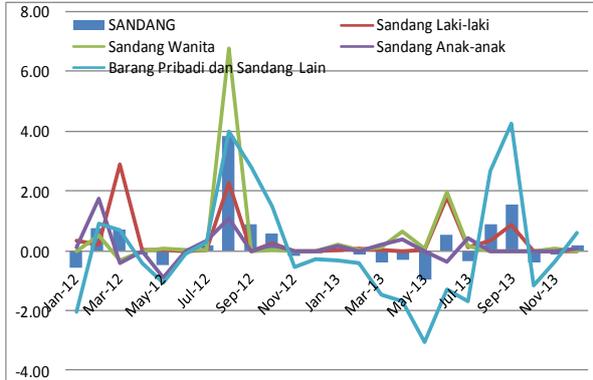
Grafik 2.18
Perkembangan Inflasi Tahunan Berdasarkan
Kelompok Komoditas Sandang



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

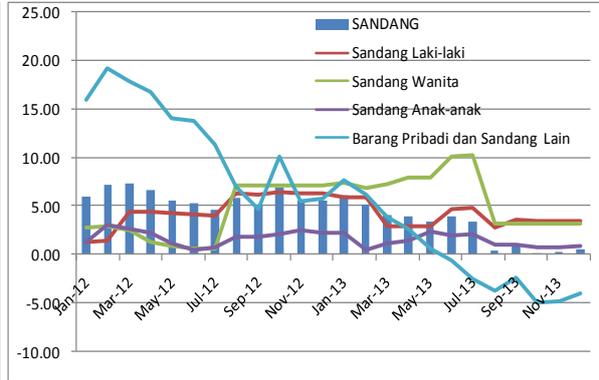
Pergerakan harga kelompok komoditas sandang yang relatif searah dengan pergerakan nasional menunjukkan adanya pengaruh yang kuat dari inflasi daerah lain terhadap inflasi kelompok komoditas sandang di provinsi NTB. Hal tersebut disebabkan karena lebih dari 75% kebutuhan sandang dipenuhi dari luar daerah terutama dari Jawa Tengah, Jakarta dan Jawa Timur, sehingga inflasi sandang di ketiga daerah tersebut berpengaruh langsung terhadap inflasi komoditas sandang di provinsi NTB.

Grafik 2.19
Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Sub Kelompok Komoditas Sandang



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 2.20
Perkembangan Inflasi Tahunan Berdasarkan Sub Kelompok Komoditas Sandang



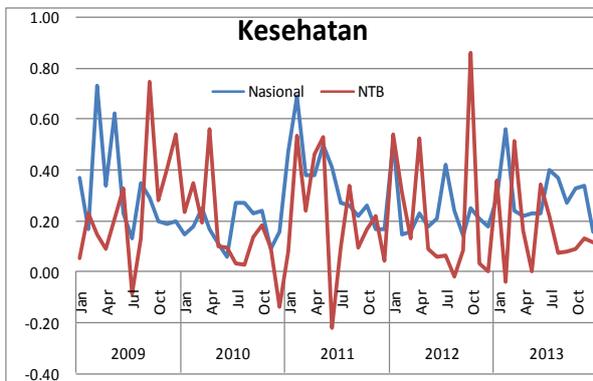
Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Berdasarkan data per sub kelompok komoditas dapat diketahui bahwa kenaikan inflasi terutama disebabkan oleh kenaikan harga Celana Panjang berbahan jeans baik pakaian wanita dan laki-laki. Adanya penurunan harga Emas dinilai menjadi penyebab utama rendahnya inflasi kelompok komoditas sandang.

2.2.5 Kesehatan

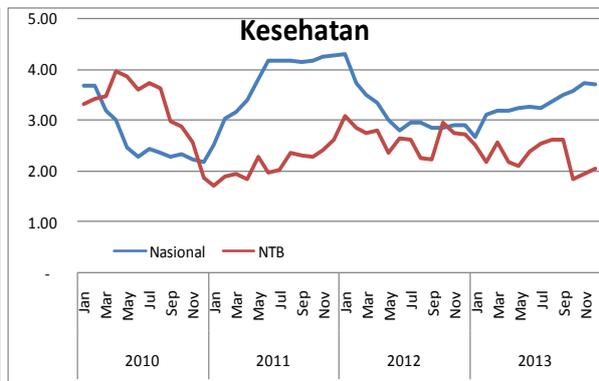
Inflasi komoditas Kesehatan relatif stabil sepanjang tahun 2013. Pergerakan harga relatif tidak terlalu berfluktuasi yang disebabkan oleh stabilnya biaya jasa kesehatan dan perawatan jasmani dan kosmetika. Kenaikan inflasi yang cukup tinggi hanya terjadi pada kenaikan harga jamu, jasa keriting rambut, obat gosok maupun jasa gunting rambut. Namun demikian, sumbangan komoditas tersebut terhadap kenaikan inflasi tidak terlalu besar.

Grafik 2.21
Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Kelompok Komoditas Kesehatan



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

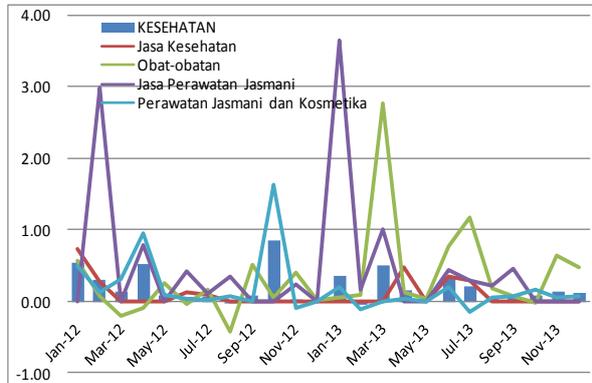
Grafik 2.22
Perkembangan Inflasi Tahunan Berdasarkan Kelompok Komoditas Kesehatan



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

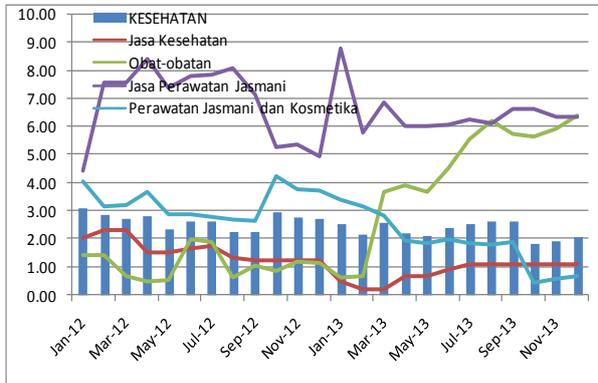
Adanya pola pergerakan harga yang acak dan berbeda dengan pergerakan harga nasional menunjukkan adanya pola penentuan harga yang bersifat regional dan tidak terpengaruh oleh kenaikan secara nasional.

Grafik 2.23
Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Sub Kelompok Komoditas Kesehatan



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 2.24
Perkembangan Inflasi Tahunan Berdasarkan Sub Kelompok Komoditas Kesehatan



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Berdasarkan data per sub kelompok komoditas, pergerakan inflasi yang cukup tinggi terjadi pada sub kelompok komoditas Obat-obatan dan Jasa Perawatan Jasmani yang mengalami kenaikan lebih dari 6% (yoy) secara tahunan. Namun demikian sumbangan kenaikan harga tidak terlalu besar yaitu masing-masing menyumbang sebesar 0,3% (sumbangan yoy) dan 0,1% (sumbangan yoy) terhadap total inflasi NTB di tahun 2013.

2.2.6 Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga

Inflasi di kelompok komoditas pendidikan, rekreasi dan olah raga juga relatif stabil sepanjang tahun 2013 dengan kenaikan tidak lebih dari 3%. Penyumbang terbesar kenaikan adalah meningkatnya biaya pendidikan taman kanak-kanak disebabkan oleh tidak adanya subsidi biaya pendidikan pada tingkat pendidikan tersebut, sedangkan biaya pendidikan tingkat SD, SMP dan SMU relatif tetap disebabkan oleh adanya subsidi pendidikan oleh pemerintah.

Nilai inflasi provinsi NTB juga relatif lebih rendah dibanding nasional terutama disebabkan oleh konsumsi pendidikan tinggi yang relatif lebih rendah dibanding daerah lain, sehingga inflasi kenaikan biaya perguruan tinggi tidak terlalu menyumbang inflasi daerah. Selain itu, biaya rekreasi, olah raga, dan kursus juga relatif rendah dibanding daerah lain sehingga membuat sumbangan kenaikan atas komoditas tersebut tidak terlalu besar terhadap total inflasi.

Grafik 2.25
Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Kelompok Komoditas Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

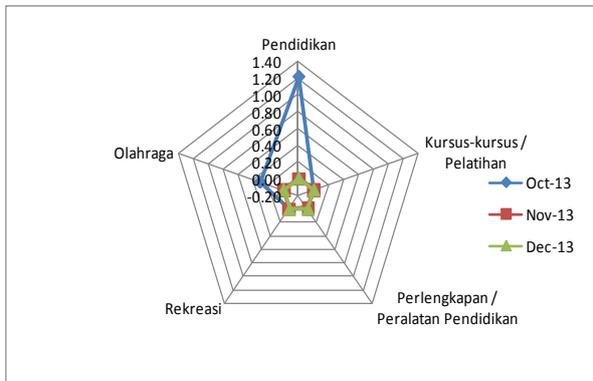
Grafik 2.26
Perkembangan Inflasi Tahunan Berdasarkan Kelompok Komoditas Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

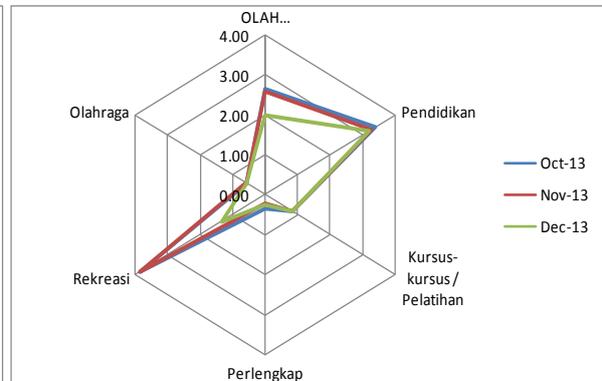
Berdasarkan sub kelompok komoditas, komoditas pendidikan masih menjadi penyumbang inflasi tertinggi diikuti oleh inflasi karena kenaikan harga di sub kelompok rekreasi dan olah raga.

Grafik 2.27
Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Sub Kelompok Komoditas Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 2.28
Perkembangan Inflasi Tahunan Berdasarkan Sub Kelompok Komoditas Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

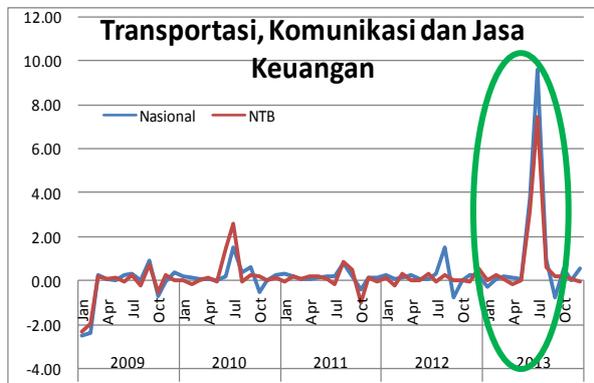
2.2.7 Transport, Komunikasi dan Jasa

Berdasarkan besaran nilai inflasi, kelompok komoditas transportasi, komunikasi dan jasa mengalami kenaikan besaran inflasi terbesar kedua setelah inflasi bahan makanan dengan nilai inflasi sebesar 12,46% (yoy). Tingginya inflasi terutama disebabkan oleh kenaikan BBM yang langsung berimbas pada kenaikan angkutan dalam dan luar kota, dan tarif taksi. Berdasarkan sumbangan terhadap total inflasi, inflasi akibat dari kenaikan BBM secara langsung memberikan sumbangan sebesar 1,59% (sumbangan yoy) dari total inflasi NTB sebesar 9,51% (yoy). Kenaikan harga bensin menjadi penyumbang terbesar kenaikan dengan sumbangan sebesar

1,19% (sumbangan yoy) dengan kenaikan harga secara tahunan sebesar 41,66% (yoy). Tarif taksi mengalami kenaikan hingga 60% (yoy) di tahun 2013 hanya menyumbang sebesar 0,3% (sumbangan yoy) terhadap total inflasi provinsi NTB. Kenaikan tarif angkutan dalam kota memberikan sumbangan kenaikan inflasi tertinggi kedua dengan sumbangan inflasi sebesar 0,17% (sumbangan yoy) dan kenaikan tarif tahunan sebesar 37,52% (yoy). Kenaikan tarif angkutan luar kota menjadi penyumbang inflasi terbesar ketiga di kelompok komoditas transportasi, komunikasi dan jasa keuangan dengan kenaikan tarif tahunan sebesar 25,69% (yoy).

Grafik 2.29

Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Kelompok Komoditas Transport, Komunikasi dan Jasa



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 2.30

Perkembangan Inflasi Tahunan Berdasarkan Kelompok Komoditas Transport, Komunikasi dan Jasa

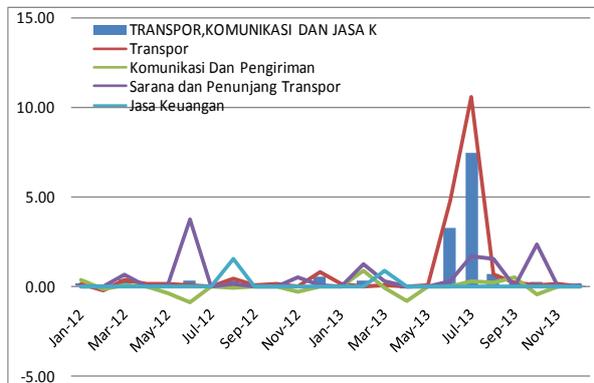


Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Arah pergerakan inflasi searah dengan inflasi nasional disebabkan oleh sumber kenaikan yang sama yaitu pada produk dalam kendali pemerintah berupa BBM. Sedangkan besar kenaikan tahunan provinsi NTB yang relatif lebih rendah dibanding nasional disebabkan oleh bobot komoditas transportasi lain di NTB yang relatif kecil, sehingga dampak kenaikan komoditas transportasi lain seperti kenaikan tarif taksi maupun dampak kenaikan harga solar tidak terlalu besar.

Grafik 2.31

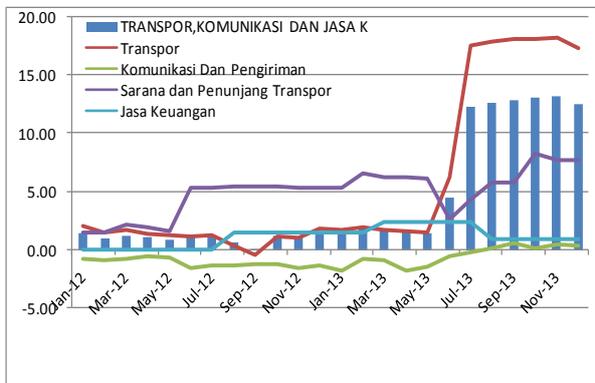
Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Sub Kelompok Komoditas Transport, Komunikasi dan Jasa



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 2.32

Perkembangan Inflasi Tahunan Berdasarkan Sub Kelompok Komoditas Transport, Komunikasi dan Jasa



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Kenaikan BBM terjadi pada akhir bulan Juni 2013, namun demikian, kenaikan tarif moda transportasi yang lain sudah mulai terjadi di bulan Juni 2013. Adanya kenaikan BBM, juga berpengaruh pada kenaikan harga sarana penunjang transportasi seperti biaya servis dan perbaikan kendaraan serta suku cadang yang mengalami kenaikan pada bulan Juli, Agustus serta di bulan Oktober 2013 yang secara tahunan menunjukkan adanya kenaikan bertahap hingga akhir tahun 2013.

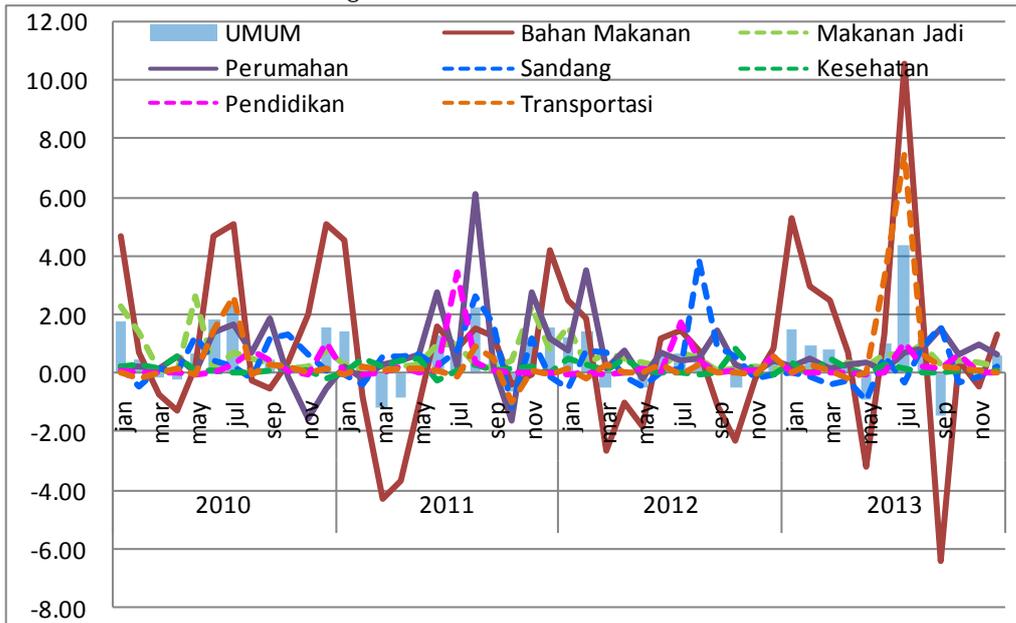
2.3 INFLASI PERIODIKAL

2.3.1 INFLASI BULANAN

Sepanjang tahun 2013, provinsi NTB mengalami inflasi dan deflasi tertinggi dalam 8 tahun terakhir yang terjadi pada bulan Juli dengan besar inflasi mencapai 4,4% (mtm) dan bulan September dengan deflasi sebesar 1,43% (mtm) dibanding bulan sebelumnya. Tingginya inflasi terutama disumbang oleh adanya kenaikan BBM dan di saat bersamaan terdapat perayaan puasa menjelang hari raya Idul Fitri yang membuat harga bahan makanan naik signifikan. Sedangkan deflasi yang terjadi lebih dikarenakan adanya pembalikan arah setelah terjadi inflasi besar di dua bulan sebelumnya.

Di triwulan IV 2013, inflasi yang terjadi cukup rendah yaitu sebesar 0,44% (mtm) di bulan Oktober 2013, inflasi 0,21% (mtm) di bulan November dan inflasi 0,60% (mtm) di bulan Desember 2013. Namun demikian inflasi yang terjadi relatif tinggi bila dibandingkan dengan karakter inflasi di triwulan IV yang cenderung rendah, hal ini disebabkan oleh adanya pergeseran perayaan Idul Adha yang maju sebelas hari dibanding tahun sebelumnya dikarenakan perbedaan sistem kalender, kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan harga gas dan penggunaan LPG 3kg untuk pengeringan tembakau dan kenaikan permintaan setiap menjelang akhir tahun.

Grafik 2.33
Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Komoditas



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Tingginya inflasi terutama disebabkan oleh kenaikan BBM di bulan Juli yang diikuti oleh anomali kenaikan harga bahan makanan. Penentuan waktu kenaikan BBM yang bersamaan dengan persiapan menjelang perayaan Idul Fitri dinilai kurang tepat dalam membangun ekspektasi inflasi harga barang, sehingga harga barang justru cenderung mengalami kenaikan tinggi mengikuti kenaikan BBM yang terjadi. Hal ini tampak dari pergerakan harga bahan makanan yang kembali normal setelah naik tinggi di bulan Juli dan Agustus memanfaatkan momen kenaikan BBM dan perayaan Idul Fitri. Semakin terintegrasinya pasar bahan makanan membuat harga jual mengalami kenaikan dan penurunan mengikuti harga yang berlaku secara nasional, dan tidak lagi terlalu dipengaruhi oleh kondisi pasokan yang relatif mencukupi di provinsi NTB sepanjang tahun 2013. Semakin mudahnya perolehan informasi antar daerah membuat perbedaan harga antar daerah juga dapat diminimalisir. Dampak positifnya dari hal ini adalah harga komoditas akan semakin homogen di seluruh daerah dengan variabel pembeda adalah biaya transportasi. Namun demikian, hal ini semakin menyulitkan pada tataran kebijakan dalam menjaga ketersediaan pasokan di masing-masing wilayah. Oleh karena itu, kebijakan *non generic* seperti kontrol pasokan komoditas pangan strategis dan pembatasan arus komoditas strategis untuk masuk dan keluar wilayah menjadi sangat relevan diterapkan sebagaimana kebijakan di Jawa Timur melakukan pembatasan gula keluar wilayah Jawa Timur ataupun pembatasan jumlah ternak keluar di provinsi NTB. Penerapan kebijakan tersebut dapat diperluas pada komoditas strategis yang lain seperti cabe, bawang merah, beras, dan komoditas lainnya. Masalah pasokan barang untuk komoditas tidak tahan lama seperti tomat, cabe dan

sayur-sayuran juga memerlukan kebijakan *non generic* seperti rekayasa masa tanam, sehingga ketersediaan pasokan dapat senantiasa terjaga sepanjang musim.

Tabel 2.2
Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi di Kota Mataram dan Bima Triwulan IV 2013

Kota Mataram								
Oktober			November			Desember		
No.	JenisBarang	Sumbangan Inflasi (%)	No.	JenisBarang	Sumbangan Inflasi (%)	No.	JenisBarang	Sumbangan Inflasi (%)
1	CABE RAWIT	0.1625	1	BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	0.1822	1	TOMAT SAYUR	0.2389
2	BAWANG MERAH	0.1233	2	BAWANG MERAH	0.1111	2	BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	0.1383
3	JERUK	0.0937	3	TARIP LISTRIK	0.0801	3	BAWANG MERAH	0.1117
4	BERAS	0.0932	4	BERAS	0.073	4	CABE RAWIT	0.1044
5	BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	0.0882	5	MIE	0.0478	5	DAGING SAPI	0.102
6	BATU BATA/BATU TELA	0.0734	6	KEMBUNG/GEMBUNG	0.047	6	ROKOK KRETEK FILTER	0.0355
7	TUKANG BUKAN MANDOR	0.0559	7	PIR	0.0207	7	KANGKUNG	0.0355
8	BAYAM	0.0521	8	BAYAM	0.0194	8	KACANG PANJANG	0.0269
9	CABE MERAH	0.05	9	SAWI HIJAU	0.019	9	ROKOK PUTIH	0.0201
10	KONTRAK RUMAH	0.0472	10	WORTEL	0.0125	10	BAWANG PUTIH	0.017

Kota Bima								
Oktober			November			Desember		
No.	JenisBarang	Sumbangan Deflasi (%)	No.	JenisBarang	Sumbangan Inflasi (%)	No.	JenisBarang	Sumbangan Deflasi (%)
1	TOMAT SAYUR	-0.4425	1	TENGGIRI	0.5824	1	TONGKOL	-0.4259
2	BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	-0.3862	2	SELAR	0.0994	2	TENGGIRI	-0.2317
3	SELAR	-0.1487	3	BANDENG	0.0844	3	KAKAP MERAH	-0.0776
4	AYAM HIDUP	-0.0978	4	TOMAT SAYUR	0.0824	4	TELUR AYAM RAS	-0.0458
5	TONGKOL	-0.0823	5	BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	0.075	5	CABE MERAH	-0.0352
6	TERI	-0.0646	6	TONGKOL	0.0611	6	PISANG	-0.0321
7	KAKAP MERAH	-0.0637	7	BERAS	0.0555	7	BAWANG PUTIH	-0.0276
8	EMAS PERHIASAN	-0.0527	8	KAKAP MERAH	0.0433	8	KANGKUNG	-0.0227
9	TELUR AYAM RAS	-0.0407	9	TARIP LISTRIK	0.0404	9	CUMI-CUMI	-0.0206
10	ASAM	-0.0326	10	BAYAM	0.0366	10	DAUN KELOR	-0.0181

Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

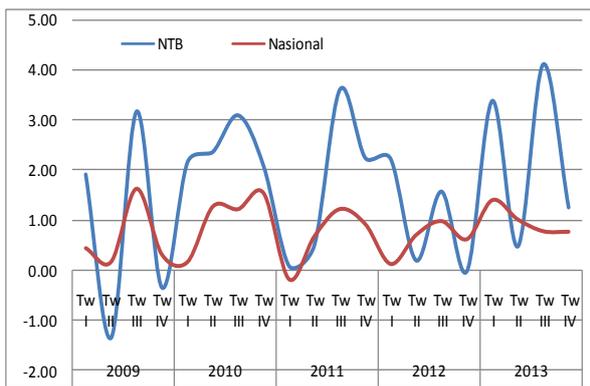
Berdasarkan komoditas penyumbang inflasi tertinggi di triwulan IV 2013, terdapat beberapa komoditas yang memiliki persistensi inflasi yang tinggi seperti bawang merah, tomat sayur, cabe rawit, ikan tongkol, ikan tenggiri, beras dan bayam. Seluruh komoditas tersebut adalah komoditas bahan makanan yang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan dan tingkat permintaan. Oleh karena itu, pengendalian pasokan pada tingkat permintaan tinggi menjadi sangat relevan dalam usaha pengendalian inflasi baik di Kota Mataram maupun Bima.

Kenaikan tarif listrik dan bahan bakar rumah tangga merupakan kebijakan pemerintah, sehingga kenaikan hanya akan terjadi pada saat pemerintah menaikkan harga komoditas tersebut. Namun demikian, untuk menjaga stabilitas harga di tingkat pengecer pemerintah provinsi sudah mengeluarkan SK untuk mengendalikan harga eceran gas di tingkat pengecer akhir dengan penetapan HET gas LPG 3kg di provinsi NTB.

2.3.2 INFLASI TRIWULANAN

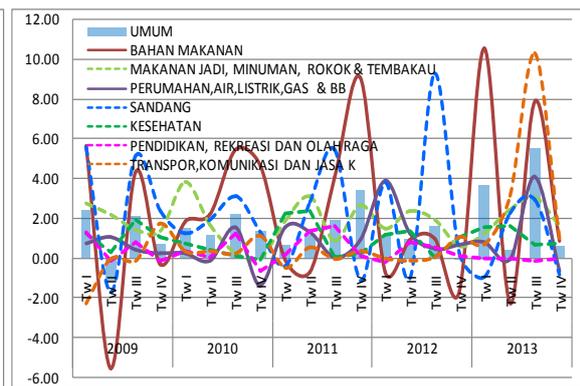
Secara triwulanan, inflasi provinsi NTB mengalami fluktuasi yang cukup tajam, berbeda dengan fluktuasi inflasi nasional yang relatif lebih landai. Berfluktuasinya inflasi NTB secara triwulanan, terutama di triwulan I 2013 disebabkan oleh adanya perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, sedangkan inflasi tinggi di triwulan III lebih disebabkan oleh adanya kenaikan BBM dan perayaan Idul Fitri. Fluktuasi inflasi cenderung tinggi pada perayaan hari raya agama Islam, dikarenakan oleh demografi penduduk NTB yang 96% beragama Islam, sehingga perayaan hari raya Islam relative lebih meriah dibanding daerah lain di Indonesia. Pola inflasi tersebut sebenarnya dapat ditanggulangi dengan peningkatan pasokan baik dari dunia usaha ataupun pemerintah, sebagai contoh, di provinsi Bali, inflasi buah-buahan pada Bulan Oktober saat perayaan Galungan dapat ditekan karena penyediaan pasokan yang mencukupi, sehingga harga buah tidak meningkat namun justru mengalami penurunan.

Grafik 2.34
Perkembangan Inflasi Provinsi NTB dan Nasional secara Triwulanan



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 2.35
Perkembangan Inflasi Triwulanan Berdasarkan Komoditas



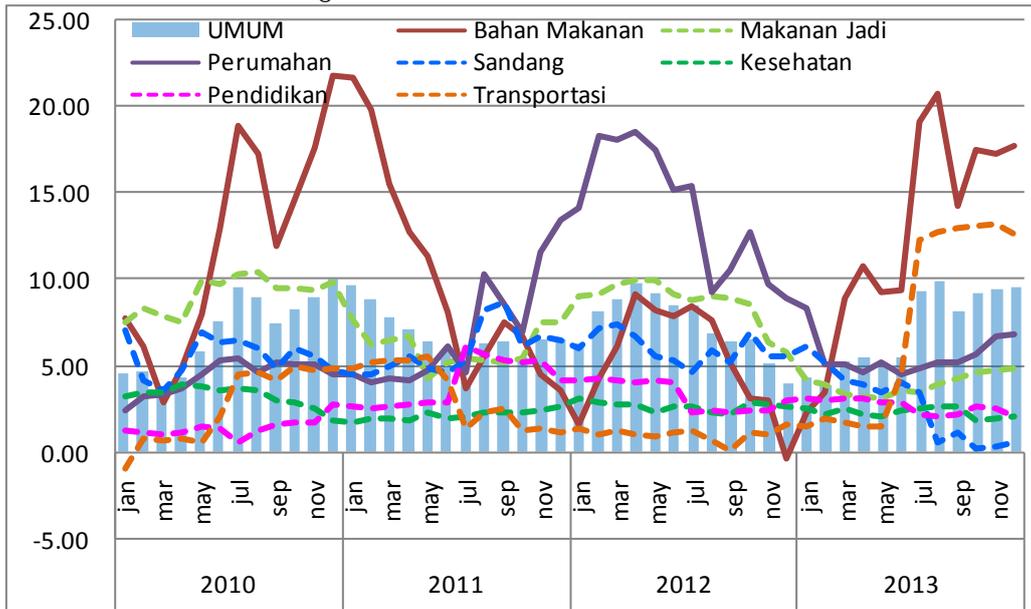
Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Fluktuasi inflasi triwulanan sepanjang tahun 2013 terjadi pada komoditas bahan makanan dan transportasi, komunikasi dan jasa keuangan, diikuti oleh komoditas perumahan, listrik, air, gas dan bahan bakar. Kenaikan inflasi sandang hanya terjadi pada triwulan III 2013 seiring dengan adanya perayaan hari raya Idul Fitri yang meningkatkan permintaan sandang terutama di Kota Mataram.

2.3.3 Inflasi Tahunan

Inflasi tahunan provinsi NTB tahun 2013 sebesar 9,51% (yoy) tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Tingginya inflasi tahunan terutama didorong oleh inflasi pada kelompok komoditas bahan makanan hingga 17,74% (yoy) dan menyumbang hingga 4,88% (sumbangan yoy) terhadap total inflasi NTB.

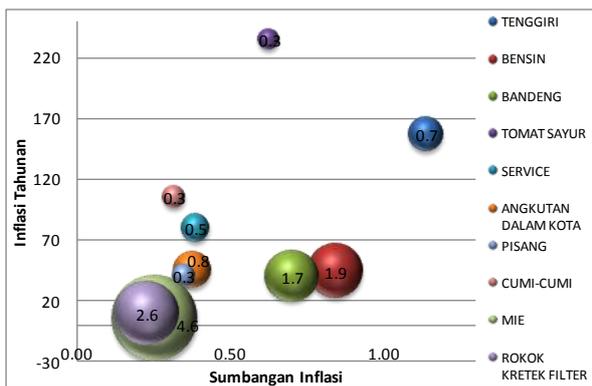
Grafik 2.36
Perkembangan Inflasi Tahunan Berdasarkan Komoditas



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

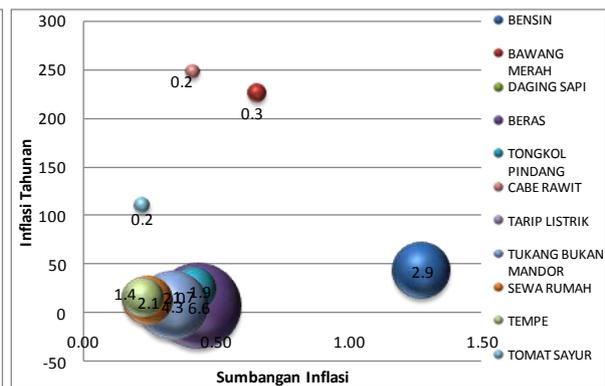
Sepanjang triwulan IV 2013, inflasi secara tahunan masih mengalami kenaikan namun dengan karakter inflasi yang berbeda dibanding tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh majunya pelaksanaan hari raya Idul Adha dibanding tahun sebelumnya dan naiknya tarif dasar listrik dan bahan bakar gas.

Grafik 2.37
Komoditas Penyumbang Inflasi Tahunan di Kota Bima



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 2.38
Komoditas penyumbang Inflasi tahunan di Kota Mataram



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Berdasarkan komoditas penyumbang inflasi tahunan terbesar, inflasi di Kota Bima terutama disebabkan oleh adanya kenaikan harga ikan tenggiri sebesar 43,06% (yoy) di bulan November dan kenaikan harga yang tinggi di bulan-bulan sebelumnya, sehingga inflasi tahunan langsung dipengaruhi kenaikan tersebut dengan inflasi tahunan mencapai 156,8% (yoy) dibanding tahun sebelumnya. Bobot konsumsi yang cukup besar membuat sumbangan inflasi komoditas ikan tenggiri juga menjadi besar. Selanjutnya komoditas terbesar kedua penyumbang

inflasi di Kota Bima adalah bensin, diikuti komoditas bandeng. Kenaikan harga tomat sayur yang mencapai lebih dari 200% (yoy) juga menyumbang inflasi tertinggi di Kabupaten Bima.

Sedangkan di kota Mataram, inflasi terutama didorong oleh naiknya harga bensin hingga 43,55% (yoy). Bawang merah menjadi komoditas penyumbang inflasi terbesar kedua dengan inflasi sebesar 225,81% (yoy), namun dengan bobot konsumsi hanya sebesar 0,29%, menjadikan sumbangan inflasi bawang merah hanya sebesar 0,66% (yoy). Demikian pula dengan komoditas cabe rawit, walaupun terjadi inflasi hingga 248,39% (yoy) dibanding tahun sebelumnya, namun karena bobot konsumsi hanya 0,17% menjadikan sumbangan inflasi hanya sebesar 0,41% (sumbangan yoy) dibanding total inflasi.

Komoditas tomat sayur, cumi-cumi dan apel termasuk dalam 20 komoditas penyumbang inflasi tertinggi baik di kota Mataram maupun Bima. Selanjutnya tingginya sumbangan inflasi komoditas bensin, tarif listrik dan angkutan dalam kota lebih disebabkan oleh adanya kebijakan kenaikan harga BBM dan listrik yang dilakukan pemerintah. Komoditas lain yang persisten tinggi sepanjang tahun di kota Mataram adalah bawang merah, daging sapi, beras, tongkol dan cabe rawit. Sedangkan komoditas yang persisten tinggi sepanjang tahun di kota Bima adalah komoditas tenggiri, bandeng, mie, ayam ras dan tongkol.

2.4 INFLASI BERDASARKAN KOTA

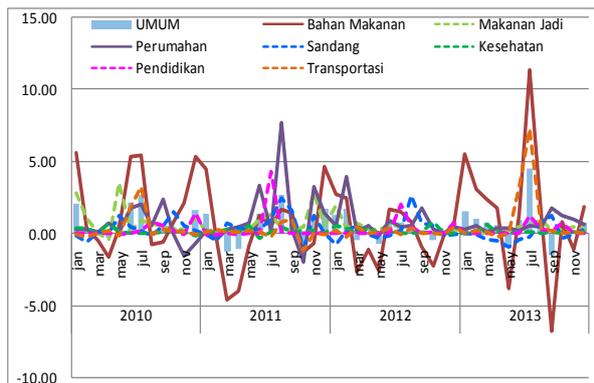
Di sepanjang tahun 2013, Inflasi Kota Bima cenderung lebih tinggi dibanding inflasi di Kota Mataram. Provinsi NTB memiliki 2 kota perhitungan inflasi yaitu kota Mataram dan kota Bima. Ke-dua kota tersebut memiliki karakteristik inflasi yang berbeda karena berada di dua pulau yang berbeda, dengan perilaku konsumsi masyarakat yang berbeda pula. Berdasarkan data komoditas penyumbang inflasi tertinggi, inflasi di Kota Mataram lebih banyak disebabkan oleh inflasi bahan makanan, sedangkan di Kota Bima walaupun inflasi juga disumbangkan dari kenaikan harga bahan makanan, namun jenis penyumbang inflasi di luar bahan makanan lebih banyak, seperti biaya servis, angkutan dalam kota, rokok kretek filter, soto, bensin dan tarif listrik.

Penyumbang inflasi di tiap bulan juga cenderung berbeda yang menunjukkan adanya perbedaan karakteristik pasar di masing-masing kota. Sepanjang triwulan IV 2013, di bulan Oktober 2013 hanya terdapat 1 komoditas yang sama dari 10 komoditas penyumbang inflasi tertinggi yaitu bahan bakar rumah tangga. Di bulan November terdapat 4 komoditas yang sama dengan 2 diantaranya merupakan komoditas *administered price*, beras dan bayam. Di bulan Desember hanya terdapat 2 komoditas yang sama yaitu bawang putih yang suplai barangnya sama-sama dari Surabaya dan kangkung.

2.4.1 Kota Mataram

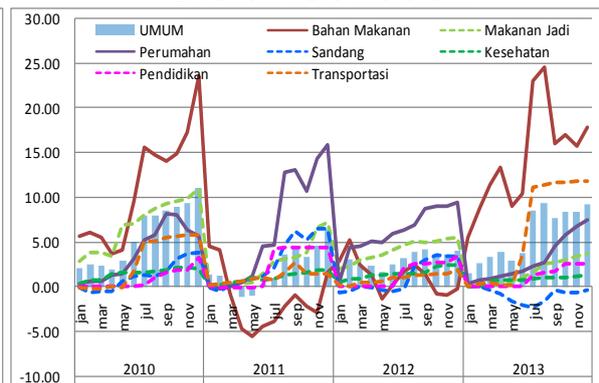
Inflasi kota Mataram hingga triwulan III 2013 cenderung tinggi namun tertahan oleh deflasi yang cukup besar di bulan September sebesar 1,51% (mtm). Pada akhir tahun 2013, inflasi kota Mataram tercatat sebesar 9,27% (yoy), inflasi komoditas bahan makan menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan nilai inflasi mencapai 17,80% (yoy) dan menyumbang hingga 4,78% (sumbangan yoy) terhadap total inflasi Kota Mataram. Perumahan menjadi komoditas penyumbang inflasi terbesar kedua di kota Mataram dengan sumbangan inflasi hingga 2,00% (sumbangan yoy) dan mengalami inflasi tahunan sebesar 7,49% (yoy). Kelompok komoditas transportasi, komunikasi dan jasa keuangan menjadi penyumbang inflasi terbesar ketiga dengan nilai inflasi tahunan mencapai 11,76% (yoy) dan menyumbang inflasi sebesar 1,61% (yoy). Adapun deflasi hanya terjadi pada komoditas sandang yang mengalami deflasi sebesar 0,48% (yoy) dengan sumbangan inflasi sebesar 0,02% (sumbangan yoy) yang disebabkan oleh adanya penurunan harga emas.

Grafik 2.39
Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Mataram



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 2.40
Perkembangan Inflasi Berdasarkan Capaian Bulanan Kota Mataram

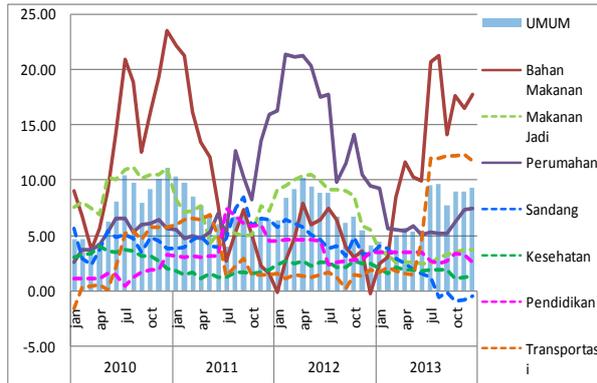


Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Kenaikan harga komoditas bahan makanan di Kota Mataram sepanjang tahun 2013 terutamadisebabkan oleh kenaikan BBM bersamaan dengan hari raya Idul Fitri sehingga terjadi kenaikan harga yang signifikan. Adanya Perayaan Maulid Nabi Muhamad SAW dan hari raya Idul Adha dan Galungan tanpa dibarengi dengan antisipasi ketersediaan pasokan serta ekspektasi harga tinggi disetiap perayaan hari besar juga meningkatkan inflasi secara signifikan. Pergerakan harga komoditas juga menunjukkan adanya tren harga yang semakin homogen dengan harga nasional, hal inimenunjukkan struktur pasar komoditas di Kota Mataram yang relatif lebih terbuka. Kemudahankomunikasi yang ada saat inimembuat harga menjadi lebih mudah mengalami penyesuaian dengan perubahan harga di daerah lain. Terlebih pada saat kenaikan BBM, disinyalir juga terjadi spekulasi ambil untung yang dilakukan oleh pedagang.

Grafik 2.41

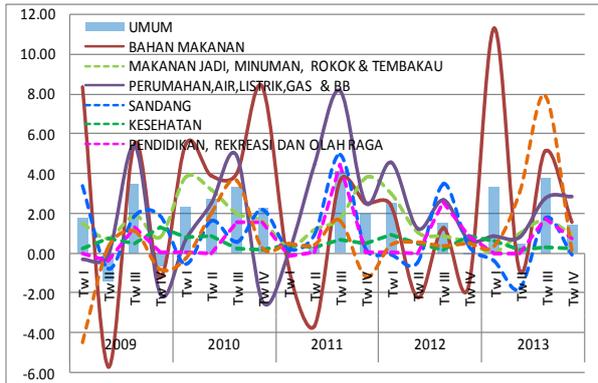
Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Mataram



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 2.42

Perkembangan Inflasi Triwulanan Kota Mataram



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

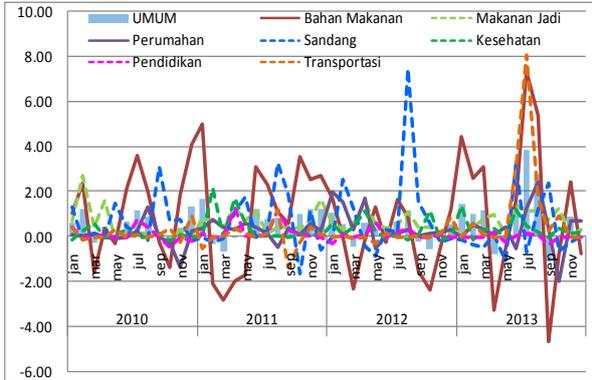
Berdasarkan data triwulanan, terlihat bahwa fluktuasi harga bahan makanan pada triwulan I lebih tinggi dibanding triwulan III, selain diakibatkan perayaan Maulid Nabi Muhamad SAW, juga dikarenakan harga dasar yang terbentuk di triwulan III sudah relatif tinggi dan pada bulan September 2013, harga bahan makanan mengalami deflasi cukup besar, sehingga terkesan lebih landai. Bandingkan dengan baik data bulanan, tahun dasar dan tahunan yang menunjukkan adanya kenaikan harga di sepanjang triwulan I 2013.

2.4.2 Kota Bima

Hingga akhir tahun 2013, inflasi di Kota Bima mencapai 10,42% (yoy) dibanding tahun sebelumnya. Inflasi kota Bima terlihat relatif rendah hingga bulan Juli 2013 dibanding kota Mataram, sebelum akhirnya mengalami kenaikan tinggi di bulan Agustus hingga akhir tahun 2013. Tingginya inflasi lebih disebabkan oleh naiknya biaya transportasi akibat dari kenaikan BBM, hal ini terlihat dari meningkatnya biaya angkutan dalam kota dan luar kota yang berimbas pada kenaikan harga barang yang lain. Komponen transportasi memegang peranan cukup penting dalam meningkatkan inflasi di Kota Bima dikarenakan kondisi pasokan komoditas konsumsi yang relatif tergantung dengan daerah lain seperti Pulau Lombok dan daerah lain dalam hal ketersediaan pasokan. Sehingga, kenaikan BBM memiliki dampak langsung dan tidak langsung yang cukup besar, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya inflasi kelompok komoditas transportasi secara bertahap hingga akhir tahun 2013 yang selanjutnya diikuti oleh kenaikan beberapa komoditas lainnya.

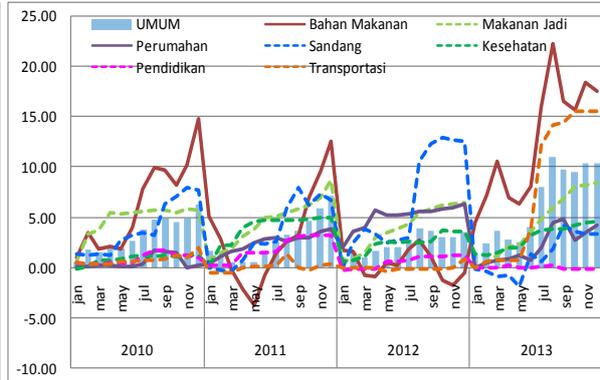
Beberapa komoditas yang menyumbang inflasi terbesar di Kota Bima antara lain komoditas ikan tenggiri, ikan tongkol, ikan selar, ikan kakap merah, cumi-cumi dan teri. Sedangkan tingginya inflasi telur ayam dan ayam hidup lebih disebabkan oleh adanya gangguan pasokan, selain kenaikan biaya transportasi, sehingga harga meningkat.

Grafik 2.43
Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Bima



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 2.44
Perkembangan Inflasi Berdasarkan Capaian Bulanan Kota Bima

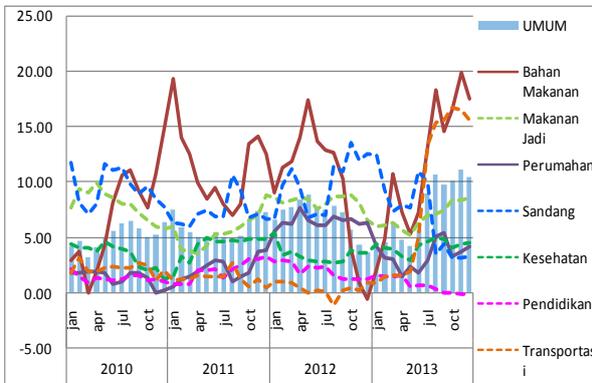


Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Berdasarkan arah pergerakan inflasi bulanan, inflasi di kota Bima terdapat persamaan arah dengan kota Mataram namun berbeda penekanan di tiap bulannya. Apabila dilakukan analisa berdasarkan data per komoditas, tampak perbedaan karakter inflasi di Kota Bima dibandingkan dengan inflasi di Kota Mataram. Di triwulan IV 2013, bahan makanan hanya mengalami inflasi di bulan November 2013 namun di bulan Oktober dan Desember 2013 terjadi deflasi, berbanding terbalik dengan arah inflasi Kota Mataram.

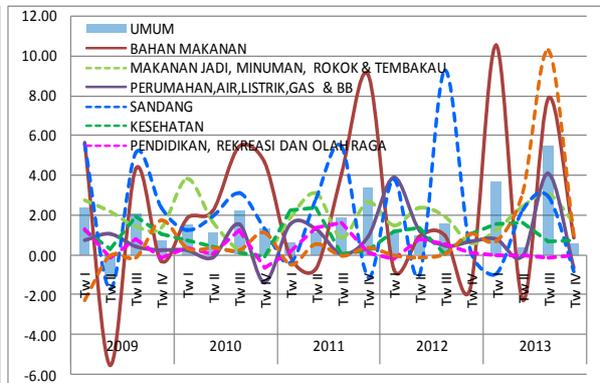
Inflasi kelompok komoditas transportasi, komunikasi dan jasa keuangan juga menunjukkan tren yang terus meningkat hingga akhir tahun 2013, berbeda dengan komoditas transportasi di Kota Mataram yang hanya naik tinggi di bulan Juli 2013 dan selebihnya kembali normal. Besarnya peran sektor pengangkutan dalam penyediaan komoditas di Kota Bima, membuat penyesuaian harga bertahap angkutan dalam dan luar kota berpengaruh cukup signifikan terhadap inflasi pada kelompok komoditas transportasi di Kota Bima.

Grafik 2.45
Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Bima



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 2.46
Perkembangan Inflasi Triwulanan Kota Bima



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Hingga triwulan III 2013, kenaikan harga bahan makanan tidak sedalam kenaikan harga di kota Mataram. Pada triwulan IV 2013, kenaikan harga bahan makanan di Kota Bima

mengalami lonjakan kenaikan yang cukup tinggi terutama disebabkan oleh hasil tangkapan ikan yang berkurang, berbeda dengan karakter inflasi di kota Mataram yang lebih digerakkan oleh konsumsi bumbu-bumbuan, buah dan sayuran. Hal ini disebabkan karena tingkat konsumsi dari komoditas ikan segar di kota Mataram hanya sebesar 3,07%, tidak sebesar Kota Bima yang menyumbang hingga 7,64% dari total konsumsi masyarakat di Kota Bima.

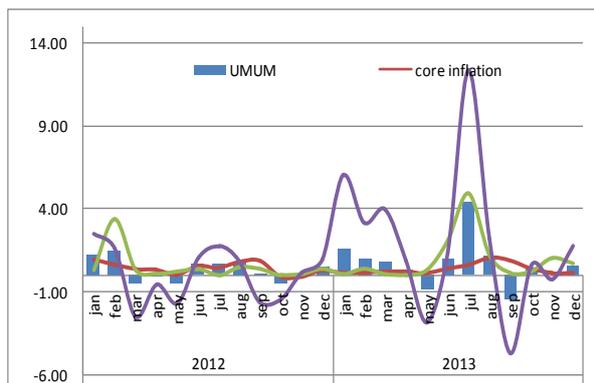
2.5 DISAGREGASI INFLASI

2.5.1 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan disagregasi inflasi, pada triwulan IV 2013 terlihat bahwa inflasi baik inflasi *volatile food* dan *core inflation* mulai terlihat melambat dibanding triwulan sebelumnya. Namun pada komoditas *administered price*, justru menunjukkan adanya peningkatan di triwulan IV yang disebabkan oleh adanya kenaikan TDL dan harga LPG 3 kg. Pergerakan inflasi antara kota penghitungan inflasi juga terlihat berbeda terutama pada komoditas *volatile food*.

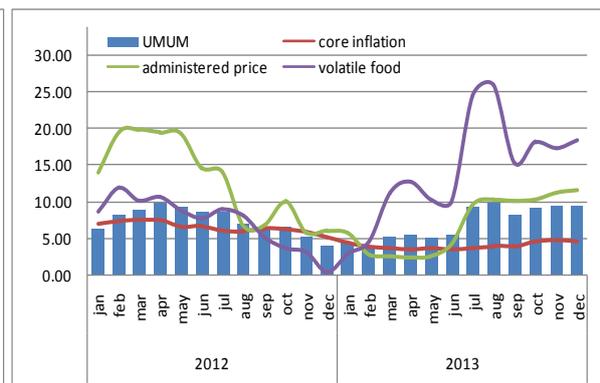
Inflasi *volatile food* pada triwulan IV secara bulanan terendah pada bulan Oktober, selanjutnya terjadi peningkatan di bulan November dikarenakan adanya panen beberapa komoditas hortikultura, dan kembali meningkat di bulan Desember disebabkan oleh peningkatan permintaan dan cuaca yang memburuk yang berpengaruh pada penurunan produksi dan tangkapan ikan. *Core inflation* masih tetap menunjukkan pergerakan harga yang stabil yang menunjukkan adanya permintaan yang stabil dengan ketersediaan pasokan yang mencukupi. Inflasi kembali terjadi pada komoditas *administered price*, seiring dengan meningkatnya TDL dan harga gas LPG di bulan November 2013.

Grafik 2.47
Disagregasi Inflasi Bulanan Provinsi NTB



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 2.48
Disagregasi Inflasi Tahunan Provinsi NTB



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

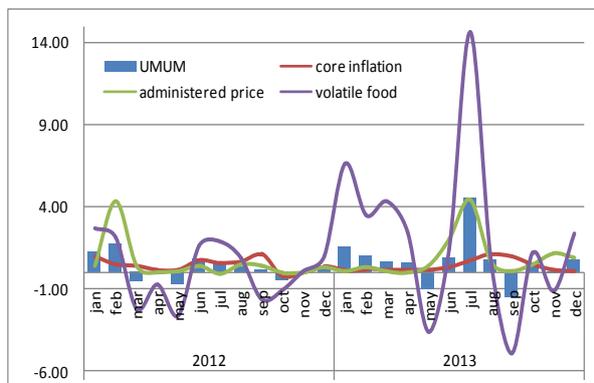
Secara tahunan, inflasi komoditas *volatile food* mengalami kenaikan tinggi di bulan Juli dan Agustus 2013 yang kemudian kembali menurun di bulan September 2013. Harga barang kemudian kembali meningkat di Oktober sehubungan dengan perayaan hari raya Idul Adha dan melandai di bulan November karena adanya deflasi beberapa komoditas. Harga kembali

mangalami peningkatan di bulan Desember 2013 seiring dengan adanya peningkatan permintaan dan cuaca yang memburuk.

2.5.2 Kota Mataram

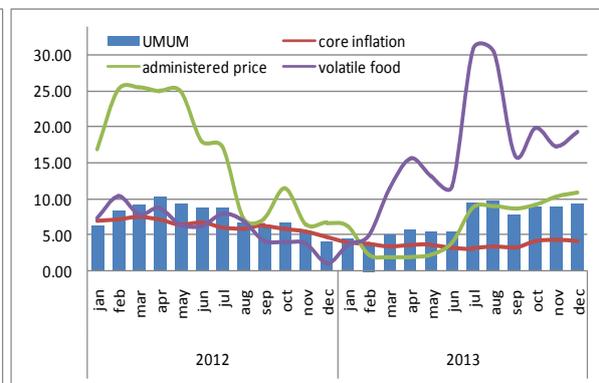
Pergerakan inflasi komoditas *volatile food* di Kota Mataram menunjukkan peningkatan di bulan Oktober dan Desember seiring dengan adanya peningkatan permintaan. Inflasi komoditas *volatile food* mengalami penurunan di bulan November, namun dibarengi dengan adanya kenaikan inflasi *administered price* sehingga secara total di Kota Mataram tetap terjadi inflasi.

Grafik 2.49
Disagregasi Inflasi Bulanan Kota Mataram



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 2.50
Disagregasi Inflasi Tahunan Kota Mataram



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

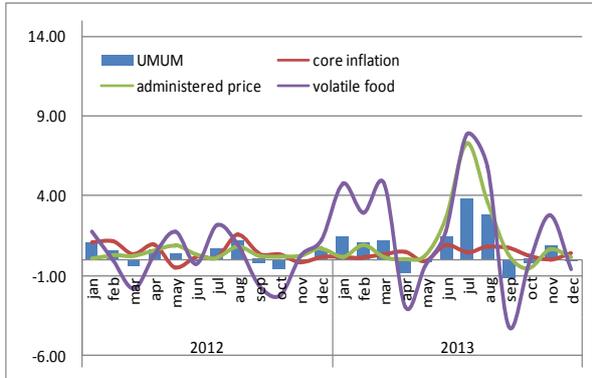
Secara tahunan, inflasi di Kota Mataram meningkat 9,27% (yoy). Peningkatan terutama didorong oleh inflasi pada komoditas *volatile food* yang juga diakibatkan oleh adanya kenaikan harga BBM pada komoditas *administered price*. Adanya kenaikan TDL dan bahan bakar rumah tangga sudah mulai meningkatkan inflasi pada komoditas *core inflation* dikarenakan oleh adanya kenaikan biaya input.

2.5.3 Kota Bima

Pergerakan Inflasi komoditas *volatile food* di Kota Bima sepanjang tahun 2013 mengalami 3 kali lonjakan besar yaitu di bulan Maret, Agustus dan November 2013. Pada bulan Januari tidak terjadi lonjakan harga komoditas *volatile food* seperti di pulau Lombok karena peringatan Maulid Nabi Muhamad SAW sebesar perayaan di Pulau Lombok. Tingginya lonjakan inflasi di bulan November 2013 lebih disebabkan oleh berkurangnya pasokan ikan karena memburuknya cuaca. Di bulan Oktober dan Desember juga terjadi deflasi pada komoditas *volatile food* yang menunjukkan tidak terlalu besarnya permintaan pada saat perayaan Idul Adha maupun pada pergantian tahun. Tingginya inflasi di Kota Mataram lebih disebabkan oleh keberadaan kota Mataram sebagai kota wisata, sehingga permintaan meningkat, sedangkan di

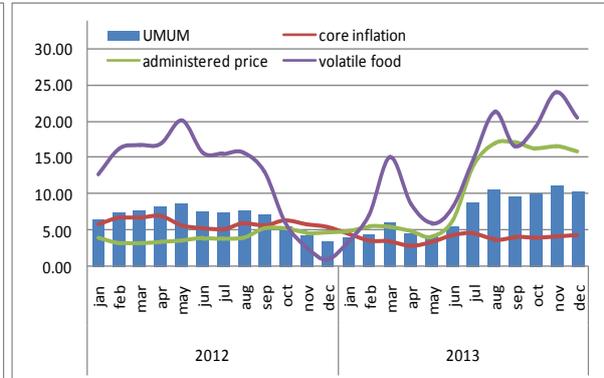
Kota Bima cenderung lebih landai seperti biasa. Penurunan harga juga disebabkan oleh cukupnya pasokan komoditas di Kota Bima di Bulan Oktober dan Desember.

Grafik 2.51
Disagregasi Inflasi Bulanan Kota Bima



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 2.52
Disagregasi Inflasi Tahunan Kota Bima



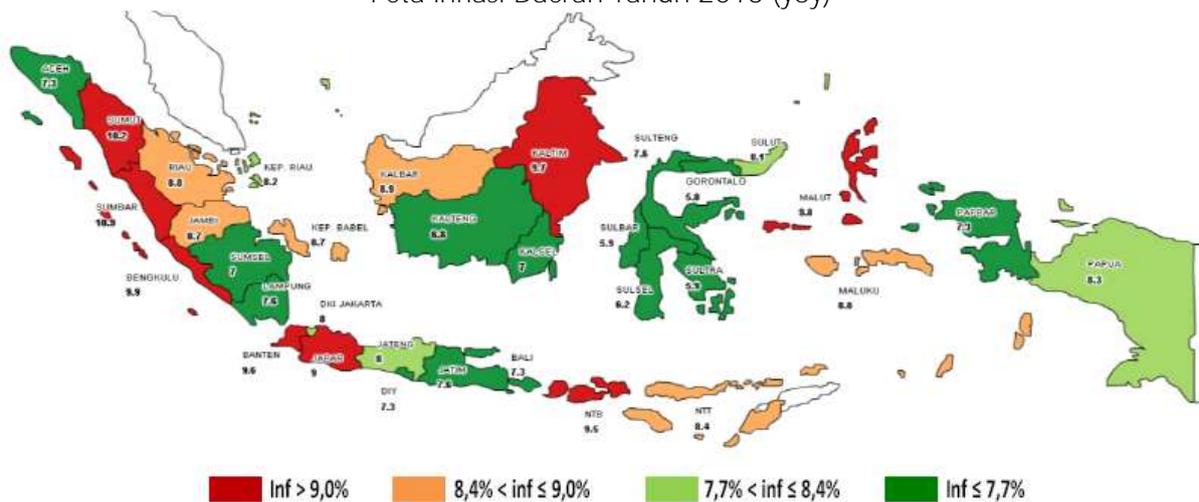
Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Pengaruh kenaikan tarif komoditas *administered price* belum terlalu berpengaruh terhadap inflasi komoditas *core inflation* yang tampak dari pergerakan inflasi *core inflation* yang masih relatif landai.

Pemetaan Struktur Pasar Komoditas Penyumbang Inflasi Terbesar di Provinsi Ntb

Sepanjang tahun 2013, Inflasi Provinsi NTB mencapai 9,51%, dan masuk dalam 9 besar Provinsi yang memiliki inflasi lebih dari 9% di tahun 2013. Daerah dengan inflasi tertinggi di Indonesia tersebut antara lain Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku Utara.

Grafik Boks 2.1.
Peta Inflasi Daerah Tahun 2013 (yoy)



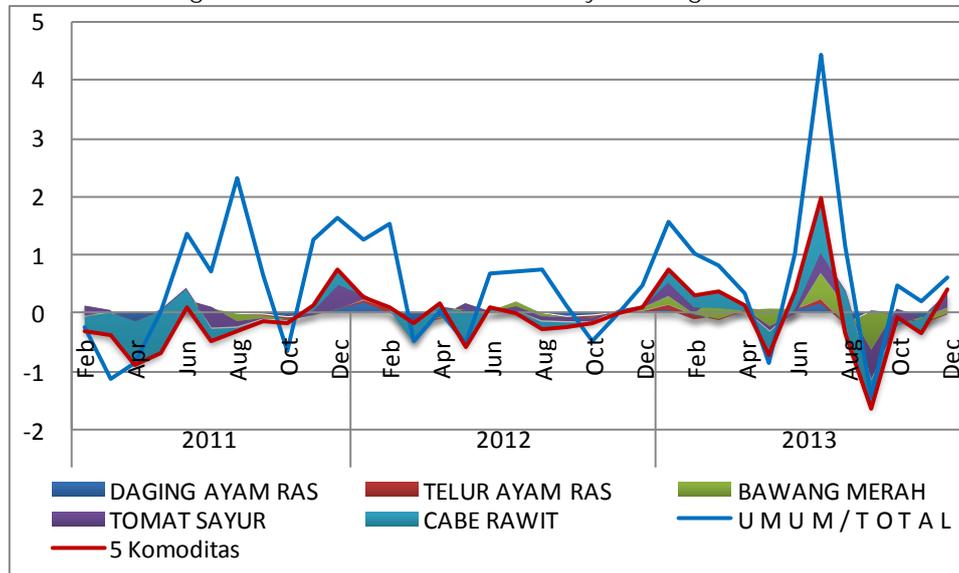
Sumber : BPS, Diolah

Tingginya inflasi di Provinsi NTB terutama disumbang oleh tiga kelompok komoditas utama antara lain kelompok komoditas bahan makanan dengan sumbangan sebesar 4,88% (sumbangan yoy), kelompok komoditas perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar dengan sumbangan sebesar 1,77% (sumbangan yoy), serta kelompok komoditas transportasi, komunikasi dan jasa keuangan dengan sumbangan tahunan mencapai 1,70% (sumbangan yoy). Ketiga kelompok komoditas mampu menyumbang hingga 8,35% dari total inflasi Provinsi NTB yang sebesar 9,51% (yoy).

Dari total 4,88% sumbangan kelompok komoditas bahan makanan, beberapa komoditas utama penyumbang inflasi antara lain daging ayam, daging sapi, telur ayam, tomat sayur, cabe rawit, bawang merah, tempe, cumi-cumi dan ikan tenggiri. Berdasarkan kesesuaian penyumbang inflasi bulanan, maka selain tempe, cumi-cumi dan ikan tenggiri, pergerakan komoditas di atas sesuai dengan pergerakan sumbangan inflasi total di Provinsi NTB. Penelitian terhadap komoditas daging sapi telah dilakukan penelitian pada tahun sebelumnya sehingga penelitian komoditas penyumbang inflasi Provinsi NTB tahun 2013 difokuskan pada lima

komoditas utama penyumbang inflasi yaitu daging ayam, telur ayam, bawang merah, tomat sayur dan cabe rawit.

Grafik Boks 2.2.
Sumbangan lima Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Bulanan



Sumber : BPS, Diolah

Berdasarkan arah pergerakan inflasi bulanan, didapatkan bahwa kelima komoditas utama penyumbang inflasi di atas, memiliki pergerakan inflasi yang relatif searah dengan inflasi total provinsi NTB, terlebih di tahun 2013 yang memiliki pergerakan relatif sama. Kenaikan ataupun penurunan inflasi sangat dipengaruhi oleh pergerakan lima komoditas utama tersebut. Terlebih pada bulan September 2013. Terjadinya deflasi yang cukup besar pada kelima komoditas tersebut, mampu menarik deflasi NTB ke level terendah dalam lima tahun terakhir. Pergerakan harga komoditas tersebut dirasa sangat fluktuatif, sehingga diperlukan pemahaman karakter dan struktur pasar yang lebih mendalam agar kebijakan yang ditempuh juga dapat semakin tepat sasaran.

Tabel Boks 2.1
Neraca Produksi lima Komoditas Utama

NERACA KOMODITAS	Produksi	Konsumsi	Surplus/ Defisit
Daging Ayam	15,176	14,050	1,126
Telur Ayam	1,338	25,346	(24,008)
Bawang Merah	100,989	11,846	89,143
Tomat Sayur	33,859	10,800	23,059
Cabe Rawit	29,700	6,570	23,130

Sumber : Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Badan Ketahanan Pangan, Diolah

Berdasarkan data produksi dan konsumsi kelima komoditas utama penyumbang inflasi, empat komoditas mengalami surplus produksi yang cukup tinggi, dan hanya satu komoditas yang mengalami defisit produksi. Komoditas daging ayam mengalami surplus terendah dengan nilai surplus hanya sebesar 1,13 ribu ton, atau sebesar 7,42% dari total produksi. Komoditas tomat sayur memiliki surplus produksi hingga 68,10%, yang berarti hanya sekitar 33% dari total produksi yang dikonsumsi. Cabe rawit bahkan memiliki surplus produksi hingga 77,88% dari total produksi, yang berarti hanya 22% dari total produksi NTB yang dikonsumsi. Surplus terbesar terjadi pada komoditas bawang merah dengan surplus produksi mencapai 88,12%, yang berarti hanya 11,3% produksi yang dikonsumsi, selebihnya dijual ke daerah yang lain.

Berdasarkan data perdagangan antar daerah, kekurangan produksi telur ayam didapatkan dari impor yang berasal dari provinsi Bali dan Jawa Timur. Surplus komoditas daging ayam lebih digunakan sebagai persediaan pangan. Surplus bawang merah diekspor ke provinsi lain terutama di kawasan timur Indonesia. Surplus komoditas cabe cabe rawit sebagian besar dijual ke daerah lain, walaupun seringkali ditemukan komoditas cabe rawit dari daerah lain dalam jumlah kecil. Surplus komoditas tomat sayur sebagian kecil mampu diolah menjadi produk bernilai tambah berupa manisan tomat oleh pengusaha lokal. Namun demikian, sebagian besar surplus komoditas belum diketahui ke daerah mana pengiriman komoditas tomat tersebut.

Dalam penelitian ini, struktur pasar dipetakan berdasarkan saluran komoditas yang ada, sedangkan penentuan kondisi persaingan di pasar tersebut menggunakan tiga pendekatan antara lain dengan menggunakan *Hirschman-Herfindahl Index* (HHI), *Concentration Ratio* empat pemain terbesar (*CR4*) dan *Minimum Efficiency Scale* (MES) atau hambatan masuk dalam pasar komoditas tersebut. Adapun kriteria pengukuran sebagai berikut :

Tabel Boks 2.2

Kriteria dalam *Hirschman-Herfindahl Index* (HHI)

HHI	<	0.01	→	<i>highly competitive index</i> .
HHI	<	0.1	→	<i>unconcentrated index</i> .
HHI	=	0.1 sd 0.18	→	<i>moderate concentration</i> .
HHI	>	0.18	→	<i>high concentration</i> .

Tabel Boks 2.3

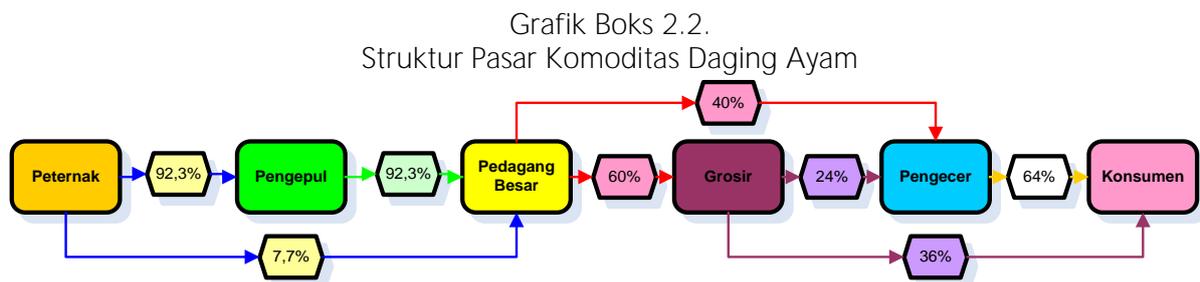
Kriteria dalam *Concentration Ratio* (*CR4*)

Nilai Konsentrasi CR ⁴	Definisi	Struktur Pasar
CR4 = 0%	Tidak ada konsentrasi	Pasar Persaingan Sempurna
CR4 = 0% - 50%	Konsentrasi rendah	Peralihan Pasar Persaingan Sempurna ke Oligopoli
CR4 = 50% - 80%	Konsentrasi menengah	Pasar Oligopoli
CR4 = 80% - 100%	Konsentrasi tinggi	Peralihan dari Oligopoli ke Monopoli
CR4 = 80% - 100%	Konsentrasi menyeluruh	Monopoli

Kriteria dalam HHI dibagi dalam empat kategori dari pasar dengan persaingan tinggi hingga terkonsentrasi, sedangkan kriteria dalam CR4 dibagi dalam lima kategori dari pasar persaingan sempurna hingga monopoli. Kriteria MES sebagaimana disampaikan Lubis (1997), $MES > 10\%$ menggambarkan hambatan masuk yang tinggi ke dalam suatu industri.

1. Daging Ayam

Pola distribusi komoditas daging ayam cukup rapi dan terdapat empat saluran distribusi komoditas yaitu pengepul, pedagang besar, grosir dan pengecer. Peternak memasarkan 92,3% komoditas melalui pengepul dan hanya 7,7% ke pedagang besar. Dari pengepul, 92,3% daging ayam dipasarkan ke pedagang besar, sehingga 100% komoditas dipasarkan ke pedagang besar. Dari 100% komoditas tersebut, 60% dipasarkan melalui grosir dan 40% langsung ke pengecer. Dari grosir, 60% dipasarkan langsung ke konsumen dan 40% lainnya dipasarkan ke pengecer. Pengecer kemudian memasarkan 64% total komoditas yang melalui mereka ke konsumen.



Berdasarkan hasil perhitungan HHI, CR4 dan MES didapatkan bahwa pasar komoditas daging ayam terkonsentrasi di tingkat pemasok dengan kondisi pasar antara oligopoli mengarah ke monopoli. Hambatan masuk di tingkat pengepul juga relatif tinggi. Dari sisi kebijakan, kontrol harga atas komoditas tersebut relatif mudah dilakukan karena jumlah perusahaan pengendali relatif sedikit. Namun demikian, peran pemerintah dalam melakukan pengendalian harga relatif sangat kecil. Oleh karena itu, kontrol melalui pemain utama menjadi cara yang paling efektif dalam mengendalikan harga.

Tabel Boks 2.4.
Hasil Perhitungan HHI, CR4 dan MES untuk Komoditas Daging Ayam

Kategori Pedagang	HHI			CR ⁴			MES
	Pasokan Sedikit	Pasokan Normal	Pasokan Banyak	Pasokan Sedikit	Pasokan Normal	Pasokan Banyak	
Pengepul	0.47	0.47	0.47	98.72	98.72	98.72	0.62
Pedagang Besar	0.03	0.03	0.03	32.73	32.73	32.73	0.13

2. Telur Ayam

Rantai distribusi telur ayam relatif lebih pendek. Dari peternak, komoditas langsung didistribusikan ke pengepul, pedagang besar, pedagang eceran maupun langsung ke konsumen. Demikian pula komoditas dari pengepul sebagian besar langsung didistribusikan ke pengecer dan sebagian kecil ke pedagang besar dan konsumen demikian pula dengan pedagang besar dan pengecer yang juga langsung mendistribusikan ke konsumen, sehingga

konsumen memiliki rantai barang yang cukup beragam. Komoditas impor juga langsung masuk melalui pengepul dan pedagang besar.



Berdasarkan hasil perhitungan HHI, CR4 dan MES didapatkan bahwa pasar komoditas telur ayam dalam rantai distribusi apapun relatif bersaing sempurna. Dengan adanya persaingan yang sempurna dan kemudahan akses dalam mendapatkan barang, maka tidak ada pedagang yang mengontrol harga barang. Harga relatif disebabkan oleh masalah pasokan semata, yaitu kenaikan harga dari importir dan bila jumlah pasokan mengalami penurunan. Operasi pasar dinilai cukup efektif bila dilakukan pada komoditas telur ayam ras.

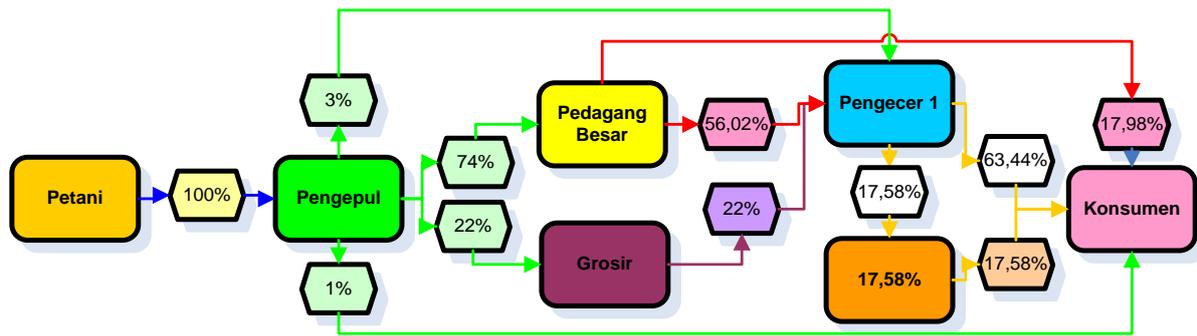
Tabel Boks 2.4.
Hasil Perhitungan HHI, CR4 dan MES untuk Komoditas Telur Ayam

Kategori Pedagang	HHI			CR ⁴			MES
	Pasokan Sedikit	Pasokan Normal	Pasokan Banyak	Pasokan Sedikit	Pasokan Normal	Pasokan Banyak	
Pengepul	0.00	0.01	0.00	11.39	13.91	9.23	0.06
Pedagang Besar	0.00	0.00	0.00	0.38	0.53	0.17	0.00

3. Bawang Merah

Rantai distribusi komoditas bawang merah relatif panjang. Jumlah saluran distribusi dari petani ke konsumen sebanyak lima rantai distribusi dengan muara distribusi di tingkat pengepul. Sebagian besar pasokan dari pengepul didistribusikan melalui perdagangan besar dan hanya 22% yang didistribusikan melalui grosir. Pengepul juga melayani penjualan langsung ke konsumen atau pengecer namun tidak terlalu besar. Dari pedagang besar, sebagian besar dijual ke pedagang eceran dan sebagian kecil juga dijual langsung kepada konsumen.

Grafik Boks 2.2.
Struktur Pasar Komoditas Bawang Merah



Berdasarkan hasil perhitungan HHI, CR4 dan MES didapatkan bahwa pasar komoditas bawang merah relatif terkonsentrasi pada pengepul. Bahkan dalam kondisi normal, nilai CR4 lebih dari 100% atau mengarah pada monopoli oleh empat pengepul besar komoditas bawang merah. Namun demikian, dalam perhitungan nilai lebih dari 100% tidak dimungkinkan. Tingginya nilai lebih disebabkan oleh adanya porsi komoditas yang diimpor namun oleh rantai di bawah pengepul, sehingga nilai CR4 lebih dari 100%. Hambatan masuk bisnis di tingkat pengepul juga relatif tinggi

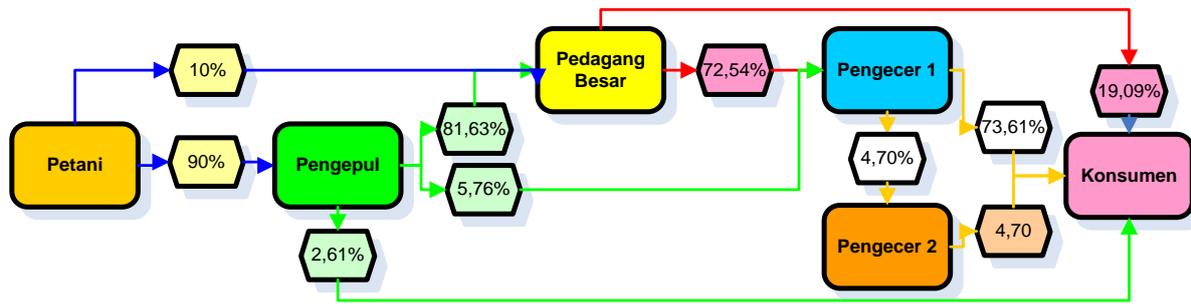
Tabel Boks 2.4.
Hasil Perhitungan HHI, CR4 dan MES untuk Komoditas Bawang Merah

Kategori Pedagang	HHI			CR ⁴			MES
	Pasokan Sedikit	Pasokan Normal	Pasokan Banyak	Pasokan Sedikit	Pasokan Normal	Pasokan Banyak	
Pengepul	0.25	0.52	0.18	92.44	101.68	80.11	0.25
Pedagang Besar	0.00	0.00	0.00	6.05	3.70	4.01	0.02

4. Tomat Sayur

Rantai komoditas tomat sayur relatif pendek. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh sifat produk yang tidak tahan lama. Muara distribusi berada di tingkat pengepul dan pedagang besar yang masing-masing mendistribusikan 90% dan 91,63% dari total komoditas yang dipasarkan.

Grafik Boks 2.2.
Struktur Pasar Komoditas Tomat Sayur



Berdasarkan hasil perhitungan HHI, CR4 dan MES didapatkan bahwa pasar komoditas tomat sayur relatif berada dalam kondisi persaingan sempurna. Baik nilai HHI maupun CR4 menunjukkan nilai di bawah 0,01% dan kurang 50% yang berarti pasar berada pada peralihan pasar persaingan sempurna dan oligopoli. Walaupun tidak ada pemain dominan, di tingkat petani, tidak ada petani yang bisa menjual ke rantai pasokan terendah. Bahkan penjualan bermuara di pengepul walaupun penjualan pengepul juga bermuara ke pedagang besar. Selain rendahnya harga jual, petani tidak berani berspekulasi dengan langsung menjual ke rantai pasokan di bawahnya dikarenakan adanya potensi tidak dibeli oleh pemasok dikarenakan merusak rantai pasokan yang sudah mereka bentuk. Dengan kondisi ini, maka harga akan sangat berfluktuasi tergantung oleh musim dan ketersediaan pasokan.

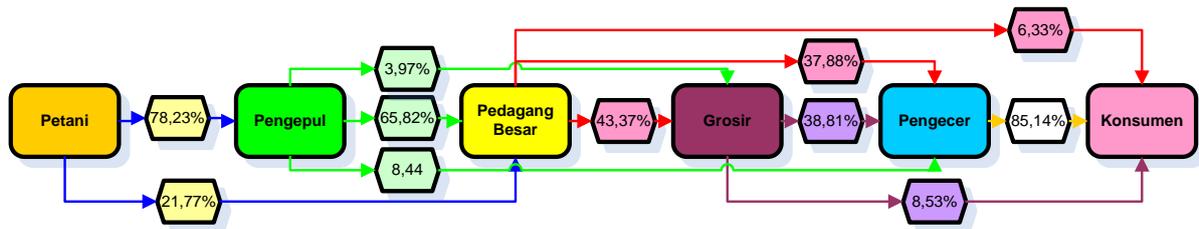
Tabel Boks 2.4.
Hasil Perhitungan HHI, CR4 dan MES untuk Komoditas Tomat Sayur

Kategori Pedagang	HHI			CR ⁴			MES
	Pasokan Sedikit	Pasokan Normal	Pasokan Banyak	Pasokan Sedikit	Pasokan Normal	Pasokan Banyak	
Pengepul	0.01	0.01	0.00	14.72	7.72	8.02	4.37
Pedagang Besar	0.00	0.00	0.00	2.80	1.81	4.14	1.17

5. Cabe Rawit

Pasar komoditas cabe rawit relatif memiliki saluran distribusi yang cukup beragam. Walaupun hanya terdiri dari empat rantai distribusi, namun masing-masing rantai relatif dapat melayani beberapa rantai di bawahnya, sehingga pilihan pasokan cukup beragam yang juga mampu menjaga harga jual dengan cukup stabil. Pedagang besar menjadi muara distribusi disusul oleh pengepul.

Grafik Boks 2.2.
Struktur Pasar Komoditas Cabe Rawit



Berdasarkan hasil perhitungan HHI, CR4 dan MES didapatkan bahwa pasar komoditas cabe rawit dalam kondisi normal terkonsentrasi secara moderat pada pengepul. Empat pemain besar juga menguasai hingga 79,80% total pasar cabai di NTB dari sisi nilai konsumsi sedangkan komoditas cabai yang diekspor tidak masuk dalam penelitian. Dikarenakan suplai barang mengandalkan suplai dari petani lokal, maka daya tawar pengepul justru mengalami penurunan ketika terjadi *shock* pasokan. Bahkan ketika pasokan banyak, daya tawar pedagang besar relatif lebih besar dibanding pengepul dikarenakan oleh cukup besarnya barang yang juga dapat diperoleh langsung dari petani. Hambatan masuk baik di tingkat pengepul maupun pedagang besar relatif besar yang ditunjukkan oleh nilai MES lebih dari 10%.

Tabel Boks 2.4.
Hasil Perhitungan HHI, CR4 dan MES untuk Komoditas Cabe Rawit

Kategori Pedagang	HHI			CR ⁴			MES
	Pasokan Sedikit	Pasokan Normal	Pasokan Banyak	Pasokan Sedikit	Pasokan Normal	Pasokan Banyak	
Pengepul	0.02	0.13	0.01	29.99	79.80	18.81	15.25
Pedagang Besar	0.02	0.00	0.09	21.86	16.27	35.07	15.25
Grosir	0.10	0.07	0.03	40.15	35.58	23.64	30.50

BAB 3

PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

Perkembangan perbankan di Nusa Tenggara Barat sepanjang triwulan IV-2013 terus menunjukkan kinerja yang positif. Kondisi tersebut tercermin dari peningkatan kinerja indikator utama perbankan meliputi total aset bank umum tercatat Rp22,74 triliun dengan angka pertumbuhan mencapai 14,89% (yoy). Fungsi intermediasi perbankan berjalan baik dan didukung dengan kinerja kredit yang baik dengan *Non Performing Loan* (NPL) sebesar 1,40% atau masih dibawah ketentuan sebesar 5%.

3.1. PERKEMBANGAN KINERJA BANK UMUM

Sampai dengan Triwulan IV-2013, kinerja Bank Umum di Nusa Tenggara Barat (NTB) secara umum masih menunjukkan perkembangan positif dan mencerminkan pelaksanaan fungsi intermediasi yang berjalan dengan baik. Peningkatan kinerja Bank Umum di Nusa Tenggara Barat tersebut tercermin dari pertumbuhan total aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan kredit¹ masing-masing sebesar 14,89%, 14,51% dan 24,00% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Akan tetapi pertumbuhan pada triwulan laporan mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang mampu tumbuh masing-masing sebesar 18,18%, 15,60% dan 33,80% (yoy). Kinerja bank umum yang terus tumbuh mendorong peningkatan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan tetap ditopang dengan NPL yang tetap terjaga di level yang cukup rendah yaitu 1,40%.

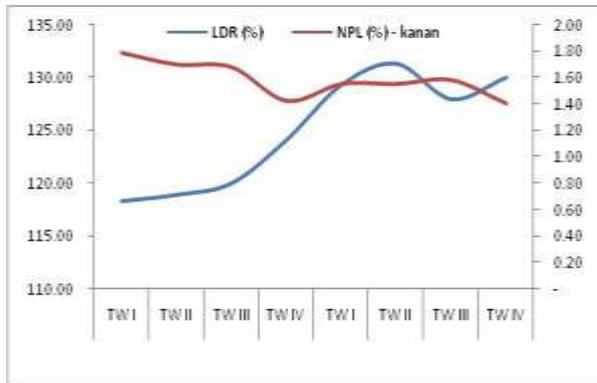
Tabel 3.1
Perkembangan Indikator Bank Umum di Nusa Tenggara Barat

INDIKATOR BANK UMUM	2012				2013			
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Total Aset (Rp Milyar)	16,782,552	17,766,444	18,541,061	19,793,294	19,912,268	20,948,188	21,911,051	22,741,283
Portumbuhan tahunan (yoy)	23.45	22.97	21.45	22.49	18.65	17.91	18.18	14.89
Portumbuhan triwulanan (qoq)	3.85	5.86	4.36	6.75	0.60	5.20	4.60	3.79
Dana Pihak Ketiga (Rp Milyar)	10,719,077	11,586,317	12,090,858	12,390,207	12,441,913	13,036,742	13,931,277	14,142,630
Portumbuhan tahunan (yoy)	27.68	27.52	24.11	16.94	16.07	12.52	15.60	14.51
Portumbuhan triwulanan (qoq)	1.49	8.09	4.01	2.48	0.74	4.78	6.86	1.52
Kredit (Rp Milyar)	13,757,226	14,900,880	15,577,775	17,144,490	18,184,757	19,491,390	20,843,079	22,670,008
Portumbuhan tahunan (yoy)	24.92	25.93	23.92	29.25	32.18	30.81	33.80	32.23
Portumbuhan triwulanan (qoq)	3.71	8.31	4.55	10.06	6.07	7.19	6.93	8.77
LDR (%)	118.28	118.88	119.97	124.06	129.24	131.25	127.89	129.94
NPL (%)	1.79	1.70	1.68	1.42	1.55	1.55	1.58	1.40

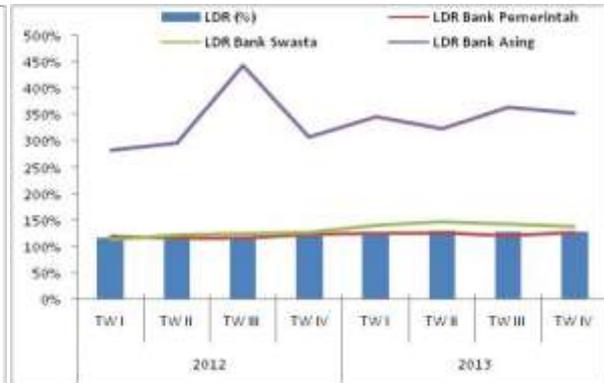
¹ Kredit merupakan total kredit berdasarkan lokasi proyek di Provinsi NTB yang disalurkan oleh Bank Umum secara nasional

Secara umum, kinerja bank umum di Nusa Tenggara Barat terus menunjukkan peningkatan selama beberapa waktu terakhir. Hal tersebut terlihat dari peningkatan rasio penyaluran kredit terhadap dana pihak ketiga atau *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang didukung oleh tren penurunan risiko kredit atau *Non Performance Loan* (NPL).

Grafik 3.1
Perkembangan LDR dan NPL



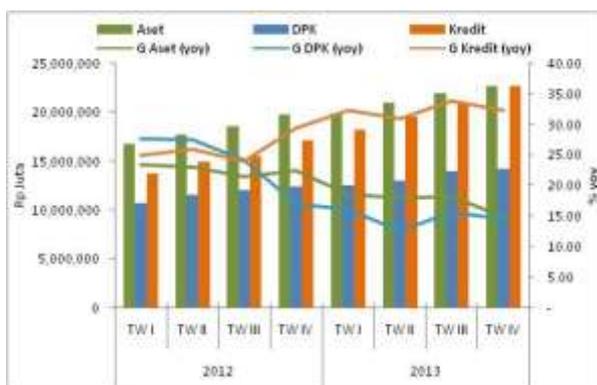
Grafik 3.2
Perkembangan LDR per Kelompok Bank



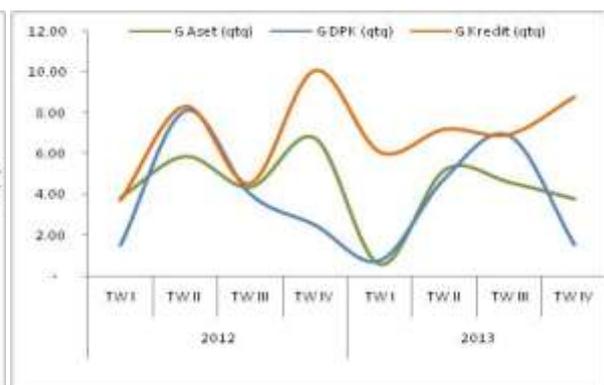
Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank Umum di Nusa Tenggara Barat terus menunjukkan peningkatan hingga mencapai 129,94% pada triwulan IV-2013 dan lebih besar apabila dibandingkan dengan LDR triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 127,89%, atau periode yang sama tahun sebelumnya (triwulan IV-2012) yang tercatat sebesar 124,06%. Peningkatan ini terutama didorong oleh rata-rata pertumbuhan kredit triwulanan (5,46% qtq) yang lebih tinggi daripada pertumbuhan DPK (4,07% qtq) dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

Berdasarkan nominal, proporsi penyaluran kredit masing-masing kelompok bank terhadap total kredit perbankan di NTB masih didominasi oleh Bank Pemerintah sebesar Rp 15,31 triliun atau 67,55% dari total kredit. Proporsi terbesar selanjutnya adalah Bank Swasta sebesar Rp 6,63 triliun atau 29,23%, dan Bank Asing memiliki porsi penyaluran kredit terkecil dengan nominal sebesar Rp 730,51 miliar atau 3,22% dari total kredit.

Grafik 3.3
Pertumbuhan Indikator Utama Perbankan (yoy)



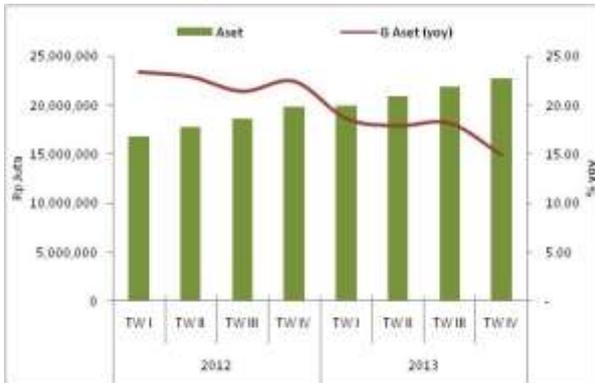
Grafik 3.4
Pertumbuhan Indikator Utama Perbankan



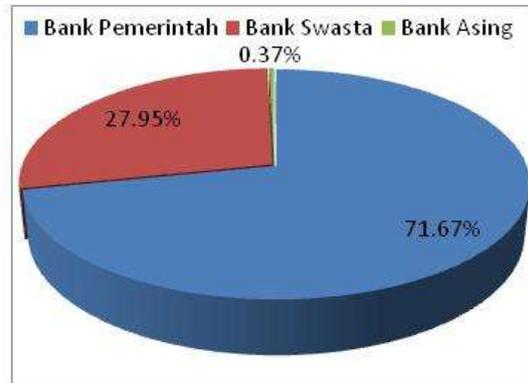
3.1.1. ASET

Pada triwulan IV-2013, total aset bank umum menunjukkan pertumbuhan sebesar 14,89% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan III-2013 yang tercatat sebesar 18,18% (yoy). Penurunan pertumbuhan aset bank umum tersebut disebabkan oleh pilihan bank untuk mengalokasikan sumber dana yang dimiliki untuk penyaluran kredit kepada masyarakat.

Grafik 3.5
Perkembangan Total Aset Bank Umum

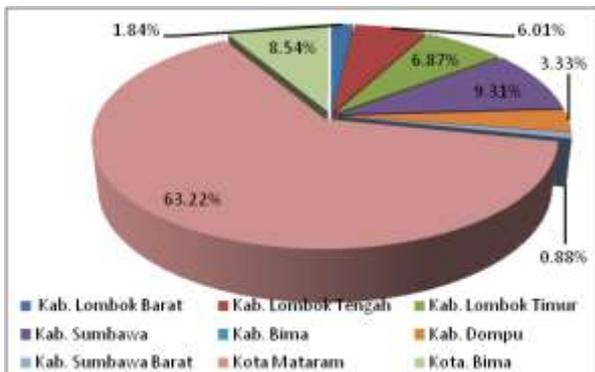


Grafik 3.6
Proporsi Aset Bank Umum

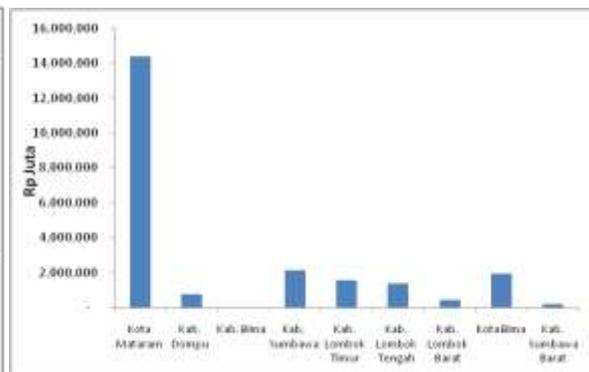


Searah dengan perkembangan ekonomi masing-masing Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat, besar aset perbankan masih didominasi oleh Bank Umum yang berlokasi di wilayah kota Mataram. Tercatat jumlah aset bank umum yang berlokasi di wilayah Kota Mataram pada triwulan IV-2013 adalah sebesar Rp 14,38 triliun, dengan proporsi sebesar 63,22% dari total aset Bank Umum di Nusa Tenggara Barat. Proporsi terbesar selanjutnya secara berurutan adalah Kabupaten Sumbawa dengan nilai aset sebesar Rp 2,12 triliun (9,31%) dan Kota Bima sebesar Rp 1,94 triliun (8,54%).

Grafik 3.7
Proporsi Aset Bank Umum Per Kabupaten /Kota



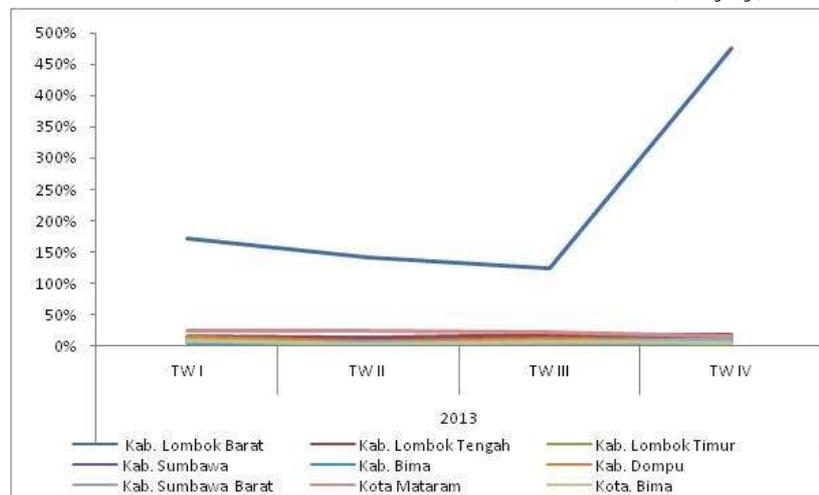
Grafik 3.8
Jumlah Aset Bank Umum Per Kabupaten / Kota



Berdasarkan perkembangan kinerja pertumbuhan aset pada periode laporan, bank umum yang berhasil mencatat pertumbuhan jumlah aset tertinggi adalah yang berlokasi di Kabupaten Lombok Barat dengan pertumbuhan sebesar 475,76% (yoy). Pembukaan kantor cabang salah satu bank umum di Kabupaten Lombok Barat pada awal tahun dan perubahan

struktur kantor yang diikuti perpindahan aset, mengakibatkan pertumbuhan aset yang sangat tinggi. Pertumbuhan tertinggi berikutnya adalah bank umum yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah, Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 18,15% (yoy), 14,93% (yoy), 12,57% (yoy) dan 10,72% (yoy).

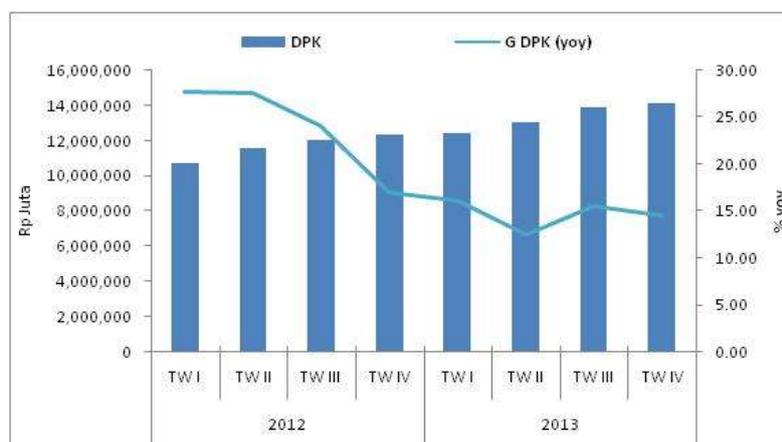
Grafik 3.9
Pertumbuhan Aset Bank Umum Per Kab / Kota (% yoy)



3.1.2. Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun bank umum di Nusa Tenggara Barat pada triwulan IV-2013 terus menunjukkan pertumbuhan positif. Tercatat jumlah DPK pada periode laporan adalah sebesar Rp 14,14 triliun, atau tumbuh sebesar 14,51% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan pada periode sebelumnya yaitu triwulan III-2013 yang tercatat sebesar 15,60%.

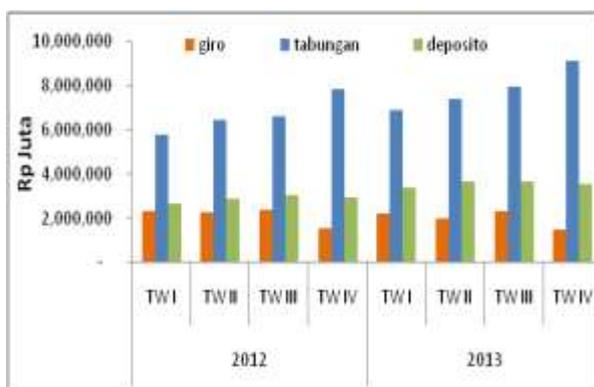
Grafik 3.10
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (yoy)



Secara triwulanan, DPK yang tumbuh sebesar 1,52% (qtq) mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,86% (qtq).

Perlambatan pertumbuhan tahunan DPK pada triwulan laporan disebabkan oleh penurunan saldo giro pemerintah pada akhir tahun menjelang berakhirnya tahun anggaran. Sebagaimana periode sebelumnya, struktur DPK Bank Umum di Nusa Tenggara Barat masih didominasi oleh tabungan dengan nominal mencapai Rp 9,08 triliun atau proporsi sebesar 64,23% dari total DPK. Menyusul kemudian deposito dengan prosentase sebesar 25,07% dan nominal Rp 3,55 triliun, serta giro dengan prosentase sebesar 10,70% dan nominal Rp 1,51 triliun. Apabila ditinjau dari sisi pertumbuhan, pada periode ini deposito mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,60% (yoy), disusul oleh tabungan sebesar 16,17% (yoy), sedangkan giro mengalami penurunan sebesar 3,40% (yoy).

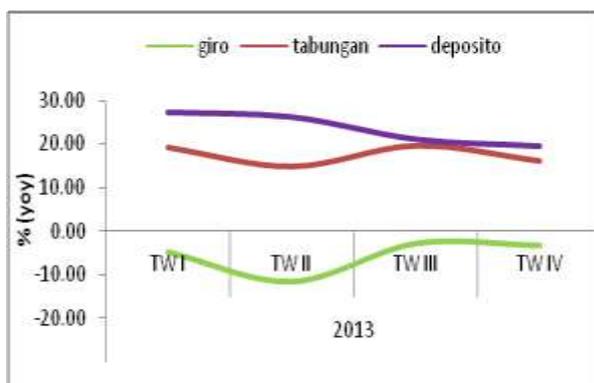
Grafik 3.11
Perkembangan DPK Per Jenis Simpanan



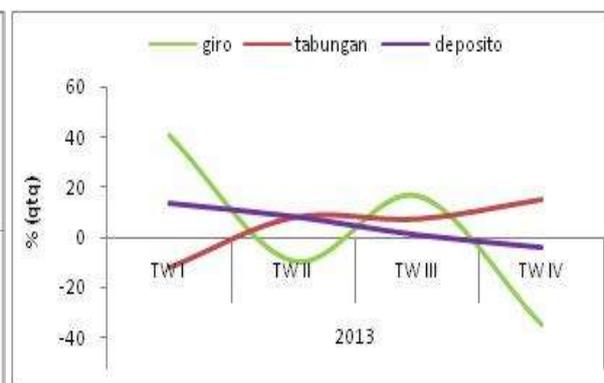
Grafik 3.12
Komposisi DPK Bank Umum



Grafik 3.13
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (yoy)

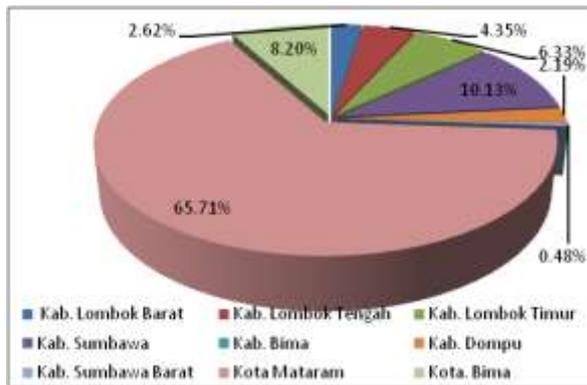


Grafik 3.14
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (qtq)

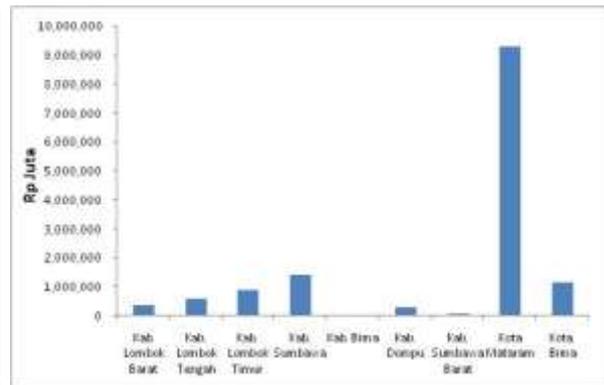


Apabila ditinjau berdasarkan lokasinya, bank umum di wilayah Kota Mataram mencatat jumlah penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di NTB. Tercatat DPK Bank Umum di wilayah Kota Mataram mencapai sebesar Rp9,30 triliun, atau 65,71% dari total DPK bank umum di NTB. Wilayah dengan DPK terbesar selanjutnya adalah Kabupaten Sumbawa sebesar Rp1,43 triliun (10,13%), Kota Bima sebesar Rp1,16 triliun (8,20%), dan Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp 894,89 miliar (6,33%).

Grafik 3.15
Proporsi DPK per Kabupaten Kota

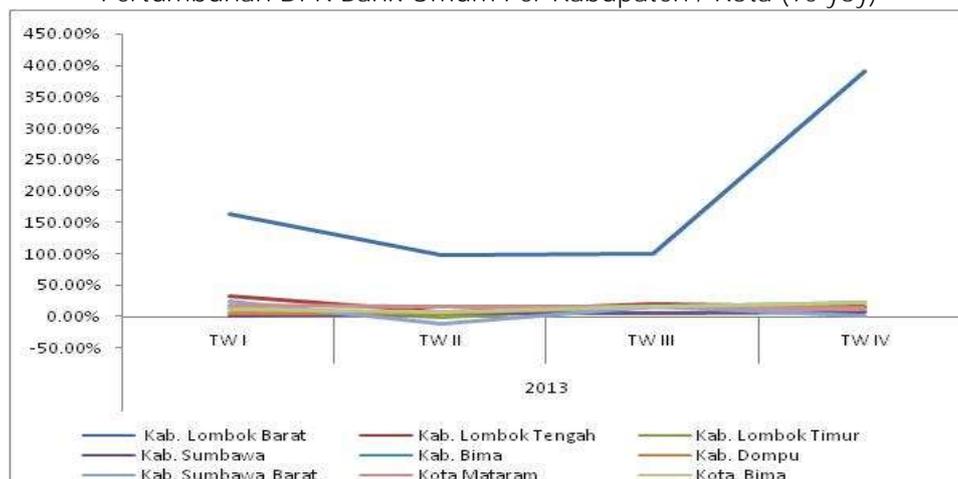


Grafik 3.16
Jumlah DPK per Kabupaten Kota



Berdasarkan perkembangan pertumbuhan DPK, Kabupaten Lombok Barat mencatat pertumbuhan tahunan tertinggi yaitu sebesar 391,73% (yoy) dengan nominal sebesar Rp370,50 miliar. Pembukaan kantor cabang salah satu bank umum di Kabupaten Lombok Barat pada awal tahun dan perubahan struktur kantor yang diikuti perpindahan DPK, mengakibatkan pertumbuhan DPK yang sangat tinggi. Pertumbuhan kinerja penghimpunan DPK terbesar selanjutnya adalah Kota Bima, Kabupaten Lombok Timur, dan Lombok Tengah dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 23,20% (yoy), 21,60% (yoy) dan 15,15% (yoy).

Grafik 3.17
Pertumbuhan DPK Bank Umum Per Kabupaten / Kota (% yoy)

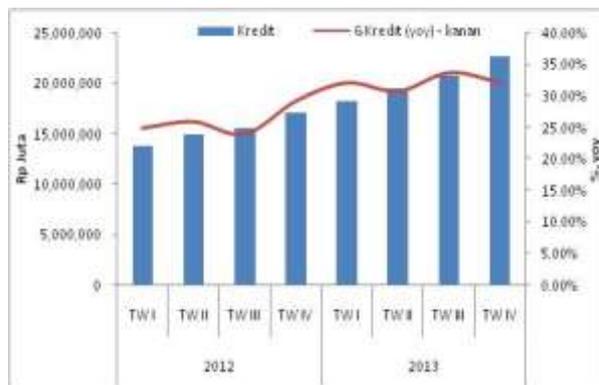


3.1.3. KREDIT

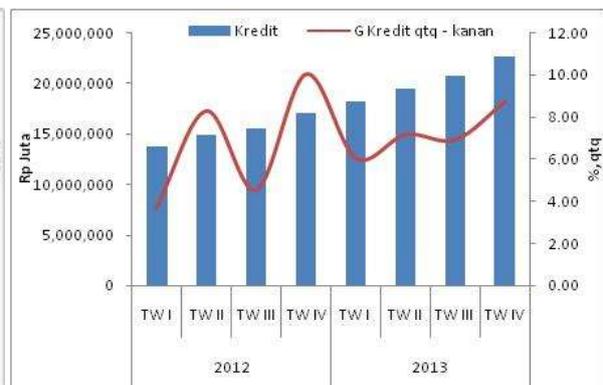
Penyaluran kredit oleh bank umum berdasarkan lokasi proyek di Nusa Tenggara Barat selama tahun 2013 masih terus menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Tercatat selama tahun 2013, kredit tumbuh sebesar 32,23% (yoy) dan 8,77% (qtq) hingga mencapai Rp22,67 triliun. Secara tahunan, pertumbuhan kredit tersebut sedikit lebih rendah apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 33,80% (yoy). Akan tetapi,

secara triwulanan penyaluran kredit periode ini lebih besar dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 6,93% (qtq). Tingginya penyaluran kredit tersebut didukung oleh terjaganya risiko kredit yang tercermin dari besar *Non Performance Loan* (NPL) sebesar 1,40% pada triwulan IV-2013. Risiko tersebut lebih rendah dibandingkan dengan NPL triwulan III-2013 yang tercatat sebesar 1,58%. Hal tersebut mencerminkan kinerja bank umum yang masih baik terhadap penyaluran kredit di Nusa Tenggara Barat.

Grafik 3.18
Pertumbuhan Kredit (yoy)



Grafik 3.19
Pertumbuhan Kredit (qtq)

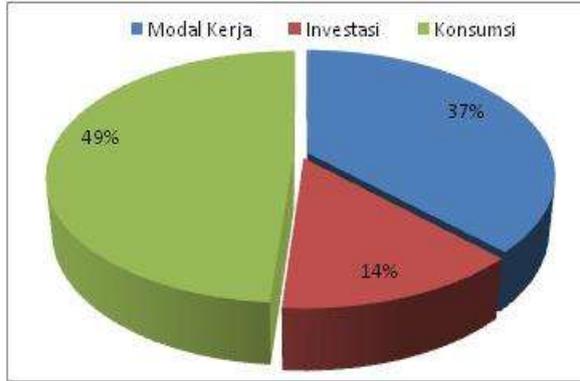


Sebagaimana periode sebelumnya, pada triwulan IIV-2013 kredit yang disalurkan bank umum di Nusa Tenggara Barat masih didominasi oleh kredit konsumsi yaitu mencapai Rp 11,06 triliun dengan prosentase sebesar 48,80% dari total kredit. Jenis kredit dengan proporsi terbesar selanjutnya adalah kredit produktif yaitu kredit modal kerja sebesar Rp8,52 triliun (37,58%). Kredit investasi mencatat proporsi yang lebih kecil yaitu 13,63% dari total kredit, dengan nominal sebesar Rp3,09 triliun. Pertumbuhan tahunan kredit modal kerja yang disalurkan bank umum di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2013 mencatat prosentase tertinggi diantara jenis kredit lainnya, yaitu mencapai 51,72% (yoy). Sementara itu, jenis kredit lainnya yaitu kredit investasi dan konsumsi mencatat pertumbuhan yang juga cukup tinggi, yaitu masing-masing sebesar 50,66% dan 16,70% (yoy). Secara triwulanan, ke-tiga jenis kredit bank umum dimaksud mencatat pertumbuhan positif. Tercatat kredit modal kerja tumbuh sebesar 10,34% (qtq), kredit investasi tumbuh 8,59% (qtq), dan kredit konsumsi tumbuh sebesar 4,31% (qtq).

Berdasarkan kelompok bank, Bank Pemerintah masih menjadi penyalur kredit terbesar dengan proporsi 67,55% dari total kredit, disusul oleh Bank Swasta sebesar 29,23% dan Bank Asing sebesar 3,22%. Ditinjau dari kinerja pertumbuhan kredit, pada periode ini bank asing mencatat pertumbuhan tahunan tertinggi yaitu mencapai 166,13% (yoy), sementara bank pemerintah dan bank swasta masing-masing mencatat pertumbuhan sebesar 31,24% (yoy) dan 27,38% (yoy).

Tingginya pertumbuhan penyaluran kredit tersebut menunjukkan baiknya kinerja bank umum dalam meningkatkan fungsi intermediasinya di Nusa Tenggara Barat. Tingkat persaingan yang semakin kondusif antara kelompok bank diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas penyaluran kredit kepada masyarakat.

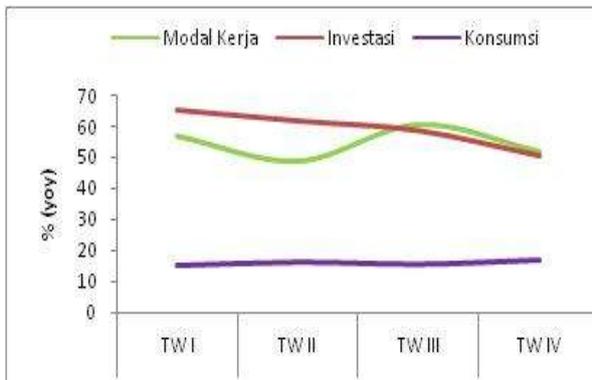
Grafik 3.20
Proporsi Penyaluran Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan



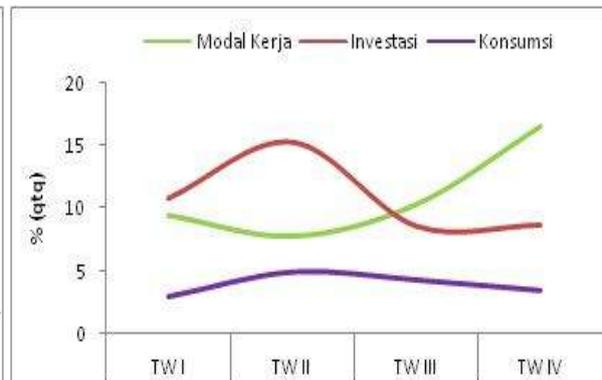
Grafik 3.21
Proporsi Penyaluran Kredit Berdasarkan Kelompok Bank



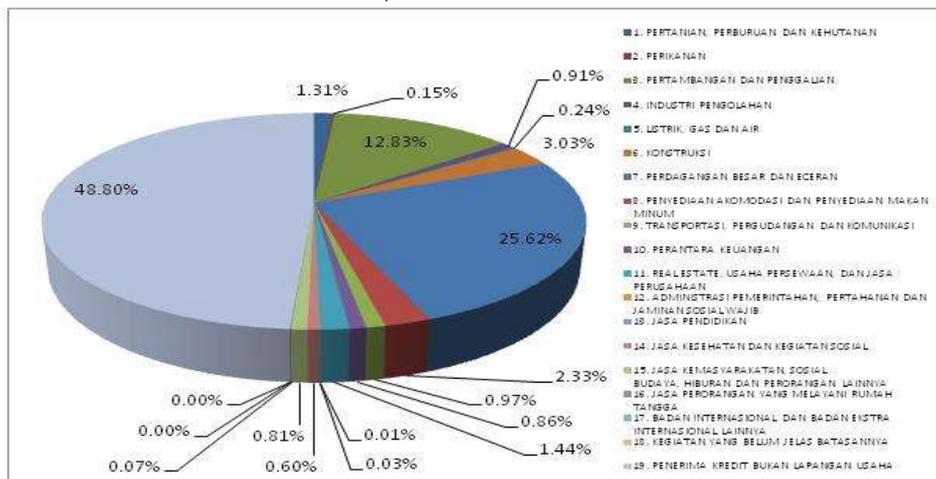
Grafik 3.22
Pertumbuhan Kredit PerJenis Penggunaan Secara Tahunan



Grafik 3.23
Pertumbuhan Kredit Per Jenis Penggunaan Secara Triwulanan



Grafik 3.24
Proporsi Kredit Sektoral

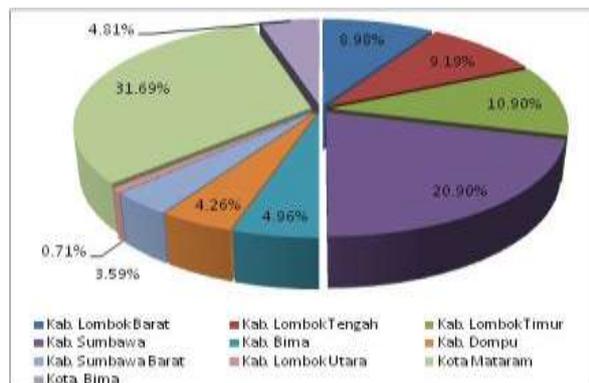


Secara sektoral, kredit yang disalurkan oleh bank umum di Nusa Tenggara Barat pada periode laporan (triwulan IV-2013) sebagian besar tersalur pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran (25,62% dari total kredit) dan sektor Pertambangan dan Penggalian (12,83% dari total kredit). Tingginya penyaluran kredit pada kedua sektor ini seiring dengan peran kedua sektor sebagai sektor unggulan penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Nusa Tenggara Barat. Berbeda dengan kedua sektor unggulan tersebut, porsi kredit sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan yang merupakan sektor utama PDRB di Nusa Tenggara Barat masih relatif kecil yaitu sebesar 1,31%. Secara nominal, kredit pada sektor ini juga mengalami penurunan sebesar 11,91% (yoy) sehingga menjadi Rp295,88 miliar. Hal tersebut dapat dijadikan indikasi masih rendahnya akses sektor pertanian yang merupakan salah satu sektor utama penyumbang pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat kepada perbankan.

Sementara itu, apabila dilihat dari angka pertumbuhannya, peningkatan penyaluran kredit tertinggi adalah pada sektor Listrik, Gas dan Air, sektor Pertambangan dan Penggalian, dan sektor Jasa Perorangan yang melayani rumah tangga dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 1959,19%, 297,97% dan 175,22% (yoy).

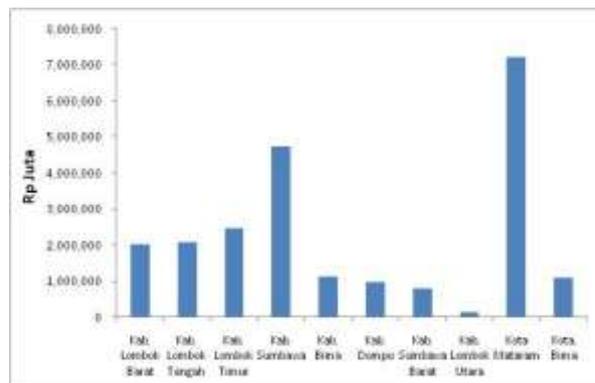
Grafik 3.25

Proporsi Penyaluran Kredit per Kabupaten /Kota



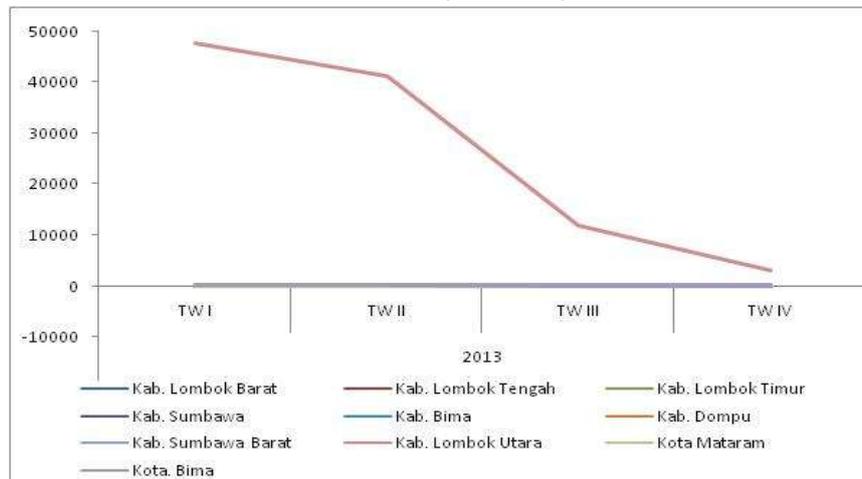
Grafik 3.26

Proporsi Penyaluran Kredit per Kabupaten /Kota



Ditinjau dari wilayah lokasi proyek, penyaluran kredit terbesar adalah di Kota Mataram dengan nominal sebesar Rp 7,18 triliun dan prosentase sebesar 31,69% dari total kredit yang disalurkan. Proporsi terbesar selanjutnya adalah di wilayah Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah dengan prosentase masing-masing sebesar 20,90%, 10,90% dan 9,19% dari total kredit yang disalurkan Nusa Tenggara Barat.

Grafik 3.27
Pertumbuhan Kredit per Kabupaten Kota

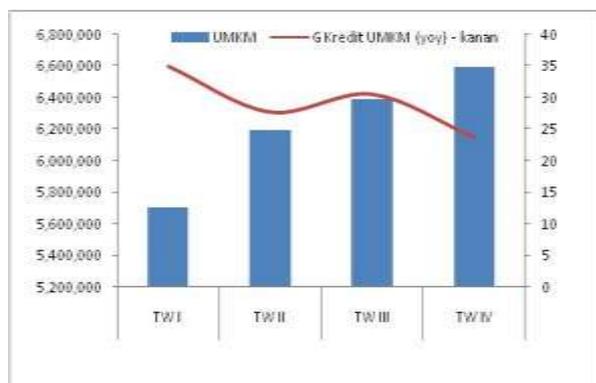


Pertumbuhan kredit tertinggi berdasarkan lokasi proyek pada periode laporan adalah di Kabupaten Lombok Utara seiring dengan pemekaran Lombok Utara menjadi Kabupaten baru, Pertumbuhan kredit tertinggi selanjutnya adalah Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur dengan prosentase pertumbuhan masing-masing sebesar 100,26% (yoy), 89,54% (yoy), 25,02% (yoy) dan 24,11% (yoy).

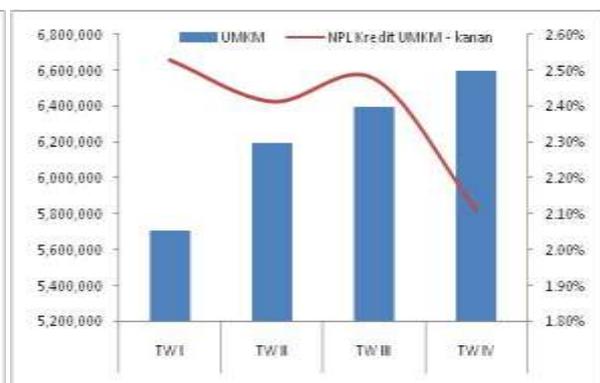
3.1.4. KREDIT USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

Perbankan di Nusa Tenggara Barat terus berperan aktif dalam meningkatkan peran UMKM dalam mendukung perekonomian daerah. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan penyaluran kredit kepada sektor UMKM.

Grafik 3.28
Perkembangan Kredit UMKM



Grafik 3.29
Perkembangan NPL UMKM

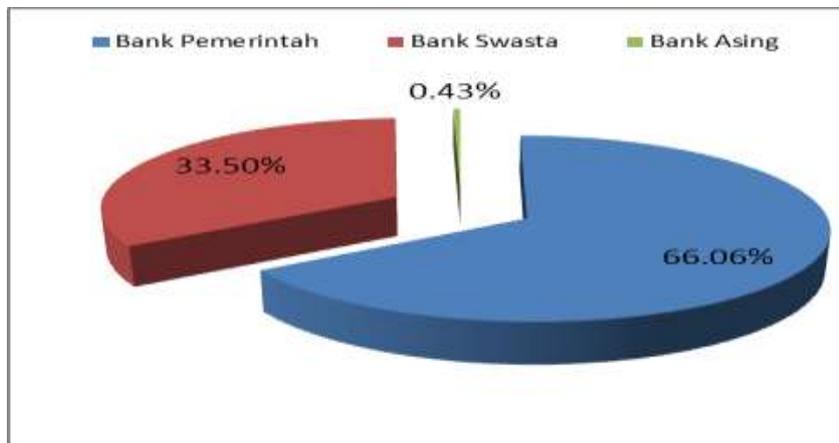


Perkembangan kredit UMKM yang disalurkan oleh perbankan di Nusa Tenggara Barat secara umum terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Tercatat pada Triwulan IV-2013 jumlah kredit UMKM adalah sebesar Rp 6,60 triliun atau tumbuh sebesar 23,69% (yoy), lebih rendah apabila dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 30,52% (yoy). Secara triwulanan, pertumbuhan kredit yang disalurkan bank umum di

Nusa Tenggara Barat kepada sektor UMKM pada triwulan IV-2013 tumbuh sebesar 3,15% (qtq), sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan III-2013 yang tercatat sebesar 3,26%(qtq).

Grafik 3.30

Proporsi Kredit UMKM Berdasarkan Bank

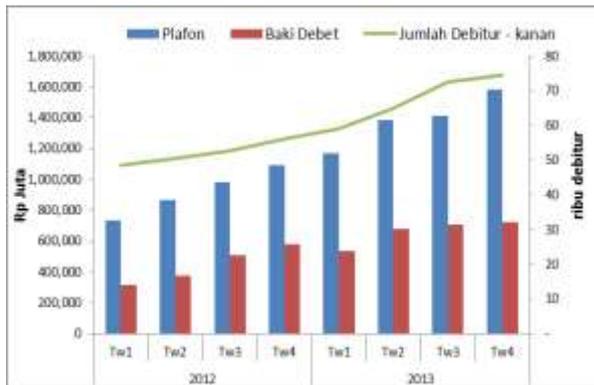


Proporsi penyaluran kredit UMKM di Nusa Tenggara Barat oleh bank umum masih didominasi oleh Bank Pemerintah sebesar 66,06% dengan jumlah nominal mencapai Rp 4,36 triliun. Bank swasta menyumbang proporsi terbesar kedua dengan presentase sebesar 33,50% dan nominal Rp2,21 triliun. Proporsi penyaluran kredit UMKM terkecil adalah bank asing dengan nominal sebesar Rp 28,68 miliar dan presentase 0,43% dari total kredit. Peningkatan kredit UMKM dimaksud mengindikasikan peran aktif perbankan dalam mendukung pengembangan UMKM di Nusa Tenggara Barat.

3.1.5. KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

KUR merupakan kredit/pembiayaan kepada kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian kredit modal kerja dan kredit investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Sampai dengan triwulan IV-2013, kinerja penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Nusa Tenggara Barat masih konsisten menunjukkan perkembangan yang positif. Plafon KUR yang disiapkan oleh bank umum pelaksana KUR di Nusa Tenggara Barat hingga periode laporan mencapai Rp1,58 triliun dengan jumlah debitur mencapai 74.398 debitur. Plafon KUR yang disalurkan tersebut tumbuh 44,84% (yoy) dan 11,76% (qtq) dibandingkan periode sebelumnya. Jumlah outstanding kredit atau baki debit KUR bank pelaksana di NTB pada periode laporan adalah sebesar Rp 720,28 miliar, meningkat 2,03% (qtq) dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Grafik 3.31
Perkembangan Penyaluran KUR di NTB



Grafik 3.32
Pertumbuhan KUR di NTB



KUR merupakan program dari pemerintah untuk membantu usaha mikro/kecil produktif yang mengalami kesulitan akses permodalan ke perbankan karena keterbatasan penyediaan agunan atau UMKM yang *feasible*/layak namun belum *bankable*(belum memiliki akses ke perbankan). Sumber dana penyaluran KUR adalah 100% (seratus persen) dari bank pelaksana yang dihimpun dari dana masyarakat berupa tabungan, deposito dan giro. Sementara itu, plafon KUR Mikro yang saat ini dapat disalurkan oleh seluruh bank penyalur KUR nilainya sampai dengan Rp20 juta dan KUR Ritel dengan plafon di atas Rp20 juta sampai dengan Rp500 juta.

Meskipun sudah ada sejak tahun 2009, program penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih memiliki kendala dalam pelaksanaannya, antara lain dari faktor calon debitur yaitu: usaha belum *feasible*, masih memiliki tunggakan kredit program, adanya persepsi dari masyarakat bahwa KUR adalah bantuan (hibah) sehingga calon debitur berani menunggak, sebagian besar belum memiliki aspek legalitas usaha serta suku bunga kredit yang tinggi. Di sisi lain, bank sebagai penyelenggara KUR harus tetap menjalankan prinsip prudensial (kehati-hatian) dalam memberikan kredit. Sementara itu, faktor kendala dari internal bank adalah keterbatasan jaringan kantor cabang bank dan sulitnya proses pencairan agunan dari pihak penjamin kredit.

3.2. STABILITAS SISTEM PERBANKAN

Stabilitas sistem perbankan yang tercermin dari berbagai risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan transaksi selama triwulan IV-2013 relatif stabil dan terjaga. Di sisi lain, fungsi intermediasi bank umum tetap terjaga dengan peningkatan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dari sebesar 127,89% pada triwulan lalu menjadi 129,94% pada triwulan laporan. Peningkatan penyaluran kredit yang diimbangi dengan terjaganya rasio NPL di kisaran 1,40% mengindikasikan adanya peningkatan stabilitas sistem perbankan yang didukung oleh kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai debitur.

Namun demikian, beberapa risiko lain yang tetap harus diwaspadai perbankan adalah risiko operasional yang terkait dengan mekanisme proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan atau kejadian-kejadian yang mempengaruhi operasional bank. Untuk itu, perlu adanya optimalisasi fungsi pengawasan atas kegiatan operasional perbankan baik oleh internal bank melalui fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) maupun oleh pihak eksternal dalam hal ini Bank Indonesia sebagai regulator dan masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan.

3.2.1. RISIKO KREDIT

Tabel 3.2
Perkembangan NPL per-Kelompok Bank

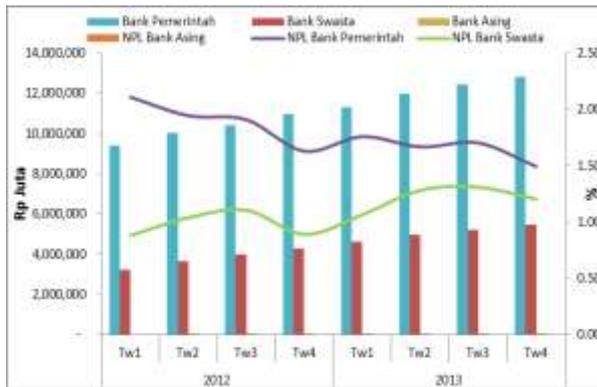
Kelompok Bank	2012				2013			
	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4
NPL Bank Umum (%)	1.79	1.70	1.68	1.42	1.55	1.55	1.58	1.40
Bank Pemerintah	2.11	1.95	1.91	1.63	1.76	1.67	1.71	1.50
Bank Swasta	0.88	1.04	1.11	0.89	1.07	1.28	1.31	1.21
Bank Asing	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Risiko kredit perbankan yang tercermin dari rasio kredit bermasalah terhadap total kredit atau *Non Performing Loan* (NPL) di Nusa Tenggara Barat secara umum terus menunjukkan perbaikan dari waktu ke waktu. NPL bank umum berdasarkan lokasi bank pelapor di Nusa Tenggara Barat pada triwulan IV-2013 tercatat membaik dibandingkan periode sebelumnya, yaitu dari sebesar 1,58% pada triwulan III-2013 menjadi 1,40% pada triwulan IV-2013. Penurunan NPL ini disebabkan pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nominal kredit bermasalah.

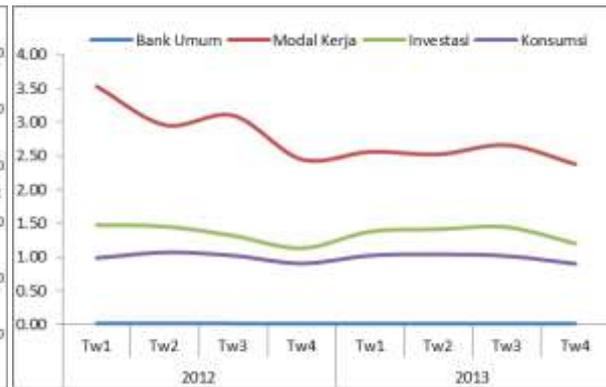
Berdasarkan kelompok bank, persentase NPL tertinggi adalah kelompok bank pemerintah dengan NPL sebesar 1,50%. NPL bank swasta di Nusa Tenggara Barat memiliki NPL lebih rendah yaitu sebesar 1,21%. Sedangkan bank asing memiliki NPL 0%. Berdasarkan jenis penggunaannya, NPL kredit tertinggi terjadi pada kredit modal kerja sebesar 2,38%, disusul oleh kredit investasi sebesar 1,20%. Sementara kredit konsumsi mencatat NPL terkecil yaitu sebesar 0,90%.

Secara individual debitur, kredit konsumsi merupakan kredit yang memiliki tingkat risiko terbesar karena bukan merupakan sektor produktif sehingga jaminan terhadap pengembalian kredit lebih kecil dibandingkan kredit produktif. Namun secara agregat perbankan, kredit konsumsi memiliki tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan kredit lainnya karena risiko kredit tersebar pada banyak debitur sehingga dapat meminimalkan signifikansi *default* debitur kredit konsumsi.

Grafik 3.33
Perkembangan NPL Bank Umum

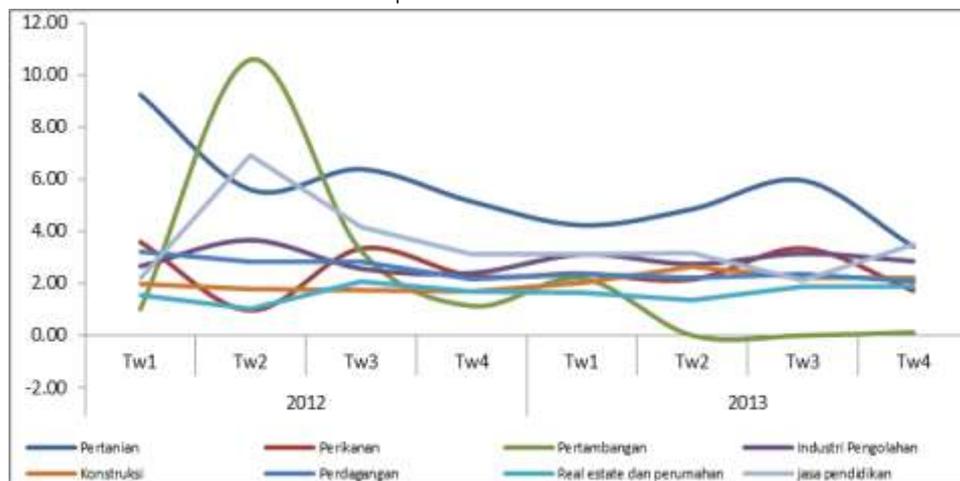


Grafik 3.34
NPL Per Jenis Penggunaan



Secara sektoral, penyaluran kredit dengan NPL terbesar pada triwulan IV-2013 adalah sektor perikanan dan sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan sektor pertanian, perburuan dan kehutanan, dengan besar NPL masing-masing sebesar 3,51%, 3,43% dan 3,41.

Grafik 3.35
NPL per Sektor Ekonomi



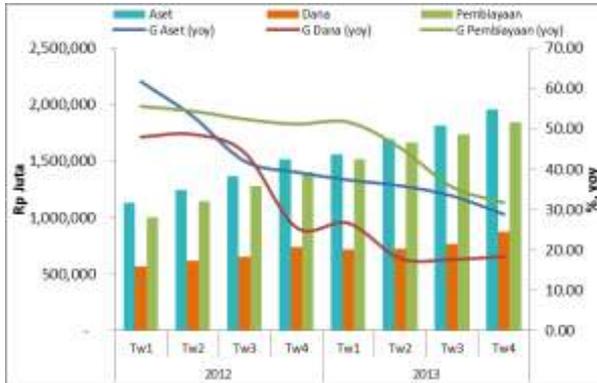
Secara umum NPL kredit dari sektor utama menunjukkan tren penurunan. Meskipun pada triwulan III-2013 NPL sektor pertanian sempat meningkat, akan tetapi pada triwulan IV-2013 kembali menurun. Hal ini diharapkan bisa memberikan keyakinan kepada perbankan khususnya bank umum untuk terus memberikan peluang penyaluran kredit kepada sektor pertanian sebagai sektor utama Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3.3. PERBANKAN SYARIAH

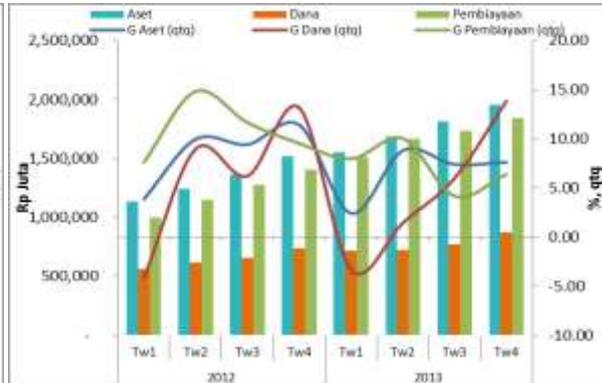
Terus tumbuh dan berkembangnya kegiatan usaha perbankan syariah di Provinsi Nusa Tenggara Barat didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan perkembangan positif, serta masih terbukanya potensi pengembangan pasar perbankan syariah di NTB. Selain

itu, peningkatan kinerja perbankan syariah di NTB juga dapat menjadi indikasi meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah khususnya bank umum.

Grafik 3.36
Perkembangan Indikator Perbankan Syariah (yoy)



Grafik 3.37
Perkembangan Indikator Perbankan Syariah (qtq)



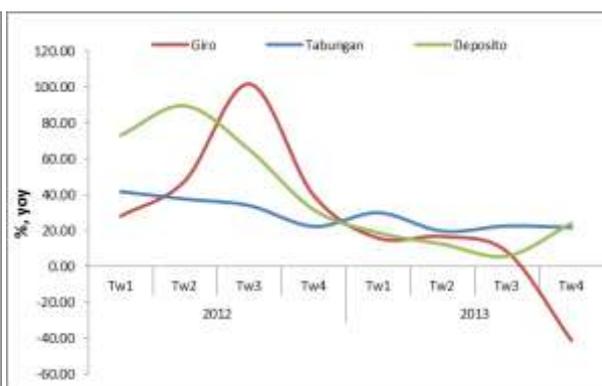
Secara tahunan, indikator kinerja utama bank umum Syariah di Nusa Tenggara Barat yang terdiri atas aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan pada triwulan III 2013 mencatat pertumbuhan dibandingkan periode sebelumnya. Aset tumbuh tinggi sebesar 28,79% (yoy) dan 7,61% (qtq) dari Rp 1,81 triliun pada triwulan III-2013 menjadi Rp 1,95 triliun pada triwulan IV-2013. Sementara itu, dana masyarakat yang disimpan pada bank umum Syariah di NTB tumbuh mencapai 18,32% (yoy) dan 13,84% (qtq) dari sebesar Rp 767,20 miliar menjadi Rp 873,38 miliar.

Berdasarkan komposisinya, peningkatan dana masyarakat didorong oleh cukup tingginya pertumbuhan jenis simpanan yaitu tabungan dan deposito yang masing-masing secara tahunan tumbuh sebesar 21,84% dan 24,27% (yoy). Secara triwulanan, pertumbuhan dari masing-masing Dana Pihak Ketiga (DPK) bank umum Syariah di NTB adalah sebesar 16,44% (qtq) untuk tabungan, 17,22% untuk deposito. Di sisi lain, simpanan dalam bentuk giro mengalami penurunan yang cukup besar baik secara tahunan maupun triwulanan yaitu sebesar 41,01% (yoy) dan 33,72% (qtq)

Grafik 3.38
Proporsi DPK Perbankan Syariah di NTB



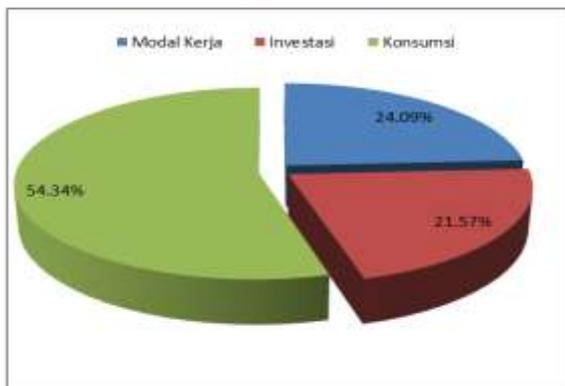
Grafik 3.39
Perkembangan DPK Perbankan Syariah di NTB



Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank umum Syariah berdasarkan lokasi proyek di Nusa Tenggara Barat selama Tw IV-2013 tumbuh sebesar 31,62% (yoy) atau 6,38% (yoy) dengan baki debit sebesar Rp 1,84 triliun. Berdasarkan jenisnya, penyaluran pembiayaan konsumsi memperoleh porsi tertinggi dengan prosentase sebesar 54,34% dari total pembiayaan. Sementara kredit produktif yaitu modal kerja dan investasi memperoleh prosentase yang lebih kecil yaitu masing-masing sebesar 24,09% dan 21,57%.

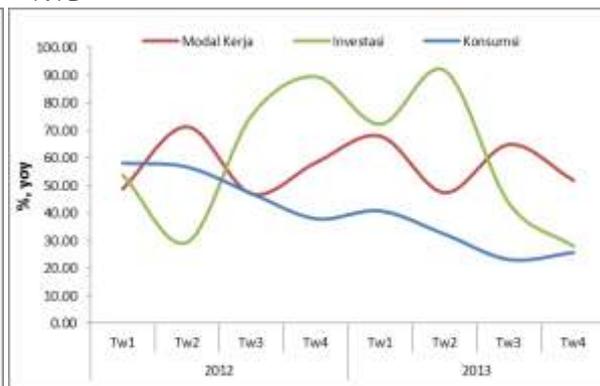
Grafik 3.40

Proporsi Pembiayaan Perbankan Syariah di NTB



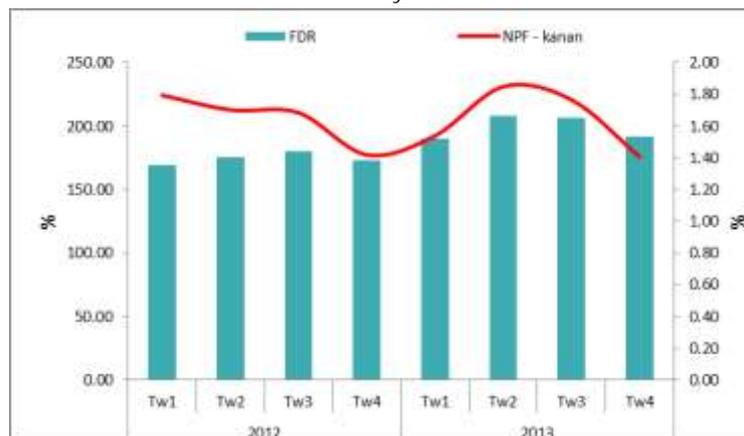
Grafik 3.41

Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah di NTB



Tingginya pembiayaan konsumsi bank umum Syariah di NTB menunjukkan bahwa masyarakat telah mulai mempercayai perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Kinerja penyaluran pembiayaan yang meningkat didukung dengan kualitas pembiayaan yang terjaga, yang tercermin dari rasio *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 1,41%. NPF tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,77% yang menandakan bahwa walaupun nilai pembiayaan meningkat, bank umum syariah tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan. Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang mencerminkan proporsi penyaluran pembiayaan dibandingkan dengan dana yang dihimpun menunjukkan penurunan. Pada triwulan IV-2013, FDR Bank umum Syariah di NTB berada di kisaran 191,51% dan lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 206,32%.

Grafik 3.42
Financing to Deposits Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF)
 Perbankan Syariah NTB



3.4. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)

Indikator kinerja utama BPR di Nusa Tenggara Barat pada Triwulan IV-2013² menunjukkan pertumbuhan yang meningkat. Secara tahunan, total aset pada periode laporan tumbuh sebesar 14,17% (yoy). Penghimpunan dana tumbuh sebesar 14,57% (yoy) pada periode laporan. Demikian pula penyaluran kredit BPR yang tumbuh sebesar 10,91% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sampai dengan triwulan IV-2013, total dana masyarakat yang disimpan pada BPR di Nusa Tenggara Barat mencapai Rp578,23 miliar. Penghimpunan dana pihak ketiga oleh BPR didominasi oleh tabungan yang mencapai 56,53% terhadap total DPK dan didukung dengan pertumbuhan sebesar 16,23% (yoy). Deposito juga tumbuh sebesar 12,49% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sehingga mencapai Rp251,37 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa BPR mulai meningkatkan penghimpunan dana dari masyarakat yang berbentuk tabungan. Di sisi lain, stabilnya peningkatan dana masyarakat dalam bentuk deposito dan tabungan yang disimpan di BPR hingga triwulan IV-2013, menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BPR.

Total kredit yang disalurkan oleh BPR di Provinsi NTB sampai dengan triwulan IV-2013, adalah sebesar Rp701,86 miliar. Kredit yang disalurkan oleh BPR didominasi oleh kredit modal kerja (mencapai 59,43% dari total kredit). Disusul kredit konsumsi dan kredit investasi dengan pangsa masing-masing sebesar 33,87% dan 6,71% dari total kredit. Dari sisi pertumbuhannya, pada triwulan IV-2013, kredit investasi tumbuh paling tinggi, yaitu sebesar 39,25% (yoy), sementara itu kredit modal kerja tumbuh 9,46% dan kredit konsumsi tumbuh 9,04% (yoy). Tingginya pertumbuhan kredit investasi dan modal kerja yang disalurkan mengindikasikan bahwa BPR mulai meningkatkan penyaluran kreditnya pada sektor produktif sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitarnya.

² Triwulan IV-2013: data sampai dengan periode November 2013

Pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dari pertumbuhan kredit mengakibatkan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) turun dari 125,39% pada triwulan III-2013 menjadi sebesar 121,38% pada triwulan IV-2013. Sementara itu, kualitas kredit yang meningkat ditunjukkan dengan penurunan rasio *Non Performing Loan* (NPL) dari 13,13% pada tahun 2012 menjadi 10,94% pada tahun 2013. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kewaspadaan BPR terhadap kualitas kredit. Akan tetapi NPL tersebut masih berada di atas batas maksimum NPL yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu maksimum 5%. Oleh karena itu, BPR perlu terus meningkatkan pengawasan terhadap kredit yang disalurkan melalui penyeleksian profil debitur secara efisien dengan memperhatikan konsep 5C (*Character, Capital, Collateral, Capacity, dan Condition of Economy*).

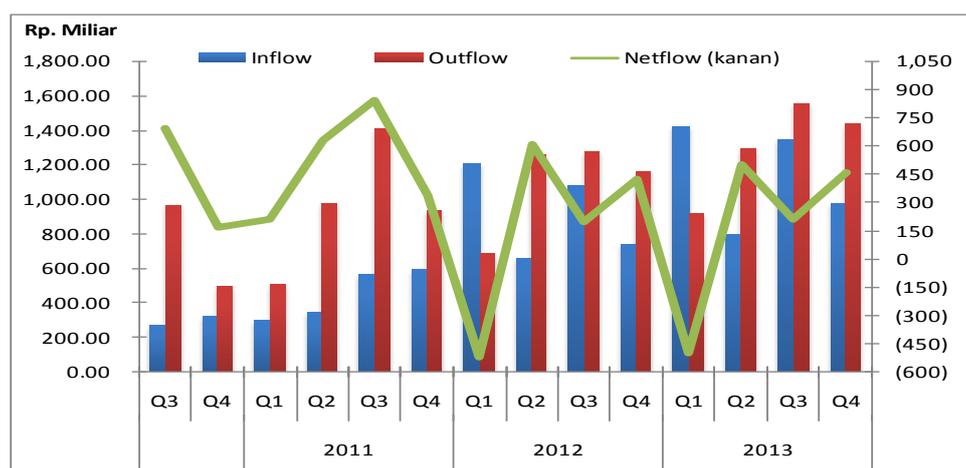
3.5. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

Pada triwulan IV-2013, perkembangan sistem pembayaran di Nusa Tenggara Barat berlangsung dengan baik dan lancar. Kegiatan transaksi keuangan secara tunai mengalami *net outflow*, sedangkan perkembangan transaksi secara non tunai didominasi oleh layanan transaksi RTGS. Sementara itu, kegiatan penukaran uang pecahan kecil mengalami penurunan setelah pada periode sebelumnya mengalami lonjakan yang cukup tinggi akibat pengaruh faktor musiman (Idul Fitri).

3.5.1. Transaksi Keuangan Secara Tunai

Pada triwulan IV-2013 perkembangan transaksi keuangan secara tunai di Nusa Tenggara Barat berada pada tren *net outflow*. Kondisi tersebut tercermin dari peningkatan jumlah aliran uang keluar (*cash outflow*) yang lebih besar dibandingkan aliran uang masuk (*cash inflow*), atau dengan kata lain jumlah penarikan uang tunai lebih besar dibandingkan jumlah setoran uang tunai yang dilakukan oleh perbankan NTB melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Grafik 3.43
Perkembangan *Inflow*, *Outflow* dan *Netflow* (Rp, miliar)



Pada triwulan IV-2013, jumlah aliran uang tunai yang masuk ke kas Bank Indonesia yang berasal dari setoran perbankan di NTB masih berada pada tren peningkatan yang tercatat sebesar Rp971,75 miliar atau tumbuh signifikan sebesar 31,35% (yoy), jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan triwulan lalu yang tumbuh hingga 24,37% (yoy) dengan nominal tercatat sebesar Rp1,34 triliun.

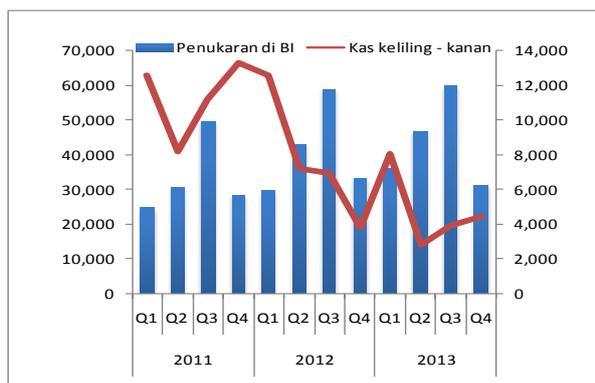
Di sisi lain, jumlah aliran uang tunai yang keluar (*cash outflow*) yang berasal dari kas Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat tercatat mencapai Rp1,43 triliun yang tumbuh positif sebesar 23,48% (yoy), lebih tinggi dibanding pertumbuhan triwulan lalu yang tercatat tumbuh sebesar 21,75% (yoy) dengan nominal sebesar Rp1,55 triliun. Jumlah aliran uang keluar yang lebih besar dibanding aliran jumlah uang masuk menyebabkan terjadinya *net outflow* dengan jumlah mencapai Rp461,47 miliar.

3.5.2. Perkembangan Penukaran Uang Pecahan Kecil

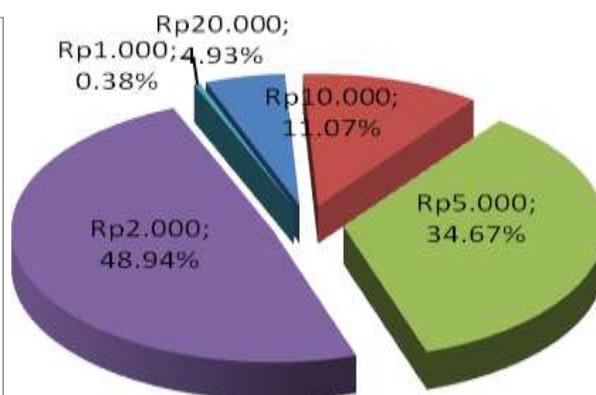
Secara umum, kegiatan penukaran uang pecahan kecil di NTB menunjukkan peningkatan. Selama triwulan IV-2013, penukaran uang pecahan kecil melalui kegiatan kas keliling yang melingkupi seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan penukaran langsung ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai Rp35,51 miliar atau tumbuh negatif sebesar 3,96% (yoy), namun tumbuh lebih rendah dibanding pertumbuhan triwulan lalu yang juga tumbuh negatif sebesar 3,19% (yoy) yang tercatat sebesar Rp63,63 miliar.

Berdasarkan lokasi, penukaran uang pecahan kecil secara langsung melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai Rp59,76 miliar atau tumbuh sebesar 1,54% (yoy), menurun dibanding triwulan lalu yang tumbuh sebesar 7,96% (yoy). Sementara itu, penukaran uang pecahan kecil melalui kegiatan kas keliling mengalami peningkatan atau tumbuh negatif juga sebesar 43,70% (yoy) atau sebanyak Rp3,87 miliar, lebih tinggi dibanding pertumbuhan triwulan lalu yang tumbuh negatif sebesar 61,30% (yoy).

Grafik 3.44
Perkembangan Penukaran Uang Kecil (Rp,
miliar)



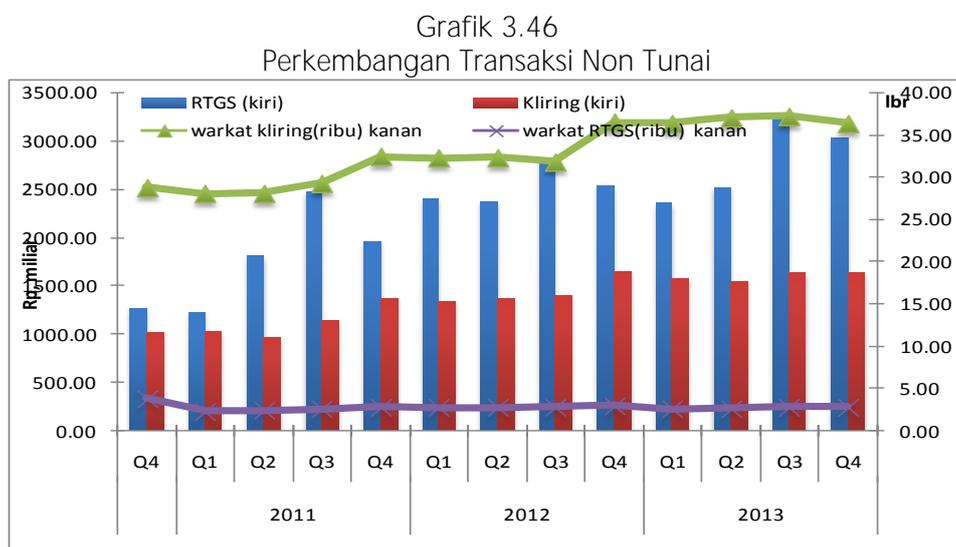
Grafik 3.45
Komposisi Penukaran Uang Kertas Keluar
Berdasarkan Jenis Pecahan



Berdasarkan komposisinya, penukaran uang kertas pecahan kecil (s.d Rp20.000) sepanjang triwulan IV-2013 jumlahnya mencapai Rp29,379 miliar. Penukaran uang kertas masih didominasi jenis Rp2.000,00 dengan jumlah mencapai 2,30 juta lembar, disusul pecahan Rp5.000,00 sebanyak 1,56 juta lembar, pecahan Rp10.000,00 sebanyak 0,79 juta lembar, pecahan Rp20.000,00 sebanyak 0,45 juta lembar dan pecahan Rp1.000,00 sebanyak 0,005 juta lembar. Sementara secara nominal, jumlah penukaran tertinggi dialami uang pecahan Rp10.000,00 yang mencapai Rp7,96 miliar kemudian disusul uang pecahan Rp5.000,00 yang mencapai uang pecahan Rp7,80 miliar.

3.5.3. Transaksi Pembayaran Secara Non Tunai

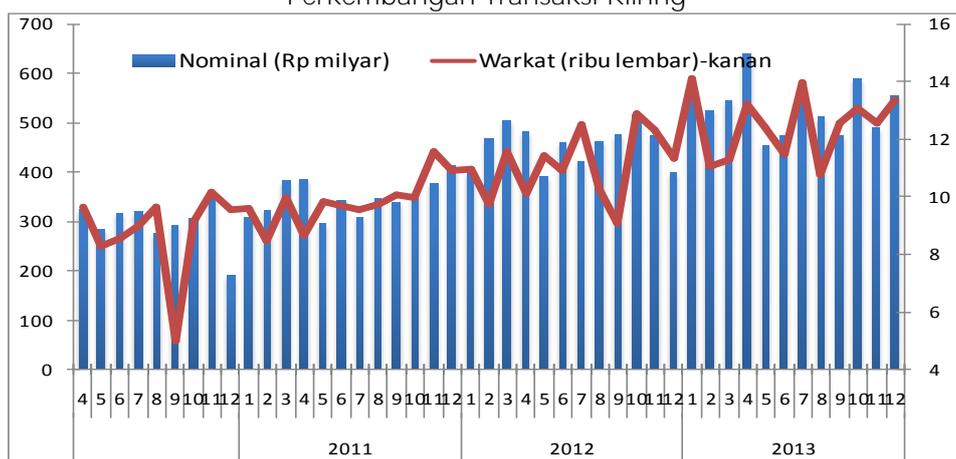
Perkembangan kegiatan transaksi non tunai di Nusa Tenggara Barat sepanjang triwulan IV-2013 relatif menunjukkan penurunan dibanding triwulan lalu. Kondisi tersebut didorong oleh menurunnya transaksi keuangan secara non tunai melalui sarana *Real Time Gross Settlement* (RTGS), dari sebesar R3,28 triliun pada triwulan lalu menjadi Rp3,03 triliun pada triwulan IV-2013. Sementara itu, pada triwulan IV-2013 transaksi secara kliring menunjukkan peningkatan yang tercatat mencapai Rp1,64 triliun (triwulan III-2013: Rp1,63 triliun).



3.5.3.1. Transaksi Kliring

Sepanjang triwulan IV-2013, nilai transaksi kliring mencapai Rp1,64 triliun atau tumbuh negatif sebesar 0,34 % (yoy), lebih rendah dibanding dengan triwulan III-2013 yang tumbuh sebesar 17,52% (yoy). Berdasarkan frekuensi transaksinya, jumlah warkat kliring yang diproses sepanjang triwulan IV-2013 menunjukkan peningkatan yang tercatat sebanyak 36,38 ribu lembar atau tumbuh negatif sebesar 0,29% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan lalu yang tercatat sebanyak 37,27 ribu lembar.

Grafik 3.47
Perkembangan Transaksi Kliring

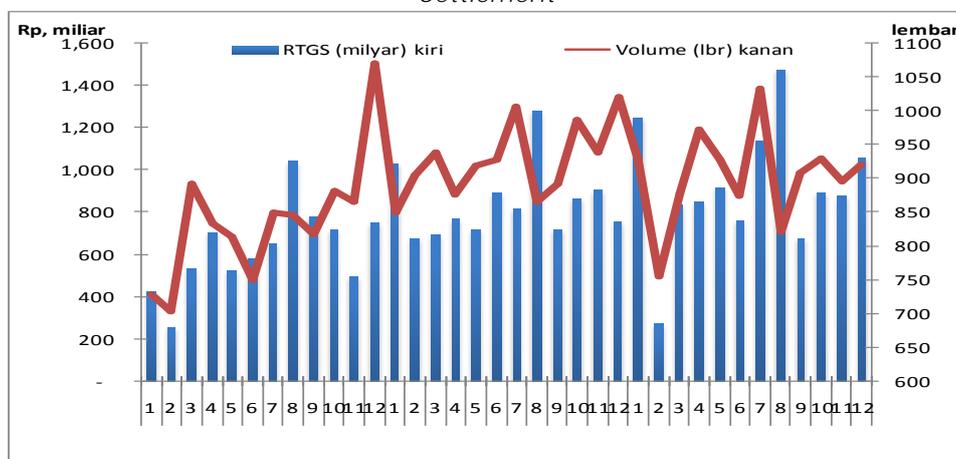


3.5.3.2. Transaksi Real Time Gross Settlement (RTGS)

Walaupun mengalami peningkatan pada triwulan lalu, kegiatan transaksi sarana RTGS tetap mendominasi sistem pembayaran non tunai pada perbankan di Nusa Tenggara Barat. Sepanjang triwulan IV-2013, jumlah transaksi pembayaran melalui RTGS tercatat sebanyak Rp3,03 triliun yang tumbuh positif sebesar 20,07% (yoy), meningkat dibanding triwulan III-2013 (Rp3,28 triliun) yang tumbuh sebesar 16,66% (yoy).

Dari sisi volume transaksi, jumlah transaksi RTGS menunjukkan peningkatan, dari 2.762 lembar pada triwulan III-2013 menjadi 2.745 lembar pada periode laporan. Berbagai keunggulan yang dimiliki sarana RTGS seperti kecepatan dan ketepatan dalam penyelesaian transaksi serta rendahnya risiko *settlement*-nya turut mempengaruhi jumlah transaksi RTGS di Nusa Tenggara Barat.

Grafik 3.48
Perkembangan Transaksi *Real Time Gross Settlement*



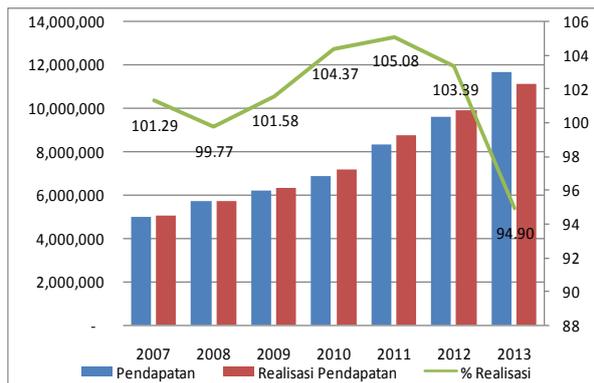
BAB 4

PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH

4.1 PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH

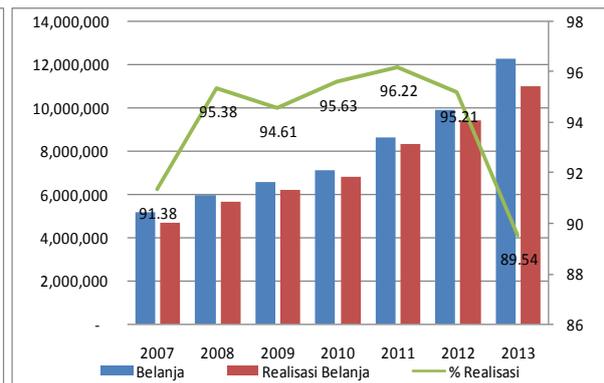
Realisasi pendapatan dan belanja daerah di tahun 2013 relatif mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Target pendapatan daerah tidak tercapai terutama disebabkan oleh tidak terpenuhinya pendapatan transfer hingga 100% dan pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) yang relatif rendah terutama capaian kabupaten Sumbawa Besar akibat dari turunnya produksi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Belanja daerah juga mengalami penurunan terutama disebabkan oleh realisasi belanja modal yang hanya terealisasi 82,89% dibanding target yang ditetapkan.

Grafik 4.1
APBD Pendapatan Kabupaten/ Kota dan Provinsi NTB Tahunan



Sumber : Kementerian Keuangan, Biro Keuangan, diolah

Grafik 4.2
APBD Belanja Kabupaten/ Kota dan Provinsi NTB Tahunan



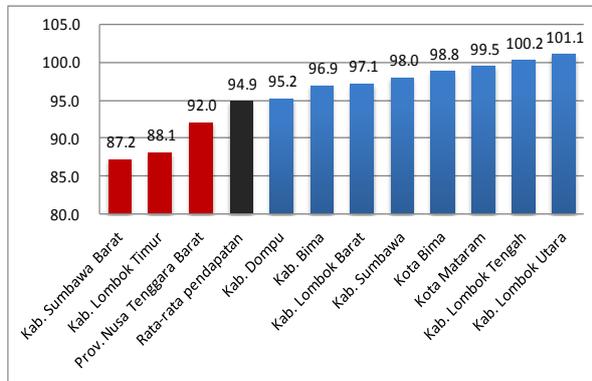
Sumber : Kementerian Keuangan, Biro Keuangan, diolah

Berdasarkan wilayah, kabupaten Sumbawa Barat menjadi daerah dengan realisasi pendapatan terendah, yang disebabkan oleh rendahnya capaian PAD yaitu sebesar 46,11%. Selain itu, pencapaian realisasi dana transfer juga terendah dibanding kabupaten lainnya. Selanjutnya realisasi pendapatan terendah kedua adalah kabupaten Lombok Timur dengan capaian sebesar 88,15%. Sedangkan pencapaian realisasi pendapatan tertinggi diraih oleh Kabupaten Lombok Utara dengan capaian sebesar 101,1% dan Lombok Tengah dengan pencapaian hingga 100,2%.

Dari sisi belanja, tiga daerah tercatat memiliki pencapaian APBD di bawah rata-rata yaitu Kabupaten Sumbawa Barat dengan pencapaian sebesar 73,4%, Kota Mataram dengan realisasi sebesar 84% dan Kabupaten Lombok Timur dengan realisasi sebesar 85,4%. Kabupaten

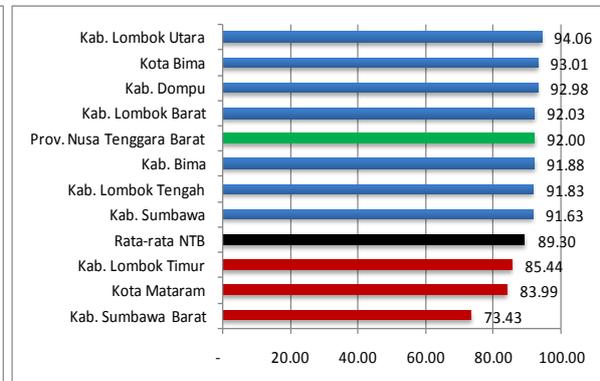
Lombok Utara menjadi daerah dengan realisasi belanja tertinggi hingga 94,1% disusul oleh Kota Bima dan Kabupaten Dompu dengan realisasi masing-masing sebesar 93,0%.

Grafik 4.3
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten/
Kota dan Provinsi di Provinsi NTB



Sumber : Biro Keuangan, Setda Provinsi NTB dan Ditjen Perbendaharaan, diolah

Grafik 4.4
Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/
Kota dan Provinsi di Provinsi NTB



Sumber : Biro Keuangan, Setda Provinsi NTB dan Ditjen Perbendaharaan, diolah

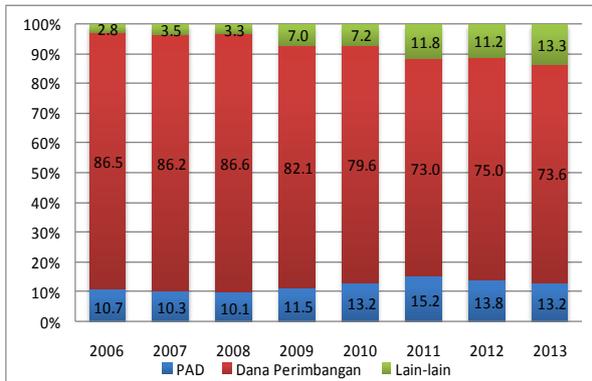
Pencapaian pendapatan pemerintah provinsi relatif rendah yaitu sebesar 92,0%. Pencapaian pendapatan ini terutama disebabkan oleh rendahnya realisasi dana transfer sebesar 91,84% dari total target yang direncanakan. Sedangkan pada kelompok biaya APBN, pencapaian pemerintah provinsi lebih tinggi yaitu dengan capaian sebesar 92,0%, serupa dengan capaian realisasi pendapatan yang terjadi.

Sebagian besar kabupaten/ kota dan Provinsi di wilayah Provinsi NTB mengandalkan dana perimbangan sebagai sumber pendanaan. Namun demikian dibanding tahun-tahun sebelumnya, porsi dana perimbangan cenderung mengalami penurunan. Pangsa dana perimbangan terhadap total pendapatan mencapai 73,6% di tahun 2013, menurun jika dibandingkan dengan pangsa dana perimbangan 7 tahun sebelumnya yang mencapai 86,5%.

Belanja pemerintah masih didominasi oleh belanja tak langsung terutama belanja gaji pegawai. Struktur belanja tidak langsung cenderung terus mengalami peningkatan hingga tahun 2010. Namun pada tahun 2011 hingga 2013, struktur belanja mengalami perubahan dengan semakin bertambahnya pangsa belanja langsung dalam belanja pemerintah.

Grafik 4.5

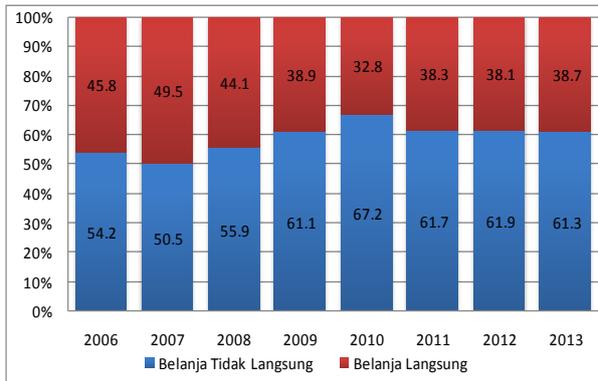
Perkembangan Pangsa Pendapatan Tahunan yang dihasilkan Pemerintah di Provinsi NTB



Sumber : Biro Keuangan, Setda Provinsi NTB dan Ditjen Perbendaharaan, diolah

Grafik 4.6

Perkembangan Pangsa Belanja Tahunan yang dihasilkan Pemerintah di Provinsi NTB



Sumber : Biro Keuangan, Setda Provinsi NTB dan Ditjen Perbendaharaan, diolah

Dibanding triwulan sebelumnya, capaian kinerja realisasi belanja negara relatif membaik, terlihat dari realisasi belanja yang cukup besar terutama pada belanja langsung. Namun demikian, rata-rata pencapaian tinggi tercatat berada di akhir tahun sehingga dirasa perlu dipercepat agar tujuan pembangunan dapat lebih cepat dirasakan. Adanya kendala dalam proses pengadaan yang relatif lama yang selama ini menjadi hambatan, sekiranya dapat menjadi prioritas untuk diatasi, sehingga realisasi proyek dapat menjadi lebih cepat.

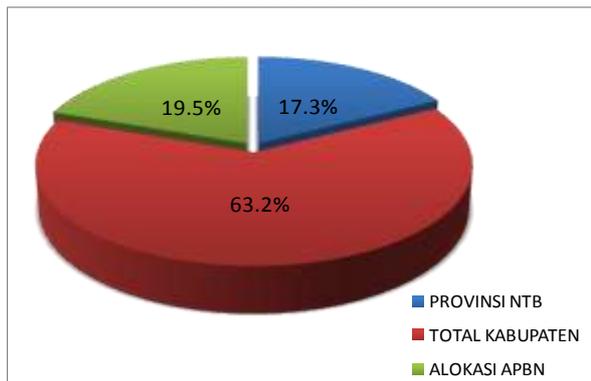
4.2 REALISASI PENDAPATAN DI PROVINSI NTB

Realisasi pendapatan total daerah di provinsi NTB tahun 2013 mencapai 13,82 triliun atau mencapai 104,88% dari total rencana pendapatan. Pencapaian yang tinggi ini terutama disebabkan oleh tingginya pencapaian penerimaan pajak dalam negeri oleh KPPN yang mencapai 218,24%, sehingga realisasi pendapatan oleh KPPN dapat mengangkat pencapaian realisasi pendapatan kabupaten/kota dan provinsi yang cenderung mengalami penurunan.

Berdasarkan realisasi pendapatan yang dihasilkan, sebesar 63,2% disumbang oleh pendapatan kabupaten dan kota atau sebesar 8,73 triliun rupiah. 19,5% total pendapatan disumbang dari alokasi APBN yang mencapai 2,70 triliun dan 17,3% disumbang oleh pendapatan provinsi, atau setara dengan 2,39 triliun rupiah. Tingginya pencapaian pendapatan pajak dalam negeri KPPN adalah selain berasal dari penghimpunan pajak penghasilan masyarakat yang berada di provinsi NTB, juga dihasilkan dari PPH penduduk yang berada di luar daerah. Tingginya pencapaian pajak menunjukkan tingkat pendapatan penduduk NTB yang semakin meningkat.

Grafik 4.7

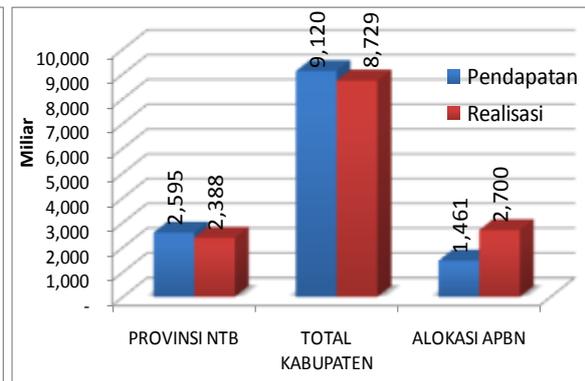
Pangsa Pendapatan yang dihasilkan Pemerintah di Provinsi NTB



Sumber : Biro Keuangan, Setda Provinsi NTB dan Ditjen Perbendaharaan, diolah

Grafik 4.8

Realisasi Pendapatan Pemerintah di Provinsi NTB



Sumber : Biro Keuangan, Setda Provinsi NTB dan Ditjen Perbendaharaan, diolah

Bagi pemerintah daerah, sumbangan pendapatan transfer masih memberikan kontribusi tertinggi dalam pencapaian realisasi pendapatan di triwulan IV 2013 dengan realisasi mencapai 96,0%. Penyaluran dana alokasi umum (DAU) hingga triwulan IV 2013 tercapai 100% sesuai dengan alokasi dana yang sudah disepakati. Demikian pula dengan dana alokasi khusus yang juga terealisasi hampir 100%. Tidak tercapainya target penerimaan lebih disebabkan oleh pencapaian dana bagi hasil yang rendah, terutama bagi hasil bukan pajak yang hanya tercapai 34,5% dari target yang direncanakan.

Pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) hingga triwulan IV 2013 sebesar 92,3% dari total target PAD di tahun 2013. Pajak daerah memberikan kontribusi terbesar realisasi dengan pencapaian sebesar 105,4% dari target. Sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah memberikan sumbangan realisasi terkecil yaitu sebesar 57,9% dari target. Rendahnya realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah terutama disebabkan oleh adanya pengembalian deviden Bank NTB yang kembali disetor sebagai penambahan modal inti, agar bank NTB dapat masuk dalam jajaran bank dengan modal inti 1 trilyun. Hal ini penting dilakukan agar bank NTB tidak menjadi bank dengan operasional terbatas sebagaimana sudah disyaratkan dalam peraturan Bank Indonesia, walaupun dampaknya adalah penurunan pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Tabel 4.1
Rincian Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten dan
Provinsi di Wilayah Provinsi NTB

NO	URAIAN	APBD			REALISASI ANGGARAN			Real KAB	Real NTB	REAL Total
		TOTAL KAB	TOTAL PROV	TOTAL APBD	TOTAL KAB	TOTAL PROV	TOTAL APBD	Tw IV	Tw IV	Tw IV
I.	PENDAPATAN									
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	806,763	904,540	1,711,303	711,681	867,418	1,579,099	88.2	95.9	92.3
1.1.1	Pajak Daerah	227,565	673,235	900,800	251,118	698,044	949,162	110.3	103.7	105.4
1.1.2	Retribusi Daerah	210,986	16,725	227,711	176,854	12,734	189,587	83.8	76.1	83.3
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dip	104,365	95,893	200,258	63,263	52,715	115,978	60.6	55.0	57.9
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	263,847	118,688	382,535	220,447	103,925	324,372	83.6	87.6	84.8
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	8,143,906	1,652,299	9,796,205	7,887,348	1,517,451	9,404,799	96.8	91.8	96.0
1.2.1	Transfer Pem.Pusat Dana Perimbangan	6,912,580	1,187,577	8,100,157	6,770,744	1,075,005	7,845,749	97.9	90.5	96.9
1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	565,697	210,658	776,355	429,413	148,646	578,059	75.9	70.6	74.5
1.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	20,193	60,158	80,351	18,125	9,598	27,724	89.8	16.0	34.5
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	5,620,953	859,353	6,480,306	5,621,914	859,353	6,481,267	100.0	100.0	100.0
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	705,737	57,408	763,145	701,292	57,408	758,700	99.4	100.0	99.4
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	983,809	464,722	1,448,532	912,014	442,446	1,354,460	92.7	95.2	93.5
1.2.3.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.2	Dana Penyesuaian	983,809	464,722	1,448,532	912,014	442,446	1,354,460	92.7	95.2	93.5
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	247,516	-	247,516	204,589	-	204,589	82.7	-	82.7
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	247,516	-	247,516	204,589	-	204,589	82.7	-	82.7
1.2.2.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	168,965	37,969	206,934	130,169	3,518	133,687	77.0	9.3	64.6
1.3.1	Pendapatan hibah	110,184	37,969	148,152	81,401	3,518	84,919	73.9	9.3	57.3
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya	58,782	-	58,782	48,768	-	48,768	83.0	-	83.0
JUMLAH PENDAPATAN		9,119,634	2,594,808	11,714,443	8,729,198	2,388,387	11,117,585	95.7	92.0	94.9

Sumber : Biro Keuangan, Setda Provinsi NTB,
diolah

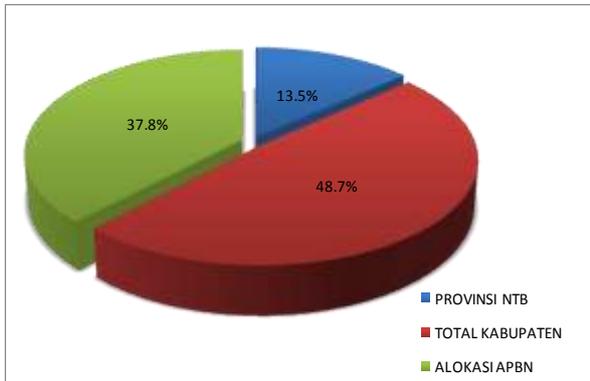
Karakter pendapatan pemerintah pusat lebih disumbang oleh penerimaan pajak dalam negeri dengan realisasi pencapaian hingga lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan besarnya potensi pajak penghasilan yang dapat diperoleh dari penduduk NTB. Hal ini juga menunjukkan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga realisasi dapat tercapai sangat signifikan.

4.3 REALISASI BELANJA DI PROVINSI NTB

Realisasi belanja provinsi NTB tahun 2013 cukup rendah bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Realisasi belanja pemerintah kabupaten/kota dan provinsi tahun 2013 hanya mencapai 89,33%, capaian terendah dalam tujuh tahun terakhir. Rendahnya pencapaian realisasi terutama disebabkan oleh rendahnya realisasi belanja beberapa kabupaten seperti kabupaten Sumbawa Barat dengan realisasi 73,43% dari target yang ditetapkan yang disebabkan oleh capaian pendapatan asli daerah yang tidak sesuai target penerimaan, sehingga harus dilakukan pengurangan belanja yang cukup besar pula.

Grafik 4.9

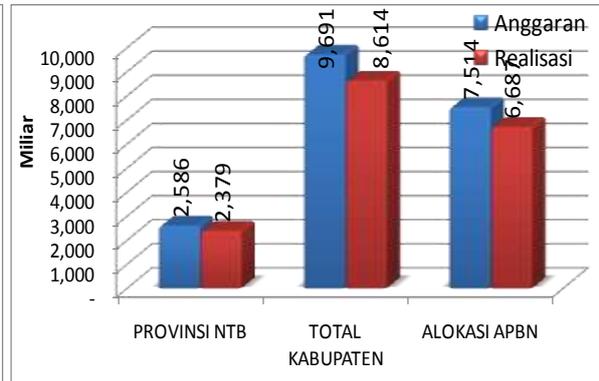
Pangsa Realisasi Belanja yang dihasilkan Pemerintah di Provinsi NTB



Sumber : Biro Keuangan, Setda Provinsi NTB dan Ditjen Perbendaharaan, diolah

Grafik 4.10

Realisasi Belanja Pemerintah di Provinsi NTB

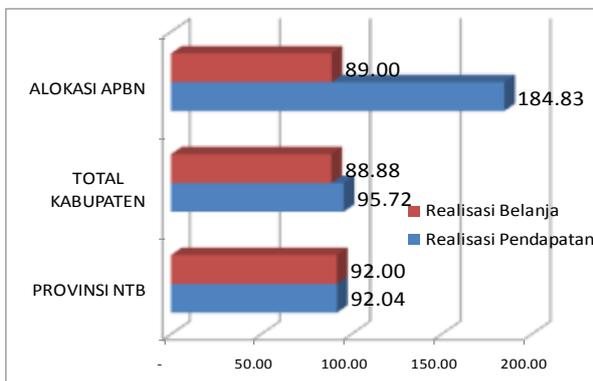


Sumber : Biro Keuangan, Setda Provinsi NTB dan Ditjen Perbendaharaan, diolah

Berdasarkan pangsa realisasi belanja yang dihasilkan, total belanja kabupaten/kota berkontribusi hingga 48,7% dari total belanja daerah, disusul oleh belanja APBN di daerah dengan pangsa 37,8% dan belanja pemerintah provinsi dengan total belanja hingga 13,5% dari total belanja pemerintah di wilayah provinsi NTB. Hingga akhir triwulan IV 2013, secara total pemerintah sudah membelanjakan hingga 17,68 triliun rupiah, dengan alokasi belanja konsumsi pemerintah sebesar 12,62 trilyun dan belanja modal pemerintah total sebesar 4,70 trilyun rupiah.

Grafik 4.11

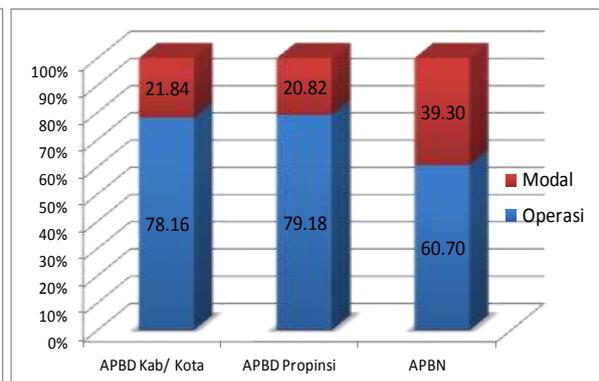
Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat



Sumber : Biro Keuangan, Setda Provinsi NTB dan Ditjen Perbendaharaan, diolah

Grafik 4.12

Pangsa Belanja Modal terhadap Total Belanja Pemerintah di Provinsi NTB

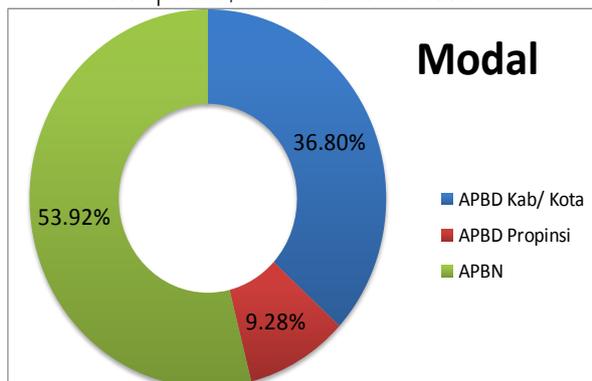


Sumber : Biro Keuangan, Setda Provinsi NTB dan Ditjen Perbendaharaan, diolah

Pemerintah provinsi NTB mampu meraih realisasi belanja tertinggi hingga 92,00% dari target yang direncanakan disusul oleh realisasi APBN dengan capaian sebesar 89,00% dan pemerintah kabupaten/kota dengan capaian sebesar 88,88%. Rendahnya pencapaian kabupaten/kota terutama disebabkan oleh rendahnya realisasi belanja pemerintah kabupaten Sumbawa Barat dengan realisasi yang hanya sebesar 73,43% dari target yang direncanakan.

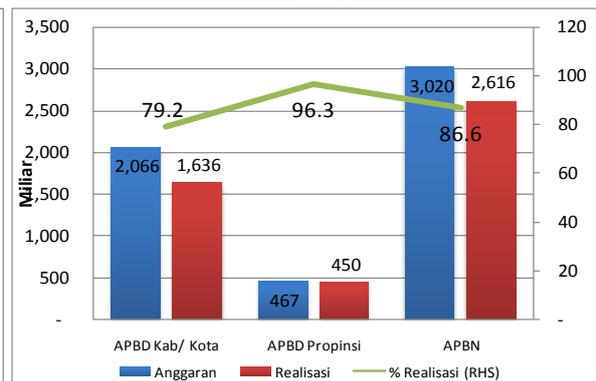
Alokasi belanja APBN menjadi belanja dengan belanja modal terbesar yaitu mencapai 39,30% dari total belanja, disusul oleh pemerintah kabupaten/kota dengan alokasi belanja modal sebesar 21,84% dan pemerintah provinsi dengan alokasi belanja modal sebesar 20,82% dari total belanja. Semakin besar belanja modal menunjukkan semakin besar komitmen pemerintah dalam melakukan pembangunan menggunakan dana sendiri. Berdasarkan pangsa belanja modal, APBN juga menjadi penyumbang biaya pembangunan terbesar dengan pangsa mencapai 53,92% dari total belanja modal, disusul total pemerintah kabupaten/ kota dengan pangsa sebesar 36,80% dan dana APBD provinsi dengan pangsa sebesar 9,28%. Tingginya belanja modal pemerintah pusat terutama disebabkan oleh adanya beberapa proyek MP3EI yang saat ini sedang berusaha diselesaikan yang tampak dari alokasi anggaran yang sebagian besar berada pada dinas pekerjaan umum. Sedangkan belanja pemerintah kabupaten/kota sebagian besar lebih ditujukan pada peningkatan konektivitas wilayah berupa pembangunan jalan, saluran irigasi dan jaringan.

Grafik 4.13
Pangsa Belanja Modal antara Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat



Sumber : Biro Keuangan, Setda Provinsi NTB dan Ditjen Perbendaharaan, diolah

Grafik 4.14
Realisasi Belanja Modal Pemerintah di Provinsi NTB



Sumber : Biro Keuangan, Setda Provinsi NTB dan Ditjen Perbendaharaan, diolah

Berdasarkan realisasi belanja modal, pemerintah provinsi merealisasikan belanja modal tertinggi dengan pencapaian realisasi belanja hingga 96,3%, disusul oleh pencapaian pemerintah pusat yang mencapai 86,6% dan pemerintah kabupaten/kota dengan realisasi sebesar 79,2%. Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Mataram menjadi daerah dengan realisasi belanja modal terendah masing-masing sebesar 55,78% dan 68,80% dari total target belanja modal tahun 2013.

Tabel 4.2
Rincian Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten dan
Provinsi di Wilayah Provinsi NTB

NO	URAIAN	APBD			REALISASI ANGGARAN			Real KAB	Real NTB	REAL Total
		TOTAL KAB	TOTAL PROV	TOTAL APBD	TOTAL KAB	TOTAL PROV	TOTAL APBD	Tw IV	Tw IV	Tw IV
II.	BELANJA									
2.1	BELANJA OPERASI	7,361,140	1,847,519	9,208,658	6,749,309	1,711,436	8,460,745	92	93	92
2.1.1	Belanja Pegawai	5,358,170	592,371	5,950,540	5,011,873	551,072	5,562,944	94	93	93
2.1.2	Belanja Barang	1,413,756	391,296	1,805,052	1,224,358	359,302	1,583,660	87	92	88
2.1.3	Belanja Bunga	8,879	-	8,879	3,758	-	3,758	42		42
2.1.4	Belanja Subsidi	1,700	250	1,950	1,413	198	1,611	83	79	83
2.1.5	Belanja Hibah	215,762	725,059	940,822	189,720	682,236	871,955	88	94	93
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	153,224	68,372	221,597	134,781	51,500	186,281	88	75	84
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	209,648	70,170	279,818	183,406	67,130	250,536	87	96	90
2.2	BELANJA MODAL	2,229,868	467,420	2,697,289	1,785,568	450,109	2,235,677	80	96	83
2.2.1	Belanja Tanah	45,964	48	46,011	35,628	42	35,670	78	89	78
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	94,902	43,730	138,632	87,089	39,301	126,391	92	90	91
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	191,765	110,137	301,901	159,001	99,215	258,216	83	90	86
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	228,748	311,207	539,955	149,436	309,337	458,773	65	99	85
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	7,515	637	8,152	6,167	611	6,779	82	96	83
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	1,663	1,663	-	1,602	1,602		96	96
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	31,356	7,700	39,056	10,270	2,212	12,481	33	29	32
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	31,356	7,700	39,056	10,270	2,212	12,481	33	29	32
2.4	TRANSFER	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA	68,994	263,400	332,394	68,384	215,436	283,820	99	82	85
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	1,894	263,400	265,294	1,697	215,436	217,133	90	82	82
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	980	-	980	718	-	718	73		73
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	66,120	-	66,120	65,969	-	65,969	100		100
	JUMLAH BELANJA	9,691,358	2,586,039	12,277,397	8,613,530	2,379,193	10,992,723	89	92	90
	SURFLUS/DEFISIT	(571,723)	8,769	(562,954)	115,668	9,194	124,861			

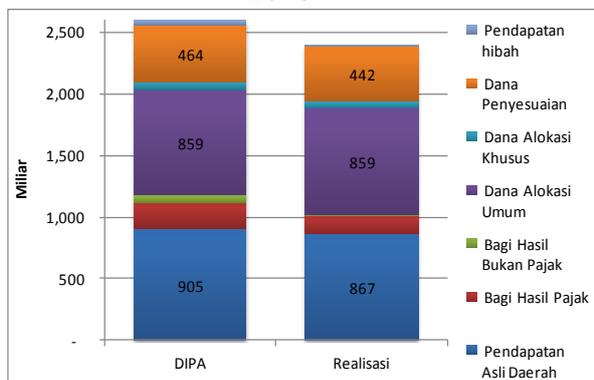
Sumber : Biro Keuangan, Setda Provinsi NTB, diolah

4.4 APBD PROVINSI NTB

Realisasi pendapatan provinsi NTB hingga akhir tahun 2013 terealisasi sebesar 92,04% dari target, menurun dibanding realisasi tahun sebelumnya dengan pencapaian sebesar 100,06%. Berdasarkan nilai nominal, realisasi pendapatan tahun 2013 mengalami pertumbuhan 6,49%, yaitu dari 2,24 trilyun menjadi 2,39 trilyun. Namun demikian, pertumbuhan ini tidak sebesar pertumbuhan yang diharapkan hingga 15,76% atau sebesar 2,59 trilyun rupiah.

Grafik 4.15

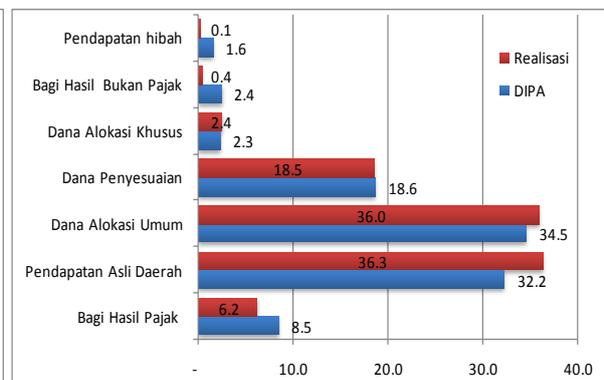
Total Realisasi Pendapatan yang dihasilkan Pemerintah Provinsi NTB dibanding DIPA tahun 2013



Sumber : Biro Keuangan, Setda Provinsi NTB,

Grafik 4.16

Perbandingan Pangsa Realisasi Pendapatan yang dihasilkan Pemerintah Provinsi NTB tahun 2013



Sumber : Biro Keuangan, Setda Provinsi NTB,

diolah

diolah

Berdasarkan struktur pendapatan, hanya dana alokasi umum dan khusus yang memiliki pencapaian hingga 100% dari target. Pendapatan asli daerah menyumbang realisasi terbesar kedua dengan pencapaian sebesar 95,90% disusul oleh realisasi dana penyesuaian yang sebesar 95,21%. Berdasarkan komponen pembentuk pendapatan asli daerah, pajak daerah mampu berkontribusi maksimal dengan realisasi mencapai 103,69%, diikuti realisasi kontribusi lain-lain PAD sebesar 87,56%, retribusi daerah 76,14% dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan realisasi sebesar 54,97%. Rendahnya penerimaan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan lebih disebabkan oleh adanya pengembalian deviden bank NTB untuk penguatan modal inti bank agar dapat masuk dalam bank dengan modal inti di atas 1 triliun dengan keuntungan keleluasaan dalam operasional.

Dengan realisasi tersebut, maka pangsa DAU mengalami peningkatan menjadi sebesar 36,0% dari total pendapatan, disusul oleh PAD dengan pangsa sebesar 36,3% dan dana penyesuaian dengan pangsa sebesar 18,5% dari total pendapatan.

Dari sisi anggaran belanja hingga triwulan IV 2013, realisasi belanja pemerintah provinsi mengalami kenaikan 19,34% dibanding realisasi belanja tahun sebelumnya. Tingkat realisasi biaya juga mengalami peningkatan cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya, yaitu dari 88,43% di tahun 2012 menjadi 92,00% di tahun 2013. Hal ini menunjukkan proses pemerintahan berjalan baik yang ditandai oleh penyerapan anggaran yang cukup tinggi.

Dibanding triwulan sebelumnya, nilai realisasi belanja triwulan IV mencapai sebesar 803,02 milyar rupiah, terutama disumbang oleh tingginya pencapaian belanja barang sebesar 175,90 milyar rupiah. Belanja lainnya dengan capaian cukup besar adalah belanja pegawai dan belanja hibah yang merupakan belanja rutin masing-masing sebesar 147,45 milyar dan 165,71 milyar dan belanja modal sebesar 230,23 milyar seiring dengan pembayaran pengerjaan pembangunan jalan dan bangunan yang memerlukan dana relatif besar.

Tabel 4.3
Rincian Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi NTB

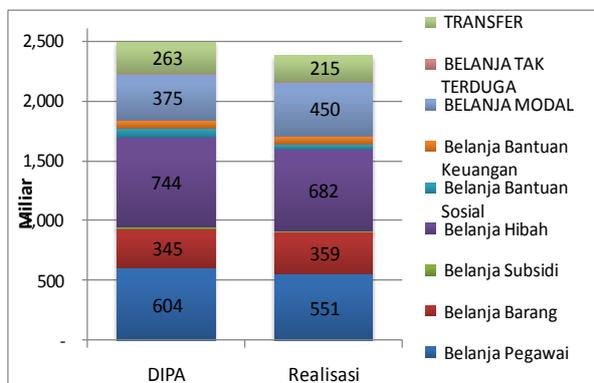
NO	URAIAN	Anggaran 2012	Anggaran 2013	Realisasi Tw III-13	Realisasi Tw IV-13	Capaian Tw 3-13 (%)	Capaian Tw 4-13 (%)	Growth 2013 (%)
I.	PENDAPATAN							
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	793,715	904,540	638,945	867,418	70.64	95.90	13.96
1.1.1	Pajak Daerah	555,167.75	673,234.69	502,949.43	698,043.79	74.71	103.69	21.27
1.1.2	Retribusi Daerah	15,590.87	16,724.72	8,352.03	12,733.65	49.94	76.14	7.27
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipis	88,891.34	95,892.61	52,715.12	52,715.12	54.97	54.97	7.88
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	134,065.01	118,688.28	74,927.95	103,925.37	63.13	87.56	(11.47)
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1,561,497.10	1,652,299.12	1,175,278.90	1,517,450.68	71.13	91.84	5.82
1.2.1	Transfer Pem.Pusat Dana Perimbangan	1,099,602.70	1,187,576.72	849,315.93	1,075,004.99	71.52	90.52	8.00
1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	186,739.21	210,658.20	109,454.84	148,645.95	51.96	70.56	12.81
1.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	49,919.43	60,157.80	6,511.29	9,598.32	10.82	15.96	20.51
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	809,617.72	859,353.03	716,127.49	859,353.03	83.33	100.00	6.14
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	53,326.34	57,407.69	17,222.31	57,407.69	30.00	100.00	7.65
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	461,894.40	464,722.40	325,962.98	442,445.70	70.14	95.21	0.61
1.2.3.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.2	Dana Penyesuaian	461,894.40	464,722.40	325,962.98	442,445.70	70.14	95.21	0.61
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	37,968.85	1,474.95	3,518.14	3.88	9.27	
1.3.1	Pendapatan hibah	-	37,968.85	1,474.95	3,518.14	3.88	9.27	
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH PENDAPATAN		2,355,212.07	2,594,808.26	1,815,698.38	2,388,386.74	69.97	92.04	10.17

Sumber : Biro Keuangan, Setda Provinsi NTB, diolah

Berdasarkan peruntukan dana, hibah menjadi belanja terbesar yang dilakukan dengan nilai realisasi mencapai 682 milyar dengan pangsa sebesar 28,68% dari total belanja provinsi NTB. Belanja pegawai menjadi pos belanja terbesar kedua dengan realisasi sebesar 551,07 milyar rupiah dengan pangsa belanja sebesar 23,16%. Belanja modal menjadi pos belanja terbesar ketiga dengan total pangsa mencapai 18,92%, diikuti oleh belanja barang dengan pangsa mencapai 15,10% dari total belanja pemerintah provinsi.

Grafik 4.17

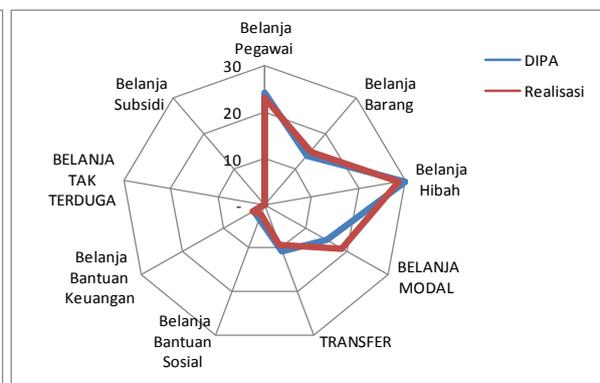
Total Belanja yang dihasilkan Pemerintah Provinsi NTB dibanding DIPA tahun 2013



Sumber : Biro Keuangan, Setda Provinsi NTB, diolah

Grafik 4.18

Perbandingan Pangsa Belanja yang dihasilkan Pemerintah Provinsi NTB dibanding DIPA tahun 2013



Sumber : Biro Keuangan, Setda Provinsi NTB, diolah

Berdasarkan tingkat realisasi penyaluran dana, realisasi belanja modal menjadi pos belanja dengan realisasi belanja tertinggi sebesar 96,30%, diikuti oleh belanja hibah sebesar 84,09% dan belanja pegawai sebesar 93,03%. Tingginya realisasi belanja modal membuat pangsa belanja modal dibanding DIPA mengalami peningkatan dari 15,06% menjadi 18,92% dari total belanja provinsi. Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja provinsi, maka pemerintah provinsi NTB mengalami surplus anggaran tahun berjalan sebesar 9,19 milyar. Ditambah SILPA tahun sebelumnya dan dikurangi pembayaran pokok hutang, total SILPA yang dimiliki sebesar 17,66 milyar rupiah.

Tabel 4.4
Rincian Belanja Daerah Pemerintah Provinsi NTB

NO	URAIAN	Anggaran 2012	Anggaran 2013	Realisasi Tw III-13	Realisasi Tw IV-13	Capaian Tw 3-13 (%)	Capaian Tw 4-13 (%)	Growth 2013 (%)
II.	BELANJA							
2.1	BELANJA OPERASI	1,734,127.56	1,847,518.73	1,139,555.58	1,711,436.47	61.68	92.63	6.54
2.1.1	Belanja Pegawai	557,076.28	592,370.70	403,620.67	551,071.51	68.14	93.03	6.34
2.1.2	Belanja Barang	402,010.81	391,296.21	183,398.87	359,302.24	46.87	91.82	(2.67)
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-			
2.1.4	Belanja Subsidi	250.00	250.00	-	197.77		79.11	-
2.1.5	Belanja Hibah	584,163.99	725,059.34	516,530.14	682,235.51	71.24	94.09	24.12
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	115,037.57	68,372.49	16,695.90	51,499.78	24.42	75.32	(40.57)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	75,588.91	70,170.00	19,310.00	67,129.67	27.52	95.67	(7.17)
2.2	BELANJA MODAL	420,309.08	467,420.26	219,883.24	450,109.30	47.04	96.30	11.21
2.2.1	Belanja Tanah	-	47.50	-	42.30		89.05	
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	46,689.55	43,729.68	22,966.70	39,301.39	52.52	89.87	(6.34)
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	90,332.21	110,136.77	33,335.07	99,214.98	30.27	90.08	21.92
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	281,671.40	311,206.80	163,234.56	309,337.23	52.45	99.40	10.49
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1,336.85	636.86	297.32	611.30	46.69	95.99	(52.36)
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	279.08	1,662.65	49.58	1,602.10	2.98	96.36	495.76
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	14,500.61	7,700.00	2,119.35	2,211.66	27.52	28.72	(46.90)
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	14,500.61	7,700.00	2,119.35	2,211.66	27.52	28.72	(46.90)
2.4	TRANSFER	195,501.62	263,400.14	214,615.56	215,435.74	81.48	81.79	34.73
2.4.1	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA	195,501.62	263,400.14	214,615.56	215,435.74	81.48	81.79	34.73
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	195,501.62	263,400.14	214,615.56	215,435.74	81.48	81.79	34.73
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-			
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-			
JUMLAH BELANJA		2,364,438.87	2,586,039.13	1,576,173.73	2,379,193.16	60.95	92.00	9.37
SURFLUS/DEFISIT		(9,226.80)	8,769.13	239,524.64	9,193.58			

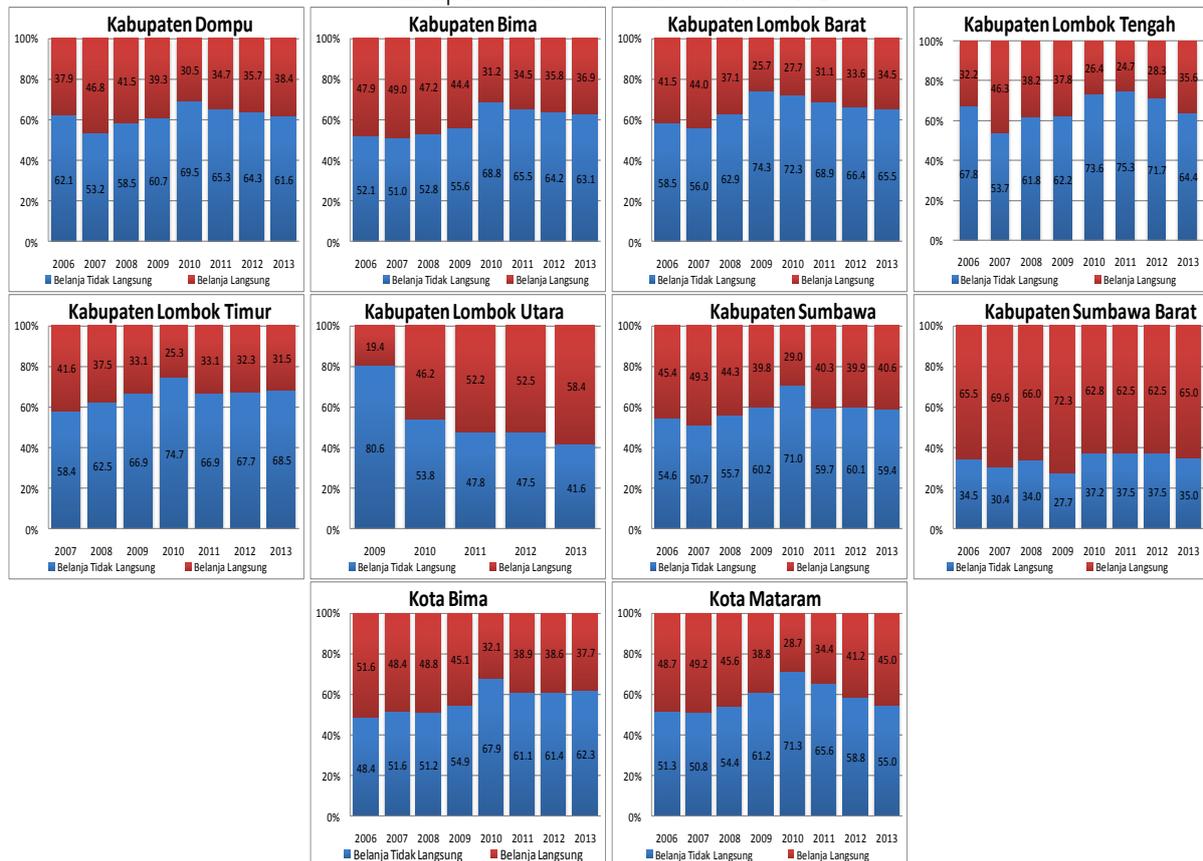
Sumber : Biro Keuangan, Setda Provinsi NTB, diolah

4.5 APBD KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI NTB

Total realisasi anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan kota di wilayah provinsi NTB berdasarkan rencana APBD tahun 2013 masing-masing sebesar 8,73 trilyun dan 8,26 trilyun, sehingga secara total terdapat surplus anggaran hingga 473,29 milyar di tahun 2013. Dengan adanya penambahan surplus anggaran tersebut, maka total sisa lebih pembiayaan anggaran hingga tahun 2013 mencapai 803,75 milyar.

Struktur belanja kabupaten/kota sebagian besar lebih banyak didominasi oleh biaya tidak langsung terlebih untuk gaji pegawai. Namun demikian, besar prosentase belanja tiap kabupaten berbeda-beda. Berdasarkan data historis belanja daerah, didapatkan bahwa hanya kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Lombok Utara yang memiliki pangsa belanja langsung lebih dari 50%. Upaya untuk memperbaiki struktur belanja di Lombok Utara juga tampak dari berkurangnya alokasi biaya tidak langsung di tiap tahunnya. Penurunan biaya tidak langsung secara signifikan terjadi pada tahun 2010 yang turun dari 80,6% menjadi 53,8% dari total biaya. Alokasi anggaran biaya tak langsung terus berkurang hingga tahun 2013 menjadi hanya 41,6% dari total biaya. Demikian pula dengan Kabupaten Sumbawa Barat. Dari tahun 2006 hingga 2013, pangsa biaya tak langsung hanya berada di kisaran 35% dari total biaya. selebihnya digunakan sebagai biaya pembangunan.

Grafik 4.19
Perbandingan Pangsa Belanja Produktif
Kabupaten dan Kota di Provinsi NTB



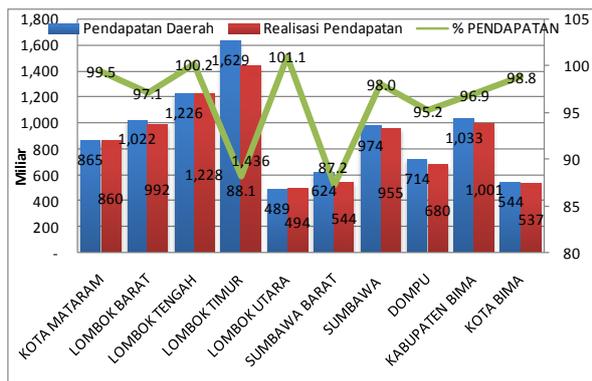
Sumber : Kementerian Keuangan, Biro Keuangan, diolah

Secara umum, perbaikan struktur APBD terjadi hampir di semua kabupaten. Perbaikan kualitas tampak pada perubahan struktur belanja kabupaten Dompu, kabupaten Bima, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan kota Mataram. Struktur belanja Kabupaten Sumbawa masih cenderung sama dalam tiga tahun terakhir, sedangkan struktur

belanja kabupaten Lombok Timur dan Kota Bima justru masih menunjukkan tren kurang produktif dibanding tahun-tahun sebelumnya yang tampak dari semakin membesarnya anggaran biaya tidak langsung dalam tiga tahun terakhir.

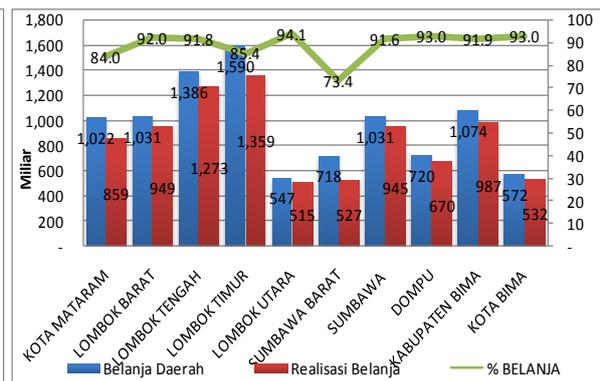
Hingga akhir tahun 2013, berdasarkan angka realisasi anggaran, kabupaten Lombok Utara menunjukkan kinerja terbaik di Provinsi NTB. Walaupun memiliki APBD terkecil dibanding daerah lain, namun Kabupaten Lombok Utara mampu memaksimalkan anggaran belanja yang ada. Total realisasi pendapatan hingga akhir tahun 2013 mencapai 494 milyar atau 101,1% dari total anggaran APBD 2013 yang ditetapkan sebesar 489 milyar. Demikian juga dengan realisasi belanja Kabupaten Lombok Utara yang mencapai 94,1%, tertinggi dibanding kabupaten/kota, provinsi bahkan realisasi APBN di Provinsi NTB. Struktur anggaran pemerintah daerah Lombok Utara menunjukkan bahwa dengan alokasi belanja tidak langsung yang tidak lebih besar dari biaya langsung, pemerintahan dapat tetap berjalan efektif.

Grafik 4.20
Realisasi Pendapatan yang dihasilkan
Pemerintah Kabupaten di Provinsi NTB



Sumber : Biro Keuangan, Setda Provinsi NTB, diolah

Grafik 4.21
Realisasi Belanja yang dihasilkan Pemerintah
Kabupaten di Provinsi NTB tahun 2013

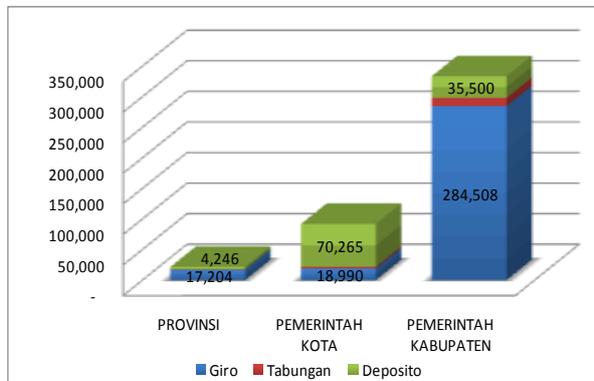


Sumber : Biro Keuangan, Setda Provinsi NTB, diolah

Secara rata-rata, realisasi pendapatan dan belanja kabupaten/kota dapat mencapai lebih dari 90%. Hanya kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa Barat yang tidak dapat mencapai realisasi pendapatan di atas 90% yang disebabkan oleh adanya perencanaan dana transfer yang cukup besar, sehingga realisasi tidak sesuai harapan di Lombok Timur dan tidak terpenuhinya ekspektasi dana bagi hasil pajak atas operasional PT NNT dikarenakan adanya penurunan pendapatan PT NNT. Kabupaten Lombok Timur menjadi kabupaten dengan perolehan pendapatan daerah tertinggi sebesar 1,44 trilyun, disusul oleh Kabupaten Lombok Tengah dengan capaian pendapatan sebesar 1,23 trilyun, kabupaten Bima sebesar 1,00 trilyun, Kabupaten Lombok barat sebesar 992 milyar dan kabupaten Sumbawa dengan capaian pendapatan sebesar 955 milyar.

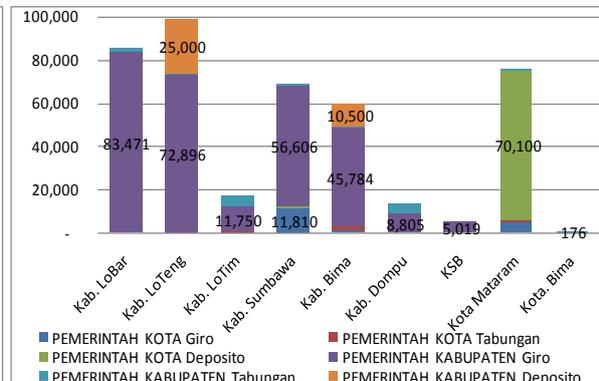
Dari sisi pengeluaran, kabupaten Lombok Timur masih menjadi kabupaten dengan pengeluaran terbesar yaitu sebesar 1,36 triliun, disusul oleh Kabupaten Lombok Tengah dengan capaian sebesar 1,27 triliun, Kabupaten Bima dengan capaian sebesar 987 milyar dan Kabupaten Lombok Barat dengan capaian sebesar 949 milyar rupiah di tahun 2013. Terdapat 4 Kabupaten/ kota dengan pencapaian belanja kurang dari 90% antara lain Kabupaten Sumbawa Barat dengan realisasi sebesar 73,4%, Kota Mataram dengan realisasi 84,0% dan Kabupaten Lombok Timur dengan realisasi sebesar 85,4%. Realisasi rendah selanjutnya adalah Kota Lombok Timur yang lebih disebabkan oleh besarnya beban hutang, sehingga kabupaten harus melakukan pembayaran pokok hutang pemerintah senilai 115,60 milyar rupiah di tahun 2013.

Grafik 4.22
Simpanan Pemerintah Kabupaten, Kota dan Provinsi dalam Perbankan di Provinsi NTB



Sumber : Biro Keuangan, Setda Provinsi NTB, diolah

Grafik 4.23
Alokasi Simpanan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi NTB



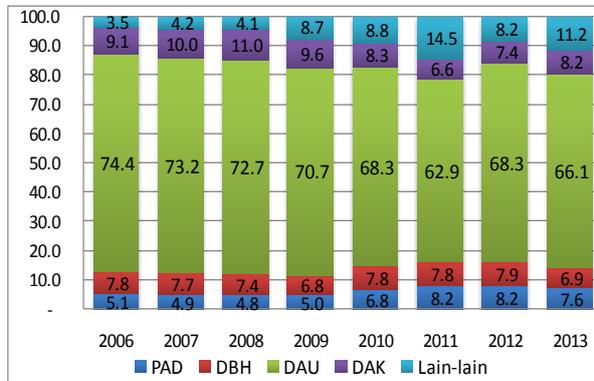
Sumber : Biro Keuangan, Setda Provinsi NTB, diolah

Data simpanan pemerintah di perbankan hingga posisi Desember 2013 tercatat sebesar 447,35 milyar rupiah. 71,70% dalam bentuk giro pemerintah yang menunjukkan alokasi anggaran belanja yang belum disalurkan dan 24,60% dalam bentuk deposito. Hal ini menunjukkan dari total SILPA pemerintah kabupaten/ kota dan provinsi yang sebesar 821,41 milyar rupiah, 447,35 milyar berada di dalam sistem perbankan dan selebihnya sebesar 374,16 milyar disimpan dalam bentuk yang lain.

Dana giro didominasi oleh pemerintah kabupaten dan dana deposito dimiliki oleh pemerintah kota. Berdasarkan lokasi bank tempat menabung, didapatkan bahwa kabupaten Lombok Barat memiliki giro terbesar dengan nilai sebesar 83,47 milyar rupiah, disusul oleh Kabupaten Lombok Tengah sebesar 72,90 milyar dan Kabupaten Sumbawa dengan giro sebanyak 56,61 milyar. Dana simpanan terbanyak dimiliki oleh Kota Mataram dengan nilai mencapai 70,10 milyar rupiah. Selain itu, terdapat dana deposito pemerintah kota yang disimpan di Kabupaten Lombok Tengah dengan nilai mencapai 25,00 milyar rupiah. Dana

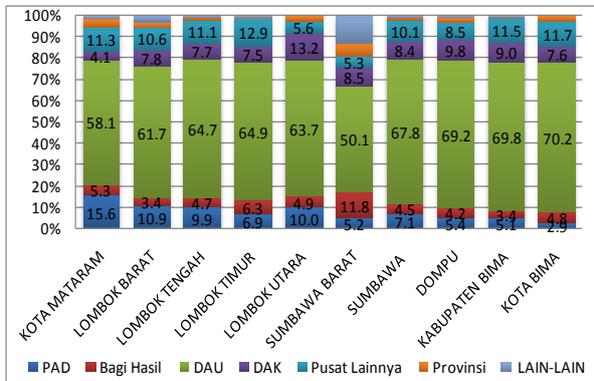
deposito pemerintah kota yang disimpan di daerah lain juga terdapat di Kabupaten Bima dengan nilai deposito sebesar 10,50 milyar.

Grafik 4.24
Pangsa Pendapatan Total Pemerintah
Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi NTB



Sumber : Kementerian Keuangan, Biro
Keuangan, diolah

Grafik 4.25
Perbandingan Pangsa Pendapatan Pemerintah
Kabupaten dan Kota di Provinsi NTB



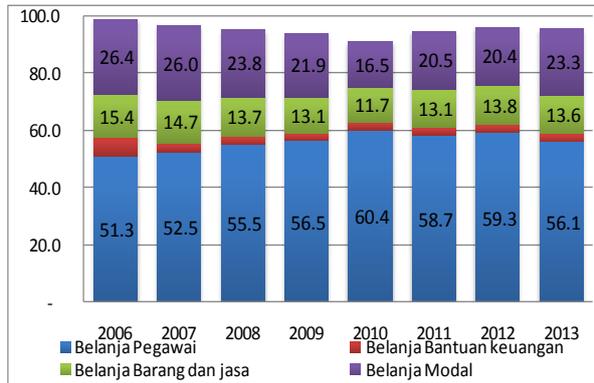
Sumber : Biro Keuangan, Setda Provinsi NTB,
diolah

Berdasarkan data rincian pendapatan kabupaten/ kota, tampak adanya perbaikan komposisi pendapatan yang tampak dari adanya kenaikan porsi pendapatan asli daerah meskipun di tahun 2013 mengalami penurunan. Porsi DAU mengalami penurunan kecuali di tahun 2013 yang mengalami peningkatan, selebihnya masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah berupa DAK, dana bagi hasil ataupun dana transfer lainnya. Kabupaten Sumbawa barat menjadi daerah dengan alokasi DAU terendah terhadap total pendapatan dengan alokasi dana sebesar 50,1%, sedangkan kota Bima menjadi daerah dengan porsi DAU tertinggi di Provinsi NTB dengan alokasi sebesar 70,2%.

Porsi belanja pegawai hingga tahun 2010 terus menunjukkan pangsa yang selalu meningkat secara rata-rata hingga mencapai 60,4% di tahun 2010. Pangsa belanja pegawai menurun di tahun 2011, sedikit meningkat di tahun 2012 dan kembali menurun di tahun 2013. Hal ini menunjukkan adanya komitmen serius dari pemerintah untuk membangun wilayahnya. Kabupaten Sumbawa Barat dan Lombok Utara menjadi daerah dengan porsi belanja modal tertinggi sebesar 33,1% dan 32,8% dari total belanja, disusul oleh Kabupaten Lombok Tengah dengan belanja modal mencapai 28,3% dari total belanja, dan Kota Mataram dengan belanja modal mencapai 20,4% dari total belanja.

Grafik 4.26

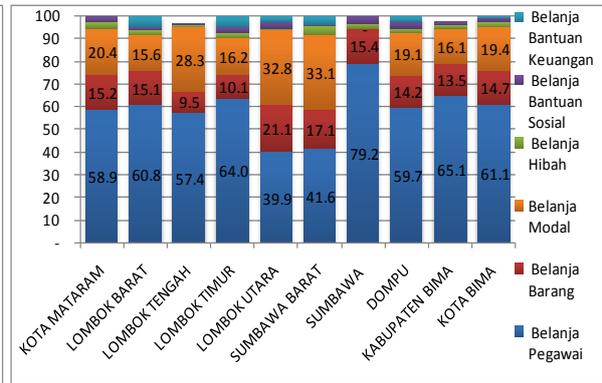
Pangsa Belanja Total Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi NTB



Sumber : Biro Keuangan, Setda Provinsi NTB, diolah

Grafik 4.27

Perbandingan Pangsa Belanja Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi NTB

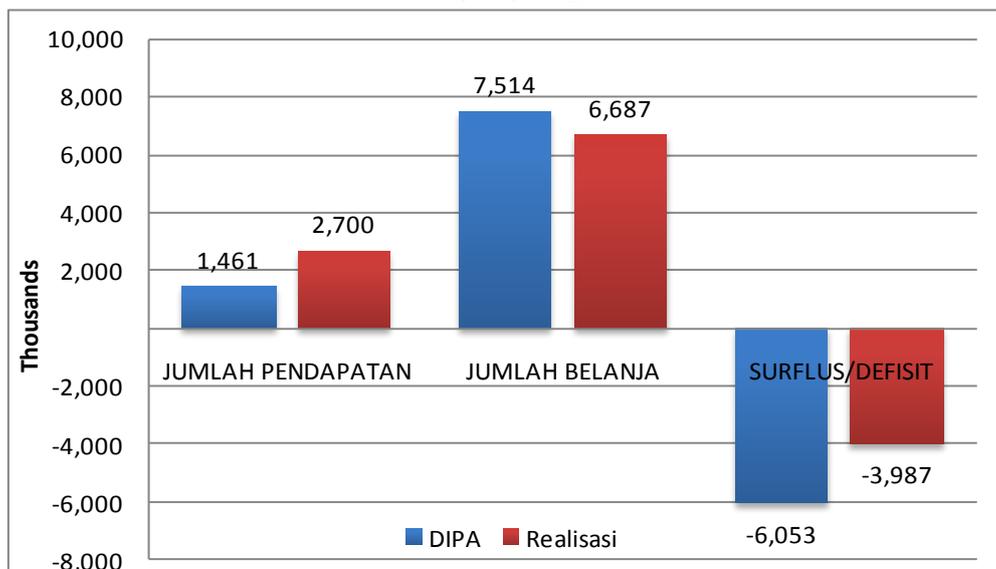


Sumber : Biro Keuangan, Setda Provinsi NTB, diolah

4.6 KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DI PROVINSI NTB

Total realisasi belanja pemerintah pusat di provinsi NTB tahun 2013 mencapai 6,69 triliun atau sebesar 89,00% dari target belanja pusat yang sebesar 7,51 triliun. Dengan jumlah pendapatan yang berhasil dihimpun sebesar 2,70 triliun, maka alokasi belanja pemerintah pusat di Provinsi NTB mengalami defisit pembiayaan hingga 3,99 triliun. Jumlah ini relatif menurun dari rencana belanja yang mengalami defisit 6,05 triliun dikarenakan oleh tingginya pencapaian pendapatan dibanding target hingga 184,83%.

Grafik 4.28
Perbandingan Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi NTB

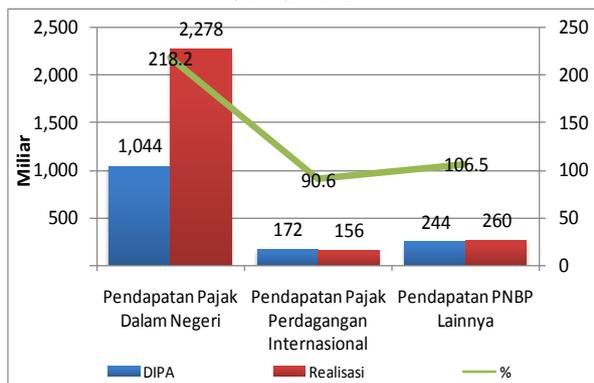


Sumber : Ditjen Perbendaharaan Negara Wilayah NTB, diolah

Penerimaan perpajakan mencapai 90,13% dari total pendapatan pemerintah pusat dan 9,66% diperoleh dari penerimaan bukan pajak. Hampir semua pendapatan negara mencapai

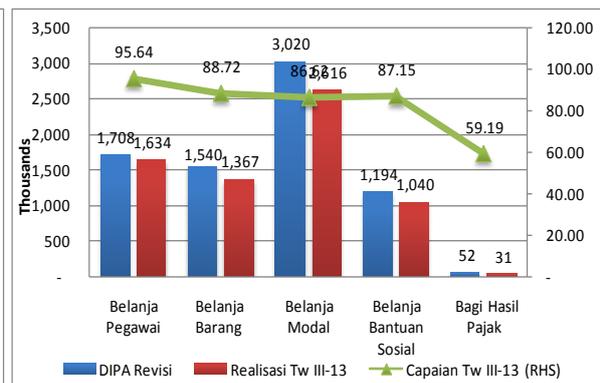
target dan hanya pendapatan pajak perdagangan internasional yang tidak mencapai target dengan pencapaian sebesar 90,56%. Sedangkan pajak pendapatan dalam negeri mencapai realisasi hingga 218,2% terutama disumbang oleh pencapaian pajak penghasilan penduduk Provinsi NTB baik yang berada dalam satu provinsi maupun di provinsi lain.

Grafik 4.29
Realisasi Penerimaan Pendapatan Negara di
Provinsi NTB



Sumber : Ditjen Perbendaharaan Negara Wilayah NTB, diolah

Grafik 4.30
Realisasi Belanja Negara di Provinsi NTB



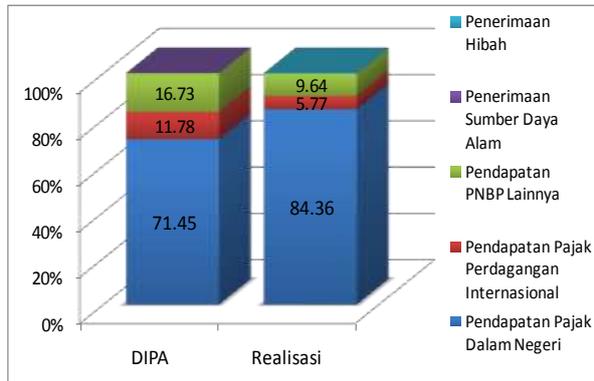
Sumber : Ditjen Perbendaharaan Negara Wilayah NTB, diolah

Realisasi belanja negara masih didominasi oleh belanja modal dengan pangsa mencapai 39,12%, diikuti oleh belanja pegawai sebesar 24,43%, belanja barang sebesar 20,44% dari realisasi total belanja dan belanja bantuan sosial dengan nilai realisasi mencapai 15,56% dari total realisasi.

Berdasarkan tingkat pencapaian belanja Negara, belanja bagi hasil pajak mencapai realisasi belanja terendah dengan tingkat belanja hanya sebesar 59,19% dari rencana belanja di tahun 2013. Belanja modal tercapai 86,62% dari rencana belanja dan belanja bantuan sosial tercapai 87,15% dari total rencana belanja. Relatif rendahnya pencapaian belanja modal terutama disebabkan oleh realisasi belanja yang mendekati akhir tahun, sehingga tidak semua belanja dapat diserap dikarenakan tidak cukupnya waktu dalam pelaksanaan proyek tersebut. Salah satunya adalah biaya investasi pembangunan jalan *ring road* dari Mataram ke Lombok Barat yang akhirnya dialihkan di tahun 2014. Pencapaian belanja tertinggi adalah belanja pegawai dengan capaian sebesar 95,64% dan belanja barang dengan capaian sebesar 88,72%.

Grafik 4.31

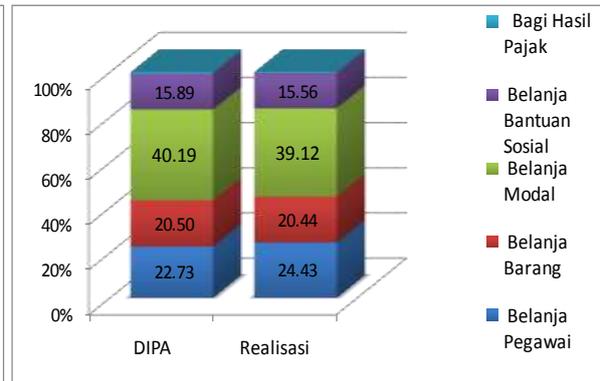
Realisasi Pangsa Pendapatan yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten di Provinsi NTB



Sumber : Ditjen Perbendaharaan Negara Wilayah NTB, diolah

Grafik 4.32

Realisasi Pangsa Belanja yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten di Provinsi NTB tahun



Sumber : Ditjen Perbendaharaan Negara Wilayah NTB, diolah

Sepanjang triwulan IV 2013, pemerintah pusat masih dapat menghimpun pendapatan hingga 887,35 milyar terutama berasal dari penerimaan pajak dalam negeri sebesar 814,12 milyar rupiah.

Tabel 4.5

Rincian Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi NTB

NO	URAIAN	DIPA	DIPA Revisi	Realisasi Tw III-13	Realisasi Tw IV-14	Bertambah/Berkurang	Capaian Tw 3-13 (%)	Capaian Tw 4-13 (%)
1	2	3		7		9	12	13
I.	PENDAPATAN NEGARA							
1.1.	Penerimaan Dalam Negeri	1,461,037	1,461,037	1,813,024	2,694,954	351,987	124.09	184.45
1.1.1.	Penerimaan Perpajakan	1,216,038	1,216,038	1,591,396	2,434,015	375,358	130.87	200.16
1.1.1.1.	Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1,043,865	1,043,865	1,463,981	2,278,104	420,117	140.25	218.24
1.1.1.2.	Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	172,173	172,173	127,414	155,912	-44,759	74.00	90.56
1.1.2.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	244,999	244,999	221,628	260,939	-23,371	90.46	106.51
1.1.2.1.	Penerimaan Sumber Daya Alam	516	516	23	679	-493	4.45	131.62
1.1.2.2.	Pendapatan Bagian Laba BUMN							
1.1.2.3.	Pendapatan PNBP Lainnya	244,483	244,483	221,606	260,260	-22,878	90.64	106.45
1.2.	Penerimaan Hibah			65	5,487	65		
	JUMLAH PENDAPATAN	1,461,037	1,461,037	1,813,089	2,700,441	352,053	124.10	184.83

Sumber : Biro Keuangan, Setda Provinsi NTB, diolah

Belanja negara di triwulan IV 2013 mencapai 2,92 trilyun atau hampir 40% dari total belanja pemerintah pusat di provinsi NTB. Pencapaian terbesar terutama berasal dari belanja modal sebesar 1,49 trilyun atau hampir 50% dari total belanja modal pemerintah pusat di provinsi NTB yang sebesar 3,02 trilyun. Pencapaian belanja barang juga relatif tinggi mencapai 40% dari total belanja barang pemerintah pusat tahun 2013 sebesar 1,54 trilyun rupiah. Walaupun secara keseluruhan belanja pemerintah pusat dapat tercapai 89,00% dibanding

triwulan sebelumnya yaitu sebesar 50,07%, namun relatif lambatnya realisasi membuat proses pembangunan juga melambat sebagaimana realisasi belanja yang dilakukan.

Tabel 4.6
Rincian Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi NTB

NO	URAIAN	DIPA	DIPA Revisi	Realisasi Tw III-13	Realisasi Tw IV-14	Bertambah/Berkurang	Capaian Tw 3-13 (%)	Capaian Tw 4-13 (%)
II.	BELANJA NEGARA							
2.1	BELANJA OPERASI	6,653,467	7,461,903	3,751,840	6,656,354	-3,710,062	50.28	89.20
2.1.1	Belanja Pegawai	1,651,259	1,708,146	1,220,162	1,633,696	-487,985	71.43	95.64
2.1.2	Belanja Barang	1,459,302	1,540,329	752,740	1,366,558	-787,589	48.87	88.72
2.1.3	Belanja Modal	2,411,281	3,019,851	1,128,022	2,615,914	-1,891,829	37.35	86.62
2.1.4	Belanja Bunga			6	6	6		
2.1.5	Belanja Subsidi							
2.1.6	Belanja Hibah							
2.1.7	Belanja Bantuan Sosial	1,131,625	1,193,576	650,911	1,040,179	-542,665	54.53	87.15
2.1.8	Belanja Lain-Lain							
2.4	TRANSFER KE DAERAH	51,946	51,946	10,536	30,749	-41,410	20.28	59.19
2.4.1	TRANSFER BAGI HASIL	51,946	51,946	10,536	30,749	-41,410	20.28	59.19
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	51,946	51,946	10,536	30,749	-41,410	20.28	59.19
	JUMLAH BELANJA	6,705,413	7,513,849	3,762,377	6,687,103	-3,751,472	50.07	89.00
	SURFLUS/DEFISIT	-5,244,377	-6,052,812	-1,949,287	-3,986,662	4,103,525	32.20	65.86
III.	PEMBIAYAAN							
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-5,244,377	-6,052,812	-1,949,287	-3,986,662	4,103,525	32.20	65.86

Sumber : Biro Keuangan, Setda Provinsi NTB, diolah

BAB 5

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

5.1 UMUM

Indikator kesejahteraan di Provinsi NTB menunjukkan adanya tren peningkatan. Adanya penurunan angka kemiskinan berdasarkan hasil survei kemiskinan di bulan September 2013 menjadi penyebab utama peningkatan indikator kesejahteraan. Dengan adanya peningkatan nilai garis kemiskinan hingga 12,0% (yoy), jumlah penduduk kurang mampu menurun hingga 3,1% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan daya beli masyarakat.

Hasil survei kegiatan dunia usaha (SKDU) juga menunjukkan penggunaan tenaga kerja di triwulan IV 2013 mengalami peningkatan seiring dengan adanya peningkatan kebutuhan tenaga kerja di sektor pertanian. Adanya penurunan jumlah angkatan kerja di bulan Agustus dinilai cukup wajar mengikuti tren penurunan yang rutin terjadi di tiap bulan Agustus. Penurunan angkatan kerja terutama di sektor formal di bulan Agustus kemungkinan disebabkan oleh peralihan pekerja remaja yang melanjutkan sekolah.

Daya beli masyarakat juga menunjukkan adanya peningkatan yang terlihat dari adanya peningkatan penurunan pembayaran cicilan hutang dan meningkatnya kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Adanya penurunan remitansi TKI lebih disebabkan oleh adanya moratorium pengiriman TKI yang menyebabkan pengiriman TKI juga mengalami pelambatan.

5.2 KETENAGAKERJAAN

5.2.1 Data Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Jumlah tenaga kerja di triwulan IV 2013 diperkirakan mengalami kenaikan sebagaimana ditunjukkan data SKDU. Peningkatan terutama didorong oleh penambahan pegawai di sektor pertanian, seiring dengan adanya musim tanam komoditas pertanian di bulan Desember 2013. Kondisi ketenagakerjaan diperkirakan akan masih cukup tinggi hingga triwulan I 2013 seiring dengan adanya produksi puncak tanaman pangan.

Walaupun data ketenagakerjaan bulan Agustus 2013 menunjukkan adanya peningkatan rasio jumlah pengangguran terbuka, peningkatan tersebut lebih disebabkan oleh adanya penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja yang hanya mencapai 65,44% dari total

penduduk usia 15 tahun ke atas. Penyebab utama penurunan angkatan kerja adalah adanya perkawinan dan juga peningkatan partisipasi sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas.

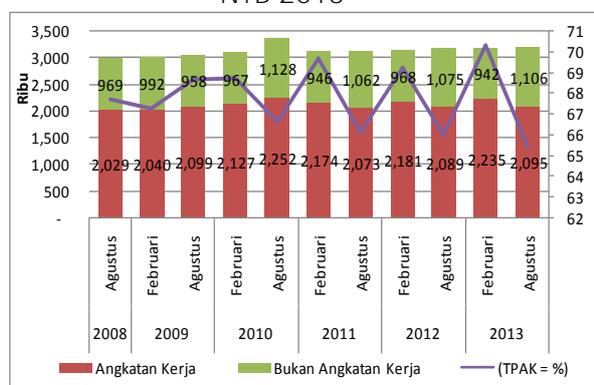
Tabel 5. 1
Perkembangan Ketenagakerjaan Prov. NTB

Kegiatan Utama	2010		2011		2012		2013	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
1. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	3,093,990	3,380,129	3,119,937	3,134,879	3,149,187	3,163,756	3,177,466	3,200,718
2. Angkatan Kerja	2,126,618	2,252,076	2,174,164	2,072,782	2,181,442	2,088,712	2,235,347	2,094,550
a. Bekerja	2,003,781	2,132,933	2,057,752	1,962,240	2,067,807	1,978,764	2,115,343	1,981,842
b. Pengangguran	122,837	119,143	116,412	110,542	113,635	109,948	120,004	112,708
3. Bukan Angkatan Kerja	967,372	1,128,053	945,773	1,062,097	967,745	1,075,044	942,119	1,106,168
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK = %)	68,73	66,63	69,69	66,12	69,27	66,02	70,35	65,44
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT = %)	5,78	5,29	5,35	5,33	5,21	5,26	5,37	5,38
6. Setengah Penganggur	775,110	825,069	773,542	860,638	811,201	880,550	824,772	924,926

Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

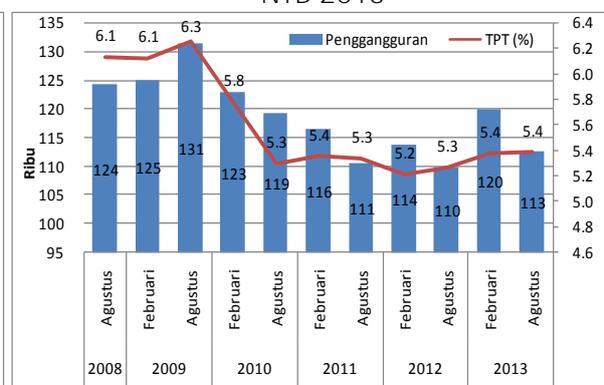
Berdasarkan karakter aktivitas sosial yang terjadi, penurunan angkatan kerja tersebut lebih disebabkan oleh bertambahnya partisipasi sekolah masyarakat, walaupun data angka partisipasi sekolah di tahun 2012 untuk kategori pendidikan SMU ke atas mengalami penurunan. Kenaikan angka partisipasi sekolah (APS) diduga akan tampak pada data tahun 2013. Secara nominal, jumlah pengangguran juga mengalami penurunan.

Grafik 5. 1
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi NTB 2013



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

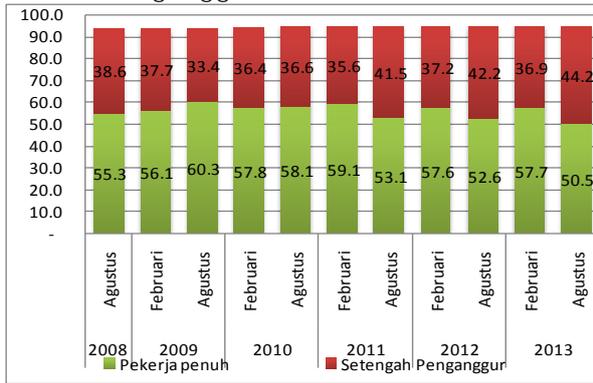
Grafik 5. 2
Jumlah dan Prosentase Pengangguran di Provinsi NTB 2013



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

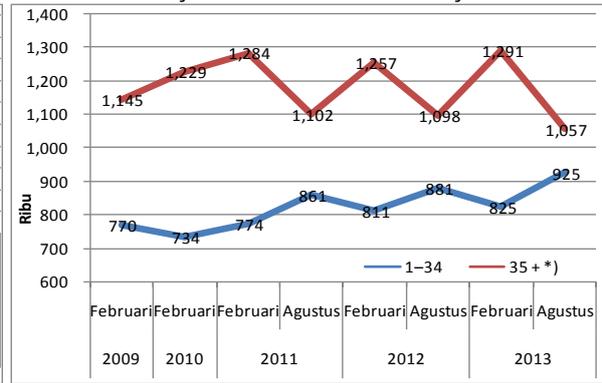
Penurunan jumlah pengangguran sayangnya tidak diikuti oleh peningkatan kualitas pekerja yang tampak dari penurunan pekerja penuh dengan penurunan pangsa hingga lebih dari 7%, dan tampak dari penurunan pekerja dengan jam kerja di atas 35 jam seminggu yang menunjukkan adanya penurunan kualitas tenaga kerja yang bekerja.

Grafik 5.3
Perbandingan Pekerja Penuh dan Setengah Penganggur di Provinsi NTB



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

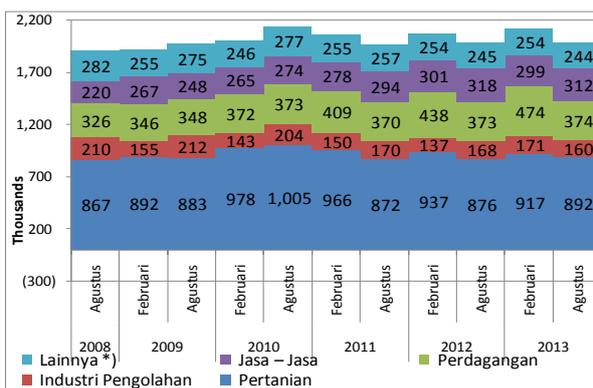
Grafik 5.4
Perbandingan Pekerja dengan Jam Kerja di Atas 35 jam dan di Bawah 35 jam



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Berdasarkan sektor usaha, penurunan terutama terjadi pada sektor perdagangan yang turun hingga 100 ribu orang tenaga kerja, terutama karyawan dan buruh perdagangan. Berdasarkan kabupaten/ kota, peningkatan pengangguran terutama terjadi di daerah Lombok Timur, Kota Bima dan Sumbawa Barat. Peningkatan pengangguran di Lombok Timur lebih disebabkan oleh kapasitas lapangan usaha yang tidak mampu menampung peningkatan tenaga kerja yang terjadi. Di Kabupaten Sumbawa Barat lebih disebabkan oleh adanya penurunan produksi PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) sedangkan di Kota Bima lebih disebabkan oleh menurunnya angkatan kerja, sehingga jumlah pengangguran dibanding angkatan kerja menjadi lebih besar.

Grafik 5.5
Sumbangan Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Ekonomi di Triwulan II 2013



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 5.6
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka di Kabupaten/ Kota

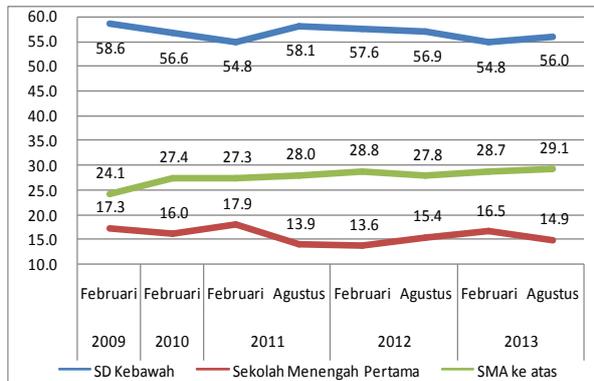
Kabupaten/ Kota	Partisipasi Angkatan Kerja			Pengangguran Terbuka		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
1. Lombok Barat	66.08	66.09	61.72	4.89	5.3	4.16
10. Kota Bima	64.84	67.77	66.54	6.36	6.36	9.21
2. Lombok Tengah	66.21	72.46	75.9	5.94	5.85	5.46
3. Lombok Timur	65.01	60.56	63.89	4.59	4.69	6.22
4. Sumbawa	68.37	72.31	71.62	5.17	4.97	4.11
5. Dompu	67.24	64.17	59.37	5.87	4.75	5.13
6. Bima	66.67	67.86	62.99	5.13	5.08	4.9
7. Sumbawa Barat	69.17	65.21	65.62	4.99	5.25	6.91
8. Lombok Utara	66.91	59.95	57.99	4.85	3.38	4.02
9. Kota Mataram	64.71	61.98	56.15	6.7	6.53	5.48
Total	66.12	66.02	65.44	5.33	5.26	5.38

Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, tampak bahwa pangsa tenaga kerja lulusan SMP mengalami penurunan di bulan Agustus 2013, menguatkan dugaan tenaga kerja yang kembali melanjutkan sekolah di tahun ajaran baru saat ini. Adanya tren kenaikan pekerja dengan pendidikan SMA ke atas, dan disertai oleh pelambatan dan tren menurun pekerja dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah menunjukkan adanya perbaikan kualitas tenaga

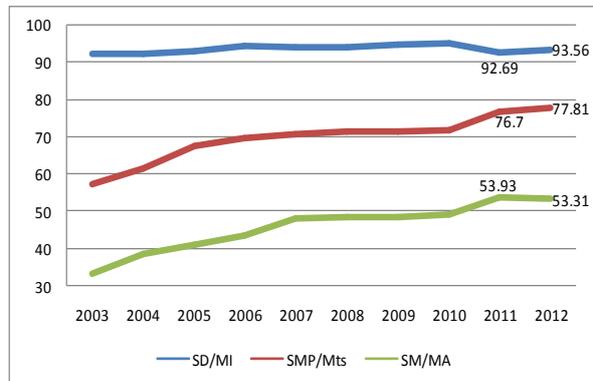
kerja. Dengan angka partisipasi sekolah yang menunjukkan adanya peningkatan, dengan partisipasi sekolah SMA hingga lebih dari 50%, maka diharapkan kualitas tenaga kerja dalam beberapa tahun ke depan juga mengalami peningkatan.

Grafik 5.7
Prosentase Pekerja di Provinsi NTB Berdasarkan Pendidikan Terakhir



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 5.8
Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi NTB



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

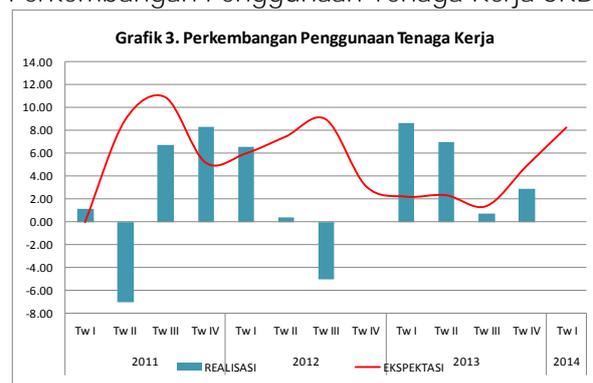
Data realisasi kegiatan dunia usaha di triwulan IV 2013 masih menunjukkan adanya peningkatan, walaupun cenderung melambat. Hal ini disebabkan oleh sudah selesainya panen raya komoditas unggulan Provinsi NTB. Peningkatan indikator pertanian lebih disebabkan oleh kebutuhan peningkatan tenaga kerja di triwulan IV 2013 bersamaan dengan datangnya musim tanam komoditas pangan.

Grafik 5.9
Perkembangan Kegiatan Dunia Usaha



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.10
Perkembangan Penggunaan Tenaga Kerja SKDU



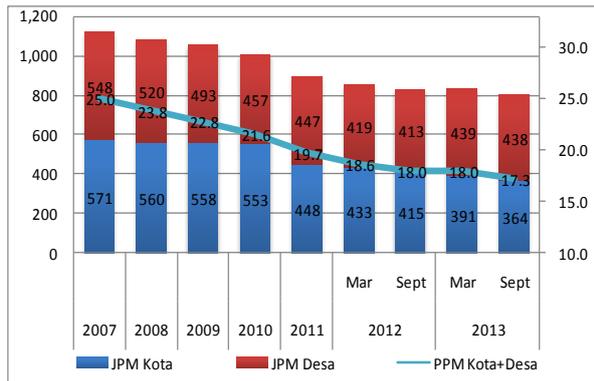
Sumber: Bank Indonesia, diolah

5.3 KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Jumlah penduduk miskin berkurang signifikan dibanding semester sebelumnya. Jumlah penduduk miskin di provinsi NTB berdasarkan hasil survei bulan September 2013 sebesar 802,45 ribu orang, berkurang 3,42% dibanding semester sebelumnya yang berjumlah 830,84 ribu orang. Penurunan jumlah penduduk miskin terutama terjadi pada penduduk miskin

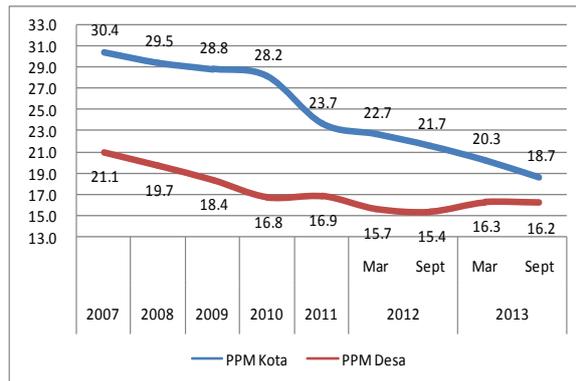
perkotaan yang turun hingga 6,98% dibanding semester sebelumnya dan turun 12,35% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan dan keberhasilan program pengentasan kemiskinan yang diterapkan. Total jumlah penduduk miskin di provinsi NTB sebesar 17,3% dari total jumlah penduduk, menurun dibanding semester dan tahun sebelumnya yang masih sebesar 18,0% dari total jumlah penduduk.

Grafik 5. 11
Perkembangan Penduduk Miskin di Propinsi NTB



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

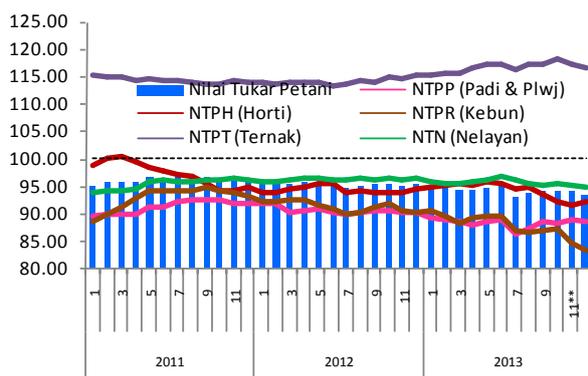
Grafik 5. 12
Prosentasi Penduduk Miskin Perkotaan dan Pedesaan



Sumber: Data Remitansi KPwBI Prov NTB

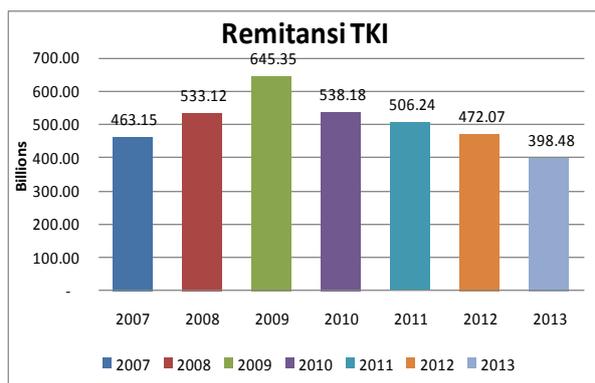
Penduduk perkotaan masih memiliki prosentasi penduduk miskin lebih banyak dibanding prosentase penduduk miskin pedesaan. Namun demikian, selisih prosentase penduduk miskin antara perkotaan dan pedesaan semakin kecil. Sebaliknya, prosentase penduduk miskin pedesaan justru melambat dan cenderung tetap di bulan september 2013.

Grafik 5. 13
Perkembangan Nilai Tukar Petani



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 5. 14
Remitansi TKI Per Negara Penempatan di Provinsi NTB 2013



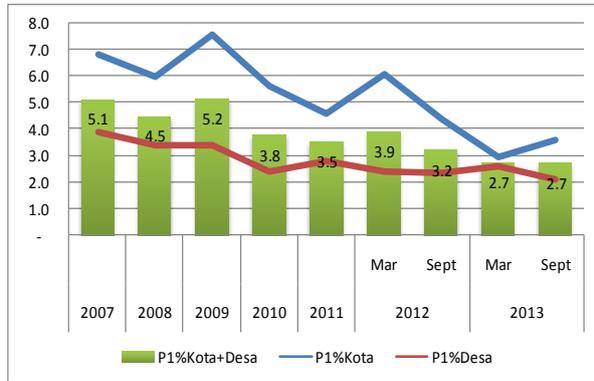
Sumber: Data Remitansi KPwBI Prov NTB

Pelambatan pengurangan penduduk miskin pedesaan terlihat dari indikator nilai tukar petani yang menunjukkan adanya pelambatan pertumbuhan di triwulan IV 2013. Secara rata-rata, NTP triwulan IV sebesar 93,81% sedikit lebih tinggi dibanding rata-rata NTP triwulan III yang sebesar 93,64%. Adanya pelambatan pengiriman TKI di Provinsi NTB yang diikuti oleh

penurunan pengiriman remitansi TKI dinilai juga dapat menghambat pengurangan kemiskinan dikarenakan TKI dan TKW yang dikirimkan sebagian besar berasal dari wilayah pedesaan di Provinsi NTB.

Grafik 5.15

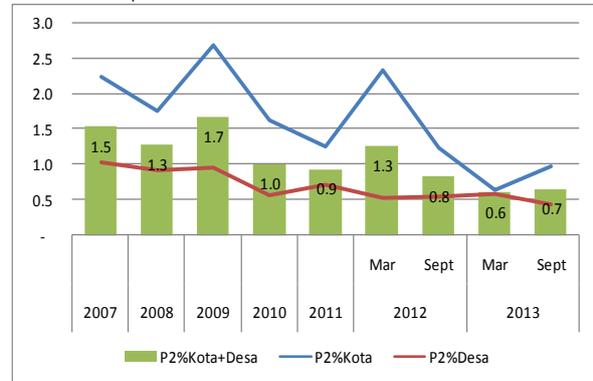
Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi NTB



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 5.16

Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi NTB 2013

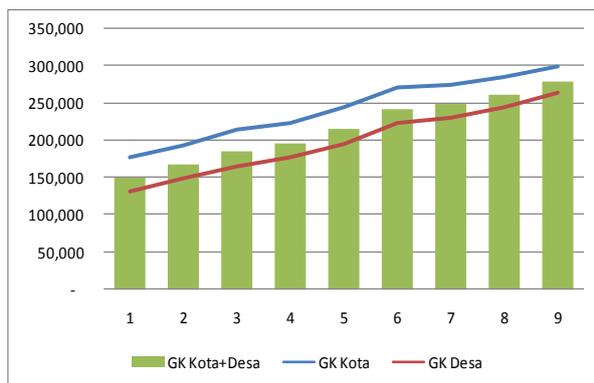


Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Berdasarkan data kualitas kemiskinan, terlihat pada indeks kedalaman kemiskinan perkotaan justru menunjukkan adanya peningkatan di bulan September 2013, demikian pula dengan indeks keparahan kemiskinan0020perkotaan yang cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan yang berdampak pada semakin beratnya upaya yang harus dilakukan untuk mengentaskan penduduk miskin dari jurang kemiskinan. Peningkatan indeks keparahan kemiskinan perkotaan juga menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di perkotaan.

Grafik 5.17

Perkembangan Garis Kemiskinan Kota dan Desa di Provinsi NTB



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 5.18

Nilai Garis Kemiskinan Berdasarkan Golongan Konsumsi

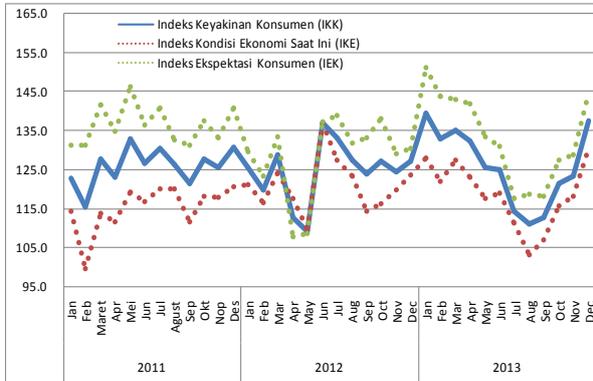
GARIS KEMISKINAN				
Makanan				
	Maret-12	Sep-12	Maret-13	Sep-13
Perkotaan	199.033	202.822	210.43	218.873
Perdesaan	176.946	182.147	195.134	209.138
Kota+Desa	186.16	190.774	201.519	213.216
Non Makanan				
	Maret-12	Sep-12	Maret-13	Sep-13
Perkotaan	71.618	72.057	75.591	81.013
Perdesaan	45.972	47.907	48.486	53.969
Kota+Desa	56.671	57.984	59.799	65.298
Total				
	Maret-12	Sep-12	Maret-13	Sep-13
Perkotaan	270.651	274.879	286.021	299.886
Perdesaan	222.918	230.054	243.62	263.107
Kota+Desa	242.831	248.758	261.318	278.514

Sumber: Data Remitansi KPwBI Prov NTB

Relatif rendahnya pengurangan jumlah penduduk miskin juga disebabkan oleh tingginya perubahan garis kemiskinan pedesaan yang naik hingga 14,82% (yoy) dibanding garis

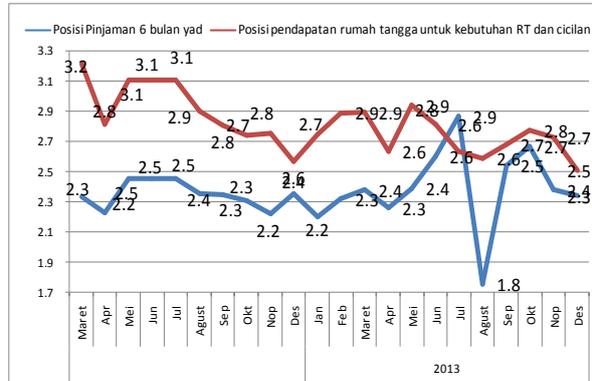
kemiskinan tahun sebelumnya. Garis kemiskinan makanan masih menjadi penyumbang biaya tertinggi setelah garis kemiskinan dari biaya-biaya non makanan.

Grafik 5. 19
Indeks Keyakinan Konsumen



Sumber: Bank Indonesia Prov NTB

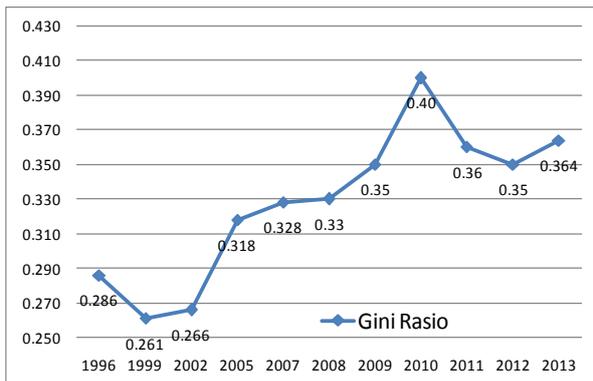
Grafik 5. 20
Indeks Ketahanan Daya Beli dan Angsuran Hutang



Sumber: Bank Indonesia Prov NTB

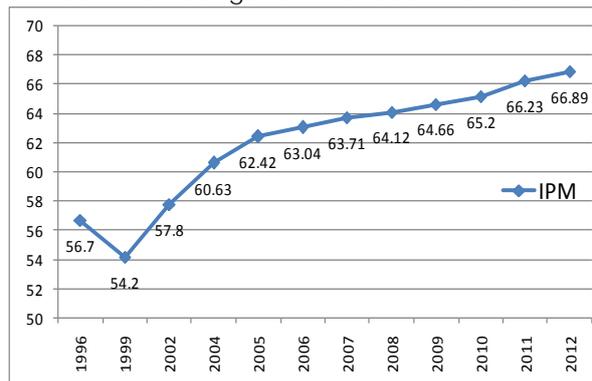
Peningkatan daya beli juga dapat dilihat dari meningkatnya keyakinan konsumen di bulan Oktober hingga Desember 2013. Selain itu indikator pembayaran hutang dan pemenuhan kebutuhan keluarga juga menunjukkan adanya peningkatan nilai indeks. Secara umum, perbaikan kesejahteraan searah dengan arah perkembangan IPM NTB yang senantiasa meningkat. Namun demikian, adanya peningkatan gini ratio juga menjadi perhatian agar kesenjangan penghasilan antara golongan kaya dan miskin tidak semakin melebar.

Grafik 5. 21
Gini Rasio Provinsi NTB



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 5. 22
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTB



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

BAB 6

PROSPEK EKONOMI DAN HARGA

6.1. PROSPEK EKONOMI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Pada tahun 2014, prospek pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan melambat bahkan mengalami penurunan dibanding tahun 2013. Faktor penyebab utama penurunan ekonomi provinsi NTB adalah produksi PT Newmont Nusa Tenggara yang hingga saat ini belum ada kepastian. Dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan no. 11 tahun 2014, maka beban bea keluar konsentrat menjadi cukup tinggi dengan kenaikan progresif dari 25% tahun ini hingga 60% tahun 2016. Dengan tingginya bea tarif tersebut, maka PT NNT berencana untuk tidak melakukan ekspor di triwulan I 2013, sehingga ramalan kinerja PDRB di triwulan I tidak mengikutsertakan hasil tambang setelah tanggal 12 Januari 2014, seiring dengan pemberlakuan UU Minerba tahun 2009.

Dengan kondisi khusus tersebut, skenario pertumbuhan ekonomi provinsi NTB disusun dalam 3 skenario yaitu dalam kondisi normal, dengan pengiriman tambang domestik dan kondisi PT NNT memutuskan untuk berhenti operasi di tahun 2014. Dalam masing-masing skenario tersebut, terdapat beberapa pertimbangan antara lain dalam kondisi normal diperkirakan terdapat peningkatan konsumsi seiring dengan adanya pelaksanaan pemilu. Namun demikian, pelaksanaan pesta demokrasi juga akan menurunkan potensi investasi dikarenakan oleh ketidakjelasan situasi keamanan di daerah. Berdasarkan hasil riset Bank Indonesia, investasi secara signifikan dipengaruhi oleh faktor keamanan, termasuk didalamnya kepastian keamanan terkait kondisi politik di daerah. Pengeluaran pemerintah diperkirakan tetap akan meningkat namun dengan peningkatan yang wajar. Pendorong investasi pemerintah adalah pembangunan jalan dan proyek MP3EI yang ada, sedang pendorong belanja adalah belanja pegawai.

Dengan pendekatan sektoral, Berdasarkan data luas tanam tanaman pangan di triwulan IV 2013, maka hasil tanaman pangan di triwulan I dan II 2014 diperkirakan meningkat cukup signifikan. Adanya program akselerasi tanam jagung di Kabupaten Dompu menjadi pendorong utama peningkatan pertumbuhan jagung, demikian pula dengan penetapan NTB sebagai lumbung kedelai nasional juga diperkirakan meningkatkan produksi kedelai provinsi NTB. Berdasarkan luas tanam padi, diperkirakan hasil panen padi juga akan mengalami kenaikan cukup signifikan di triwulan I dan II 2014. Namun demikian, faktor ketersediaan pupuk dinilai menjadi penghambat utama pertumbuhan pembangunan pertanian di provinsi NTB. Dengan alokasi subsidi pupuk yang menurun, maka pasokan pupuk diperkirakan tidak dapat mencukupi hingga akhir tahun 2014. Adanya kelangkaan pupuk di bulan Desember tahun 2013 yang

disebabkan oleh plafon subsidi pupuk yang sudah melebihi anggaran diperkirakan juga akan menurunkan produktivitas tanaman pangan di triwulan I dan II 2014. Sehingga, peningkatan luas tanam yang ada tidak dapat memberikan hasil yang maksimal.

Terdapat rencana pembangunan pabrik pakan ternak oleh Kadin, namun demikian dampaknya dimungkinkan baru dapat dirasakan 2-3 tahun ke depan disebabkan oleh investasi pembangunan pabrik yang memakan waktu relatif lama. Aktivitas konsumsi terutama untuk logistik pemilu diperkirakan meningkat. Investasi yang ada diperkirakan lebih berupa penambahan kapasitas pabrik yang ada, sedangkan investasi baru diperkirakan menurun menunggu kepastian keamanan setelah pemilu. Ancaman industri di Provinsi NTB adalah juga berasal dari penetrasi barang dari daerah lain yang secara kualitas dan harga relatif lebih kompetitif dikarenakan oleh besarnya skala produksi. Pengusaha lokal harus lebih jeli dalam memanfaatkan keunggulan komparatif terkait kedekatan dengan pelanggan dan layanan purna jual.

Sektor listrik, gas dan air bersih diperkirakan meningkat seiring dengan adanya peningkatan konsumsi dan penambahan pasokan. Sektor bangunan diperkirakan mengalami pelambatan seiring dengan adanya pengetatan kredit kepemilikan rumah, meningkatnya tarif dasar listrik dan kenaikan harga bahan bangunan. Sektor perdagangan hotel dan restoran diperkirakan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan konsumsi. Sedangkan peningkatan sektor hotel dan restoran sangat dipengaruhi oleh tingkat kondusifitas provinsi NTB dalam menjaga keamanan selama pemilu berlangsung. Semakin aman pelaksanaan pemilu, maka sektor hotel dan restoran, serta transportasi juga akan meningkat seiring dengan karakter transportasi udara Provinsi NTB yang lebih banyak digunakan untuk tujuan pariwisata.

Adanya kenaikan tarif penerbangan dapat memperlambat laju transportasi. Namun, penambahan rute penerbangan diperkirakan juga akan menambah jumlah penumpang secara agregat. Bisnis keuangan, persewaan dan jasa perusahaan diperkirakan mengalami peningkatan cukup tinggi seiring dengan adanya peningkatan konsumsi dan pinjaman selama pemilu, dan sektor jasa-jasa juga meningkat cukup besar seiring dengan tumbuhnya industri jasa dan aktivitas partai politik selama pemilu legislatif dan pemilu presiden yang terselenggara tahun ini.

Terkait industri pertambangan, dengan dikeluarkannya peraturan menteri keuangan, maka saat ini PT NNT memiliki 3 pilihan produksi yaitu yang pertama adalah tetap memproduksi seperti biasa yaitu PT NNT tetap melakukan ekspor dan melakukan pengiriman domestik. Berdasarkan informasi terakhir sedang diwacanakan pengalokasian pengiriman domestik konsentrat tembaga ke PT Smelting dengan porsi pengiriman sebesar 20% untuk PT NNT dan 80% untuk PT Freeport. Dengan pembagian tersebut, maka PT NNT mendapat jatah untuk memasok produksi katoda tembaga setara dengan 60 ribu ton katoda tembaga atau setara dengan 240 ribu konsentrat tembaga 60% total produksi konsentrat tembaga PT NNT tahun

2013. Permasalahannya adalah kepastian alokasi 20% yang belum diterima, serta tidak adanya kepemilikan saham dalam PT Smelting, sehingga daya tawar perusahaan relatif cukup rendah. Dengan adanya penurunan produksi, maka total biaya juga relatif menjadi lebih besar dikarenakan biaya tetap yang dikeluarkan tetap sama walaupun produksi mengalami penurunan. Adanya tarif ekspor sebesar 25% secara langsung memotong profitabilitas perusahaan, walaupun dalam perhitungan PDRB tidak terlalu berpengaruh dikarenakan sistem perhitungan yang menggunakan keuntungan sebelum pajak. Permasalahan yang terjadi lebih kepada internal perusahaan apakah *feasible* untuk terus berproduksi atau tidak.

Skenario kedua adalah perusahaan tidak melakukan ekspor ke luar negeri dan hanya melakukan pengiriman dalam negeri sebesar lebih kurang 240 ribu ton konsentrat sesuai dengan alokasi pembagian jatah pasokan PT Smelting. Sehingga, nilai produksi otomatis mengalami penurunan. Sedangkan dalam scenario ketiga adalah PT NNT menghentikan sama sekali produksi yang dilakukan, sehingga PDRB sektor tambang otomatis tidak dimasukkan dalam perhitungan.

Tabel 6.1
Proyeksi PDRB tahun 2014 dan Triwulan I 2014

KOMODITAS	2012	2013**	Normal	Tambang domestik	Berhenti produksi	Tw I 2014**	Normal	Tambang domestik	Berhenti produksi	qtq Tw I 2014**
			2014**	2014**	2014**		ctc	ctc	ctc	
Pertanian	5,026	5,183	5,352.2	5,352.2	5,352.2	1,198.80	3.27	3.27	3.27	(6.5)
Pertambangan dan Penggalian	2,958	3,157	3,487.3	2,363.3	599.9	388.54	10.47	(25.14)	(81.00)	(55.5)
Industri Pengolahan	1,018	1,059	1,108.6	1,108.6	1,108.6	270.10	4.67	4.67	4.67	1.9
Listrik, Gas & Air Bersih	83	92	99.3	99.3	99.3	23.81	8.28	8.28	8.28	(0.8)
Bangunan	1,710	1,797	1,876.8	1,876.8	1,876.8	458.68	4.47	4.47	4.47	(3.2)
Perdagangan, Hotel & Restoran	3,445	3,718	3,990.1	3,990.1	3,990.1	945.64	7.31	7.31	7.31	(0.3)
Transportasi & Komunikasi	1,731	1,843	1,936.7	1,936.7	1,936.7	447.38	5.06	5.06	5.06	(8.6)
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1,217	1,316	1,425.2	1,425.2	1,425.2	343.64	8.27	8.27	8.27	2.4
Jasa-jasa	2,131	2,253	2,417.6	2,417.6	2,417.6	566.65	7.33	7.33	7.33	(1.9)
NTB	19,319	20,417	21,693.8	20,569.8	18,806.4	4,643.24	6.25	0.75	(7.89)	(11.9)
NTB tanpa Tambang	16,878	17,824	18,806.4	18,806.4	18,806.4	4,392.29	5.51	5.51	5.51	(3.4)

Sumber : BPS dan Ramalan Bank Indonesia, diolah

Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan hasil peramalan statistik setelah penyesuaian didapatkan ramalan PDRB provinsi NTB tahun 2014 sebesar 6,25% dengan asumsi PT NNT normal berproduksi. Dengan sudah mulai berakhirnya pelebaran dinding tambang, maka produksi PT NNT di tahun 2014 diramalkan sudah akan mengalami peningkatan, sehingga kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat cukup besar. Faktor penghambat dan pelambat pertumbuhan adalah tarif ekspor yang cukup besar.

Apabila PT NNT memutuskan untuk tidak melakukan ekspor dan hanya mengirimkan hasil tambang untuk keperluan domestik sesuai dengan plafon pengiriman sebesar 20% dari total kapasitas PT Smelting, maka total PDRB NTB diperkirakan masih akan mengalami pertumbuhan hingga 0,75%. Berdasarkan hasil perhitungan, dengan hanya menyuplai pasar domestik, maka total nilai tambah sektor perdagangan diperkirakan akan mengalami

penurunan sebesar 25% yang menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi provinsi NTB total menjadi sebesar 0,75% (yoy). Potensi penurunan diperkirakan masih mampu menurun lebih rendah dikarenakan oleh potensi dampak ikutan akibat dari PHK karyawan maupun potensi kredit macet perbankan, walaupun tidak terlalu besar.

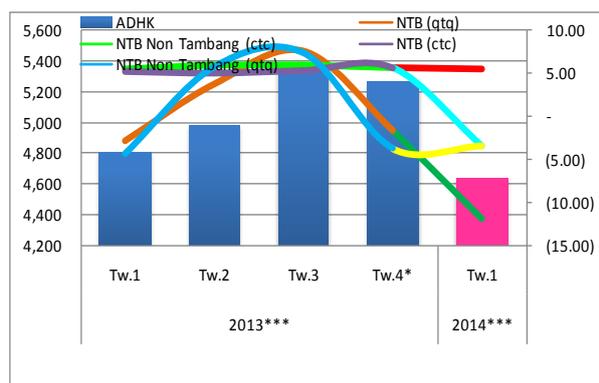
Apabila skenario ketiga yang berjalan, yaitu PT NNT menghentikan sama sekali produksi yang dilakukan, maka pertumbuhan ekonomi provinsi NTB akan mengalami penurunan sebesar 7,89% (yoy). Penurunan pertumbuhan ekonomi dapat bertambah apabila diikuti dengan pengurangankaryawan yang ada. Dengan berkurangnya karyawan, maka potensi ekonomi juga mengalami penurunan dikarenakan oleh potensi penurunan total biaya pegawai yang sebesar 1 triliun berpotensi mempengaruhi sektor yang lain. Namun demikian, juga masih terdapat potensi mengalami peningkatan akibat dari pembukaan lapangan kerja baru atau pindah pekerjaan, sehingga penurunan masih dapat dikendalikan.

Berdasarkan proyeksi PDRB non tambang, diprediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2014 akan bertumbuh sebesar 5,51%. Pertumbuhan ekonomi relatif lebih rendah dibanding capaian PDRB di tahun 2013 yang sebesar 5,61 tanpa tambang lebih dikarenakan adanya pelambatan investasi yang disebabkan oleh aksi investor untuk menunggu kepastian keamanan dan politik yang ada di provinsi NTB.

Potensi peningkatan PDRB juga masih dapat ditingkatkan apabila pemerintah dapat memberikan kepastian keamanan dan kemudahan investasi bagi investor. Selain itu, peningkatan PDRB juga berpotensi dapat terjadi pada sektor pertanian seiring dengan adanya beberapa investasi pertanian dan peningkatan luas tanam yang terjadi. Pembangunan saluran tersier pengairan, penarikan investasi sektor hulu komoditas pertanian, pembangunan bendungan yang terjadi maupun keberhasilan negosiasi peningkatan jatah alokasi pupuk untuk provinsi NTB dinilai akan membantu meningkatkan produksi pertanian tahun 2014.

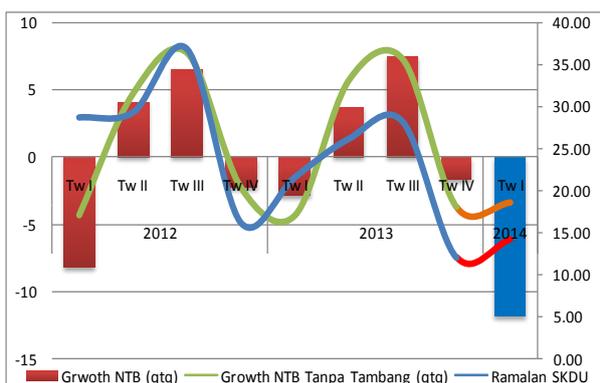
Keamanan yang terjaga serta kondisi politik dan social yang kondusif juga dapat meningkatkan ekspektasi kunjungan wisatawan. Apalagi ditambah dengan meningkatnya penerbangan langsung seperti yang saat ini sedang dijajagi seperti penerbangan Mataram-Banjarmasin ataupun penerbangan internasional dengan negara lain. Peningkatan kunjungan penumpang akan meningkatkan kunjungan pariwisata yang juga berdampak pada peningkatan PDRB sektor tersier, seperti perdagangan, hotel dan restoran, transportasi dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa lainnya.

Grafik 6.1
Peramalan PDRB NTB Tahunan dan Triwulanan



Sumber: BPS Provinsi NTB dan BI, diolah

Grafik 6.2
Korelasi Peramalan Statistik dengan Peramalan SKDU



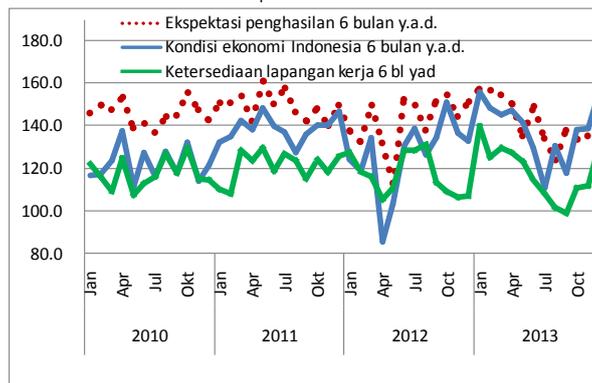
Sumber: : BPS Provinsi NTB dan BI, diolah

Berdasarkan hasil peramalan di triwulan I 2014, pertumbuhan PDRB triwulanan diperkirakan mengalami penurunan sebesar 11,89% (qta). Penurunan terbesar terutama disebabkan oleh tidak beroperasinya PT NNT di triwulan I 2014 seiring dengan adanya penetapan tarif ekspor komoditas konsentrat. Selain itu, Penurunan PDRB lebih mengikuti karakteristik PDRB di triwulan I 2014 yang memang cenderung mengalami penurunan. Penurunan ekonomi diperkirakan terjadi pada sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor listrik, air dan gas, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor transportasi dan komunikasi, serta sektor jasa-jasa. Penurunan pertumbuhan sesuai dengan karakter aktivitas ekonomi di triwulan I yang cenderung mengalami pelambatan. Apabila tanpa mempertimbangkan sektor tambang, maka pertumbuhan ekonomi di triwulan I 2014 diperkirakan hanya akan berkurang sebesar 3,36% (qta) lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun sebelumnya.

Dibanding kondisi triwulan yang sama tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi masih mengalami kenaikan sebesar 5,57% (yoy) tanpa tambang. Dengan komoditas tambang, maka pertumbuhan ekonomi tahunan akan menurun sebesar 3,36% (yoy) dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya.

Apabila dibandingkan dengan hasil peramalan survei Survei Kegiatan Dunias Usaha (SKDU) Bank Indonesia, maka hasil peramalan non tambang relatif mendekati pencapaian arah pertumbuhan PDRB. Namun demikian, apabila sektor pertambangan dimasukkan maka arah pertumbuhan ekonomi akan tertarik kebawah dan berkurang cukup besar disebabkan oleh porsi pertambangan yang cukup berpengaruh dalam perekonomian.

Grafik 6.3
Indeks Ekspektasi Konsumen



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Pelembahan potensi pertumbuhan tersebut masih dapat ditahan oleh optimisme masyarakat terhadap kondisi saat yang tampak dari adanya kenaikan indeks ekspektasi konsumen. Semakin optimis ekspektasi konsumen akan perekonomian, maka potensi konsumsi masyarakat juga akan cenderung meningkat yang otomatis dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga dalam PDRB.

Gambar 6.1
Proyeksi Curah Hujan Triwulan I 2013



Sumber: BMKG, diolah

Berdasarkan data BMKG, kondisi curah hujan di Pulau Lombok pada bulan Januari masih sangat tinggi, sedangkan di Pulau Sumbawa relatif tinggi. Pada bulan Februari, curah hujan cukup tinggi namun mulai mendekati menengah baik di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa. Pada bulan Maret, curah hujan relatif menengah dengan curah hujan antara 100-200 mm. Kondisi curah hujan yang relatif stabil ini dinilai cukup bagus untuk pertanian yang memasuki musim panen, sehingga diharapkan hasil panen dapat meningkat signifikan sesuai dengan peningkatan luas tanam yang terjadi.

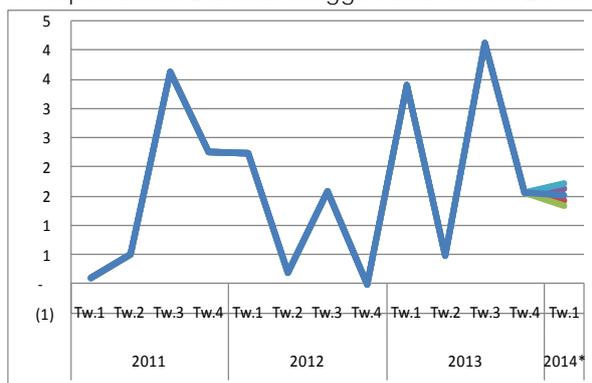
6.2. PERKIRAAN INFLASI NUSA TENGGARA BARAT

Sepanjang tahun 2014, inflasi di Provinsi NTB diperkirakan berada pada level 5,8%. Penurunan inflasi lebih disebabkan oleh sudah cukup tingginya inflasi di tahun sebelumnya,

sehingga inflasi di tahun 2014 terkena dampak tarikan ke bawah yang disebabkan oleh basis harga yang tinggi di tahun sebelumnya, sehingga pelaku usaha cenderung enggan menaikkan harga lebih tinggi. Adanya cuaca yang relatif bersahabat juga berpotensi meningkatkan produksi yang berdampak pada stabilnya harga bahan pangan.

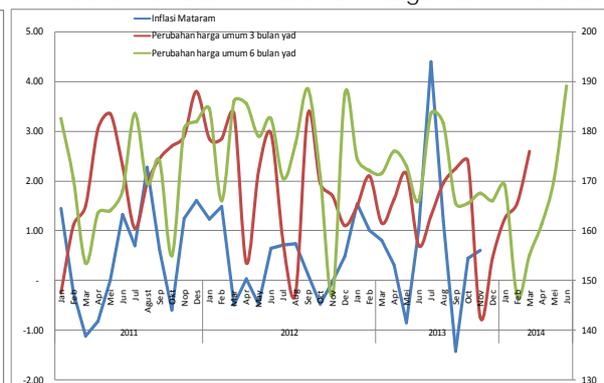
Tekanan potensi inflasi terutama disebabkan oleh adanya pemilu di tahun 2014 yang berpotensi memberikan tekanan permintaan. Selain itu, adanya pemilu juga berpotensi memberikan tekanan inflasi yang lebih disebabkan oleh faktor pengendalian harga dan program pemerintah yang lebih sulit dilaksanakan karena banyaknya gangguan operasional selama pelaksanaan pemilu. Adanya ancaman gangguan operasional pemerintah berpotensi menumbuhkan spekulasi pasar untuk memainkan harga. Oleh karena itu, penguatan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menjadi penting dilakukan untuk mengantisipasi potensi adanya shock permintaan dan pasokan barang.

Grafik 6.4
Prospek Inflasi Bulanan hingga Akhir Tahun 2013



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 6.5
Indeks Ramalan Perubahan Harga Survei Konsumen



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Pada triwulan I 2014, inflasi diperkirakan berada di level 1,52%. Inflasi diperkirakan relatif lebih rendah dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya, hal ini tercermin dari pencapaian realisasi inflasi bulan Januari yang cukup rendah yaitu sebesar 1,48% dibanding realisasitahun-tahun sebelumnya, prediksi inflasi Februari kurang dari 1% dan inflasi bulan Maret akan mengalami deflasi. Berdasarkan ramalan harga survei konsumen menunjukkan bahwa tekanan inflasi menunjukkan adanya tekanan harga yang cukup besar, terutama disebabkan oleh adanya sentimen inflasi yang meningkat.



Pacuan Kuda

By : Imran Iswadi